



# Jurnal KETATANEGARAAN

ISSN : 2548 - 4389

VOLUME : 008 / April 2018

## KEBUDAYAAN & PERADABAN

Rully Chairul Azwar	MEMBANGUN PERADABAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BERDASARKAN BUDAYA PANCASILA
Bambang Sadono	PRAGMATISME SEBAGAI BUDAYA POLITIK ZAMAN 'NOW'
Syamsuddin Haesy	MELIHAT PERADABAN INDONESIA MENGHADAPI TANTANGAN ABAD 21 PERSPEKTIF PANCASILA (Esai Sederhana Perspektif Kebudayaan dan Pancasila)
Hajriyanto Y. Thohari	STRATEGI KEBUDAYAAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA
Ulla Nuchrahwaty	GENDER, KEBUDAYAAN DAN PERADABAN
Lalu Sudarmadi	MEMBANGUN KEBUDAYAAN PANCASILA
Ali Masykur Musa	PERGESERAN BUDAYA POLITIK INDONESIA DARI LEGITIMASI MORAL KE LEGITIMASI MODAL
M. Alfian Alfian	KEPEMIMPINAN POLITIK KEINDONESIAAN (Suatu Refleksi Kebudayaan)
Iman Toto K. Rahardjo	BANGSA DAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI HASIL PROSES KEBUDAYAAN (Sebuah Tinjauan Pengantar)
Yusyus Kuswandana	BUDAYA PANCASILA SEBAGAI PERADABAN INDONESIA
Djamil Aziz	KEBUDAYAAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL, AGAMA DAN EKONOMI



**LEMBAGA PENGAJIAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



*Jurnal*  
**KETATANEGARAAN**

**KEBUDAYAAN & PERADABAN**

**LEMBAGA PENGAJIAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

# PENGELOLA JURNAL KETATANEGARAAN

## **Pengarah dan Penanggungjawab :**

Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI);  
Mahyudin (Wakil Ketua MPR RI);  
Evert Ernest Mangindaan (Wakil Ketua MPR RI);  
M. Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI);  
Oesman Sapta (Wakil Ketua MPR RI)

## **Wakil Penanggungjawab :**

Ma'ruf Cahyono (Sekjen MPR RI);  
Selfi Zaini (Wasekjen MPR RI);  
Yana Indrawan (Kepala Biro Pengkajian MPR RI)

## **Dewan Redaksi :**

Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;  
Mohammad Jafar Hafsa; Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta

## **Redaktur Pelaksana :**

Ali Masykur Musa; Andi Mattalatta; AT. Sugito;  
Baharuddin Aritonang; Didik J. Rachbini; Fitra Arsil;  
Gregorius Seto Harianto; Hajriyanto Y. Thohari; Hamdan Zoelva;  
Iman Toto Kartoraharjo; Irmanputra Sidin; I Wayan Sudirta;  
Maruarar Siahaan; M. Alfian Alfian; Ulla Nuchrawaty;  
Yasmin Muntaz.

## **Editor :**

Fitra Arsil; Gegorius Seto Harianto;  
Hajriyanto Y. Thohari; M. Alfian Alfian

## **Desain Grafis :**

Wahyudi

## **Layout :**

Herna Dwi Kusumawati; Lita Amelia

## **Sekretariat :**

Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;  
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo ;  
Dina Nurul Fitria; Akhmad Danial; Fitri Naluryanty; Ferzya;  
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Rio Reinaldo;  
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;  
Yoga Tunggal Prabowo; Dennys Advenino Pulo.

Jurnal Ketatanegaraan adalah jurnal ilmiah populer yang terbit berkala setiap 2 (dua) bulan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI. Penerbitan Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi, membuka ruang dialog, dan memasyarakatkan gagasan-gagasan ketatanegaraan ke seluruh elemen bangsa.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pemikiran penulis yang perlu diseminasi untuk menjadi pengetahuan publik khususnya untuk mereka yang menelaah sistem ketatanegaraan. Jurnal ini akan distribusikan seluas mungkin dengan harapan dapat menjadi ruang dialog dan wadah dialektika gagasan ketatanegaraan semua elemen bangsa yang pada gilirannya akan bermanfaat dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPR RI.

Redaksi menerima sumbangan tulisan dari para ahli/pakar sesuai dengan tema setiap penerbitan. Redaksi berhak melakukan penyuntingan tanpa mengubah isi dan makna tulisan. Substansi makalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Untuk penerbitan volume ke-sembilan pada bulan Juni 2018, tema tulisan mengenai **PERTANAHAN** Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi Jurnal Ketatanegaraan  
**Lembaga Pengkajian MPR RI**  
Gedung Bharana Graha, Lt. III.  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270,  
Telp. (021) 57895418  
Email: [lembagapengkajian@mpr.go.id](mailto:lembagapengkajian@mpr.go.id) dan  
[lembaga.pengkajian@gmail.com](mailto:lembaga.pengkajian@gmail.com)

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Redaksi</b>	vii
<b>Sambutan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI</b>	ix
<b>Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI</b>	xi
<b>Membangun Peradaban Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berdasarkan Budaya Pancasila</b> <i>Rully Chairul Azwar</i>	1
<b>Pragmatisme Sebagai Budaya Politik Zaman ‘Now’</b> <i>Bambang Sadono</i>	29
<b>Melihat Peradaban Indonesia Menghadapi Tantangan Abad 21</b> <b>Perspektif Pancasila (Esai Sederhana Perspektif Kebudayaan Dan Pancasila)</b> <i>N. Syamsuddin Ch. Haesy</i>	37
<b>Strategi Kebudayaan Untuk Kemajuan Bangsa</b> <i>Hajriyanto Y. Thohari</i>	53
<b>Gender, Kebudayaan dan Peradaban</b> <i>Ulla Nuchrawaty</i>	77
<b>Membangun Kebudayaan Pancasila</b> <i>Lalu Sudarmadi</i>	95
<b>Pergeseran Budaya Politik Indonesia Dari Legitimasi Moral Ke Legitimasi Modal</b> <i>Ali Masykur Musa</i>	117

<b>Kepemimpinan Politik Keindonesiaan (Suatu Refleksi Kebudayaan)</b> <i>M. Alfian Alfian</i>	131
<b>Bangsa Dan Negara Indonesia Sebagai Hasil Proses Kebudayaan (Sebuah Tinjauan Pengantar)</b> <i>Iman Toto K. Rahardjo</i>	151
<b>Budaya Pancasila Sebagai Peradaban Indonesia</b> <i>Yusyus Kuswandana</i>	181
<b>Kebudayaan Nasional dalam Perspektif Kearifan Lokal, Agama, dan Ekonomi</b> <i>Djamal Aziz</i>	193
<b>Tentang Penulis</b>	203
<b>Pedoman Penulisan</b>	206
<b>Anggota Lembaga Kajian MPR RI</b>	210

## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Ketatanegaraan Volume 008/April 2018 mengambil tema Kebudayaan & Peradaban yang merupakan pengejawantahan Pasal 31 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Tema Kebudayaan dan Peradaban menjangkau permasalahan yang luas dan mendasar karena pada dasarnya segenap aspek kehidupan bangsa mencerminkan budaya bangsa sekaligus menunjukkan tingkat peradaban bangsa. Dalam Penjelasan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 diuraikan bahwa *Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya dan kebudayaan berkembang atas dasar nilai yang diyakini, ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta teknologi yang dikuasai sehingga melahirkan yang disebut peradaban.

Masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaannya masing-masing adalah plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam). Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri atas kejamakan, dan bukan ketunggalan. Artinya, dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai berbagai sub-kelompok masyarakat yang tidak dapat disatukelompokkan satu dengan lainnya. Demikian pula dengan kebudayaan mereka. Heterogenitas yang merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya. Artinya, masing-

masing subkelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya bisa sungguh-sungguh berbeda satu dari yang lainnya<sup>1</sup>.

Sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaannya menunjukkan gerak yang dinamis. Dinamika tersebut pada dasarnya terjadi sebagai akibat selalu terdapat dua kekuatan dalam masyarakat yang menjawab tantangan kemajuan secara berbeda. Kekuatan yang satu cenderung sangat berhati-hati dalam menerima kemajuan dan perubahan; bahkan terkadang justru menolak perubahan karena khawatir akan kehilangan jatidirinya atau nilai-nilai budaya warisan pendahulunya. Kekuatan ini acap kali disebut sebagai kekuatan konservatif. Kekuatan lainnya ialah kekuatan yang cenderung sangat antusias menerima perubahan dan kemajuan. Pada masanya, kompromi terjadi atas dasar arahan atau petunjuk tokoh-tokoh masyarakat dan keteladanannya. Sejak jaman globalisasi, yang ditandai oleh perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi, pergeseran atau bahkan perubahan budaya terjadi karena derasnya informasi dan penetrasi budaya dari luar.

Masalahnya bagi masyarakat Indonesia yang majemuk dan jamak adalah pertama, bagaimana menentukan manakah kebudayaan nasional Indonesia itu dan kedua bagaimana melakukan penggalangan agar potensi masyarakat bangsa Indonesia yang begitu beragam dan kaya itu dapat bersinergi mempersatukan budaya nasional Indonesia dan menampakkan peradaban bangsa yang unggul.

Dalam Jurnal Ketatanegaraan Volume 008 ini permasalahan tersebut diurai lebih jauh melalui berbagai pendekatan dan sudut pandang.

Jakarta, April 2018

Redaktur Pelaksana

---

<sup>1</sup>Budiono Kusumohamidjojo (2000), *KEBHINNEKAAN MASYARAKAT DI Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 45.



# **SAMBUTAN PIMPINAN LEMBAGA PENGAJIAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 32 UUD Tahun 1945 berbunyi : *“Pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia”* yang kemudian diuraikan dalam penjelasannya sebagai berikut: *“Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”*.

Bahwa kebudayaan bangsa Indonesia akan selalu mengalami proses akulturisasi ditengah peradaban dunia, sudah sangat disadari oleh para Pendiri Bangsa, namun demikian harus diupayakan tetap berpedoman pada kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yaitu Pancasila, dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 32 ayat 1 dan pasal 31 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 ( setelah perubahan).

Jurnal Ketatanegaraan Volume 008/April 2018 ini mengambil tema Kebudayaan & Peradaban dengan fokus **“Membudayakan Nilai-nilai Pancasila sebagai Peradaban Indonesia”**.

Jurnal ini mengangkat pemikiran sekitar persoalan antara lain belum teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan bangsa dari beberapa narasumber yang telah ikut berkontribusi aktif membuat tulisan dalam rangkaian proses pengkajian, yang menurut Lembaga Pengkajian patut dijadikan referensi bagi para pembaca.

Demikianlah, kami atas nama Lembaga Pengkajian MPR RI mengharapkan agar Jurnal ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dan pencerahan khususnya di bidang Kebudayaan serta umumnya dalam praktek Penyelenggaraan Negara.

Terima kasih, selamat membaca. Salam konstitusi.

Jakarta, April 2018  
Dewan Redaksi/  
Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI



Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., IPU.

# SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dalam tahun ketiga perjalanan Lembaga Pengkajian MPR RI, kami melihat bahwa lembaga ini semakin produktif menghasilkan kajian-kajian terkait dengan beragam persoalan konstitusi. Tentu saja, sebagai pihak yang ikut membidani kelahiran lembaga ini, kami merasa ikut berbangga karena lembaga ini, meski belum sempurna, namun bergerak *on the right track* sesuai dengan *khittah* kelahirannya.

Lembaga Pengkajian MPR RI adalah lembaga di MPR RI yang diarahkan untuk menjadi “Laboratorium Konstitusi”. Tugas utamanya adalah memberi masukan, pertimbangan, usul dan saran terkait sistem ketatanegaraan Indonesia kepada Pimpinan MPR dalam bentuk rekomendasi dan hasil-hasil kajian. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itulah, Lemkaji melakukan beragam aktifitas pembahasan beragam topik terkait Konstitusi.

Satu hal yang menarik, kajian-kajian yang dilakukan Lemkaji atas konstitusi dilakukan dengan cara menghubungkannya dengan isu-isu aktual yang dirasakan menjadi persoalan publik. Disinilah hasil kajian Lemkaji yang sedianya ditujukan untuk konsumsi internal, pada kenyataannya juga layak menjadi konsumsi publik di luar lembaga MPR. Hal itulah yang terlihat dari kajian Lemkaji tentang “Budaya Pancasila sebagai Peradaban Indonesia” yang substansi pemikirannya terekam dalam jurnal ini.

Pembicaraan mengenai Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang harus dibudayakan guna membangun peradaban bangsa sangatlah penting dan relevan dibicarakan karena beberapa hal. *Pertama*, soal pemajuan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila merupakan salah satu misi negara yang diamanatkan dalam Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi ini, kajian soal kebudayaan dalam konstitusi memang menjadi ranah MPR.

*Kedua*, kaitan “kebudayaan” dengan “pembangunan peradaban” tidaklah perlu diragukan lagi. Misalnya, pemikiran bahwa kemajuan peradaban perlu didukung oleh faktor budaya, sudah menjadi pemikiran umum. Misalnya, peradaban Barat disebut wujud karena dorongan “Etika Protestan” (*Protestant Ethics*). Kemajuan bangsa-bangsa di Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan dan Jepang, juga

ditengarai lahir karena nilai-nilai Konfusianisme atau semangat *Bushido* (Samurai).

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang secara *genuine* nilai-nilainya digali oleh para pendiri negara dari kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia seperti ketuhanan atau permusyawaratan. Dari sisi ini, bangsa Indonesia sudah memiliki modal awal pembangunan peradabannya karena Pancasila adalah ideologi, falsafah dasar negara dan jati diri bangsa. Selain itu, banyak budaya dan kearifan lokal yang jika dihayati dengan baik, bisa memberi kontribusi positif bagi pembangunan peradaban bangsa.

Jurnal di tangan pembaca yang merupakan terbitan Lembaga Pengkajian MPR yang ke-8 ini membicarakan hal-hal penting tersebut di atas. Karenanya, dari sisi kepentingan publik, jurnal ini memang selayaknya tidak dikonsumsi oleh para anggota MPR saja secara internal, namun didiseminasikan pada publik yang lebih luas.

Kami menyambut gembira penerbitan Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR edisi ke-8. Kami berharap regularitas penerbitan Jurnal Ketatanegaraan ini bisa terus dipertahankan. Tentu saja, Kami dari Sekretariat Jenderal MPR RI akan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada Kami. Mudah-mudahan penerbitan jurnal ini berdampak positif tidak saja bagi MPR namun juga bagi pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia di masa depan.

Jakarta, April 2018  
Sekretaris Jenderal MPR RI



Dr. Ma'ruf Cahyono, SH.MH.

# MEMBANGUN PERADABAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BERDASARKAN BUDAYA PANCASILA

Rully Chairul Azwar

## Abstrak

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) adalah kunci membangun peradaban Indonesia masa depan. Karenanya, Konstitusi mengamanatkan pengembangan Iptek sebagai tugas pemerintah. Konstitusi juga mengamanatkan, pemajuan Iptek itu harus berbasis nilai-nilai, utamanya nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta ditujukan untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Hal itu dilandasi kesadaran pengembangan Iptek bersifat ambivalen; bisa memajukan namun sekaligus bisa menghancurkan kemanusiaan dan kehidupan. Karena itu, Iptek tidaklah bisa sepenuhnya bebas nilai. Secara ontologis, metode pengembangan Iptek tetap otonom lewat metode ilmiah, namun secara aksiologis atau sisi pemanfaatan Iptek, diperlukan panduan nilai. Bagi pengembangan Iptek di Indonesia, nilai-nilai Pancasila-lah yang harus dijadikan sebagai aksiologi dan dasar kultural. Ada lima prinsip nilai Pancasila yang harus dijadikan visi pengembangan Iptek Indonesia di masa depan yaitu; ketuhanan, kemanusiaan/internasionalisme, kesatuan kebangsaan, kerakyatan (demokrasi politik) dan keadilan sosial (demokrasi ekonomi).

**Kata Kunci:** Pancasila, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Aksiologi, Teori Kebenaran.

## Abstract

*The progress of science and technology is the key to the development of a future civilization of Indonesia. Therefore, the Constitution has mandated the development of science and technology as a duty of the government. The Constitution has also mandated the advancement of science and technology to be based on values, particularly the values of religion and unity of the nation as well as to be aimed at the advancement of civilization and the welfare of humankind. That is based on the awareness that the development of science and technology has an ambivalent nature: science and technology can advance but at once can also destroy humanity and life. Therefore, science and technology cannot be fully value free. Ontologically, the method of the development of science and technology remains autonomous through scientific method, however, axiologically or the aspect of the utilization of*

*science and technology requires value guidance. For the development of science and technology in Indonesia, it shall be the values of Pancasila which shall be made the cultural axiology and base. There are five value principles of Pancasila which shall be made the vision of the future development of science and technology of Indonesia, namely: divinity, humanity/internationalism, oneness of the nation, democracy (political democracy) and social justice (economic democracy).*

**Keywords:** Pancasila, science and technology, culture, axiology, the theory of truth.

## **Pendahuluan**

Kunci kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh potensi dan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh inovasi serta kreativitas yang dapat meningkatkan daya saing (*competitiveness*) bangsa secara berkelanjutan. Selain itu, dinamika zaman yang berkembang sangat pesat berkat inovasi dan kreativitas membuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menjadi krusial. Pada gilirannya, penguasaan Iptek menjadi kunci kemajuan suatu bangsa karena menjadi salah satu strategi beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bangsa yang miskin kreatifitas dan inovasi, serta tertinggal dalam penguasaan Iptek niscaya akan berada dalam gerbong terbelakang dalam barisan lokomotif bangsa-bangsa.

Syukurnya, hal itu sudah menjadi kesadaran bangsa kita. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memajukan Iptek dijadikan sebagai tugas konstitusi yang harus dijalankan pemerintah. Hal itu tertuang dalam Pasal 31 Ayat (5) yang berbunyi; “*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*”. Dalam rangka menjalankan kewajiban konstitusionalnya memajukan Iptek itu, setiap pemerintahan dituntut memiliki serangkaian strategi kebijakan yang bersifat jangka panjang di satu sisi sembari tetap berpijak pada strategi jangka pendek sesuai tantangan khas di zamannya.

Menariknya, Yudi Latif menjelaskan, pasal itu juga mengedepankan sebuah tema diskusi klasik yaitu *pertautan antara pengembangan Iptek dengan pondasi kultural atau budaya*. Menurutny, Pasal 31 Ayat (5) itu setidaknya menggarisbawahi dua hal penting. *Pertama*, pasal itu menyadarkan kita akan semakin pentingnya peranan iptek dalam kerangka pencapaian kesejahteraan, kemajuan, dan kemandirian bangsa sehingga upaya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek merupakan misi nasional yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. *Kedua*, kesadaran bahwa betapapun penting nya hal itu, dalam proses pengembangannya sama sekali tidak boleh tercerabut dari akar-akar budaya bangsa.

Meski merupakan tema diskusi yang bersifat klasik, namun menurut Latif upaya pengkajian dan pengkaitan antara pengembangan Iptek dengan pertimbangan budaya yang berkembang selama ini masih bersifat sporadis dan belum proporsional. Paling tidak, kajian-kajian semacam itu memiliki dua wajah. *Pertama*, kajian diwarnai argumen-argumen “ilmu bebas nilai” dari kaum *techno-neutralis* yang melihat pengembangan Iptek hanya sekitar analisa *cost-benefit*, efisiensi dan produktifitas yang mengesampingkan faktor-faktor sosio-kultural. *Kedua*, berlawanan dengan kelompok pertama, ada kelompok *techno-phobic* yang bersikap reaktif terhadap perkembangan Iptek karena cenderung memandang Iptek hanya dari aspek negatif tanpa kemudian diimbangi dengan upaya proaktif untuk menggali pondasi kultural sebagai basis pengembangan iptek.<sup>1</sup>

Corak lain pengkaitan antara faktor-faktor budaya dalam kaitan dengan upaya pengembangan Iptek adalah justru dengan cara “menyalahkan” nilai-nilai “tradisional” masyarakat Indonesia sebagai kurang kondusif bagi tradisi pengembangan Iptek. Misalnya, masyarakat Indonesia masih berlebihan dalam mengembangkan nilai-nilai ekspresif dan kurang mengembangkan nilai-nilai progresif (Alisjahbana, 1994); kebudayaan Jawa yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, secara *de facto* mengandung nilai-nilai yang menghambat kemajuan ilmu (sikap, mental feodalistik, budaya sungkan berterusterang, dan lain-lain) (Hardjowirogo, 1984;

---

<sup>1</sup> Yudi Latif, “Sosiokultur sebagai Basis Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, *Jurnal SosioTeknologi*, Volume 13, Nomor 3, ITB, Bandung, Desember 2014, hal. 167

Mulder, 1984) atau; masyarakat Indonesia tergolong masyarakat dalam kategori *soft state moral*, cenderung hendak santai saja, ingin cepat menjadi doktorandus, dan seterusnya (Lubis, 1988).<sup>2</sup>

Dalam situasi kajian pengembangan Iptek dikaitkan dengan masalah kebudayaan semacam digambarkan Latif itu, ada kesan bahwa perbincangan soal dimana peran Pancasila dan budaya yang dibangun di atas nilai-nilainya dalam membangun peradaban Indonesia masa depan lewat pengembangan Iptek, terasa mengada-ada. Mungkin akan terdapat pertanyaan soal apakah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila lantas dapat dijadikan dasar bagi pengembangan Iptek? Pertanyaan berikutnya adalah, di tengah asumsi umum bahwa masyarakat dengan peradaban paling maju yang ditandai dengan kemajuan Iptek adalah peradaban Barat, apakah masih ada signifikansi bagi sebuah pembicaraan tentang pengembangan peradaban berbasis Iptek dari sebuah kultur non-Barat seperti Indonesia, apalagi jika nilai-nilai lokalnya telah “didakwa” sebagai lahan tidak kondusif bagi pengembangan Iptek?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita masih harus terlebih dahulu menghadapi persoalan mendasar; apakah ada relasi antara pengembangan Iptek dengan nilai-nilai budaya yang dibangun di atas nilai-nilai filsafat, ideologi dan agama? Mengapa konstitusi menugaskan pemerintah untuk memajukan Iptek dengan mengkaitkannya dengan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa dengan tujuan memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan? Apakah hal itu menunjukkan pada kita sebuah paradigma pengembangan Iptek berlandaskan Pancasila yang bersifat khas Indonesia dimana pengembangan Iptek tidak bersifat sekular atau lepas dari agama sebagaimana lazim dikembangkan oleh peradaban Barat dan ditujukan untuk perkembangan kesejahteraan manusia, tidak untuk dirinya sendiri namun untuk seluruh umat manusia?

---

<sup>2</sup> *Ibid.*



## Relasi Iptek dan Kebudayaan

Apakah memang ada relasi antara Iptek dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat? Lawrence (1985) sebagaimana dikutip dalam Latif (2014) menjelaskan, hubungan antara Iptek dan Kebudayaan adalah hubungan yang bersifat timbal balik. Di satu sisi, Iptek memengaruhi terbentuknya kebudayaan (baru) dan sebaliknya budaya memengaruhi perkembangan Iptek di satu masyarakat. Iptek tidak bisa tumbuh tanpa ditopang oleh nilai-nilai budaya yang kondusif dan sebaliknya, kebudayaan dan masyarakat tidak dapat berfungsi dengan wajar tanpa adanya perkembangan Iptek yang sehat. Dari perspektif semacam itu, Latif menyatakan, Iptek sebagai salah satu produk kebudayaan, bukanlah suatu hipotesis yang lepas dari pengaruh faktor-faktor budaya lainnya.<sup>3</sup>

Iptek, lanjut Latif, dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan tepat apabila diletakkan dalam konteks sosial-budaya yang tepat pula. Dia mengutip kesimpulan penelitian Ann Johnston dan Albert Sasson (1986) tentang kegemilangan perkembangan Iptek di Cina sejak abad pertama hingga ke-15 yang menyatakan, pada zaman-zaman tertentu selalu ada bangsa yang lebih unggul dari bangsa lain dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek. Hal itu sangat tergantung pada besarnya dukungan infrastruktur budaya dalam pengembangan Iptek di bangsa-bangsa itu. Mereka juga mengatakan, “Teknologi memang berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi dan sejarah. Namun, teknologi itu sendiri merupakan produk dan ekspresi budaya suatu masyarakat pada suatu zaman. Oleh karena itu, boleh jadi suatu bentuk inovasi yang sama akan melahirkan hasil berbeda karena perbedaan konteks sejarah dan budayanya.”<sup>4</sup>

Selanjutnya dikutip juga pandangan Louven yang menyatakan, “Setiap teknologi memiliki dan tertanam dalam nilai-nilai dan cita-cita masyarakat tempat ia dikembangkan sehingga pengeksplosiannya secara implisit mengadakan pengeksplosian nilai-nilai baru, menurut sikap masyarakat yang bersangkutan”. Dapat dikatakan, maju-

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 171

<sup>4</sup> *Ibid.*.

mundurnya perkembangan Iptek suatu masyarakat akan sangat berkaitan erat dengan kondisi-kondisi budaya di sekelilingnya (Poespowardojo, 1993). Hal itu didukung beragam penelitian sosial tradisi Weberian misalnya Robert N. Bellah (1985) yang meneliti kaitan agama Tokugawa dengan semangat berusaha kaum Samurai di Jepang; David C. McClelland (1961), meneliti hubungan antara motif berprestasi dengan jatuh-bangunnya Kota Florence, Italia; Tu Wei-Ming (1984), meneliti hubungan etika Konfusian dan industrialisasi Singapura; Clifford Geertz (1963) dan L. Peacock (1978) untuk kasus Indonesia.<sup>5</sup>

Meski sepakat soal adanya relasi saling membangun secara mutual antara sains, teknologi dan kebudayaan, Yasraf Amir Piliang, mengutip pendapat Kaplan (1972:89) menjelaskan, paling tidak ada tiga pandangan berbeda tentang hakikat dan sifat relasi itu. *Pertama*, pandangan “determinisme teknologi” (*Technological determinism*) menilai perkembangan Iptek merupakan “motor” perubahan pada sistem budaya lain, bukan sebaliknya. Misalnya, penemuan televisi telah mengubah cara orang berkomunikasi, mencari informasi dan memaknai dunia sekitarnya. *Kedua*, pandangan “determinasi budaya” (*cultural determinism*) yang melihat perubahan pada tingkat sosial-budaya justru menjadi fondasi perkembangan teknologi. Kebudayaanlah yang awalnya merangkai ide, gagasan, imajinasi, nilai, dan makna. Sains dan teknologi lantas merealisasikan semuanya ini melalui produk-produknya. Dengan demikian, sains dan teknologi adalah ‘refleksi’ dari kebudayaan.<sup>6</sup>

Pandangan *ketiga*, adalah pandangan “determinisme lunak” (*soft determinism*) yang berupaya mencari “jalan tengah” dari dua pandangan yang disebut diawal tadi. Menurut pandangan ini, Iptek bukan sekedar merefleksikan atau mempengaruhi budaya tetapi lebih dari itu, Iptek justru membentuk budaya. Iptek tidak hanya dipengaruhi tetapi sebaliknya memengaruhi subsistem budaya yang lain. Diakui, Iptek dibangun oleh nilai-nilai budaya tetapi Iptek juga dapat mengubah nilai-nilai itu (Kaplan, 1972:89). Penemuan

---

<sup>5</sup> Ibid., hal. 171-2

<sup>6</sup> Yasraf Amir Piliang, “Transformasi Budaya Sains dan Teknologi; Membangun Daya Kreatifitas”, *Jurnal SosioTeknologi*, Volume 13, Nomor 2, ITB, Bandung, Agustus 2014, hal. 77-8

komputer, misalnya, di satu pihak, dimungkinkan karena adanya kebutuhan kultural untuk menghitung, mengolah, dan mengkomunikasikan data secara cepat dan massal. Akan tetapi, di pihak lain, penggunaan komputer secara intens oleh masyarakat lantas mengubah perilaku, cara berpikir, dan pandangan dunia manusia itu sendiri.<sup>7</sup>

Piliang sendiri melihat, dalam relasi antara Iptek dan budaya terdapat sebuah paradoks. Di satu sisi, guna mengembangkan Iptek dibutuhkan semacam “budaya teknologi”, yaitu nilai-nilai budaya yang mendorong perkembangan teknologi seperti daya kreativitas, rasionalitas, mental produktif, dan berorientasi ke depan. Di sisi lain, penggunaan Iptek juga menghasilkan dampak berupa benturan nilai. Benturan terjadi bila teknologi tak hanya dipandang sebagai sebuah alat guna dan utilitas, tetapi sebagai pencipta makna. Lahir nihilisme yaitu kondisi ketika manusia menyerahkan diri mereka pada bingkai teknologi, yang kemudian mengendalikan makna hidup mereka: panik, serba cepat, instan, dan tercabut dari alam. Teknologi lalu menjadi semacam “beban sosial”.<sup>8</sup>

Karena itulah, lahir berbagai paradigma baru guna mengantisipasi nihilisme tersebut. Misalnya, muncul konsep “budaya berpikir holistik”, yang melihat teknologi dalam sudut pandang seluas-luasnya, atau “budaya ketiga”, yaitu simbiosis antara paradigma teknologi dan kebudayaan. Ada juga paradigma “teknologi yang manusiawi”, yaitu kombinasi teknologi tinggi dan sentuhan manusia<sup>9</sup>. Dalam kerangka semacam itu, pembangunan sebuah kebudayaan Iptek yang berbasis nilai-nilai Pancasila tidak saja menjadi relevan karena memang menjadi perbincangan di kalangan para ahli, namun juga patut diajukan sebagai upaya menambah paradigma baru dalam soal relasi Iptek dan kebudayaan. Hal seperti itu bukanlah sebuah kemustahilan karena, sebagaimana akan dibahas di bab ini nanti, Pancasila tidak saja merupakan ideologi dan dasar

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Yasraf Amir Piliang, “Budaya Teknologi di Indonesia: Kendala dan Peluang Masa Depan”, *Jurnal SosioTeknologi*, Edisi 28 Tahun 12., ITB, Bandung, April 2013, hal. 247-262

<sup>9</sup> *Ibid.*

negara namun bisa dibangun sebagai sebuah sistem ilmiah dan filsafat.

### **Ambivalensi Iptek**

Iptek memiliki dua sisi; positif dan negatif. Di satu sisi, Iptek adalah faktor signifikan dalam pembangunan kebudayaan dan peradaban manusia. Kemajuan Iptek membuat manusia semakin mudah memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun sosial. Di sisi lain, penemuan dan pemanfaatan Iptek juga memiliki “sisi gelap” berupa dampak dan eksese negatif tidak saja bagi manusia sebagai makhluk individu dan sosial, namun juga pada alam keseluruhannya. Sejarah kemanusiaan telah menyaksikan betapa Iptek tidak saja dimanfaatkan untuk “menguasai” alam, tetapi juga untuk menguasai dan memerangi sesama manusia. Perkembangan Iptek dewasa ini juga memicu *dehumanisasi*; perkembangan Iptek tidak dipicu perkembangan dan kebutuhan manusia lagi namun justru manusia “dipaksa” menyesuaikan diri dengan perkembangan Iptek yang membuatnya tidak manusiawi dan merampas kebahagiaannya.<sup>10</sup>

Kemajuan yang berhasil dicapai manusia berkat Iptek disadari bersifat ambivalen. Berkat Iptek, manusia mendapat banyak kemudahan dan kemajuan yang dulunya tidak terbayangkan. Kemajuan Iptek di bidang transportasi dan telekomunikasi misalnya, membuat komunikasi antar manusia begitu mudahnya. Selain itu, kemajuan di bidang kesehatan membuat hidup lebih berkualitas dan meningkatkan tingkat harapan hidup (*life expectancy*). Kesadaran bahwa *knowledge is power* itu mendominasi pemikiran di abad XVIII dan XX. Namun di abad XX, mulai muncul kesadaran bahwa kemajuan Iptek itu juga menimbulkan banyak problem dan kesulitan baru yang kerap kali berkonotasi etis. Saat bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, mulai disadari akibat-akibat penguasaan fisika nuklir oleh manusia beserta kengerian akan kemampuan manusia memusnahkan kehidupan. Mulai 1960-an, muncul juga keinsyafan akan masalah ekologi berupa

---

<sup>10</sup> Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Apresiasi terhadap Ilmu, Agama dan Seni*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kedua, 2015, hal. 451 - 2

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang mengancam planet bumi.<sup>11</sup>

Di awal-awal perkembangannya, Iptek dianggap sebagai “kemajuan” karena kemampuannya membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Iptek dianggap sebagai kunci pemecahan seluruh permasalahan manusia karena fungsi dasar teknologi pada mulanya bersifat instrumental; sebagai alat perpanjangan tubuh manusia. Alat-alat transportasi adalah perpanjangan kaki, mesin dan alat-alat besar adalah perpanjangan tangan, film dan televisi adalah perpanjangan mata, radio dan telepon adalah perpanjangan telinga dan komputer merupakan perpanjangan fungsi otak. Namun apa yang pada awalnya dirancang sebagai sarana memperluas penguasaan manusia akan alam, ternyata berkembang menjadi sesuatu yang sukar dikendalikannya sendiri dan terkadang malah mengendalikan hidup manusia. Filsuf Jerman, Martin Heidegger (1889-1976) mengatakan, teknologi yang diciptakan manusia, mulai menguasai manusia.<sup>12</sup> Kita tidak bisa lagi membayangkan kehidupan kita bisa berjalan tanpa teknologi seperti listrik, mesin-mesin otomatis, alat-alat transportasi dan komunikasi modern atau internet.

Menyikapi ambivalensi Iptek itu terdapat dua respons. *Pertama*, problem negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan Iptek dinilai sebagai problem etis. Bertens misalnya menjelaskan, di akhir tahun 1960-an, etika yang pada awalnya bersifat abstrak-filosofis, mulai bergerak ke arah etika terapan yang meminati masalah-masalah yang lebih kongkrit. Faktor terpenting dari “naik daun” nya etika terapan itu adalah karena perkembangan pesat Iptek memicu banyak persoalan etis besar, khususnya di bidang biomedis.<sup>13</sup> Muncul masalah-masalah moral baru yang ditimbulkan Iptek. Teknologi “bayi tabung”, eksperimen dengan embrio atau rekayasa genetika misalnya, melahirkan pertanyaan; apakah kita boleh memanipulasi kehidupan manusia? Bagaimana tanggungjawab kita pada lingkungan hidup dalam pengembangan proses industrialisasi? Apakah teknologi nuklir

---

<sup>11</sup> K. Bertens, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Kedua, Desember 1994, hal. 282-4

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 283-7

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 264

dapat diterima sebagai sarana legitim untuk mempertahankan diri padahal energi nuklir bisa membawa resiko besar bagi masa depan manusia dan lingkungan? Itulah beberapa contoh persoalan etis berat dewasa ini.

*Kedua*, problem kemajuan Iptek yang kadang mengakibatkan proses distorsi dan dehumanisasi itu, dinilai Jujun Suriasumantri, “...sebenarnya lebih merupakan **masalah kebudayaan** daripada **masalah moral**”. Artinya, dihadapkan dengan ekses-ekses negatif Iptek, masyarakat sebenarnya harus mampu menentukan pilihan teknologi mana yang digunakan dan mana yang tidak. Terkait hal itu Suriasumantri menulis; “secara konseptual maka hal ini berarti bahwa suatu masyarakat harus menetapkan **strategi pengembangan teknologinya** agar apa yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dijunjungnya”. Diakui, proses menetapkan “strategi kebudayaan” dalam pengembangan teknologi itu tidak mudah karena dalam kenyataannya manusia memiliki nafsu ingin tahu yang terus ditunjang oleh industri teknologi yang bersifat serakah mencari keuntungan.<sup>14</sup> Misalnya, pilihan menggunakan alat komunikasi *smartphone* teknologi terbaru. Masyarakat terus memburunya dan cenderung mengabaikan ekses negatif teknologi itu jika digunakan tidak dengan kematangan emosi dan pikiran.

### **Iptek Tidak Bebas Nilai**

Pandangan Suriasumantri dan Bertens pada hakikatnya sama; Iptek melibatkan *pilihan*. Bertens berpandangan, jika manusia tidak mampu membatasi diri, yang dibawa oleh Iptek bukan semata kemajuan tapi juga kemunduran dan kehancuran. Ekses negatif yang menyertai kemajuan Iptek menimbulkan masalah-masalah etis yang menjadi tanggungjawab manusia untuk menghadapinya.<sup>15</sup> Makin maju Iptek, maka kebijaksanaannya dalam menjalankan kemampuan teknologisnya itu makin besar. Setiap ilmuwan dan teknikus harus mampu menjawab pertanyaan; “Apakah semua yang *bisa* dikerjakan

---

<sup>14</sup> Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Op. Cit.*, hal. 456

<sup>15</sup> Bertens, *Etika, Op.Cit.*, hal.284

ilmu dan teknologi, pada kenyataannya *boleh* dikerjakan juga?”<sup>16</sup> Di sisi lain, Suriasumantri tidak menolak asumsi yang menyatakan ekkses negatif Iptek melahirkan masalah moral, namun karena titik tekannya adalah “masyarakat”, maka dia memandang soal itu sebagai “masalah kebudayaan”. Masyarakat lah yang memilih, bukan ilmuwan atau teknikus, mana teknologi yang *boleh* dipergunakan dan mana yang *tidak*.<sup>17</sup>

Karena melibatkan *pilihan*, maka pemajuan dan pengembangan Iptek *tidak bebas nilai*. Atau paling tidak, otonomi pengembangan Iptek dilandasi oleh kebebasan nilai terbatas yang hanya berlaku pada tataran tertentu. Konsepsi semacam ini merupakan pandangan yang muncul belakangan seiring dengan makin majunya Iptek itu sendiri dan belum muncul di awal-awal pengembangannya. Menurut Bertens, dulu banyak ilmuwan merasa segan mengakui bahwa ilmu tidak bebas nilai karena ada kekhawatiran bahwa pandangan semacam itu bisa merongrong otonomi pengembangan ilmu. Apalagi, sejarah mencatat beberapa peristiwa “traumatik” seperti “perkara Galilei” pada tahun 1633 dimana Gereja Katolik memaksa ilmuan Italia Galileo Galilei menarik teorinya bahwa bumi mengelilingi matahari (heliosentrisme) karena dinilai bertentangan dengan Kitab Suci Kristen. Campur tangan agama pada ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan metode ilmiah lantas dinilai merugikan pengembangan Iptek.<sup>18</sup>

Kasus inkuisisi Galileo ini selama dua setengah abad mempengaruhi pola pikir ilmuwan di Barat, khususnya Eropa. Terjadi “pertarungan” antara tradisi keilmuan yang ingin terbebas dari dogma ajaran apapun dengan kalangan yang ingin memaksakan dogma ajarannya menjadi premis ilmiah. Dalam konteks pertarungan semacam itulah dibangun semacam credo bahwa “ilmu bebas nilai” dimana para ilmuwan, khususnya dalam ilmu-ilmu alam, membangun otonomi keilmuannya yang terbebas dari kungkungan nilai-nilai moral. Sayangnya, dalam situasi demikian Iptek berkembang sangat pesat sehingga “ilmu bebas nilai” mendapatkan legitimasi sangat kuat. Konflik antara Ilmu dan Nilai (moral, ideologi, agama) tidak saja

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 288

<sup>17</sup> Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Bertens, *Etika, Op. Cit.*, hal. 285

terjadi di bidang ilmu-ilmu alam tetapi merambah juga ke ilmu-ilmu sosial seperti ajaran komunisme dan konsep dominasi ras Arya Nazi Jerman.<sup>19</sup> Pada akhirnya, otonomi ilmu dalam mengembangkan metode dan prosedur penemuan kebenaran ilmiah diterima tanpa keberatan apapun.

Belakangan, credo “ilmu bebas nilai” dalam komunitas ilmuwan itu mulai kembali dipertanyakan. Bahwa metode dan prosedur pencarian “kebenaran” teori-teori ilmiah dan penerapan teori-teori yang lantas menghasilkan teknologi adalah otonom, bisa diterima karena fokus dari ilmu dan teknologi adalah rangkaian proses dan upaya untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan “bagaimana” (bagaimana struktur materi, bagaimana membuat mobil hemat energi dan lain-lain). Namun, disamping pertanyaan “bagaimana”, ada pertanyaan yang tidak kalah penting yaitu “untuk apa”. Misalnya, proyek ilmiah ruang angkasa yang memakan biaya besar, jika dikaitkan dengan tujuan dilakukannya proyek-proyek itu, maka akan muncul pro-kontra tentang apakah tidak sebaiknya dana besar itu digunakan untuk proyek-proyek yang lebih relevan dengan kemanusiaan seperti pendidikan atau kesehatan?<sup>20</sup>

Disinilah tampak bahwa perbincangan tentang Iptek lantas melibatkan juga perbincangan tentang masalah *Ontologi* dan *Aksiologi*. Ontologi adalah hakikat obyek yang ditelaah oleh ilmu pengetahuan yang mencakup batas-batas penelaahan dan penafsiran realitas tentang obyek yang ditelaah itu. Ontologi adalah hakikat realitas dari obyek yang ditelaah. Adapun aksiologi terkait dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Terkait soal ontologi dan aksiologi kaitannya dengan aspek moral dari ekkses Iptek, para ilmuwan terbagi menjadi dua kelompok.<sup>21</sup>

Kelompok pertama menginginkan Iptek tetap bebas nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Menurut pendapat kelompok

---

<sup>19</sup> Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, *Op. Cit.*, hal. 254-5

<sup>20</sup> Bertens, *Etika*, *Op. Cit.*, hal. 286-8. Persoalan semacam ini pernah dialami di zaman Orde Baru saat Menristek saat itu, BJ Habibie mengembangkan sejumlah industri strategis seperti industri pesawat dan industri senjata. Sebagian kalangan menilai proyek-proyek itu sebagai proyek berbiaya tinggi (*high cost*) yang belum terlalu prioritas untuk dikembangkan di saat rakyat masih tertinggal di bidang sosial-ekonomi.

<sup>21</sup> Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, *Op. Cit.*, hal. 455-6



pertama ini, tugas ilmuwan hanyalah menemukan dan mengembangkan Iptek. Sedang mengenai penggunaannya (aksiologi), apakah digunakan untuk tujuan-tujuan baik atau tujuan-tujuan buruk, tidaklah menjadi bagian wilayah yang harus dipikirkan para ilmuwan melainkan menjadi hak dan tanggungjawab penuh masyarakat. Kelompok ini, ingin melanjutkan netralitas Iptek secara total sebagaimana era Galilo Galilei. Sebaliknya, ada kelompok ilmuwan kedua yang berpendapat, netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya terletak pada aspek ontologisnya saja, sedangkan pada aspek aksiologis, bahkan sejak pemilihan obyek penelitian, para ilmuwan harus senantiasa melandasinya dengan asas-asas moral dan memiliki kewajiban untuk mengontrol aksi dan pikirannya pada asas-asas itu. Kelompok ini mencoba menyesuaikan kenetralan ilmu secara pragmatis dengan melihat perkembangan Iptek dan masyarakat.<sup>22</sup>

Paling tidak ada tiga landasan berpikir kelompok kedua yaitu; (1) penggunaan Iptek secara destruktif oleh manusia merupakan hal faktual, terbukti dari meletusnya dua perang dunia yang menggunakan Iptek guna kepentingan perang; (2) Iptek telah berkembang sedemikian rupa hingga mencapai tahap esoterik sehingga hanya kaum ilmuwan yang mampu mengukur derajat ekses yang mungkin terjadi jika terjadi penyalahgunaan; (3) kemajuan pesat Iptek mengandung resiko terjadinya fenomena dimana Iptek bisa mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki semisal dalam kasus revolusi genetika dan perekayasaan sosial (*social engineering*). Berdasarkan tiga hal itu, para ilmuwan kelompok kedua ini berpendapat, “....ilmu harus menentukan sikap moral bahwa pemanfaatan ilmu harus digunakan untuk *kebaikan* dan *keselamatan* manusia tanpa *merendahkan martabat* atau *mengubah hakikat* kemanusiaan itu sendiri”<sup>23</sup>.

### **Aksiologi Pancasila**

Dari dua kelompok besar ilmuwan yang disebutkan di atas, tampaknya pilihan lebih rasional bagi pengembangan Iptek di

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 457-8

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 458

Indonesia saat ini dan di masa depan adalah menapaki jalan dan pola pikir kelompok kedua. Yaitu, pengembangan ilmu secara ontologis lewat prosedur dan metode ilmiah haruslah berjalan secara otonom dan tidak bisa diintervensi oleh nilai-nilai sehingga bisa mencapai kreatifitas pemikiran yang tertinggi. Namun dalam aspek aksiologis terkait “untuk apa” penemuan-penemuan Iptek itu lantas digunakan, para ilmuwan dan saintis Indonesia haruslah dipandu oleh sebuah strategi pengembangan Iptek sehingga apa yang dihasilkan sesuai nilai-nilai moral dan budaya masyarakat. Panduan nilai-nilai moral dan idiil juga perlu diberikan pada masyarakat selaku pengguna Iptek sehingga mampu menentukan pilihan teknologi mana yang digunakan dan mana yang tidak atau agar mereka bisa menggunakan teknologi secara bijak.

Pandangan kelompok kedua ini tampak dari pendapat Yudi Latif, saat membahas persoalan, ”Apa sesungguhnya yang keliru dalam proses pembangunan di negeri ini?” Di satu sisi ada kesyukuran bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kultural yang sangat berlimpah. Namun di sisi lain, kinerja kebudayaan kita untuk memuliakannya masih sangat miskin hingga terbuka kesadaran bahwa kemiskinan yang menyelimuti kehidupan kita itu justru disebabkan oleh kemiskinan kreativitas kultural itu sendiri, yakni lemahnya daya-daya saintifik dan etos kerja untuk mengaktualkan potensi-potensi sumber daya yang berlimpah tersebut. Dalam konteks itu Latif berpandangan, adopsi dan pengembangan teknologi di Indonesia bukan saja sesuatu yang perlu melainkan juga imperatif. Namun harus juga dijawab, teknologi seperti apa, bagaimana hal itu dikembangkan, untuk apa, dan untuk siapa ?<sup>24</sup>

Disinilah dibahas kemungkinan tentang adanya “aksiologi Pancasila” yaitu menjadikan Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai basis aksiologis dalam pengembangan Iptek di Indonesia. Konsep itu memiliki dasar pemikiran yang mencakup dua hal. *Pertama*, status Indonesia yang belum sepenuhnya menjadi sebuah negara industri maju dengan kemajuan Iptek tinggi.

---

<sup>24</sup> Yudi Latif, “Sosiokultur sebagai Basis Pengembangan”, *Op.Cit.*, hal 166-7

Hal itu memberinya kesempatan untuk mempelajari secara seksama pengalaman negara-negara industri maju dalam pengembangan Ipteknya yang sebagaimana telah dibahas, memiliki karakter ambivalen yaitu mendorong kemajuan bagi masyarakat namun juga bisa memicu dampak residual yang bersifat negatif. *Kedua*, Pancasila sebagai basis nilai kehidupan bernegara, seperti akan dibahas nanti, adalah sebuah ideologi yang bisa dikembangkan tidak saja sebagai sebuah sistem filsafat tetapi juga sebagai sebuah sistem ilmiah.

Terkait kemungkinan diperankannya Pancasila sebagai basis nilai yang memandu pengembangan Iptek, selain bisa belajar dari pengalaman negara-negara Barat, Indonesia bisa juga belajar dari negara-negara Asia yang telah berhasil dalam industrialisasinya seperti Jepang, Korea Selatan dan Cina. Di tiga negara ini, budaya lokal digunakan sebagai bagian dari motor penggerak pembangunannya. Ada akulturasi antara budaya kolektif konfusian dengan budaya individu kapitalisme Barat yang dilakukan melalui proses penyerapan dan seleksi. Dari tiga negara ini, kita bisa mempelajari bagaimana proses penyerapan dan seleksi dilakukan dan apa pula dampak-dampak yang ditimbulkannya. Misalnya, Jepang menganut konsep *datsua nyuo* atau “tinggalkan Asia dan bergabung dengan Eropa” dimana proses menjadi maju adalah dengan mengimitasi model-model keorganisasian Barat. Bandingkan dengan Cina yang melakukan perubahan lewat proses reinterpretasi ajaran sosialisme dan Konfusianisme.<sup>25</sup>

Mengutip Sayidiman Suryohadiprojo, pembangunan peradaban sebuah bangsa non-Barat dengan berbasis nilai-nilai budayanya bukanlah sebuah hal mustahil. Menurutnya, di akhir Abad XX muncul kesadaran bahwa di samping nilai-nilai yang bersifat universal yang diidentikkan dengan Barat, terdapat juga nilai-nilai khas bukan Barat yang bisa memicu kemajuan peradaban bangsa-bangsa non-Barat. Kesadaran itu mendapat penguatan empiris dari kemajuan besar yang dicapai negara-negara yang menganut Konfusianisme seperti Jepang,

---

<sup>25</sup> Pembahasan terkait hal ini bisa dilihat dalam Citra Hennida et. all, “Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan Cina”, *Jurnal Global & Strategis*, Tahun 10, No. 2, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2016

Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Cina. Majalah *TIME* edisi 14 Juni 1993 memuat pengakuan bahwa ada peradaban maju selain Barat yang merambah jalan kemajuan materil dan spirituil serta berhasil mengembangkan Iptek bukan lewat nilai-nilai yang sepenuhnya Barat. Karenanya dia percaya, Indonesia bisa membangun peradabannya berbasis budayanya sendiri.<sup>26</sup>

Di situ Sayidiman menyinggung konsep “Restorasi Pancasila” sehingga menjadi kebudayaan bangsa yang mampu mendukung pembangunan peradaban Indonesia itu. Disebutkan bahwa Restorasi Pancasila itu paling tidak terdiri dari tiga aspek. *Pertama*, perlu pendalaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang intensif di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan terpelajar dan pimpinan bangsa. *Kedua*, menjadikan Pancasila berperan sebagai faktor utama dalam pembangunan Manusia Indonesia dan Masyarakat dan Bangsa Indonesia (*Nation and Character Building*). Terakhir, Pancasila dijadikan sebagai *referensi utama* ketika hendak mengadopsi nilai-nilai bukan Indonesia guna memperkaya kebudayaan Indonesia. Adopsi nilai-nilai non-Indonesia penting, terutama saat di luar terjadi kemajuan Iptek yang luar biasa, namun adopsi itu harus menjamin bahwa hasilnya benar-benar sesuai dengan keperluan hakiki bangsa Indonesia.<sup>27</sup> Pancasila menjadi “alat saring” dari segi aksiologi.

### “Teori Kebenaran” Pancasila

Dalam Seminar Nasional *Mengenang Satu Abad Kelahiran Prof Notonegoro* dengan tema “Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” yang diselenggarakan UGM pada 1 Februari 2006, Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Budisutrisna mengedepankan konsep tentang “Teori Kebenaran” menurut Pancasila yang menurutnya harus dijadikan dasar bagi pengembangan ilmu di Indonesia. Menurutnya, Ilmu (*science*) memiliki tujuan utama untuk

---

<sup>26</sup> Sayidiman Suryohadiprodo, “Restorasi Pancasila Menuju Pembangunan Peradaban Indonesia”, dimuat dalam *kompas.com*, 11 April 2016.

<sup>27</sup> *Ibid.*

mengungkap dan mendapatkan “kebenaran” (*truth*) lewat metode ilmiah yang dalam kajian filsafat terdiri dari tiga “teori (menentukan) kebenaran” yaitu *koherensi* (memakai logika deduktif dan bersifat rasional), *korespondensi* (memakai logika induktif dan bersifat empiris) dan pragmatis (kebenaran berdasarkan fungsi). Teori kebenaran Pancasila, meramu tiga teori itu.<sup>28</sup>

Budisutrisna berpendapat, dalam teori kebenaran Pancasila, ilmu yang ingin dikembangkan tidak saja yang memenuhi kriteria kebenaran dalam teori koherensi dimana kebenaran dicapai lewat logika deduktif yang dihasilkan rasio atau kebenaran dalam teori korespondensi yang digapai lewat logika induktif dan bukti-bukti empiris. Teori kebenaran Pancasila haruslah juga berdasarkan teori pragmatis dimana terdapat keterkaitan antara ilmu dengan fungsi. Dalam kerja-kerja ilmiah berdasar teori kebenaran Pancasila, ketiga teori itu saling melengkapi. Lebih lanjut dia menjelaskan, nilai-nilai Pancasila adalah dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dimana kebenaran ilmiah haruslah sesuai dengan nilai ketuhanan (*god*), kemanusiaan (*humanity*), kesatuan (*one*), kerakyatan (*people*) dan keadilan (*justice*).<sup>29</sup>

Mengutip pemikiran Notonagoro, Pancasila merupakan “abstraksi” dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan dan agama. Abstraksi itu terlihat dari rumusan sila-sila Pancasila yang terdiri dari kata dasar (Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil) dan kata sifat (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan). Dari sisi ini, nilai-nilai Pancasila itu pada hakekatnya bersifat abstrak umum yang luas dan universal. Luas karena bisa dijadikan pegangan untuk berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai itu juga universal karena tidak terikat pada ruang dan waktu. Dalam Pancasila, tercermin pandangan bangsa Indonesia tentang ketuhanan,

---

<sup>28</sup> Budisutrisna, “Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu”, Makalah Pendukung dalam Seminar Nasional **Mengenang Satu Abad Kelahiran Prof. Notonagoro** dengan Tema “Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, yang Diselenggarakan pada 1 Pebruari 2006 di Balai Senat UGM, Yogyakarta. Tulisan ini dimuat dalam *Jurnal Filsafat*, Volume 39, Nomor 1, Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, April 2006, hal. 57 - 66

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 57

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang merupakan permasalahan manusia secara menyeluruh.<sup>30</sup>

Selanjutnya, nilai-nilai universal yang ada dalam Pancasila itu sesuai dengan teori kebenaran *koherensi* karena mengutip Notonagoro (1975: 19), ada konsistensi dalam struktur sila dalam Pancasila. Sila Pancasila tersusun dalam beberapa bagian namun ada dalam satu kesatuan makna yang utuh, saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Setiap bagian dalam Pancasila merupakan bagian yang mutlak yang jika dihilangkan satu bagian saja darinya, maka hal itu akan merusak struktur makna yang terbentuk dalam Pancasila sehingga tidak bisa berfungsi maksimal. Setiap sila Pancasila di dalamnya mengandung sila yang lainnya dan dalam masing-masing sila terdapat hubungan yang saling mengkuifikasi. Misalnya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Begitu seterusnya dengan sila yang lain pula.<sup>31</sup>

Teori kebenaran Pancasila juga sesuai dengan teori korespondensi karena proposisi-proposisi yang ada dalam Pancasila bersesuaian dengan realitas empiris kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu ditemui beragam ungkapan tentang Pancasila sebagai “jiwa bangsa Indonesia”, “kepribadian bangsa Indonesia”, “pandangan hidup bangsa Indonesia” atau “pedoman hidup bangsa Indonesia”. Nilai-nilai Pancasila, meski tidak disadari penuh, secara instrinsik tergambar dalam dinamika kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia dalam adat kebudayaan, religi serta dalam tatakelola kehidupan bermasyarakatnya. Karena berhasil diabstraksi (digali) menjadi nilai-nilai abstrak umum universal, maka Pancasila dapat menjadi sumber pemecahan masalah kehidupan sehari-hari karena menurut Notonagoro, hubungan Pancasila dengan bangsa Indonesia adalah hubungan sebab-akibat; Pancasila dibentuk dari nilai-nilai bangsa dan begitu sebaliknya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 66-7

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 69

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 70

Teori kebenaran Pancasila juga bersesuaian dengan teori kebenaran pragmatik yang menyatakan, nilai kebenaran sebuah proposisi diukur dengan kriteria kemanfaatan atau fungsi dalam kehidupan praktis. Dari sisi ini, Pancasila telah berfungsi sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang telah dibuktikan dalam lintasan sejarahnya, baik sejak saat Pancasila itu dirumuskan maupun dalam menghadapi berbagai kemelut kebangsaan. Para penganut Pancasila, percaya akan kebenaran Pancasila karena dia bersifat fungsional mempersatukan bangsa Indonesia.<sup>33</sup>

Teori Kebenaran Pancasila ini dinilai bisa digunakan sebagai dasar bagi pengembangan Iptek di Indonesia. Menurut teori kebenaran Pancasila, Iptek harus koheren dalam arti harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Iptek juga harus memenuhi kriteria korespondensi dimana pernyataan atau proposisi ilmiah harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Terakhir, pengembangan Iptek harus menganut asas kefaedahan yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai kebenaran inilah yang seharusnya dipakai sebagai dasar pengembangan Iptek di Indonesia agar tidak lahir alienasi karena nilai-nilai dasarnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia.<sup>34</sup>

### **Lima Visi Pengembangan**

Berdasarkan “Teori Kebenaran” Pancasila yang mencakup koherensi, korespondensi dan pragmatisme itu, kita bisa menyusun semacam visi pengembangan Iptek di Indonesia yang berjumlah lima butir sesuai dengan nilai-nilai abstrak inti dan universal dalam Pancasila yaitu; (1) Ketuhanan; (2) Kemanusiaan Universal; (3) Kesatuan (multikulturalisme); (4) Kerakyatan (Demokrasi Politik) dan; (5) Keadilan Sosial (Demokrasi Ekonomi). Kelima visi itu harus dilihat dalam satu koherensi (konsistensi) dimana kelima visi itu

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 74

saling terkait (korespondensi) satu sama lain agar secara pragmatik-fungsional mampu menghasilkan satu kemanfaatan bagi pembangunan peradaban Indonesia yang maju di masa depan.

### 1) *Ketuhanan*

Soekarno dalam “Pidato Lahirnya Pancasila” menyatakan, “Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!” dimana “Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan”.<sup>35</sup> Dari pernyataan itu tergambar bahwa Prinsip Ketuhanan tidak saja mensifati level negara yang dicita-citakan, tetapi juga pada level individu (masing-masing orang Indonesia), termasuk para ilmuwan dan saintis. Inilah jiwa yang mendasari norma Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama...”.

Karenanya, Iptek yang dikembangkan di Indonesia harus “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam artian menjadikan nilai-nilai moral agama sebagai **panduan** pengembangan dan pemanfaatannya. Seperti dikemukakan Kuntowijoyo, proses industrialisasi yang menyebabkan transformasi sosial dan kultural akibat diterapkannya Iptek di Indonesia, tidak boleh mengulang sejarah industrialisasi Barat dimana di tengah-tengah kemajuan pesat Iptek, jiwa kebudayaan Barat mengalami kekosongan yang hebat yang muncul akibat proses sekularisasi, proses de-religionisasi.<sup>36</sup> *Pengembangan Iptek yang berketuhanan di Indonesia harus tidak mengarah pada sekularisasi namun keterpaduan antara Iptek dan Imtaq* (Iman dan taqwa).

### 2) *Kemanusiaan/Internasionalisme*

Prinsip lain yang ada dalam Pancasila adalah prinsip kemanusiaan universal atau disebut Soekarno sebagai “prinsip internasionalisme”. Dihubungkan dengan nasionalisme, disitir pernyataan Gandhi bahwa “*My nationalism is humanity*”. Selain itu,

---

<sup>35</sup> Saafroedin Bahar, et.all (Penyunting.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama Edisi III, 1995, hal.80

<sup>36</sup> Dr. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Penerbit Mizan, Bandung, Januari 1991, hal. 166-170



pendirian Negara Indonesia haruslah menuju pada apa yang disebutnya “kekeluargaan bangsa-bangsa”.<sup>37</sup> Jadi, prinsip kemanusiaan memiliki dua dimensi arti yaitu *humanisme* dan *internasionalisme*.

Prinsip humanisme dalam *pengembangan Iptek di Indonesia haruslah mengarah pada “Iptek yang humanis”* dalam arti Iptek yang tidak lantas memunculkan proses dehumanisasi atau penurunan derajat manusia. Proses industrialisasi, sebagaimana diingatkan Nurcholish Madjid, beresiko menurunkan derajat manusia sebagai sebuah fungsi dari keseluruhan dunia permesinan. Dia dihargai lewat nilai instrumentalis-fungsional yang bisa digunakan atau dibuang semata berdasar fungsi yang dapat dia lakukan.<sup>38</sup> Lebih jauh, seperti dikatakan Suriasumantri, Iptek sudah berada di ambang kemampuan mempengaruhi proses reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri seperti dalam biomedik dan rekayasa genetika.<sup>39</sup>

Prinsip internasionalisme dalam pengembangan Iptek di Indonesia telah tertuang dalam norma Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; “*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi....untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*” Karenanya, pengembangan Iptek di Indonesia harus diarahkan pada manfaatnya untuk peradaban manusia secara keseluruhan. Untuk itu, pengembangan teknologi nuklir atau persenjataan misalnya, haruslah diatur sedemikian rupa hingga tidak berkembang ke arah yang membahayakan umat manusia.

### 3) *Kesatuan Kebangsaan*

Soekarno dalam pidato “Lahirnya Pancasila” membahas konsep kesatuan ini dalam konteks penjelasannya tentang prinsip “kebangsaan”. Di situ dibahas tentang Indonesia sebagai satu “*nationale staat*” yang “*„berdiri di atas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatra sampai ke Irian*”.<sup>40</sup> Prinsip “kesatuan” ini lantas dikaitkan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keragaman Indonesia baik dari segi agama maupun

---

<sup>37</sup> *Risalah Sidang, Op. Cit.*, hal.76

<sup>38</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Penerbit Mizan, Bandung, 1987, hal. 130

<sup>39</sup> Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Op. Cit.*, hal. 452

<sup>40</sup> *Risalah Sidang, Op. Cit.*, hal. 72-4

budaya yang tersimbolkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (keragaman dalam satu kesatuan).

*Pengembangan Iptek di Indonesia harus menjadikan nilai kemajemukan dan kesatuan kebangsaan ini sebagai pedoman.* Hal itu dilakukan dalam tiga tataran; (1) tataran epistemologis (metode mendapatkan pengetahuan); (2) tataran pengembangan dan; (3) tataran difusi/diseminasi. Terkait tataran epistemologis, pengembangan Iptek Indonesia harus mempertimbangkan kekayaan *local wisdom* (nilai-nilai kearifan lokal) di tanah air sebagai bagian yang tidak “dimatikan” karena dianggap bagian masa lalu yang menghambat kemajuan namun direvitalisasi sebagai bagian dari Iptek.

Selanjutnya, pada tataran pengembangan, haruslah dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pengembangan Iptek, khususnya di level pendidikan tinggi, pengembangan Iptek berdasarkan wilayah dengan masing-masing potensinya. Perlu dikembangkan sentra-sentra penelitian berbasis wilayah seperti wilayah pertanian, perikanan/kelautan, pedesaan, perkotaan dan sebagainya. Kriteria seperti itu sudah sedikit tercermin dalam Pasal 81 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, namun baru sebatas pada bentuk Akademi Komunitas.

Pada tataran difusi/diseminasi, penyebaran hasil-hasil Iptek harus mempertimbangkan norma-norma lokal yang ada di masyarakat. Sebab, seperti dikemukakan Rogers dan Shoemaker (1987), penyebaran inovasi ke masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan sistem sosial, adalah sebuah usaha kompleks karena melibatkan banyak faktor seperti faktor sosial budaya dan ekonomi.<sup>41</sup> Banyak kasus inovasi teknologi baru gagal disebarkan atau ditolak karena tidak mempertimbangan norma-norma dan faktor-faktor sosial budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

#### **4) Kerakyatan (Demokrasi Politik)**

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, Bertens menyatakan bahwa jika kemampuan manusia bertambah besar berkat kemajuan Iptek, maka kebijaksanaannya dalam menjalankan kemampuan itu

---

<sup>41</sup> Everett M. Rogers & F. Floyd Shoemaker, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, disarikan oleh Drs., Abdillah Hanafi, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Cetakan keempat, 1987, hal. 15-6

harusnya bertambah pula. Tidak semua yang *bisa* dilakukan dengan kemampuan *Iptek* itu boleh dilakukan juga. Secara etis, harus ada batasan-batasan tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan *Iptek*. Persoalannya, siapa yang berhak menentukan batasan-batasan itu?<sup>42</sup>

Disinilah relevansi penerapan prinsip “Kerakyatan” (demokrasi politik) dalam pengembangan *Iptek*. Dengan prinsip ini, arah dan strategi pengembangan *Iptek* yang “boleh” dan “tidak boleh” dikembangkan di Indonesia haruslah melibatkan rakyat sebagai pemiliki tertinggi kedaulatan lewat permusyawaratan wakil-wakilnya di legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan perannya masing-masing. Hal itu dilakukan lewat penciptaan beragam aturan perundangan yang bisa menjamin, pengembangan *Iptek* di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam Pancasila.

##### **5) *Keadilan Sosial (Demokrasi Ekonomi)***

Dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0 yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, *nano-technology*, dan lain sebagainya. Banyak yang menganggap Revolusi Industri 0.4 ini mengandung ancaman terutama dimana bisnis digital menggeser bisnis konvensional yang pada gilirannya berpotensi menciptakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka pengangguran meningkat. Revolusi 0.4 menciptakan *job disruption* dimana beberapa jenis pekerjaan akan hilang sehingga PHK tak terhindarkan. Peran manusia dalam rantai bisnis secara fisik digantikan mesin atau robot, internet, dan teknologi baru lainnya.

Untuk itu, diperlukan adanya prinsip “Keadilan Sosial” dalam pengembangan *Iptek* Indonesia dimana pengembangan *Iptek* dalam bentuk otomatisasi dan mekanisasi baik di sentra-sentra industri maupun di beberapa jenis pekerjaan tertentu harus tetap menjamin terwujudnya demokrasi ekonomi/kesejahteraan sosial. Perkembangan *Iptek* lantas tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan persoalan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) dimana salah satu prinsip demokrasi ekonomi adalah efisiensi namun tetap berkeadilan.

---

<sup>42</sup> Bertens, *Etika, Op. Cit.*, hal. 288-9

## Penutup : Menuju Peradaban Indonesia

Jika kita membicarakan peradaban Indonesia masa depan, maka pengembangan Iptek adalah misi nasional yang tidak bisa dielakkan. Dalam kerangka itu muncul persoalan klasik tentang apakah kita memiliki dasar-dasar budaya yang kondusif bagi pengembangan Iptek tersebut. Perbincangan soal kaitan antara pengembangan Iptek dan Kebudayaan dalam tulisan ini menyimpulkan, kedua hal itu tidak bisa dipisahkan dan pola hubungan keduanya bersifat timbal balik. Iptek tidak sekedar refleksi dari kondisi sosial-budaya namun mampu membentuk tatanan sosial dan kebudayaan itu sendiri. Karenanya, sangat relevan untuk mengkaitkan masalah pengembangan Iptek dengan soal-soal kebudayaan.

Disini, Pancasila yang digali dari beragam nilai yang ada di masyarakat Indonesia, kita kedepankan sebagai basis dari visi pengembangan Iptek ke depan. Kita mempercayai bahwa pembangunan sebuah kebudayaan Iptek yang berbasis nilai-nilai Pancasila tidak saja relevan, namun juga merupakan wacana yang patut diajukan dalam upaya menambah paradigma baru dalam soal relasi Iptek dan kebudayaan. Hal seperti itu sangat mungkin dilakukan karena Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara bisa dikembangkan menjadi sebuah sistem ilmiah dan filsafat. Tulisan ini sudah berupaya mengkonstruksi sebuah “teori kebenaran” Pancasila dan menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila memenuhi syarat untuk dibangun menjadi sebuah teori kebenaran tersendiri karena karakternya yang memiliki aspek korespondensi, koherensi sekaligus pragmatik. Dari situ coba dibangun sebuah tentang “aksiologi Pancasila” dimana Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai basis aksiologis dalam pengembangan Iptek di Indonesia.

Aksiologi Pancasila menjawab persoalan-persoalan kebudayaan dan moral terkait pengembangan Iptek semisal, “Apakah semua yang *bisa* dikerjakan Iptek, pada tataran realitasnya *boleh* juga dikerjakan?”. Pada tataran masyarakat, jika masyarakat diharapkan bersikap bijak dalam penggunaan Iptek, mana teknologi yang *boleh* dipergunakan dan mana yang *tidak*? Jawaban-jawaban dari

pertanyaan-pertanyaan itu adalah; (1) pemajuan dan pengembangan Iptek *tidak bebas nilai* tapi harus berbasis nilai-nilai, dalam hal ini nilai-nilai Pancasila dan; (2) otonomi pengembangan Iptek dilandasi kebebasan nilai yang sifatnya terbatas yaitu hanya pada aspek ontologi yaitu obyek yang ditelaah beserta metode ilmiahnya. Dari segi aksiologi, terkait kegunaan dan pemanfaatan Iptek, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pemandunya.

Mengutip pemikiran Notonagoro, Pancasila merupakan “abstraksi” dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan dan agama (koresponden/sesuai realitas). Nilai-nilai Pancasila itu pada hakekatnya bersifat abstrak umum yang luas karena bisa dijadikan pegangan untuk berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dan universal karena tidak terikat pada ruang dan waktu. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai itu saling terkait (koheren), tidak bisa dipisahkan dan membentuk satu kesatuan makna. Setiap sila Pancasila di dalamnya mengandung sila yang lainnya dan dalam masing-masing sila terdapat hubungan saling mengkualifikasi. Nilai-nilai Pancasila itulah yang harusnya dipakai sebagai dasar pengembangan Iptek di Indonesia agar pengembangan Iptek tidak melahirkan alienasi dimana pengembangan Iptek berujung pada tercerabutnya masyarakat Indonesia dari nilai-nilai dasarnya, budaya serta jati dirinya. Tulisan ini lantas mengajukan lima visi pengembangan Iptek Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di Indonesia.

- 1) Prinsip Ketuhanan; Iptek yang dikembangkan di Indonesia harus “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam artian menjadikan nilai-nilai moral agama sebagai panduan pengembangan dan pemanfaatannya.
- 2) Prinsip Kemanusiaan/Internasionalisme; (a) pengembangan Iptek di Indonesia harus diarahkan kemanfaatannya untuk peradaban manusia secara keseluruhan; (b) pengembangan teknologi nuklir, persenjataan, biomedis, harus diatur sedemikian rupa hingga tidak berkembang ke arah yang membahayakan umat manusia dan dehumanisasi.

- 3) Prinsip Kesatuan Kebangsaan; *pengembangan Iptek di Indonesia harus menjadikan nilai kemajemukan budaya (mutikulturalisme. local wisdom) dan kesatuan kebangsaan ini sebagai pedoman.*
- 4) Prinsip Kerakyatan (demokrasi politik): arah dan strategi pengembangan Iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah melibatkan rakyat sebagai pemilik tertinggi kedaulatan lewat permusyawaratan wakil-wakilnya di legislatif, eksekutif dan yudikatif lewat penciptaan beragam aturan perundangan yang bisa menjamin, pengembangan Iptek di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam Pancasila.
- 5) Prinsip Keadilan Sosial (demokrasi ekonomi): pengembangan Iptek dalam bentuk otomatisasi dan mekanisasi baik di sentra-sentra industri maupun di beberapa jenis pekerjaan tertentu harus tetap menjamin terwujudnya demokrasi ekonomi/kesejahteraan sosial (efisien berkeadilan).

Lewat lima visi pengembangan Iptek berbasis nilai-nilai Pancasila itu, pengembangan Iptek di Indonesia untuk kemajuan peradaban Indonesia di masa depan bisa kita pandang lewat kaca mata optimisme, meski disadari masih banyak tantangan yang dihadapi. Jika Pancasila adalah nilai-nilai yang digakli dari masyarakat bangsa kita dan tertanam sejak lama, sejarah sudah membuktikan nilai-nilai itu berhasil menjadi motivasi dasar nenek-moyang kita di masa lalu untuk mengembangkan “Iptek” yang cukup maju di zamannya. Beberapa sisa kemajuan peradaban masa lalu Indonesia masa lampau masih kita saksikan saat ini di bidang pertanian, astronomi, arsitektur dan lain sebagainya. Kalaupun kemudian kebudayaan masa lampau itu tidak lagi mampu menunjukkan vitalitas dan kontinuitasnya saat ini, mungkin karena kita melupakan nilai-nilai yang sudah ada akibat disrupsi sejarah politik kebudayaan kolonial ditambah praktik-praktik politik dan ekonomi yang tidak kondusif selepas kemerdekaan.

## Daftar Pustaka

- Bahar, Saafroedin, *et.al.* (Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama Edisi III, 1995
- Bertens, K, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Kedua, Desember 1994
- Budisutrisna, “Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu”, *Jurnal Filsafat*, Volume 39, Nomor 1, Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, April 2006
- Hennida, Citra *et. all*, “Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan Cina”, *Jurnal Global & Strategis*, Tahun 10, No. 2, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2016
- Kuntowijoyo, Dr., *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Penerbit Mizan, Bandung, Januari 1991,
- Latif, Yudi, “Sosiokultur sebagai Basis Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, *Jurnal SosioTeknologi*, Volume 13, Nomor 3, ITB, Bandung, Desember 2014
- Piliang, Yasraf Amir, “Budaya Teknologi di Indonesia: Kendala dan Peluang Masa Depan”, *Jurnal SosioTeknologi*, Edisi 28 Tahun 12,, ITB, Bandung, April 2013
- , “Transformasi Budaya Sains dan Teknologi; Membangun Daya Kreatifitas”, *Jurnal SosioTeknologi*, Volume 13, Nomor 2, ITB, Bandung, Agustus 2014
- Roger, Everett M. & Shoemaker, F. Floyd, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, disarikan oleh Drs., Abdillah Hanafi, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Cetakan keempat, 1987
- Suriasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu; Sebuah Apresiasi terhadap Ilmu, Agama dan Seni*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Keduapuluhlima, 2015.
- Suryohadiprodjo, Sayidiman. “Restotasi Pancasila Menuju Pembangunan Peradaban Indonesia”, dimuat dalam *kompas.com*, 11 April 2016.





# PRAGMATISME SEBAGAI BUDAYA POLITIK ZAMAN ‘NOW’

Bambang Sadono

## Abstrak

Pembentukan perundang-undangan bila dilandasi argumentasi yang bersumber pada pragmatisme bukan bersumber dari ideologi, telah mendominasi budaya politik saat ini, atau dikenal zaman ‘Now’. Kasus kontroversial dalam revisi UU MD3 dan sebelumnya kontroversi mengenai ‘*money politic*’, yang kemudian disusul dengan mahar politik, politisasi hukum, dan sebagainya bisa dijadikan indikasi tumbuh suburnya budaya pragmatisme, dan matinya budaya idealisme. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sejatinya adalah sumber hukum dalam praktek pembentukan perundang-undangan yang menjadi indikasi budaya politik dan budaya hukum dalam demokrasi substansial. Untuk itu, artikel ini membahas tentang posisi Pancasila sebagai basis budaya politik dan konsistensi pada budaya hukum.

**Kata Kunci:** Pancasila, Pembentukan Undang-Undang, Budaya Politik, Budaya Hukum.

## Abstract

*The legislation process which is based on arguments derived from pragmatism rather than from ideology, has dominated the current political culture, or namely ‘Now’ era. The controversial case of the revision of the MD3 Law and the earlier controversy over ‘money politics’, which was followed by political dowry, politicization of the law, and so on could be an indication of the growth of the culture of pragmatism, thus, the death of the culture of idealism. The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and Pancasila are in fact legal sources in the practice of legislative establishment which indicate the political culture and legal culture in substantial democracy. For that reason, this article discusses the position of Pancasila as the basis of political culture and consistency in legal culture.*

**Keywords:** Pancasila, Law Formation, Political Culture, Legal Culture.

## Pendahuluan

Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau biasa disingkat sebagai MD3 membuahkan respon negatif yang cukup serius dari publik. Kritik yang paling keras antara lain karena DPR dan Presiden terkesan hanya mengutamakan bagi-bagi jabatan pimpinan lembaga negara, dan upaya melindungi lembaga legislatif dari kritik publik. Kemungkinan akan terjadinya produk undang-undang yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan cita hukum rakyat ini, karena antara lain DPR dan Presiden tidak konsisten terhadap pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011<sup>1</sup>. Bahkan, bisa dianggap lahirnya undang-undang ini cenderung melanggar UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Pelanggarannya antara lain bisa dilihat terhadap Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang norma yang mengatur materi yang harus dimasukkan dalam UU. Materi muatan yang harus diatur dengan UU itu adalah: (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) perintah suatu UU untuk diatur dengan UU; (c) pengesahan perjanjian internasional tertentu; (d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK); dan/atau (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Membagi bagi jabatan pimpinan DPR, DPD, dan MPR hanya terkesan mengakomodasi kepentingan elit politik, tidak ada kaitannya dengan alasan perubahan atau pembuatan undang-undang seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Apalagi dilakukan dilakukan dengan tergesa-gesa seperti mengejar target waktu masa bakti periode Tahun 2014 hingga Tahun 2019 yang tinggal sekitar satu setengah tahun lagi. Walaupun ada yang membantah revisi undang-undang tersebut hanya lantaran mengejar jabatan.<sup>2</sup> Ada juga yang berpendapat revisi tersebut punya landasan argumentasinya,

---

<sup>1</sup> Sadono, Bambang *Kompas*, 23 Januari 2017, "Pragmatisme dalam Pembentukan UU".

<sup>2</sup> *Kompas*, 4 Februari 2018, "PDI-P Bantah Penambahan Kursi Pimpinan DPR Sekadar Mengejar Jabatan"

walaupun demikian, praktek politik seperti itu tidak boleh diulang lagi di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Kasus revisi UU MD3 ini semakin memperkuat kesan bahwa pragmatisme memang sudah sangat mendominasi budaya politik saat ini. Sebelumnya kontroversi mengenai *money politic*, yang kemudian disusul dengan mahar politik, politisasi hukum, dan sebagainya bisa dijadikan indikasi tumbuh suburnya budaya pragmatisme, dan matinya budaya idealisme.

## Permasalahan

Berdasarkan uraian pada Pendahuluan, artikel ini mengulas pemikiran tentang, “*mengapa tren pragmatisme dan matinya idealisme ini makin marak sebagai budaya politik di zaman ‘Now’?*” dan, “*bagaimana cara memperbaikinya?*”

Budaya sebagai basis nilai secara *das sollen* memang harus menjadi landasan bagi kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi suatu bangsa. Walaupun dalam kenyataannya kekuatan yang dominan di bidang ekonomi dan politik justru menekan pada tatanan sosial, hukum, maupun budaya. Hal ini bisa dilihat dari analisis menggunakan teori fungsionalisme struktural *Talcott Parsons* pada Tahun 1964. Asumsi dasar Parsons bahwa masyarakat terintegrasi dalam satu sistem yang bisa dikelompokkan dalam subsistem ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Lebih lanjut menurut Parsons<sup>4</sup> dalam sistem sosial bisa disusun secara bertingkat hubungan antara subsistem, melalui dua cara. Pertama berdasarkan sistem nilai yang membentuk pola, dan kedua berdasarkan motivasi, orientasi, dan komitmen untuk terpenuhinya harapan-harapan dan masyarakat. Jika dibaca dari basis nilai yang merupakan sublimasi dari jiwa dan aspirasi suatu masyarakat atau bangsa, maka nilai-nilai budaya dan komitmen sosial, seharusnya menjadi arah dan pembentuk warna dalam kehidupan politik maupun

---

<sup>3</sup> Kompas, 9 Februari 2018, “Agung Laksono Nilai Penambahan Kursi Pimpinan DPR-MPR untuk Tebus Dosa”

<sup>4</sup> Parsons, Talcott, 1964, *The Sosial System*, London: Collier-Macmillan & New York :The Free Press

ekonomi. Namun sering terjadi, realitas kekuatan ekonomi maupun kepentingan politik yang dominanlah yang mendikte penataan sosial dan pengarahannya budaya, termasuk melalui hukum dan perundang-undangan.

Melihat kenyataan ini membuktikan bahwa Pancasila sebagai inti budaya, termasuk budaya politik di Indonesia belum menjadi ideologi dominan, terutama dalam pembentukan hukum di zaman 'Now'.

### **Posisi Pancasila sebagai Basis Budaya Politik**

Pentingnya ideologi, seperti Pancasila dalam pembentukan hukum antara lain dikemukakan Glendon Schubert<sup>5</sup>, menegaskan bahwa setiap pilihan hukum dipengaruhi oleh pilihan-pilihan politik, yang didasari oleh pilihan-pilihan ideologi. Apakah dalam membuat hukum kita cukup hanya mengindahkan kepentingan-kepentingan politik dominan, terutama kepentingan elit politik. Ataukah, hukum memang di buat untuk menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat, yang akan dilayani oleh hukum tersebut.

Kebutuhan akan pentingnya ideologi yang merupakan sistemisasi dari kumpulan idealisme yang hidup dalam suatu bangsa, dalam mencapai tujuan bernegara, juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo<sup>6</sup>. Diperlukan komitmen moral yang harus diterjemahkan dalam sistem hukum satu negara. Untuk Indonesia, Pancasila dan konstitusi dalam hal ini UUD 1945, menunjukkan arah moral yang akan dicapai. Sistem hukum yang diciptakan dalam suatu negara tidak cukup hanya memenuhi keadilan dan kemanfaatan, namun harus membawa ke tujuan akhir suatu bangsa yaitu mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Hukum yang baik harus membahagiakan.

Posisi nilai yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila itulah yang oleh Hans Kelsen dirumuskan sebagai sebagai norma dasar, yang

---

<sup>5</sup> Schubert, Glendon, 1975, *Human Jurisprudence, Public Law as Political Science*, Honolulu: The University Press of Hawaii, hal 201

<sup>6</sup>Rahardjo, Satjipto, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Gentapress, hal 104

menjadi basis pembuatan hukum dalam suatu negara. Kelsen<sup>7</sup> menyebut norma dasar (*grundnorm*) merupakan rumusan yang disepakati para pendiri negara yang berisi nilai-nilai pokok, yang kemudian diterjemahkan dalam sistem hukum satu negara. Berdasarkan pada norma dasar inilah kemudian disusun konstitusi, dan peraturan hukum pelaksanaannya. Norma dasar merupakan postulat yang menjadi tujuan akhir atau rujukan tertinggi dari setiap norma dalam perundang-undangan.

Dalam tataran praktis, konsistensi norma dasar sebagai sumber hukum dan Undang-undang Dasar sebagai rujukan undang-undang, seperti yang dikemukakan oleh Pataniari Siahaan<sup>8</sup> akhirnya semua diserahkan pada undang-undang yang diberi mandat sesuai dengan Pasal 22A UUD 1945, untuk membentuk undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini UU Nomor 10 Tahun 2004, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Secara prosedural, penterjemahan atau pelaksanaan Pancasila, baik sebelum maupun sesudah Ketetapan MPRS XX/1966, sesudah dan sebelum terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2004, atau sesudah dan sebelum terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2011, ternyata tidak tegas, tidak seragam, dan tidak ada unsur kepastian. Ada yang menyebut penterjemahan atau pelaksanaan Pancasila dalam pertimbangan (konsiderans) dalam pasal. Ada yang menyebut penterjemahan atau pelaksanaan Pancasila baik dalam konsiderans maupun dalam pasal. Ada yang menyebut kata “Pancasila”, ada yang menyebut secara implisit “nilai-nilai” atau “sila Pancasila”, baik secara lengkap, atau satu atau beberapa sila saja. Ada juga yang tidak menyebut sama sekali baik istilah “Pancasila” maupun “nilai-nilai”, atau “sila-silanya”.

Kesimpulan semacam ini juga diambil oleh Sudjito<sup>9</sup> yang menyebut sebagian masyarakat Indonesia menganggap Pancasila

---

<sup>7</sup>Kelsen, Hans, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, 2006, Bandung : Nusa Media & Nuansa, hal 167

<sup>8</sup> Siahaan, Pataniari, 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta : Konpress hal 524.

<sup>9</sup> Jaya Baya, Sudjito : “Hukum Indonesia Wus Ngiwakake Nilai Pancasila”, majalah Jaya Baya, No 22 Minggu V Januari 2016.

sebagai dasar negara sudah tidak penting lagi. Bahkan pemerintah dan masyarakat seakan tidak menyadari bahwa semangat individualisme dan liberalisme terus menggerogoti nilai-nilai Pancasila.

### **Konsistensi pada Budaya Hukum**

Praktek pembuatan undang-undang dipotret dengan baik oleh KC Wheare<sup>10</sup> dalam bukunya *Modern Constitutions*, bahwa hukum atau undang-undang merupakan kompromi realitas politik. Wheare pada Tahun 1966 menegaskan bahwa *resultante* atau kesepakatan politik yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan situasi tertentu. Artinya hukum apapun bisa dibuat, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar, jika mayoritas kekuatan politik memang menghendaki. Berdasarkan hal tersebut, seolah-olah apapun yang diputuskan oleh pembuat undang-undang, harus diterima warga negara.

Hal ini juga diperkuat oleh Mahfud pada Tahun 2010, bahwa materi hukum atau perundang-undangan, tidak ada benar atau salah, baik atau buruk. Karena menurut Mahfud<sup>11</sup>, hukum merupakan produk politik. Namun dalam pembentukan hukum tidak cukup hanya membutuhkan kesepakatan politis, seperti teori Wheare, namun juga harus diperkuat dengan kajian teoretis atau akademis.

Bahkan menurut Lawrence M Friedman pada Tahun 2005<sup>12</sup> menyebut “*key components of the legal order, are substance, procedures, structures, and legal culture*”, artinya hukum bukan hanya terdiri dari norma atau substansi, namun juga ditentukan oleh prosedur, struktur, dan dibangun berdasarkan kultur suatu bangsa. Karenanya, hukum membutuhkan konsistensi sebuah sistem dan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan.

Jika suatu undang-undang ternyata substansinya tidak sejalan dengan cita hukum di masyarakat, maka telah terjadi inkonsistensi dalam proses pembuatan hukum atau undang-undang tersebut. Inilah yang kemudian secara teoretis bisa dibaca, telah terjadi politisasi

---

<sup>10</sup> KC Wheare, 1966, *Modern Constitution Second Edition*, London : Oxford University Press

<sup>11</sup> Mahfud MD, Moh, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, hal xv

<sup>12</sup> Lawrence M Friedman, 2005, “*COMING OF AGE: Law and Society Enters an Exclusive Club*”, *Annual Review of Law and Social Science*, Volume 1, University of Wisconsin

dalam pembentukan undang-undang, seperti yang terlihat pada kasus revisi UU MD3 kali ini.

Politisasi hukum adalah rekayasa atau akal-akalan dalam pembuatan dan penegakan hukum karena tekanan kekuatan kekuasaan ataupun bisnis, yang mengakibatkan tujuan hukum yang ideal tak terwujud. Tujuan hukum yang baik adalah menciptakan hukum yang adil, berkepastian, dan bermanfaat untuk orang banyak.

Menurut teori Nonet dan Selznick<sup>13</sup>, hukum responsif yang dibutuhkan rakyat umumnya tak akan bisa diwujudkan jika kultur hukum yang demokratis tak bisa diciptakan. Hukum akan gagal memotret cita-cita idealistis dari warga negara, tetapi hanya mengekspresikan kepentingan kekuasaan dan bisnis yang berperan sebagai kelompok penekan. Demokratis tidak dalam pengertian demokrasi formal dengan melihat kesepakatan di lembaga legislatif. Namun harus dilihat secara substansial, yakni jika rakyat terbanyak bisa mengekspresikan apa yang menjadi aspirasinya melalui lembaga pembentuk undang-undang secara formal.

## **Kesimpulan**

Praktek politik yang tidak mengindahkan basis budaya sebagai landasan nilai dalam mengambil kebijakan politik mempunyai kecenderungan makin kuat di zaman 'Now'. Kecenderungan ini bisa melahirkan politisasi dalam pembuatan undang undang. Politisasi hukum bisa dihindarkan jika pembuat Undang-undang yang mendapat amanah rakyat bisa mengesampingkan kepentingan pragmatisnya dan mengutamakan idealisme berdasarkan kepentingan yang lebih besar.

Pengawasan idealisme sebagai budaya politik dalam pembentukan Undang-undang juga bisa dilakukan masyarakat sipil yang punya kemampuan membaca dan berpartisipasi dalam proses legislasi, yang sering dilakukan secara tertutup, dan bersembunyi dari keterbukaan terhadap publik.

---

<sup>13</sup> Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition, Toward Reponsive Law*. New York: Harper & Row.

Benteng terakhir, jika undang-undang yang tidak aspiratif tersebut lolos di DPR, adalah Mahkamah Konstitusi yang bisa menguji konsisten terhadap budaya politik maupun budaya hukum yang sudah tersublimasi dalam norma dasar Pancasila, dan dirumuskan dalam politik hukum pada konsistensi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Daftar Pustaka

- Friedman, Lawrence M. 2005. “*COMING OF AGE: Law and Society Enters an Exclusive Club*”, Annual Review of Law and Social Science Vol(1). University of Wisconsin
- Jaya Baya, Sudjito. 2016. *Hukum Indonesia Wus Ngiwakake Nilai Pancasila*. No 22.
- Kelsen, Hans. 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media & Nuansa. Bandung.
- Kompas*. 4 Februari 2018, *PDI-P Bantah Penambahan Kursi Pimpinan DPR Sekadar Mengejar Jabatan*.
- Kompas*. 9 Februari 2018. *Agung Laksono Nilai Penambahan Kursi Pimpinan DPR-MPR untuk Tebus Dosa*.
- Mahfud MD, Moh. 2010. “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”. Penerbit Rajawali Press.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip. 1978. *Law and Society in Transition, Toward Reponsive Law*. Penerbit Harper & Row. New York
- Parsons, Talcott. 1964, *The Social System*, Penerbit The Free Press. London: Collier-Macmillan dan New York.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Penerbit Gentapress. Yogyakarta.
- Sadono, Bambang. 23 Januari 2017. *Pragmatisme dalam Pembentukan UU*. Kompas. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Schubert, Glendon. 1975. *Human Jurisprudence, Public Law as Political Science*. Penerbit The University Press of Hawaii. Honolulu.
- Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Penerbit Konpress. Jakarta.
- Wheare, Kenneth C. 1966. *Modern Constitution Second Edition*. Penerbit Oxford University Press. London.



# MELIHAT PERADABAN INDONESIA MENGHADAPI TANTANGAN ABAD 21 PERSPEKTIF PANCASILA

(Esai Sederhana Perspektif Kebudayaan dan Pancasila)

N. Syamsuddin Ch. Haesy

## Abstrak

Dalam perspektif Pancasila, Peradaban Indonesia sebagai puncak perkembangan kebudayaan nasional ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu: Penegakan hukum berbasis keadilan; Peradaban berbasis kebudayaan (integralitas artistika, estetika, dan etika); kedaulatan insaniah (kemanusiaan) berbasis integralitas cinta dan kasih sayang. Proses perubahan kehidupan bangsa selama ini belum merupakan perubahan yang dilandasi strategi kebudayaan dengan semestinya. Semua masih berlangsung untuk dan atas nama politik, ekonomi, dan sosial yang elementer. Kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya sehari sejak Indonesia Merdeka, kita sudah mempunyai Undang-undang Kebudayaan yang kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks inilah mestinya seluruh penyelenggara Negara menangkap esensi kebudayaan yang sejati, sehingga kita dapat tegas menyatakan, bahwa kebudayaan sebagai patron dan jalan utama pembangunan bangsa, yang mencegah terjadinya proses reduksi budaya. Karena reduksi budaya dalam pembangunan nasional, akan menghancurkan tatanan hidup bangsa ini. Pancasila bagaimanapun proses perumusannya sebagai dasar idiologis bangsa Indonesia sebagai traktat kebudayaan, memandu kita menghampiri peradaban masa depan dengan kelenturan khas Indonesia. Untuk mewujudkan cita bersama: Negara berdaulat, Ekonomi mandiri, dan Peradaban unggul kala seabad Indonesia Merdeka, semua elemen masyarakat, negara dan bangsa wajib melakukan konsolidasi sebagai kerja baik yang tak boleh ditunda, walau hanya sekejap. Peradaban Indonesia masa depan terkait dengan perkembangan nilai kecerdasan dan kearifan budaya nasional di masa lalu dan interaksi nilai-nilai kecerdasan budaya tersebut dengan perkembangan budaya global yang tak lagi sama dengan perkembangan budaya agraris, industri dan informasi. Keseluruhan nilai budaya masa transisi tersebut berhubungan langsung dan tidak langsung dengan perkembangan politik nasional. Dalam satu tarikan nafas, pengabaian etika dan budaya dalam praktik politik mempengaruhi perkembangan peradaban Indonesia ke masa depan. Konsistensi menerapkan Pancasila sebagai landasan idiil dan ideologis bangsa dengan keberanian untuk mengelola negara yang tidak membiarkan terjadinya friksi dan konflik

dalam tataran gagasan dan praktik politik kebangsaan, akan memungkinkan bangsa Indonesia siap menghadapi tantangan Abad ke 21.

**Kata kunci :** Peradaban Indonesia, Pancasila sebagai Landasan idiil, dan politik nasional.

### **Abstract**

*In the perspective of Pancasila, the civilization of Indonesia as the peak of the development of national culture has been supported by three main pillars, namely: law enforcement to be based on justice; civilization to be based on culture (integrity of artistic, esthetics, and ethics); sovereignty of humans (humanity) to be based on integrity of love and compassion. The process of change in the life of the nation hitherto has yet to become a change which is based on cultural strategy as it should be. All are still proceeding for and on behalf of elementary politics, economy, and social interest. We have never realized that indeed one day as of Indonesia's Independence, we already have a cultural law which we name the Constitution of 1945. It should be in this context that all the State performers should understand the true essence of culture, so that we can firmly state, that it is culture as patron and main road of development of the nation, which prevents the occurrence of the process of reduction of culture, because the reduction of culture in national development will destroy the order of life of this nation. Pancasila despite its howsoever formulation process as an ideological base of the Indonesian nation as a cultural tractate, guides us to encounter the future civilization with flexibility which is typical Indonesia. In order to manifest our joint aspiration: a sovereign State, an autonomous economy, and a superior civilization by the time of one century independent Indonesia, all elements of the society, the state and the nation are obliged to conduct consolidation as good work which shall not be delayed, although just for a moment. The future civilization of Indonesia is related to the development of the value of intelligence and wisdom of the national culture of the past and interaction of values of that cultural intelligence with the development of global culture which is no longer similar with the development of the agrarian, industrial and informational culture. The whole cultural values of that transition period are directly and in-directly linked with the development of national politics. In one breath, the neglect of ethics and culture in political practice would affect the development of Indonesia's civilization towards the future. The consistency of implementation of Pancasila as an ideal and ideological base of the nation with the courage to manage the state which would not allow the occurrence of frictions and conflicts at the platform of national ideas and political practice, will enable the Indonesian nation to be ready to encounter the challenge of the 21<sup>st</sup> century.*

**Keywords:** *the civilization of Indonesia, Pancasila as an ideal base, and national politics.*

## Pendahuluan

Indonesia adalah keberagaman dan keberbagaian budaya (multikulturalisma) yang menyatu dan terintegrasi dalam satu peradaban yang final, seperti tercermin dalam Pancasila. Peradaban yang dilandasi dengan pondasi kokoh religiusitas (Ketuhanan Yang Maha Esa), humanitas (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), populisma berkeadaban (Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), dan egaliterianisme kesetaraan berbasis keadilan (Keadilan Sosial).

Beranjak dari pandangan demikian, Peradaban Indonesia sebagai puncak perkembangan kebudayaan nasional ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu: Penegakan hukum berbasis keadilan; Peradaban berbasis kebudayaan (integralitas artistika, estetika, dan etika); Kedaulatan insaniah (kemanusiaan) berbasis integralitas cinta dan kasih sayang.

Beranjak dari pandangan ini, perlu kesepakatan kolektif untuk menyatakan, bahwa kualitas dan kemajuan suatu bangsa tak pernah ditentukan oleh politik dan ekonomi praktis yang terlalu banyak berkemul dengan beragam kepentingan sesaat. Penentu utama kualitas dan kemajuan sebuah bangsa adalah kebudayaannya.

Terutama, ketika kita hendak melihat parameter kemajuan bangsa adalah kedaulatan politik yang nyata berintegritas, kemandirian ekonomi berdaya saing prima, dan peradaban dengan nilai-nilai kemanusiaan yang unggul. Parameter tersebut saya sebut sebagai parameter budaya, karena pencapaiannya terkait dengan : dayakarsa (*inspiration*) sebagai energi utama bagi bertumbuhnya dayacipta (*creativity*), dayakarya (*inovation*). Nilai-nilai dasar yang dilahirkan oleh ketiga parameter, itu merupakan kekuatan pendorong utama (*prime driving forces*) pergerakan bangsa mencapai posisi unggul di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

Pandangan ini berangkat dari dialektika pemikiran Aristoteles dan Plato (dari sudut pandang empirisma dan unempirisma) dalam memahami kehidupan manusia secara asasi, yang melihat peradaban berbasis kebudayaan sebagai proses dinamis yang mempertemukan manusia dengan nilai-nilai dasar kehidupan empiriknya. Pertemuan ini

yang memungkinkan manusia berkembang dari semula hanya bertumpu pada kemampuannya mengelola *intuitive reason*, mendeskripsikannya *human imagination* (imajinasi kemanusiaannya), untuk selanjutnya menguji imajinasi itu dengan *fundamental focal concern* kehidupan manusia atau kecerdasan budaya (edukasi, spiritualisma, kemampuan ekonomi, dan tanggungjawab lingkungan alam dan sosial).

Kecerdasan budaya mendorong manusia memadukan kekuatan pemikiran, naluri, rasa, dan indria secara utuh dan harmonis. Itulah yang semestinya menjadi landasan pokok kerangka idealistika praktik politik, ekonomi, sosial, sains, teknologi, spiritualitas atau religiusitas. Kerangka dimensional yang menyatukan dimensi fisik dan metafisik, yang harus dijelmakan dalam kehidupan empiris, yang boleh disebut sebagai realitas kehidupan pertama.

## **Permasalahan**

Melihat peradaban Indonesia dari perspektif Pancasila, semestinya bertolak dari sudut pandang kecerdasan budaya demikian, sehingga tidak lari dari tugas utama pengelolaan bangsa, sebagaimana tercermin dalam konstitusi utama negara. Yaitu: Meningkatkan kecerdasan bangsa, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, melindungi segenap warga bangsa dari berbagai ancaman bangsa-bangsa lain (pertahanan dan keamanan) dan kemampuan mengelola peran dan fungsi bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Tentu, sesuai dengan perkembangan peradaban dan kemajuan dunia.

Mengurut kembali perjalanan bangsa Indonesia yang tak pernah henti gaduh sejak awal kemerdekaan sampai kini dari perspektif ini, kita melihat sumber masalahnya terletak pada kualitas dan kapasitas penyelenggara negara yang belum sepenuhnya mampu mengelola dan menghimpun dimensi budaya dalam keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Padahal, Indonesia mempunyai dimensi budaya dalam bentuk kearifan dan kecerdasan lokal dari Aceh sampai Papua yang memberikan modal budaya sangat besar, sebagai energi kebudayaan yang selalu relevan dan terbarukan, serta sesuai dengan perkembangan zaman. Kecerdasan dan kearifan

lokal bangsa ini tak berhenti hanya pada era agraris dan industri di hari kemarin, tak juga tidak bertambah pada era informasi digital (sibernetik) kini, tetapi terus bergerak ke era konseptual dengan beragam kemungkinan melakukan inovasi dan invensi untuk menjawab kuantum budaya.

Proses perubahan bangsa ini, belum merupakan perubahan yang dilandasi strategi kebudayaan semestinya. Semua masih berlangsung untuk dan atas nama politik, ekonomi, dan sosial elementer. Apalagi ketika sejak 72 tahun terakhir, terjadi distorsi pemahaman kebudayaan yang mereduksi nilai-nilai budaya di dalamnya, hanya menjadi sebatas seni dan ekspresi adat istiadat. Kebudayaan hanya diintip dari jendela ekonomi, politik, sosial, bahkan dari lubang kecil industri dan teknologi informasi semata. Kita tidak pernah menyadari, bahwa sesungguhnya, sehari sejak Indonesia Merdeka, kita sudah mempunyai Undang Undang Kebudayaan yang kita sebut sebagai Undang Undang Dasar 1945, yang kemudian hendak direduksi dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

## **Pembahasan**

Dengan diundangkannya Undang-undang ini seolah-olah kita telah menyadari, “bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Lantas dengan sadar menimbang, “bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.”

Dalam konteks inilah mestinya, seluruh penyelenggara negara menangkap esensi kebudayaan yang sejati, sehingga kita dapat tegas menyatakan, bahwa kebudayaan sebagai patron dan jalan utama pembangunan bangsa, yang mencegah terjadinya proses reduksi

budaya. Karena reduksi budaya dalam pembangunan nasional, akan menghancurkan tatanan hidup bangsa ini. Adalah fakta, bahwa para pembuat Undang Undang Pemajuan Kebudayaan, justru mereduksi budaya secara legal, seperti tercermin dalam Bab I Ketentuan Umum. Undang-undang ini membatasi kebudayaan hanya sebagai “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.” Bukan sebagai nilai dasar peradaban manusia Indonesia sebagai puncak pencapaian kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (NRI). Karenanya, pengertian tersebut tidak selaras dengan uraian berikutnya, “Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.” Selebihnya, budaya lebih diposisikan sebagai obyek dan bukan subyek dalam keseluruhan konteks pembangunan nasional.

### **Faktor-Faktor Peruntuh Bangsa**

Indonesia lebih memerlukan formula budaya melalui strategi kebudayaan yang tepat untuk menjadikan dirinya sebagai *emerging nation*, bukan sekadar pokok-pokok pikiran kebudayaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. Karena jauh sebelum Republik Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, telah tumbuh berkembang pemikiran dan kesadaran kebangsaan (1905), yang kemudian menjelma dalam Kongres Pemuda dan memberikan modal dasar budaya, melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Proses perumusan kesepakatan Sumpah Pemuda memberikan gambaran, bagaimana kekayaan budaya (kearifan dan kecerdasan lokal, seni, serta cepatnya perkembangan *sains* dan teknologi) mesti dikelola serempak dan serentak, dalam komitmen Indonesia (satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa).

Dalam konteks itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, perlu mengambil inisiatif menyelenggarakan dialog *scenario plan* kebudayaan untuk merumuskan *visioneering* kebangsaan. Khususnya untuk menentukan pilihan perubahan bangsa ini ke depan, setidaknya sampai 2045, bertepatan dengan 1 Abad Indonesia Merdeka. Suatu *scenario plan* yang akan menentukan

pilihan model perubahan yang dikehendaki: perubahan cepat (revolusi), perubahan lambat (reformasi yang riskan dengan deformasi), atau perubahan dinamis (transformasi). Bila tidak, arus perubahan buruk akan membuat bangsa ini nelangsa dan sansai.

Strategi Kebudayaan diperlukan, karena kita akan menghadapi suatu masa yang nyaris tak menentu. Beberapa futuris berbakal pengalaman berbagai bangsa di dunia, telah mengisyaratkan persoalan asasi yang bakal terjadi. Jared Diamond (2003) menyebut beberapa faktor yang meruntuhkan dan mendorong maju bangsa-bangsa di dunia, semuanya terkait dengan dimensi budaya.

Pertama, Dampak Manusia terhadap Lingkungan. Salah satu yang paling dahsyat sebagai faktor peruntuh adalah *deforestasi* yang sekaligus terkait dengan pengabaian atas kendali pertambangan yang jauh dari praktik *best practise mining*. Pandangan Diamond, ini sudah terisyaratkan sejak dalam salah satu rumpaka Sunda, bahwa faktor peruntuh itu adalah : *gunung-gunung dibarubuh* (bad mining practices), *tatangalan dituaran* (deforestasi), *cai caah babanjiran* (flash flood), *bhuwana marudah montah* (hot mudflow). Bangsa Viking mengalami persoalan ini. Setarikan nafas, terkait hal ini adalah perubahan iklim yang mengubah sosio habitus dan akhirnya mengubah pola tatanan hidup yang dengan sendirinya berdampak pada perubahan perilaku budaya. Dalam adat Minangkabau dikemukakan, *Panakiak pisau sirauik, ambiak galah batang lintabuang, silodang ambiak ka niru, satitiak jadikan lauik, nan sakapa jadikan gunuang, alam takambang jadi guru*. Tradisi budaya terbentuk melalui proses interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, ketentuan alam (sunnatullah-natural law) berkembang menjadi guru.

Kedua, Menjauhnya Jiran yang Ramah. Faktor peruntuh eksistensi bangsa ini dialami oleh The Greenlanders yang semula mengandalkan perdagangan antara bangsa serumpun atau serantau (sekawasan). Ketika laut dan selat yang memisahkan dan bukan menyatukan mereka mulai ramai dilayari kapal-kapal dagang internasional, mulai terjadi friksi dan akhirnya perseteruan (konflik) kepentingan, yang semula dipicu oleh hal-hal yang kemudian

dianggap asasi, seperti klaim batas wilayah negara sampai klaim atas produk budaya. Konflik berkembang menjadi konfrontasi dan perang. Masing-masing jiran menghindari kesepakatan untuk memelihara kawasan bersama. Indonesia yang menjadi *core* di kawasan Nusantara, akan riskan menghadapi hal ini, terutama dalam konteks perairan Selat Melaka, Laut China Selatan, dan kawasan Pasifik. Terutama karena bersinggungan langsung dengan negara-negara jiran, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Neugini, dan Australia. Konsep tradisi genuin yang tumbuh sebagai kecerdasan dan kearifan budaya daerah, menawarkan cara yang elegan dalam hidup berjiran. Antara lain, tercermin dalam adat Bugis: *Pada idi pada elo sipatua sipatokong*, kesadaran untuk saling membantu sesama, mengambil inisiatif sebagai subyek dalam mewujudkan kerukunan kolektif. Caranya, seperti tercermin dalam budaya Sunda: *nu jauh urang deukeutkeun, geus deukeut urang layeutkeun, geus layeut urang paheutkeun, geus paheut silihwangikeun* (menghimpun yang terserak, mendekatkan yang jauh, mengkaribkan yang dekat, mengukuhkan komitmen kolektif untuk saling memuliakan). Bertetangga baik tanpa kehilangan integritas dan elegan, seperti tercermin dalam syair dolanan anak Madura dengan berasal pada kepompong (*Kertanoker*):

*Kertanoker, dimma bara' dimma temor / Ker-tanoker, sapa  
nyapa kaadha' lanjjang omor*

*Ker-tanoker jambuna massa' saseba' / Ker-tanoker lagguna  
nyapa kaadha'*

*Ker-tanoker jambuna massa' sapennay / Ker-tanoker lagguna  
nyapa e songay*

*Ker-tanoker jambuna massa' sacorong / Ker-tanoker lagguna  
nyapa e lorong*

*Ker-tanoker jambuna massa' pagar / Ker-tanoker lagguna  
nyapa e langgar*

*(Ker-tanoker dimana barat, dimana timur / ker-tanoker, siapa  
yang menyapa duluan akan panjang umur*

*Ker-tanoker ada jambu masak separuh / Bila tak bertegur sapa,  
besok menyapa duluan*

*Ker-tanoker ada jambu masak sekeranjang / Boleh bertengkar  
besok menyapa di sendang*



*Ker-tanoker ada jambu masak setakaran / Boleh bertengkar  
besok menyapa di jalan*

*Ker-tanoker ada jambu masak di pagar / Boleh bertengkar  
besok menyapa di langgar)*

Ketiga, Tidak Berfungsinya Nilai Budaya dalam Praktik Politik.

Faktor peruntuh suatu bangsa yang diisyaratkan Diamond ini, adalah ketika praktik politik yang tercermin dalam kebijakan nasional pembangunan (secara multidimensi) mengabaikan pembangunan dimensi kedalaman manusia (agama, tradisi, dan keadaban moralitas), termasuk pembiaran friksi sosial berpangkal suku, agama, ras, antargolongan disertai penegakan hukum yang lemah atas setiap pelanggar komitmen persatuan dan kebersatuan, baik dalam konteks domestik maupun kawasan. Dimensi budaya Indonesia, mempunyai cara yang cukup untuk mengatasi hal ini. Dalam konteks ini, kecerdasan dan kearifan budaya lokal Indonesia, memberi isyarat penting tentang kekerasan dan anarkisme sebagai peradaban purba yang tak boleh dibiarkan dan dihidup-hidupkan. Penganjur, pemancing, dan pelaku kekerasan adalah bagian masyarakat manusia yang masih tertinggal di masa lalu, di era peradaban *pra agraris*. Era, ketika *ashobiyah* alias solidaritas dan soliditas komunal dipandang sebagai ekspresi utama solidaritas dan soliditas sosial. Pengabaian atas pembangunan mental spiritual bermuara pada pembangunan karakter kebangsaan di era siberetik kini, hanya akan mendorong eksplotasi narsisme dan ‘menghina akal budi,’ yang memanjakan *suprémé fantacia*. Suatu laku hidup yang dalam kecerdasan dan kearifan lokal masyarakat Sasak, disebut sebagai *ngumbang maraq pepadu peta tanding* (jagoan mencari lawan), *kepeng satus jari satak* (melebih-lebihkan persoalan), *manis-manis tunduran gunung* (nampak ideal, meskipun tak sesuai kenyataan). Membiarkan friksi komunal berkembang menjadi konflik sosial, sama halnya dengan membiarkan *maraq budun angsoh nat* (bisul membawa nanah) yang sewaktu-waktu akan pecah, berdarah, dan ngilu. Apalagi, bila hal itu dilakukan hanya untuk menutupi ketidakmampuan memuliakan rakyat, *maraq biwih baun nyinggaq*. Hanya melampiasikan syahwat politik, *maraq minyak betempuh aiq* (ibarat minyak bertemu air).

Pandangan di atas hanya dengan sedikit menganggit kecerdasan dan kearifan lokal Indonesia. Kita dapat selalu optimistik mempertahankan dan mengembangkan peradaban Indonesia, sepanjang Pancasila sebagai traktat kebudayaan Indonesia dimanifestasikan secara dinamis dan kontemporer, mengikuti perkembangan peradaban dunia. Termasuk dalam menyikapi secara khas perubahan terminologi globalisasi dan glocalisasi. Dalam konteks Globalisasi yang diisyaratkan George Soros sebagai pengembangan kekuasaan keuangan global dan meningkatnya dominasi pertumbuhan korporasi transnasional atas ekonomi nasional. Akan halnya Glocalisasi diisyaratkan Philip Kotler sebagai strategi penetrasi *brand* internasional terkenal ke negara lain dengan adaptasi lokal yang sesuai. Baik globalisasi dan glocalisasi akan berdampak pada perubahan orientasi budaya, dan kelak bermuara pada perubahan peradaban.

### **Pancasila di Hadapan Tantangan Abad 21**

Pancasila bagaimanapun proses perumusannya sebagai dasar idiologis bangsa Indonesia sebagai traktat kebudayaan, memandu kita menghampiri peradaban masa depan dengan kelenturan khas Indonesia. Baik dalam konteks gramatika maupun filosofi. Empat sila di dalam rumusan Pancasila diawali dengan kalimat bentukan berawalan *ke* yang menunjukkan komitmen final pemahaman integral, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, dan Keadilan. Satu sila lainnya, menggunakan awalan *per* yang menunjukkan pluralisma dan multikulturalisme. Pancasila dengan memandu kita memahami esensi sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*, tidak bertumpu pada dimensi *bhinneka* dan *kebhinnekaan*, melainkan kepada *tunggal ika* dan *ketunggal-ikaan*. Inilah panduan budaya yang semestinya menjadi titian kita untuk memahami realitas dan dimensi kedalaman insaniah sebagai bangsa yang terintegrasi dalam spiritualitas budaya, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan, sekaligus mempunyai otonomi khas yang terbuka dalam memandang realitas nyata pluralisma dan multikulturalisma dalam konteks kebangsaan.

Beranjak dari pandangan di atas, Pancasila merupakan panduan utama untuk memahami pilihan strategis penyelenggaraan negara dan

pembangunan bangsa ke depan, berbasis kedalaman insaniah, dan karenanya, seluruh warga bangsa merupakan modal insan, tak semata-mata sumberdaya manusia. Artinya, setiap manusia Indonesia merupakan fokus utama seluruh aspek pembangunan nasional. Kualifikasinya, jelas: insan religius, manusiawi beradab, patria, demokratis, dan adil. Kualifikasi insaniah Indonesia ini dalam konteks Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, semestinya mampu memformulasi prinsip demokrasi Indonesia sebagai cara mencapai harmoni kebangsaan. Tidak semata-mata sebagai alasan untuk memperebutkan kekuasaan. Demokrasi berbasis musyawarah dan mufakat. Demokrasi yang dalam kecerdasan budaya Minahasa, disebut *Sa Cita Esa, Telu Cita. Sa Cita Telu, Esa Cita* (Bila kita bersatu, tiga jualah kita. Kendati kita tiga, bersatu jualah kita). Bila nilai budaya ini berlaku, tak perlu lagi para *walak* dan *ukung* (para petinggi negeri dan partai politik) bersilang sengkabut, *pabaliut* (simpang siur) oleh kuatnya kepentingan dan kegemaran mem-permainkan nasib rakyat yang sesungguhnya. Kesadaran ini yang semestinya mendorong praktik politik beradab, walaupun dalam perbedaan politik (praktik dan pragmatika) tetap solid: *Maan matulengka ululoan taan maleole osa*. (Meskipun tungku belanga terbalik, harus solid).

Pancasila juga memandu memahami realitas kita sebagai kepulauan nyiur, suatu negeri yang seharusnya menjadi tempat bertumbuhnya begitu banyak nyiur yang padanya melekat perlambang manfaat yang paripurna. Dari nyiur yang baik akan diperoleh minyak kelapa terbaik pula, yang dalam kecerdasan budaya Aceh disebut *pakiban ue meunan minyeuk*. Bila partai politik hendak diamsalkan sebagai nyiur, maka partai politik sebagai institusi sosial dengan fungsi utama sebagai wadah kaderisasi negarawan (bukan sekadar politisi), mestinya sadar betul untuk menegakkan etika (adat-perangai) dan konstitusi dalam setarikan nafas. Karena dengan demikian, partai politik akan menjadi pilar-pilar atau tiang sangga peradaban unggul Indonesia kelak, yang di dalamnya budaya dan hukum menjadi ruh dan selongsongnya. Bila tidak, akan berlaku *Adat meukoh reumbong, hukom meukoh pureh. Adat jeub beurangho takong, hukom hanyeut*

*talangeuh*. Adat berporong rebung, hukum berpotong lidi. Lalu ramai-ramai berpikir: etika boleh dihindari, karena hukum tidak bisa dibantah. Padahal, keduanya tak terpisahkan, karena hukum bersendi etika. *Adat ngon hukom lage zat ngon sifeut*, etika dan hukum laksana zat dengan sifat. Di sinilah fatsoen politik menjadi penting maknanya. Konstitusi negara, konstitusi partai, *fatsoen* politik, dan etika sosial, etika berbangsa ada dan diadakan karena diperlukan untuk mengelola bangsa agar lebih tertib.

Selalu ada wahana dan fungsi yang saling bertaut satu dengan kepemimpinan. *Umong meuateung, ureng meupeutua. Rumah meuadat, pukat meukaja* (Sawah berpematang, orang berpemimpin, rumah bertiang, pukat berkaja). Selalu harus ada pemimpin supaya tujuan partai, masyarakat, negara dan bangsa mampu diwujudkan. Pemimpin yang baik diperlukan untuk menghidupkan etika politik, yang ketika hilang, susah mencarinya. *Matee aneuk meupat jeurat, matee adat ta pat mita* (mati anak ada makamnya, hilang budaya ke mana mau mencari (ganti)?).

Untuk mewujudkan cita bersama: Negara berdaulat, Ekonomi mandiri, dan Peradaban unggul kala seabad Indonesia Merdeka, semua elemen masyarakat, negara dan bangsa wajib melakukan konsolidasi sebagai kerja baik yang tak boleh ditunda, walau hanya sekejap. Bila tidak akan tersalip oleh yang buruk-buruk, seperti terungkap dalam kecerdasan budaya Minangkabau: *Karajo biekek elok dilakeh-lakehkan, jangan diselo dek nana buruak*. Konsolidasi penting untuk eksistensi bangsa di masa depan, dan untuk itu warga bangsa ini perlu bersumpah, laksana saudara-saudara di Aceh: “*Nibak putéh mata get putéh tulueng*” (Daripada putih mata, lebih baik putih tulang).

Sumpah anak bangsa ini penting, karena kita akan menghadapi tantangan millenium baru ke depan. Menurut James Martin (2007), kita akan menghadapi 17 Tantangan Besar Abad ke 21, yaitu perubahan cepat dari evolusi alamiah menjadi revolusi oleh tangan manusia (sains, teknologi, ekonomi dan politik). Tantangan-tantangan itu, menuntut kita, generasi kini, meninggalkan *legacy*: mewujudkan Pancasila sebagai landasan solusi menghadapi tantangan besar itu.

Religiusitas Pancasila dan kesadaran kemanusiaan yang beradab, memodali kaum muda untuk menghadapi tantangan:

- 1) Menyelamatkan Bumi, sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia untuk mengelola Bumi sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi, dan kebijakan yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Khususnya dalam merespon perubahan iklim.
- 2) Membalikkan Kemiskinan, dengan melakukan perubahan kebijakan yang mampu menghambat kesenjangan ekonomi baik secara domestik maupun global, dengan prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim dan dampaknya (kehidupan sosial yang brutal).
- 3) Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk, dengan cara-cara yang lebih manusiawi dalam menjamin kesehatan kaum perempuan dan anak-anak, dengan prioritas pada pengendalian kematian ibu dan anak pada proses persalinan, bermuara pada peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) yang terkait langsung dengan populasi.
- 4) Mengembangkan Gaya Hidup Lestari dengan berbagai kebijakan pengendalian sumberdaya alam secara efektif dan efisien dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas hidup lebih tinggi tanpa merusak lingkungan.
- 5) Mencegah Perang All-Out di abad ke-21 yang dapat mengakhiri segalanya, dengan konsisten menerapkan kebijakan manusiawi dan berkeadilan dalam tata kelola nuklir, serta pengawasan senjata nuklir dan biologi atau senjata pemusnah massal lainnya.
- 6) Tata Kelola Globalisme Efektif dengan kebijakan negara yang jelas dan bertanggungjawab atas penggunaan bandwidth tanpa serakah, sekaligus merancang globalisme yang menopang pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan atas budaya lokal. Menyerasikan secara tepat antara budaya global dan budaya. Sekaligus membantu negara-negara gagal menjadi negara berkembang.

- 7) Melindungi Biosfer untuk mencegah hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, yang kepunahannya berdampak langsung pada kehidupan umat manusia dan bangsa. Termasuk membangun kesepakatan antar negara dalam suatu wilayah mengurai kepadatan spesies yang terancam punah. Selaras dengan hal tersebut, memelihara kawasan perlindungan laut yang dirancang dengan penegakan hukum yang tepat.
- 8) Mencegah Terorisme dengan membangun komitmen kolektif pengendalian industri senjata pemusnah massal yang semakin murah dan mudah diakses. Prioritas utamanya adalah peningkatan kualitas kesejahteraan dan keadilan untuk mencegah orang ingin menjadi teroris dan menghidupkan budaya toleransi.
- 9) Mengembangkan dan memanfaatkan secara tepat Budidaya Kreativitas-Teknologi yang mendorong inovasi dan invensi, dengan mewadahi generasi muda menjadi entrepreneur berbasis kunggulan dan kemajuan teknologi informasi.
- 10) Menaklukan beragam penyakit dengan menghambat epidemi (penyebaran) penyakit menular cepat dan bisa membunuh jutaan orang, seperti yang telah terjadi berkali-kali dalam sejarah.
- 11) Memperluas Potensi Manusia sebagai modal insan (human investment dan human capital) yang tak lagi hanya sebagai human resources melalui kebijakan tepat tentang man power plan terintegrasi dalam suatu negara. Titik beratnya pada upaya terencana mengembangkan kemampuan yang tersembunyi di dalam diri setiap orang dengan memanfaatkan teknologi hebat yang mempercepat potensi belajar.
- 12) Menanggulangi Singularitas melalui kebijakan pengendalian dan harmonisasi kemampuan berbasis kecerdasan manusia dengan peningkatan kemampuan kecerdasan komputer generasi terbaru. Setarikan nafas mengembangkan kebijakan yang menghidupkan nilai kemanusiaan yang mampu menemukan dan menguasai cara mempercepat perubahan (transformasi) yang terkendali;
- 13) Menghadapi Resiko Eksistensial dengan pengendalian ketat berbagai kemungkinan tumbuhnya inisiatif berdampak pemusnahan manusia, seperti pelepasan patogen yang dimodifikasi secara genetik.

- 14) Menjelajahi Transhumanisme dengan berbagai kebijakan politik nasional untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dengan kecerdasan budaya, untuk menahan proses sosial dan politik yang dapat mengubah manusia secara radikal. Sejalan dengan itu, secara paralel mesti dikembangkan kebijakan pengendalian teknologi yang memungkinkan manusia untuk hidup lebih lama, belajar lebih banyak, dan mendapatkan kemampuan untuk terhubung ke objek nanoteknologi. Tanpa pengendalian melalui budaya, transhumanisme akan sangat kontroversial, karena akan menimbulkan konflik argumen etika utama yang dapat mendorong dehumanitas.
- 15) Merencanakan Peradaban Lanjutan dengan kebijakan khas untuk mencegah transhumanisme dan singularitas, berubah lebih ekstrem, dengan menentukan "Peradaban macam apa yang akan kita bangun untuk masa depan?"
- 16) Mengembangkan Pemodelan Sistem Planet, karena kita perlu memastikan bahwa kita tidak melampaui titik di mana pemanasan global tidak dapat dibalik, dengan pemantauan tepat sains yang terkait dengan sistem bumi;
- 17) Menjembatani Kesenjangan antara kecerdasan budaya global dan lokal, serta kearifan budaya lokal yang membentuk kepribadian bangsa. Dimulai dengan mengatasi kesenjangan antara keahlian dan kearifan kita di tengah perkembangan cepat sains dan teknologi, karena terlalu banyak kebijakan yang kurang tepat, termasuk dalam menyikapi perkembangan konsumsi dan tata manfaat gadget yang lebih cepat, lebih murah, lebih pintar, lebih efisien yang akan meningkatkan keuntungan bagi masyarakat, negara dan bangsa.

## **Penutup**

Peradaban Indonesia masa depan terkait dengan perkembangan nilai kecerdasan dan kearifan budaya nasional di masa lalu dan interaksi nilai-nilai kecerdasan budaya tersebut dengan perkembangan budaya global yang tak lagi sama dengan perkembangan budaya

agraris, industri dan informasi. Keseluruhan nilai budaya masa transisi tersebut berhubungan langsung dan tidak langsung dengan perkembangan politik nasional. Dalam satu tarikan nafas, pengabaikan etika dan budaya dalam praktik politik mempengaruhi perkembangan peradaban Indonesia ke masa depan.

Pancasila sebagai traktat kebudayaan mempunyai relevansi kontemporer dengan perkembangan peradaban ke depan, termasuk dalam menyikapi perkembangan arus besar pusan globalisasi dan glokalisasi yang berdampak pada pencapaian kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Penerapan Pancasila secara tepat, konsisten, dan konsekuen tanpa harus terlalu banyak ditafsirkan ulang, akan memberikan dampak baik bagi upaya tata kelola negara dan bangsa. Khususnya dalam memilih demokrasi sebagai cara mencapai harmoni kebangsaan.

Konsistensi menerapkan Pancasila sebagai landasan idiil dan ideologi bangsa dengan keberanian untuk mengelola negara yang tidak membiarkan terjadinya friksi dan konflik dalam tataran gagasan dan praktik politik kebangsaan, akan memungkinkan bangsa Indonesia siap menghadap tantangan Abad ke 21. Persoalan akan menjadi lain, ketika kita abai melihat konteks Pancasila dengan pilihan-pilihan perubahan yang akan dilakukan, khususnya untuk menyambut Seabad Indonesia Merdeka.

### **Daftar Pustaka**

- Diamond, Jared. *Why Do Societies Collapse?*, TED, Februari 2003.
- Haesy, N. Syamsuddin Ch. Beberapa artikel lepas, 2011 – 2017.
- Haesy, N. Syamsuddin Ch. Indigostar, Salamadani Publishing House, 2011.
- Haesy, N. Syamsuddin Ch. Platinum Track, Salamadani & Inco, 2011.
- Martin, James. *The Meaning of 21th Century*, Uxford University, Januari, 2007.



# STRATEGI KEBUDAYAAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA

Hajriyanto Y. Thohari

## Abstrak

Dinamika kebudayaan bangsa Indonesia paskakolonial dapat dikatakan berjalan lamban. Masalah-masalah yang diwarisi setelah proklamasi kemerdekaan tidak tertuntaskan sepenuhnya, seperti keterbelakangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Akar persoalannya terletak pada proses akulturasi yang tidak tuntas. Ini berbeda dengan masa-masa kekuasaan Hindu dan Islam, di mana masyarakat Nusantara mampu melakukan akulturasi kebudayaan secara cepat. Kehadiran Hindu dan Islam mampu mengubah wajah kebudayaan Nusantara dan menggesernya dari era pra sejarah ke masa sejarah. Berkat akulturasi maka terjadilah lompatan tinggi kebudayaan. Dengan melihat perjalanan sejarah ini kita dapat menentukan strategi budaya yang tepat dalam rangka membangun masa depan bangsa. Dibutuhkan sikap mental yang terbuka, mau menerima kebudayaan Barat tertentu yang tidak menghapus identitas Nusantara. Proses untuk itu disebut dengan akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan terbukti ampuh meningkatkan kualitas kebudayaan Nusantara, mampu membangkitkan kedaulatan bangsa, dan mampu membuktikan adanya transformasi kebudayaan dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Hal itu terbukti ketika masyarakat Nusantara dengan lapang dada menerima kebudayaan Hindu dan Islam.

**Kata kunci:** akulturasi kebudayaan, strategi kebudayaan, transformasi kebudayaan.

## Abstract

*Cultural dynamics in Indonesia have been progressing slowly since post-colonial era. Inherited problems since the independence have been solved, such as backwardness in science, technology and economics. The main problem lies in an incomplete process in acculturation. This is different back then during the days of Hindu and Islamic era, where the people of Nusantara were able to acculturate quickly. The presence of Hindu and Islam was able to change the face of the culture of Nusantara and shift it from the pre-historical era to the historical period. Thanks to the acculturation, there was a significant progress of culture. By looking at this historical journey we can determine the right culture strategy in order to build the nation's culture that does not erase the identity of Nusantara, capable of generating the sovereignty of the nation, and able to prove the existence of cultural*

*transformation from simple to more complex. This was evident when the people of Nusantara preciously accepted Hindu and Islamic culture.*

**Keywords:** *acculturation of culture, cultural strategy, transformation of culture.*

## **Pendahuluan**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk: memiliki tidak kurang dari 700 suku dan 400 bahasa serta artefak kebudayaan yang melimpah. Aset kebudayaan yang demikian besar tersebut niscaya menjadi modal berharga bagi bangsa Indonesia untuk tampil menjadi bangsa besar yang dihormati di pentas dunia dengan/karena peradabannya yang tinggi. Alih-alih menjadi petaka yang potensial memecah belah bangsa, modal kebudayaan (*cultural capital*) tersebut dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan negara sekaligus sebagai identitas budaya dan kesadaran nasional. Bukankah pada sejatinya apa yang disebut dengan nasionalisme adalah manifestasi kesadaran bernegara atau semangat berbangsa?<sup>1</sup>

Posisi Indonesia yang berada pada silang budaya membuat Nusantara demikian kaya dengan budaya yang tidak saja *genuine* hasil kreasi dan olah karsa manusianya, tetapi juga sebagai hasil akulturasi dengan budaya-budaya lain semisal budaya Barat, Cina, India (Hindu-Budha) dan Islam. Bahkan dengan kekayaannya itu, Nusantara sangat potensial untuk menjadi bangsa yang berperadaban agung. Menurut berbagai catatan sejarah, kita sudah memiliki prestasi-prestasi yang mengarah ke sana.<sup>2</sup>

Namun perjalanan selama 73 tahun Republik Indonesia berdiri, kekayaan budaya tersebut belumlah terkelola dengan baik. Akibatnya, ancaman disintegrasi bangsa masih mencuat dengan berbagai isu yang silih berganti berputar berkepanjangan dan berputar tak berkesudahan. Kita patut bersyukur, beberapa daerah atau provinsi yang pada mulanya sempat bersikap sangat keras kepada Republik, akhirnya

---

<sup>1</sup> Muljana, Slamet.(2008), *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan* Jilid 1, LKIS, Yogyakarta, hal. 3.

<sup>2</sup> Lombart, Denys.(2008), *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid 3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.176

bersedia bertemu di meja dialog. Belum lagi gesekan-gesekan sosial, konflik etnis dan politik, dan lain sebagainya, yang masih menghantui kita. Kondisi ini diperburuk oleh tingkat kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran yang meluas, ketidakadilan dan kesenjangan, serta korupsi yang merajalela di berbagai tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah. Disebabkan oleh antara lain faktor-faktor itu semua, cita-cita dan impian luhur para pendiri bangsa masih jauh panggang dari api.

Indonesia merupakan negara dengan cadangan devisa terkaya ke-14 di dunia. Inilah yang menyebabkan Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok G-20. APBN kita pun sudah menginjak angka Rp. 1.418 Trilyun (2012) dan Rp. 2000 Trilyun lebih (2017). Dengan anggaran sebanyak itu, tentu bukan masalah besar bagi kita mencapai tujuan utama proklamasi, yaitu menyejahterakan rakyat. Namun kenyataan dengan jelas menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih demikian tinggi, yaitu 31 juta (BPS, 2010), pengangguran masih demikian besar jumlahnya, kesenjangan ekonomi masih demikian lebar, dan kerawanan sosial dan politik masih merupakan ancaman.

Di manakah letak masalahnya? Bukankah manusia Indonesia merupakan manusia yang memiliki kualitas dan kapasitas individu yang menonjol? Banyak yang meraih juara dalam berbagai bidang keilmuan dan teknologi dan kompetisi tingkat internasional sehingga dengan mudah tentu akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tampaknya, premis ini hanya berlaku untuk prestasi-prestasi yang memungkinkan manusia Indonesia berkompetisi secara individu. Akan tetapi, ketika masalah yang dihadapi bersifat kolektif (tim), hal ini menjadi persoalan dan hambatan yang cukup mengganggu. Manusia-manusia Indonesia yang terhimpun ke dalam suatu lembaga pemerintahan-birokratis, misalnya, kenyataannya belum mampu menyelesaikan masalah ini.

Berbagai pilihan kebijakan dan strategi sudah ditempuh untuk menata dan mengelola permasalahan-permasalahan publik. Pada masa Presiden Soekarno, strategi politik menjadi pilihan dengan mengedepankan jargon-jargon mempersatukan bangsa, anti imperialisme dan kapitalisme (ganyang Malaysia, Operasi Trikora,

GANEFO, dll). Sebagai konsekuensi, Presiden Soekarno menjalankan kebijakan ekonomi autarkik, mengandalkan semangat gotong royong masyarakat, dan menolak atau sangat selektif terhadap utang asing. Kemudian Presiden Soekarno juga menertibkan Dewan Konstituante yang tidak efektif membahas konsitusi negara serta membubarkan dua partai penting Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi. Namun dengan strategi ini, kehidupan perekonomian terabaikan sehingga nyatanya inflasi sempat mencapai 600 persen menjelang kejatuhan pemerintahan yang dipimpinya.

Ketika Presiden Soeharto menjadi Presiden berikutnya, belajar dengan kegagalan menata ekonomi di masa Orde Lama, ia menjalankan strategi ekonomi untuk menggenjot kemakmuran rakyat. Dengan dukungan para ekonom alumni Berkeley University, Orde Baru menganut kebijakan pasar yang menitikkan pada pertumbuhan. Dengan itu diharapkan *trickle down effect* terjadi. Di kemudian hari, meskipun mampu meningkatkan angka pertumbuhan dan kesejahteraan relatif, strategi ini di kemudian hari dikritik karena menciptakan kesenjangan dan memperlebar jarak antara yang kaya dan miskin. Karena tetesan yang diharapkan ‘menetes’ dengan sendirinya dari kue ekonomi nasional yang diperoleh ‘Jakarta’, kenyataannya tidak menetes hingga ke daerah secara merata. Belum lagi praktik masa itu yang lazim dikenal sebagai KKN, memperparah situasi sosial ekonomi bangsa yang berujung pada jatuhnya Orde Baru. Strategi ekonomi, yang mengabaikan strategi lainnya ini, kenyatanya tidak berjalan sukses membangun pondasi kebangsaan yang kuat.

Di era Reformasi, kondisi ini masih terus berlanjut. Dalam hal-hal tertentu justru semakin memburuk. Masyarakat dan bangsa seolah tak lagi memiliki pegangan dan panduan yang pasti. Pancasila dan UUD 1945 tetap ada, namun tidak menjadi pegangan bagi masyarakat. Seakan-akan keduanya merupakan warisan Orde Baru yang mesti dicampakkan. Akibatnya, situasi kebangsaan mengalami krisis multi-dimensi. Mulai krisis politik hingga krisis budaya. Krisis politik telah terlampaui dengan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden BJ Habibie. Antara lain, menggalang kesepakatan-kesepakatan bersama, melakukan dialog kebangsaan, memberikan

kebebasan pendirian partai politik, diselenggarakannya pemilu demokratis sejak 1999 dan amandemen konstitusi yang berlangsung hingga empat kali.

Krisis ekonomi pun juga diupayakan untuk segera diatasi. Pemerintah terus bergerak berusaha menstabilkan perekonomian setelah didera krisis ekonomi akut pada 1997. Rakyat kecil yang bergiat di bidang UKM ikut bekerja nyata memperbaiki keadaan. Sampai tingkat tertentu, upaya-upaya itu membuahkan hasil yang cukup mengesankan. Namun, kenyataannya adalah masalah-masalah bangsa masih menumpuk. Yang memprihatinkan adalah banyak masalah yang dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian secara tuntas. Masih banyak kasus masa lalu baik yang bersifat politik maupun ekonomi yang belum selesai, yang pada waktu-waktu tertentu masih dipersoalkan masyarakat. Kini kita masih dihadapkan pada persoalan separatisme, pelanggaran ham berat masa lalu, masalah Bank Century, BLBI, mafia hukum, mafia pajak, dan berbagai kasus penyalah-gunaan keuangan negara, bahkan nasib para (mantan) presiden! Ini memang bukan masalah sederhana, begitu kompleks dan mungkin mengandung implikasi ekonomi politik besar.

Persoalan masa lalu dulu pernah akan diselesaikan dengan cara rekonsiliasi, bahkan didukung dengan Ketetapan MPR nomor V/MPR/2000 dan Undang-Undang tentang KKR. Tapi sampai sekarang hasilnya masih saja tidak terselesaikan.<sup>3</sup> Sementara itu, kasus-kasus masa kini, seperti mafia hukum dan sebagainya, diakui secara resmi sebagai kenyataan riil dan terjadi secara faktual. Untuk itu Presiden mengeluarkan Keppres untuk membentuk Satgas Mafia Hukum, menyatakan sendiri secara resmi dalam pidatonya soal terjadinya penyalahgunaan uang negara. Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan ketidakbenaran dalam kasus-kasus tersebut. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia kerja untuk itu, lengkap dengan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasinya. Mungkin memang masih diperlukan waktu lama untuk menyelesaikan itu semua. Dengan kata lain, tetap saja hasilnya masih dapat dianggap

---

<sup>3</sup> Thohari, Hajriyanto,(2011), dalam majalah GATRA, edisi 24-30.

menggantung, *kampul-kampul*, atau *mekengkeng*.<sup>4</sup>

Melihat hal ini, perlulah dipikirkan suatu strategi lain strategi yang selama ini tidak pernah menjadi prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Jika pun pernah disebut, strategi ini menjadi sekedar pelengkap yang menempati posisi di pinggiran. Saya mengusulkan strategi yang dipilih atau diprioritaskan adalah strategi kebudayaan. Karena, masalah bangsa yang terjadi jangan-jangan bukan semata-mata bersumber pada soal politik atau ekonomi, tapi lebih dari itu, yaitu berkaitan dengan budaya.<sup>5</sup>

Prof. Dr. Suhartono Wiryopranoto, guru besar ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dalam seminar tentang ilmu-ilmu humaniora dan *nation character building* belum lama berselang mengatakan bahwa secara kultural bangsa ini mengidap kecekakan budaya (*cultural lag*) dan ketekoran budaya (*cultural shortage*) yang berkepanjangan.<sup>6</sup> Kecekakan atau ketekoran di sini, kata Prof. Suhartono, berarti *cupet, ora nyandak* atau *ora tekan* (tidak sampai). Seumpama tali, masih menurutnya, tali ini memang kurang *dowo*, sehingga tidak bisa digunakan sebagai pengikat bagian-bagian lain hingga tersimpul sebagai kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan. Namanya juga tali yang pendek atau cekak, ia tidak bisa ditarik lagi menjadi lebih panjang untuk mengatasi persoalan publik atau bangsa.<sup>7</sup> Atau ibarat aki (*accu*), setrumnya tidak lagi kuat untuk menghidupkan mesin. Kecekakan dan ketekoran budaya inilah yang mengakibatkan pemimpin bangsa atau penyelenggara negara secara keseluruhan tanpa kecuali tidak mampu menuntaskan permasalahan sehingga dibiarkan tetap menggantung (*mekengkeng, kampul-kampul, ngambang*) saja. Hal ini terjadi karena kita menderita *cultural lag* atau *cultural shortage* yang berkepanjangan, sehingga tidak mampu membuat manajemen pengentasan diri.<sup>8</sup>

Di awal pemerintahan Orde Baru, Koentjaraningrat telah mengingatkan tentang masalah budaya, yaitu terkait kelemahan

---

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> ibid

mentalitas bangsa Indonesia yang dipandang punya potensi untuk merintangi pembangunan, yaitu mentalitas *nrabas*<sup>9</sup>). Beliau mengatakan bahwa mentalitas seperti itu tidak cocok untuk menopang pembangunan, bahkan dapat menjadi kendala dan rintangan bagi upaya pembangunan itu sendiri. Terutama karena mereka yang mempunyai mentalitas menerabas selalu menghindari kerja keras, disiplin tinggi, dan rasa tanggung jawab. Mereka lebih suka mencari jalan pintas walaupun harus melakukan cara-cara melanggar etika dan aturan, yang pada akhirnya menyeret orang pada perilaku KKN.<sup>10</sup>

Mentalitas *nrabas* menyebabkan hilangnya rasa malu (*shameless*), perasaan “tidak enak”, *ewuh pekewuh*, dan bahkan nilai-nilai instrumental seperti dosa, kualat, dan haram lenyap dari perbendaharaan hidup. Walaupun harus merugikan banyak orang melalui praktik KKN, orang lebih mementingkan bagaimana dapat segera melepaskan dahaga konsumerisme. Seringkali korupsi pun tidak cukup untuk memenuhi hasrat hedonistiknya itu. Untuk menambah penghasilan yang lebih besar, tidak jarang dilakukan berbagai upaya yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang *tegel* (*heartless*), seperti memotong honorarium bawahan, memotong dana proyek, meminta komisi proyek, bahkan menjadi calo dan mafia anggaran.<sup>11</sup>

Mochtar Lubis dalam pidatonya pada tahun 1977 juga mengungkapkan 6 karakter manusia Indonesia yang berpotensi menghambat pembangunan. Secara garis besar ada enam ciri manusia yang dikemukakan oleh Mochtar Lubis, di antaranya munafik atau hipokrit, enggan dan segan bertanggung jawab, bersikap dan berperilaku feodal, percaya takhayul, artistik (berbakat seni), dan lemah watak atau karakter.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, 1990), *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Gramedia, Jakarta.); Koentjaraningrat dalam Sjafriz Sjafrin, *Begawan Muhammadiyah: Bunga Rampai Pidato Pengukuhan Guru Besar Muhammadiyah*, (LSAP, Jakarta), hal. 406.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Link internet diklik tanggal 30 November 2011. [http://ledianalanis.multiply.com/reviews/item/12?&show\\_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem](http://ledianalanis.multiply.com/reviews/item/12?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem)).

**Ciri Pertama: Munafik atau Hipokrit.** Ciri munafik atau hipokrit ini muncul, terbentuk pada karakter manusia Indonesia sejak masa feodal dan kolonial. Manusia Indonesia sering berpura-pura, lain di muka, lain di belakang. Sistem feodal dan kolonial di masa lampau menekan rakyat dan menindas segala inisiatif mereka. Sehingga secara langsung atau tidak langsung, hal itu memaksa manusia Indonesia untuk menyembunyikan apa sebenarnya yang dirasakannya, yang dipikirkannya, dan yang dikehendakinya. Semua itu disembunyikan karena takut bakal mendatangkan akibat-akibat yang membawa bencana bagi dirinya.

**Ciri Kedua: Enggan dan Segan Bertanggung jawab.** Untuk ciri ini Mochtar Lubis mengambil contoh yang menarik. Kata-kata "bukan saya" acap kali terlontar dari mulut manusia Indonesia. Ini menurut Mochtar Lubis merupakan bukti nyata rasa enggan dan segan bertanggung jawab itu memang ada dalam diri manusia Indonesia. Misalnya, jika terjadi suatu kesalahan atau kegagalan pada suatu lembaga, biasanya atasan akan berkata "bukan saya," kemudian menggeser kesalahan ke bawahan. Begitu seterusnya hingga jabatan terbawah. Ketika sampai ke jabatan yang terbawah bukan berarti rasa enggan bertanggung jawab itu tidak ada. Tetap saja dan kata "bukan saya" tadi akan berganti menjadi "saya hanya melaksanakan perintah dari atasan!" Inilah kebiasaan yang hingga saat ini masih ada pada kita.

**Ciri Ketiga: Bersikap dan Berprilaku Feodal.** Feodalisme itu ditandai dengan sikap di mana yang berkuasa sangat tidak suka mendengar kritik. Sementara itu, pihak lain, yang tidak berkuasa, menjadi segan untuk melontarkan kritik. Manusia yang berada di kalangan atas mengharapkan agar manusia yang berada di bawahnya, baik itu kepangkatannya, kekuasaan, kedudukan atau kekayaan mengabdikan kepadanya dengan segala rupa. Pengabdian segala rupa itu bisa berbentuk sikap patuh, hormat, takut dan merendahkan diri. Begitu pula dengan bawahan. Mereka dengan jiwa feodalnya bersedia untuk mengabdikan kepada pihak-pihak yang berada pada posisi "di atas" tadi.



**Ciri Keempat: Percaya Pada Takhayul.** Di zaman dulu manusia percaya bahwa gunung, pohon, keris memiliki kekuatan gaib. Begitu pula halnya dengan manusia Indonesia sampai dewasa ini. Hingga sekarang manusia Indonesia yang modern pun, baik itu yang telah bersekolah, telah berpendidikan tinggi sekalipun masih terus juga membuat dan percaya pada jimat, mantra atau lambang-lambang. Manusia Indonesia sangat cenderung percaya mantra, semboyan atau lambang yang dibuatnya sendiri. Contoh bentuk ritual takhayul yang membuat kita berlaku tidak rasional, dan malas kerja keras karena mengandalkan kekuatan spiritual antara lain tradisi melarung, yakni meletakkan sesaji di laut maupun di sungai sebagaimana kerap terjadi di Bali, Pantai Selatan, dan sebagainya, dengan harapan diberi keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, juga ritual meletakkan sesaji (makanan, bunga-bunga, dan lainnya) di bawah pohon yang dianggap keramat dan dipercaya dapat memberikan kekuatan dan kesuksesan tertentu. Romo Mangunwijaya juga menyatakan bahwa de facto bangsa Indonesia ini masih dikepung oleh kepercayaan magi, mistik dan takhayul.

**Ciri Kelima: Watak Yang lemah.** Manusia Indonesia menurut Mochtar Lubis bersedia mengubah keyakinannya agar dapat "bertahan". Dengan kata lain, mereka mudah goyah. Mudah goyahnya watak ini merupakan akibat dari ciri manusia feodal. Termasuk dalam ciri ini adalah upaya untuk menyenangkan atasan dan menyelamatkan diri.

**Ciri Keenam: Artistik.** Dari keenam ciri manusia yang dikemukakan Mochtar Lubis di atas hanya ciri inilah yang merupakan ciri positif. Suatu ciri yang menarik dan mempesonakan yang merupakan sumber dan tumpuan hari depan manusia Indonesia. Manusia Indonesia hidup dengan perasaan sensualnya yang kemudian membuat daya artistik berkembang lalu tertuang dalam segala rupa ciptaan artistik menurut WS Rendra disebut bangsa berlanggam estetik ini.

Walhasil, dalam diri bangsa dan penyelenggara negara ini harus dilakukan perubahan yang mendasar secara budaya. Diperlukan injeksi budaya agar kembali memiliki energi sehingga pulih dari *cultural lag* dan *cultural shortage* tadi. Ini lebih merupakan kerja-

kerja budaya daripada politik. Karena itu, diperlukan strategi kebudayaan untuk memulihkan diri.

## **Belajar dari Masa Lalu**

Di atas telah dikemukakan berbagai ketertinggalan, keterbelakangan, dan konflik berkepanjangan telah dialami bangsa ini. Cita-cita sejati kemerdekaan dan persatuan yang sempat digalang para pendiri republik (*founding fathers*) semakin keropos dari waktu ke waktu di tangan generasi penerusnya sendiri. Cita, rasa, cipta, dan karsa anak bangsa, yang semestinya bernilai positif untuk mengisi dan mengiringi kemerdekaan menuju masa depan ideal, berbalik arah. Akibatnya, kedaulatan bangsa bagaikan berada di ujung tanduk.

Mengenai akar konflik, para ahli berbeda pendapat dan melontarkan pandangannya masing-masing. Sebagian menilai bahwa faktor ekonomi dan kesenjangan sosial merupakan pemicunya. Sebagian yang lain mengatakan persoalan nilai-nilai kebudayaan yang berbeda menyebabkan terjadinya *over laping* dan benturan antarnilai dan antarbudaya. Ada juga yang melihat agama sebagai pemicu konflik, sehingga para pemeluknya memiliki alasan teologis untuk melakukan kekerasan.<sup>13</sup>

Sementara itu, soal keterbelakangan Indonesia dibanding negara-negara lain yang sudah maju, bukan lagi persoalan yang asing di telinga kita. Sejarah dunia mencatat terjadinya revolusi pengetahuan, revolusi industri, revolusi sosial, revolusi politik, revolusi teknologi, dan revolusi ekonomi. Semua revolusi tersebut digagas lebih dahulu oleh Barat, yang muncul dari kesadaran kritis mereka. Harus diakui bahwa Nusantara belum mengembangkan sistem teknologi, sistem ekonomi, dan sistem pengetahuan sekuat mereka (Barat).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andy Dermawan, (2009), *Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar Mengurai Akar Konflik*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, hlm. 117

<sup>14</sup> Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: CSIS, 1978), hlm. 35

Penyakit tersebut adalah persoalan paling krusial yang menuntut penanganan sesegera mungkin. Membiarkan penyakit menggerogoti tubuh bangsa dan negara Indonesia adalah pertanda kehancuran masa depan kita. Sebab penyakit ini akan menurunkan persoalan-persoalan bangsa dan negara yang beragam. Kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, kebodohan, rapuhnya semangat persatuan, eksklusifitas etnis dan tradisi, *truth claim* dalam ranah kepercayaan, adalah turunan dari persoalan-persoalan tersebut.

Jika ditelisik lebih mendalam maka titik permasalahannya terdapat pada pola pikir dan tindakan yang mandek, lamban, eksklusif, tidak progresif, serta kurang berminat pada kebaikan universal yang ditandai dengan kemajuan dan persatuan. Seperti telah diisyaratkan, yang demikian ini adalah persoalan kebudayaan, yang berkaitan dengan masalah akal budi manusia, pikiran dan cipta karsa manusia.<sup>15</sup> Manusia yang berperilaku jumud dipastikan berkebudayaan statis pula. Sebaliknya, apabila semangat berkemajuan muncul maka watak jumud, eksklusifitas yang tak berguna, dan *truth claim* yang merusak solidaritas sesama bangsa akan berkurang. Cita-cita ideal yang kemudian diusung adalah kesadaran kemanusiaan universal, tegaknya HAM, demokrasi, dan masyarakat yang terbuka yang mengakui pluralitas (*kebhinnekaan*) dan bersedia menghormati kemajemukan bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

Karena masalah yang dibicarakan adalah kebudayaan, maka jawaban mendasar, yang bisa ditawarkan demi perbaikan nasib bangsa dan negara di masa sekarang dan untuk masa depan haruslah melalui cara-cara kebudayaan. Ali Moertopo mengatakan, jika persoalan-persoalan besar yang kita hadapi dewasa ini, baik secara nasional maupun regional ingin kita dekati secara prinsipil dan radikal, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus memasuki jalan kebudayaan. Oleh karena itu, sudah tiba saatnya kita berpikir mengenai strategi kebudayaan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, (2009), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-8, Semarang: CV. Widya Karya, hlm. 94

<sup>16</sup> Sultan Hamengkubuwono X, (2007), *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, - Jakarta: Gramedia, hlm. 95

<sup>17</sup> Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan..Op.Cit.* Hlm. 3

Strategi kebudayaan merupakan upaya penyelidikan dan pembacaan kita terhadap kebudayaan, dan kemudian menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan (*power*) yang berguna untuk mengatasi segala kemelut dan problem yang dihadapi bangsa dan negara. Meminjam rumusan Ali Moertopo, strategi kebudayaan adalah keharusan untuk melihat dan memperlakukan kebudayaan sebagai kekuatan.<sup>18</sup> Untuk melakukan pembacaan dan analisis terhadap kebudayaan Nusantara ini diperlukan data-data historis yang komprehensif. Berikut ini disampaikan paparan atas sejarah kebudayaan yang dimiliki bangsa kita. Dari perjalanan historis tersebut diharapkan muncul gagasan mengenai kebudayaan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berperadaban tinggi.

## Sejarah Kebudayaan Nusantara

Untuk melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Nusantara ini kita dapat membaginya ke dalam dua periode: *periode prasejarah* dan *periode sejarah*. Periode sejarah sendiri meliputi masa kekuasaan Hindu-Budha, kekuasaan Islam, dan kekuasaan kaum kolonial dari Eropa. Perodesasi semacam ini didasarkan pada adanya perubahan-perubahan kebudayaan yang menonjol pada masing-masing tahapan tersebut.

*Pertama*, periode prasejarah. Pada periode ini sudah ditemukan gejala kemunculan manusia-manusia purba dan kebudayaannya di Nusantara. Hal itu terbukti dengan ditemukannya fosil-fosil yang kemudian disebut manusia Solo, manusia Ngandong, dan manusia Wajak. Berdasarkan analisis yang dilakukan seorang pakar paleoantropologi Indonesia, Prof. Teuku Jacob (1976), manusia Ngandong diyakini sebagai keturunan langsung dari *Pithecantropus Erectus*. Asumsinya bahwa *Pithecantropus Erectus* yang ditemukan di Ngandong disebut juga *Homo Soloensis* terus berevolusi menjadi jenis makhluk *Homo Sapiens*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid. Hlm. 9

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, (1984), *Kebudayaan Jawa*, - Jakarta: pt Balai Pustaka, hlm. 33

Keberadaan manusia purba ini sudah mengenal kebudayaan yang relatif sistematis, terorganisir, dan menunjukkan gejala yang sudah maju. Hal ini terutama berkaitan dengan pengetahuan tentang alam, musim, bintang, juga tentang kehidupan. Adanya pengetahuan yang demikian itu tampak pada perkembangan sektor-sektor lain seperti pelayaran, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Sistem teknologi juga sudah menggejala seperti adanya teknologi pertanian, pelayaran, peternakan, bahkan juga kemampuan menuangkan logam untuk membuat senjata sejenis panah.<sup>20</sup>

Tingkat imajinasi dan kreatifitas kesenian juga berkembang luas. Manusia purba dari ras Austro-Melanesoid di bagian Timur Kepulauan Nusantara dan Irian sudah membuat lukisan-lukisan di gua, juga alat-alat dari pecahan batu kecil (*flakes*) dengan pegangan dari kayu, yang agaknya jelas mereka gunakan sebagai alat memotong. Tidak sekedar kemampuan seni pahat semacam itu, manusia purba juga telah melakukan relasi kebudayaan dan persilangan kebudayaan antar pulau. Hal itu terbukti ketika alat-alat yang diciptakan oleh manusia di bagian Timur dibawa dan disebarluaskan ke arah Barat, sehingga alat-alat flakes tersebut juga ditemukan di Jawa Timur.<sup>21</sup>

Bahkan, pada masa kala glacial, kira-kira 2 juta tahun yang silam, Nusantara adalah tempat yang paling memungkinkan untuk ditempati makhluk ras manusia. Sebab dataran Sunda dan dataran Sahul atau tempat lain yang berada di sepanjang garis ekuator (katulistiwa) adalah tempat yang lumayan hangat dan memungkinkan ras manusia mempertahankan hidupnya di sana. Sementara sebagian besar permukaan bumi pada kala itu tertutupi es. Itu artinya, sebagian besar daratan Asia Utara, Eropa, Amerika Utara dan Selatan, serta Australia adalah tempat-tempat konsentrasi lapisan es, sehingga (hampir) tidak memungkinkan untuk ditempati ras manusia.<sup>22</sup> Untuk konteks kebudayaan secara lebih spesifik, kira-kira 40 abad sebelum Masehi, Pulau Jawa merupakan daerah

---

<sup>20</sup> Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan.Op.Cit.* hlm. 20

<sup>21</sup> H.A. Kholiq Arif dan Otto Sukatno Cr, (2010) *Mata Air Peradaban: dua mellenium Wonosobo.* -Yogyakarta: LkiS, hlm. 87

<sup>22</sup> Ibid. Hlm. 88-89

pertemuan berbagai ras dan daerah pertemuan bagi berbagai kebudayaan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil yang berciri-ciri Australoid dan Mongoloid.<sup>23</sup>

Terkait dengan sistem religi, manusia purba Nusantara juga telah mengenalnya dengan relatif baik. Pemikiran magis dan sakral berakar sangat kuat di dalam jiwa masyarakat Nusantara. Manusia telah mengenal kehadiran Yang Gaib sebagai kekuatan spiritual.<sup>24</sup> Kepercayaan mereka di zaman modern kita istilahkan dengan keyakinan animisme dan dinamisme. Sementara di bidang pertanian, masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa khususnya, dan beberapa pulau yang lain, diperkirakan telah mengenal sistem berladang dengan menanam umbi-umbian sejak  $\pm$  2.000 tahun sebelum Masehi.<sup>25</sup>

Demikianlah sepintas tentang manusia Nusantara dan kebudayaannya di zaman pra sejarah. Yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa masyarakat Nusantara purba telah mengenal sistem pengetahuan, sistem ekonomi, dan sistem teknologi dalam bentuk yang relatif maju dan berasal dari lintas geografis. Sejak awal masyarakat Nusantara purba adalah masyarakat yang terbuka dan mampu menyerap kebudayaan asing yang dibawa purba ras Austro-Mongoloid. Berikutnya pembahasan kita beralih pada sejarah kebudayaan Nusantara zaman sejarah yang dimulai dan ditandai dengan penerimaan atas pengaruh-pengaruh Hindu dan Islam.

Kedatangan agama Hindu ke Nusantara memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kebudayaan. Terutama sekali perubahan besar tersebut dapat dilihat pada empat bidang: sosial, bahasa, seni, dan agama. Di bidang sosial terbentuklah kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kerajaan Kutai, Pajajaran, Sriwijaya, Mataram Kuno, sampai Majapahit. Kasta-kasta dan dinasti-dinasti juga mulai dikenal, seperti dinasti Syailendra dan dinasti Sanjaya. Di bidang bahasa, sastra-sastra yang berbahasa Sanskerta mulai banyak dinikmati, raja-raja Hindu menggunakan nama-nama

---

<sup>23</sup> Ibid. Hlm. 94

<sup>24</sup> Ali Moertopo, Op.Cit. hlm. 22

<sup>25</sup> H.A. Kholiq Arif, Op.Cit. hlm. 96

Sanskerta, dan aksara-aksara Jawa pun berkolaborasi dengan bahasa “import” tersebut. Dalam sistem religi, masyarakat Nusantara mulai mengenal dewa-dewa yang sebelumnya tidak mereka kenal. Raja-raja juga mulai menyusun silsilahnya dan menyambungkannya dengan dewa-dewa itu.<sup>26</sup> Akan tetapi sebenarnya soal pembentukan kerajaan-kerajaan di Nusantara oleh orang-orang India yang beragama Hindu masih diperdebatkan, dan diasumsikan kerajaan tersebut sudah ada sebelum kehadiran agama Hindu.<sup>27</sup>

Seiring berjalannya waktu, Islam pun datang ke bumi Nusantara dengan membawa kebudayaannya sendiri. Sebagaimana yang dilakukan agama Hindu, Islam juga membawa perubahan kebudayaan dalam empat bidang: sosial, bahasa, kesenian, dan sistem religi. Di bidang sosial politik, kita mengenal munculnya kerajaan-kerajaan Demak, Banten, Aceh, Makassar, Mataram, dan sebagainya. Unsur-unsur bahasa Arab juga merebak. Gelar-gelar *Al-Sulthan* disandang oleh raja-raja Islam. Dalam kesenian, semisal dunia pewayangan, misalnya lakon-lakon yang menampilkan nilai-nilai Islam juga bermunculan. Atmosfer yang Hinduistis sedikit demi sedikit mulai diwarnai oleh suasana dan kebudayaan yang Islamis.<sup>28</sup>

Uniknya, kehadiran Hindu dan Islam tidak menimbulkan konfrontasi dan penolakan dari kalangan masyarakat pribumi. Hal ini disebabkan oleh kesamaan esensial budaya. Aspek-aspek mendasar dari kebudayaan Hindu dan Islam yang lebih maju sudah dikenal sebelumnya oleh kebudayaan Nusantara yang masih sederhana. Aspek-aspek tersebut meliputi sistem sosial, bahasa, kesenian, dan religiusitas. Persamaan dan kesamaan penguasaan atas aspek-aspek tersebut secara alamiah mendorong masyarakat pribumi dengan mudah melakukan akulturasi dengan kebudayaan asing (Hindu-Islam). Tidak heran apabila kalangan sejarawan berpendapat bahwa kehadiran Hindu dan Islam di bumi Nusantara berlangsung dengan damai.

---

<sup>26</sup> Ali Moertopo.Op.Cit. hlm. 23-24

<sup>27</sup> Otto Sukatno CR,(2003) *Dieng: Poros Dunia* -Yogyakarta: Ircisod, hlm. 140

<sup>28</sup> Ali Moertopo.Op.Cit. hlm. 26

Demikian gambaran umum tentang kehadiran kebudayaan luar (Hindu dari India dan Islam dari Arab) yang masuk dan memberi pengaruh luar biasa bagi perkembangan kebudayaan Nusantara. Akan tetapi, kedatangan Hindu dan Islam tidak lantas menggeser sepenuhnya kebudayaan yang sudah berkembang jauh sebelumnya. Di sini, kita menemukan dua fenomena menarik mengenai sejarah kebudayaan Nusantara ini, yaitu, diskontinuitas dan kontinuitas. Diskontinuitas berarti terdapat nilai-nilai kebudayaan yang betul-betul terhapus oleh kebudayaan yang datang berikutnya. Sedangkan kontinuitas berarti nilai-nilai tertentu masih berlanjut dan bertahan sekalipun hadir nilai-nilai yang baru. Dalam kondisi yang terakhir inilah kita melihat terjadinya akulturasi, yakni percampuran dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan identitas kebudayaan lama.<sup>29</sup>

Akulturasi menjadi semacam corong kebudayaan yang dapat meningkatkan kualitas kebudayaan pribumi. Dengan meleburnya antara dua sisi kebudayaan (budaya Nusantara dan budaya luar yang berasal dari Hindu dan Islam) maka masyarakat Nusantara telah meningkatkan kualitas kebudayaan aslinya yang diwariskan oleh zaman pra sejarah. Sekalipun kita harus menyadari bahwa pengaruh-pengaruh Hindu dan Islam hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu seperti sosial, bahasa, kesenian, dan agama. Sementara di luar wilayah-wilayah tersebut, seperti di ranah ekonomi, pengetahuan, dan teknologi, Hindu dan Islam tidak begitu memberi pengaruh luar biasa yang bisa menghantarkan pada revolusi kebudayaan secara penuh.

Kelak, setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, kita baru menyadari bahwa kebudayaan yang mencakup sistem ekonomi, sistem pengetahuan, dan sistem teknologi yang kita miliki telah tertinggal jauh dan berjalan di tempat. Kedatangan kaum kolonial memunculkan kesadaran baru bahwa ada kebudayaan lain yang berbeda yang berdiri berhadap-hadapan secara diametral dengan kebudayaan kita sendiri.

Sejarah kebudayaan Nusantara mengalami perkembangan

---

<sup>29</sup> Ibid. Hlm. 26



yang semakin menarik dengan datangnya bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-17. Jika kebudayaan Hindu dan Islam mampu diadaptasi dan menyebabkan terjadinya akulturasi kebudayaan, maka kebudayaan Eropa yang dibawa oleh kaum kolonial itu tidak mampu diadaptasi dan menyebabkan tidak terjadinya akulturasi yang sebanding. Sebaliknya, kebudayaan Eropa dan kebudayaan Nusantara berdiri berhadap-hadapan, sesekali saling menolak, sehingga memunculkan dualisme kebudayaan di Nusantara. Kondisi dualistis semacam itu bertahan lama sampai lahirnya semangat dan kesadaran nasionalisme untuk melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan.<sup>30</sup> Tak jarang, dualisme kebudayaan tersebut mendaratkan pada konflik “berdarah”.

Perbedaan kebudayaan yang amat menonjol tersebut dapat dilihat dari penguasaan bangsa-bangsa Eropa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara kebudayaan Nusantara yang diwariskan oleh Hindu dan Islam tidak memiliki keterampilan dan kemampuan tersebut, sehingga orang-orang Nusantara tidak sejajar dengan bangsa Eropa. Di sinilah letak perbedaan antara kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Eropa. Bangsa Eropa berbeda dengan Hindu dan Islam yang datang ke Nusantara dengan membawa “oleh-oleh” kebudayaan yang sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat pribumi di kepulauan Nusantara ini. Bangsa Eropa menunjukkan sesuatu yang “aneh” dan tidak bisa diadopsi sepenuhnya oleh masyarakat Nusantara.

Kita dapat melihat kedatangan bangsa Portugis yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias yang tiba pada tahun 1487. Dia telah mengitari Tanjung Harapan dan menduduki perairan Samudra Hindia. Diogo Lopes de Sequeira atas perintah raja Portugal tiba di Malaka pada tahun 1509 dengan membawa kapal-kapal bermesin canggih dan berteknologi tinggi, sehingga lebih mudah digerakkan, lebih cepat, dan lebih memungkinkan melakukan ekspansi laut. Kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan meriam. Dan pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque tiba di Malaka dengan membawa

---

<sup>30</sup> Ibid. Hlm. 28

1.200 orang dan 18 buah kapal bermesin.<sup>31</sup> Kecanggihan teknologi perkapalan dan sistem pelayaran Portugis tidak dimiliki oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu.

Ini adalah awal bagi masyarakat Nusantara melihat dengan mata kepala sendiri akan adanya kebudayaan baru yang sama sekali tidak mereka kenal dan belum pernah mereka miliki selama ini. Kebudayaan yang mereka lihat adalah kebudayaan berteknologi tinggi yang memanfaatkan peranan mesin-mesin. Mungkin benar asumsi yang dilontarkan Ali Moertopo bahwa keunggulan budaya Barat atas budaya pribumi masyarakat Nusantara, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dijadikan alat kolonialisasi dan imperialisasi kebudayaan. Dia mengatakan, situasi kultural yang berbeda tidak jarang dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di wilayah ini (Nusantara).<sup>32</sup>

Kekalahan di ranah kebudayaan (teknologi dan ilmu pengetahuan) ini adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi kekalahan Nusantara terhadap serangan Eropa. Pada tahun-tahun antara 1513-1629 terjadi serangan-serangan merebut Malaka yang sudah dikuasai Portugis. Namun semua serangan tersebut dapat dipukul mundur oleh kekuatan militer Portugis yang jauh lebih kuat. Bahkan, pada tahun 1536 Sultan Alauddin Riayat Syah I (m. 1529-64) terpaksa berdamai setelah kalah perang dari Portugis.<sup>33</sup>

Dari fakta-fakta ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bertahannya era kolonialisme dan imperialisme adalah akibat langsung dari adanya dualisme kebudayaan (Eropa dan Nusantara) yang tak mau menjalin hubungan akrab melalui proses akulturasi, sehingga membuka peluang bagi bangsa Eropa memanfaatkan keunggulan budayanya sebagai alat penjajahan dan mempertahankan kekuasaan demi *glory* dan *gold*. Kesadaran kritis pun muncul, rasa nasionalisme tumbuh, dan gerakan perlawanan untuk menjemput kemerdekaan mulai bersemi. Generasi muda bangsa

---

<sup>31</sup> M.C. Ricklefs, (2005), *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, Third Edition, terj. Satrio Wahono, dkk, Cet. Ke-2, - Jakarta: Serambi, hlm. 62-63

<sup>32</sup> Ali Moertopo, Op.Cit. hlm. 28

<sup>33</sup> M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, Op.Cit. hlm. 80-81

mulai menyadari bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa, dan segala bentuk penjajahan harus dihapus dari muka dunia. Kesadaran semacam ini dapat dibaca sebagai *gejolak kebudayaan*. Atau sekali lagi meminjam istilah Ali Moertopo sebagai ungkapan baru di dalam kontinuitas kebudayaan Nusantara.<sup>34</sup>

Kesadaran kritis dan nasionalisme itu pada akhirnya menghantarkan Nusantara ke gerbang kemerdekaan dan terbebas dari penjajahan bangsa Eropa. Di titik inilah masyarakat Nusantara tercerahkan bahwa pergumulannya dengan Hindu (India) dan Islam (Arab) telah memberinya warna baru dalam hal agama, bahasa, sosial dan kesenian. Sedangkan pergumulannya dengan bangsa-bangsa Eropa sekalipun pahit dan penuh perjuangan melahirkan kesadaran kebudayaan dan pencerahan bahwa masyarakat Nusantara tidak memiliki sistem pengetahuan, sistem ekonomi, dan sistem teknologi sekuat Barat atau Eropa. Keterbelakangan Indonesia dibandingkan negara-negara Barat tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang sezaman dengan *founding fathers* negara ini. Tetapi, keterbelakangan tersebut masih dirasakan sampai detik ini.

Keterbelakangan yang masih kita rasakan sampai detik ini disebabkan oleh keterlambatan melakukan proses akulturasi dengan budaya Barat, yang ditandai dengan kemajuan mereka di bidang pengetahuan dan teknologi. Keterlambatan tersebut dimulai sejak paska kemerdekaan.

Ada beberapa alasan keterlambatan. *Pertama*, kita sibuk dengan berbagai perang kemerdekaan. *Kedua*, perhatian untuk pembangunan tersapu habis oleh perhatian pada permainan-permainan politik partisan.<sup>35</sup> Semisal pertempuran Surabaya (Oktober 1945), pertempuran Ambarawa (November 1945), pertempuran Medan Area (13 Oktober 1945), perang dan diplomasi, menghadapi aksi-aksi militer Belanda, pemberontakan Komunis, dan aksi-aksi militer II Belanda,<sup>36</sup> adalah contoh-contoh problem krusial paska proklamasi yang menghambat percepatan akulturasi.

---

<sup>34</sup> Ali Moertopo.Op.Cit. hlm. 29

<sup>35</sup> Ibid. Hlm. 35-36

<sup>36</sup> Marwati Djoened Poesonegoro dan Nugroho Notokusanto, (1984) *Sejarah Nasional Indonesia VI*, - Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 110-161

Kesibukan ini secara otomatis menghabiskan perhatian kita untuk dapat dicurahkan pada upaya pengembangan pengetahuan dan akulturasi kebudayaan di bidang pengetahuan, ekonomi, dan teknologi yang sempat diperlihatkan oleh Barat atau Eropa.

Di awal abad ke-21 ini, bangsa Indonesia masih juga menggunakan banyak waktunya untuk kepentingan politik partisan, dan ironisnya hanya untuk “berperang” sesama bangsa. Sekalipun dalam wajah yang berbeda, ruang dan waktu yang berbeda, serta para pelaku yang berbeda, akan tetapi, watak dasarnya tetaplah sama, yakni terabaikannya akulturasi dengan budaya Barat yang sudah maju di ranah pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Akibatnya keterbelakangan dan potensi konflik tetap berlangsung dan seakan-akan tampak sudah mendarah daging. Fenomena radikalisme agama dan etnis adalah salah satu contoh konflik yang dibangun di antara sesama warga Indonesia, yang mana ini juga menjadi alasan terabaikannya pengembangan pengetahuan dan teknologi.

Demikianlah gambaran singkat perjalanan historis kebudayaan kita. Di samping mengetahui titik lemah kita sendiri, kita juga dapat mengambil hikmah dalam menentukan strategi kebudayaan untuk mengatasi problem keterbelakangan dan konflik, tentunya demi terciptanya tatanan masyarakat yang maju, rukun, berdaulat, adil, sejahtera, berkebudayaan dan berperadaban tinggi. Berikut adalah paparan analitis tentang strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan demi kekokohan budaya kita, sehingga terbentuklah kedaulatan bangsa yang sesungguhnya.

### **Jalur Kebudayaan sebagai Tawaran**

Setelah melihat perjalanan historis kebudayaan masyarakat Nusantara sejak zaman pra sejarah hingga kini, maka untuk meningkatkan kualitas kebudayaan kita yang nyata-nyata masih terbelakang dibandingkan dengan kebudayaan Barat, paling tidak harus ditempuh tiga hal berikut: akulturasi, kepemimpinan yang mantap, dan pendidikan.

*Pertama*, akulturasi. Masyarakat Nusantara mampu meninggalkan kebudayaan prasejarah dan memasuki kebudayaan sejarah setelah menerima kebudayaan-kebudayaan baru yang datang dari India dan Arab (baca: Hindu dan Islam). Tanpa banyak meninggalkan warisan kebudayaan yang diterima dari nenek moyang yang hidup di zaman prasejarah, masyarakat Nusantara mampu memadukan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru sehingga terbentuklah sintesis kebudayaan baru. Inilah proses akulturasi (bukan asimilasi dan enkulturasi) yang diinginkan, yang dalam sejarah terbukti mampu meningkatkan kualitas kebudayaan Nusantara, terutama di bidang seni, bahasa, sistem sosial, dan agama. Sebaliknya, diabaikannya proses akulturasi nilai-nilai Hindu-Islam dengan nilai-nilai baru yang dibawa Barat membawa dampak buruk bagi dinamisasi kebudayaan Nusantara. Terbukti, kehadiran bangsa-bangsa Eropa selama 3 abad lebih di bumi Nusantara ini tidak mampu mengangkat kualitas kebudayaan Nusantara pada umumnya.

*Kedua*, kepemimpinan. Tegaknya kepemimpinan yang mapan dan hadirnya seorang penguasa untuk mengatur jalannya proses akulturasi sangatlah penting. Konsep akulturasi dengan sendirinya mengasumsikan percampuran dua kebudayaan atau lebih dengan tetap mempertahankan identitas asli. Akulturasi yang tidak seimbang rawan mengarah pada dominasi kebudayaan eksternal yang datang belakangan, yang bakal menghapus identitas asal yang sudah ada sebelumnya.

Kebudayaan Barat tidak sepenuhnya cocok untuk diserap dan diamalkan di bumi Nusantara ini. Misalnya sekularisme dan individualisme adalah contoh produk kebudayaan Barat yang tidak sepenuhnya cocok dengan kebudayaan Timur (Nusantara) yang sangat religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan, sebagaimana dikandung dalam dasar negara kita, Pancasila. Namun, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ditampilkan Barat adalah cermin ideal yang mesti ditiru oleh masyarakat Timur. Upaya untuk mendorong lahirnya keseimbangan dalam proses akulturasi tersebut membutuhkan model kepemimpinan ideal.

*Ketiga*, aspek pendidikan. Pendidikan adalah upaya humanisasi dan pendewasaan. Melalui jalur pendidikan kesadaran kritis, kematangan cakrawala berpikir, dan tumbuh kembangnya mentalitas yang kuat, dapat dilakukan. Dunia pendidikan juga bisa menjadi saluran bagi percepatan proses akulturasi, bahkan bisa disebut sebagai sarana terpenting dalam hal itu. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di Barat, perekonomian yang melesat di negara-negara Eropa dan Amerika, serta di belahan dunia lainnya, dan perkembangan teknologi mutakhir, dapat diperkenalkan dan dicontoh oleh masyarakat Nusantara melalui media pendidikan ini.

Dalam membangun bangsa, pendidikan menjadi amat penting peranannya sebagai salah satu unsur “trinitas” strategi kultural. Pendidikan secara langsung maupun tidak bertujuan menciptakan manusia Pancasila. Pancasila adalah satu konsep kebudayaan yang sangat cocok bagi terbentuknya kebudayaan Nusantara. Pancasila adalah nilai-nilai yang diperas dari spirit terdalam jiwa masyarakat Nusantara. Sila pertama menekankan sikap religiusitas yang kuat, yakni percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan adi-manusiawi. Sila kedua mengidealkan kehidupan yang adil beradab, menghormati antara sesama, dan menolak sikap ekstrim, fanatik, dan saling mendendam. Sila ketiga mencita-citakan persatuan dalam masyarakat yang plural dan majemuk, serta yang memiliki nilai-nilai tradisi berbeda. Konflik dan perpecahan tidak dikehendaki oleh Pancasila, karena sikap-sikap buruk tersebut tidak mencerminkan tata masyarakat modern yang berperadaban luhur. Sila keempat tidak lain adalah perwujudan demokrasi, sistem yang menghargai persamaan hak dan kewajiban. Demokrasi juga mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sedangkan sila kelima menghendaki kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pendidikan, cita-cita humanisasi dan pembentukan manusia Pancasila di atas dapat diwujudkan. Melalui pendidikan pula ilmu pengetahuan dapat ditransformasikan. Pendidikan adalah media yang paling efisien demi percepatan akulturasi yang diinginkan.

## Kesimpulan

Ketertinggalan kebudayaan bangsa kita dibanding dengan bangsa-bangsa yang sudah maju membutuhkan strategi-strategi kultural yang mapan dan terencana. Ketertinggalan tersebut dapat diatasi melalui peningkatan di bidang ekonomi, pengetahuan, dan teknologi. Untuk melakukan semua upaya tersebut membutuhkan sikap mental yang terbuka, mau menerima kebudayaan Barat tertentu yang tidak menghapus identitas Nusantara. Proses untuk itu disebut dengan akulturasi kebudayaan.

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, akulturasi kebudayaan terbukti ampuh meningkatkan kualitas kebudayaan Nusantara, mampu membangkitkan kedaulatan bangsa, dan mampu membuktikan adanya transformasi kebudayaan dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Hal itu terbukti ketika masyarakat Nusantara dengan lapang dada menerima kebudayaan Hindu dan Islam.

## Daftar Pustaka

- Arif, H.A. Kholiq dan Sukatno Cr, Otto. 2010. *Mata Air Peradaban: dua mellenium Wonosobo*. Yogyakarta: LKiS.
- Dermawan, Andy. 2009. *Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar Mengurai Akar Konflik*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Hamengkubuwono X, Sultan. 2007. *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*. Jakarta: Gramedia.
- [http://ledianalanis.multiply.com/reviews/item/12?&show\\_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem](http://ledianalanis.multiply.com/reviews/item/12?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem)). Diklik pada tanggal 30 November 2011.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Moertopo, Ali. 1978. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: CSIS.
- Partanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Popolar*. Surabaya: Arkola.
- Poesonegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Retnoningsih, Ana, dan Suharso. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-8. Semarang: CV. Widya Karya.
- Ricklefs, M.C. 2005. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, Third Edition, terj. Satrio Wahono, dkk, Cet. Ke-2. Jakarta: Serambi.
- Sairin, Sjafri. *Begawan Muhammadiyah: Bunga Rampai Pidato Guru Besar Muhammadiyah*. 2005. PSAP Muhammadiyah
- Sukatno CR, Otto. 2003. *Dieng: Poros Dunia*. Yogyakarta: Ircisod.
- Thohari, Y. Hajriyanto. Penyelenggara Negara dan Ketekoran Budaya. *Gatra*, 24-30 November 2011.



# GENDER, KEBUDAYAAN DAN PERADABAN

Ulla Nuchrawaty

## Abstrak

Kesetaraan gender masih menjadi tantangan bagi bangsa kita. Hal itu dikarenakan masih banyak terjadi praktek ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di berbagai sektor, baik di sektor ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kaum perempuan menjadi korban ketidakadilan tersebut. Kenyataan itu melahirkan kebudayaan dan peradaban yang negatif bagi bangsa. Diperlukan sarana yang efektif guna mewujudkan kesetaraan gender untuk membangun peradaban bangsa yang unggul. Yakni, melalui partai politik. Melalui langkah-langkah transformatif berbasis gender yang dilakukan oleh partai politik, diharapkan akan mampu menyiapkan peradaban bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang.

**Kata kunci:** kesetaraan gender, gender dan peradaban, pengarusutamaan gender

## Abstract

*Gender equality is still a challenge for our nation. That is due to the still lots of practice of injustice and gender inequality in various sectors: in the economic, political, social as well as cultural sectors. It has been women who have become victims of that injustice. That reality gives rise to a negative culture and civilization of the nation. Effective means is needed to manifest gender equality to develop a superior civilization of the nation, namely through political parties. Through gender based transformative steps conducted by political parties, we expect to be able to prepare a better civilization of the nation in the future.*

**Keywords:** *gender equality, gender and civilization, gender prioritization.*

## Pendahuluan

Masyarakat adalah himpunan dari berbagai individu yang membentuk suatu kelompok yang berinteraksi secara sosial dan budaya masing-masing. Pengalaman yang dialami oleh anggota kelompok itulah yang kemudian melahirkan suatu bentuk kebudayaan

yang menjadi penanda atau ‘*icon*’ dari masyarakat tersebut. Di dunia ini tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tidak memiliki budaya karena pada hakekatnya setiap manusia adalah makhluk sosial.

Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu adalah “*zoon politicon*” (manusia adalah binatang berpolitik). Sedangkan menurut istilah dalam ilmu mantiq, manusia adalah hewan (makhluk hidup) yang berakal. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dalam diri manusia senantiasa melekat nilai sosial budaya yang mempengaruhi dan bahkan menjadi pedoman hidup berperilaku dalam kesehariannya. Dengan demikian, masyarakat berbudaya adalah kelompok yang memiliki karakter yang mengedepankan nilai sosial yang tinggi dan bermakna.

Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri-ciri khusus dari sebuah kebudayaan. Masing-masing kelompok masyarakat memiliki sifat kebudayaan yang berbeda. Bagi masyarakat Barat makan sambil berjalan (bahkan setengah berlari) adalah hal biasa, karena bagi mereka *time is money*. Berbeda dengan masyarakat Timur, jangankan makan sambil berjalan, makan sambil berdiri saja sudah melanggar etika. Namun, secara garis besar, seluruh kebudayaan yang ada di dunia ini memiliki sifat hakikat yang sama.

Semua kebudayaan senantiasa bergerak dinamis karena mengikuti dinamika manusia itu sendiri. Perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lain, baik disengaja maupun tidak (seperti migrasi, pengungsian atau karena sebab-sebab lain), akan membawa kebudayaan dari suatu masyarakat tertentu ke masyarakat lain yang menyebabkan terjadinya akulturasi.

### **Gender dalam Perspektif Budaya dan Peradaban.**

Pada umumnya unsur budaya ada yang dengan mudah diterima oleh masyarakat, namun ada pula yang sulit untuk langsung diterima. Unsur budaya yang mudah diterima antara lain adalah yang berhubungan langsung dengan kebutuhan primer manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai individu yang memiliki kepentingan jauh ke depan, misalnya peralatan komunikasi, kosmetika, dan gaya hidup

serta sandang dan pangan. Sementara itu, budaya yang sulit untuk langsung diterima yakni antara lain yang memuat unsur-unsur kepercayaan seperti ideologi, falsafah hidup, pandangan (visi misi) ataupun konsep tentang tata nilai yang melibatkan atau yang akan mempengaruhi pandangan dan sikap seseorang.

Peradaban - yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *civilization* - adalah puncak kebudayaan. Maka “peradaban” adalah suatu hasil yang telah dicapai dan diwujudkan menjadi sesuatu yang maju, positif dan berpengaruh baik serta memberi manfaat. Istilah peradaban kerap digunakan untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Pada saat perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya yang berwujud unsur-unsur yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dapat dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Sedangkan menurut Arnold Toynbee, peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi<sup>1</sup>. Pengertian lain menyebutkan bahwa peradaban adalah kumpulan seluruh hasil budidaya manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik (misalnya bangunan, jalan), maupun non-fisik (nilai-nilai, tatanan, seni budaya maupun iptek).

### **Kondisi Obyektif dan Berbagai Alternatif Pemajuan Gender**

Kesetaraan gender penting untuk membangun sebuah peradaban, yakni peradaban yang unggul, sensitif dan responsif terhadap gender. Artinya, suatu keadaan budaya yang memberikan perhatian terhadap perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, yang diwujudkan melalui sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.

Selama ini ikhtiar pengarusutamaan gender masih menjadi agenda yang panjang dan berliku. Hal itu karena masih banyaknya masalah yang dialami kaum perempuan dalam masyarakat, baik di

---

<sup>1</sup> “*The Disintegrations of Civilization*” dalam *Theories of Society*. 1965. New York: The Free Press, hal. 1355.

sektor domestik maupun di ruang publik. Seperti terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis. Sementara di ruang publik, perempuan juga sangat rentan mengalami berbagai tekanan. Seperti misalnya di sektor ekonomi, terjadinya marginalisasi dan pemiskinan perempuan melalui pemberlakuan upah murah. Di dunia politik, perempuan kerap dianggap tidak rasional, tidak dapat mengambil keputusan dan lebih banyak menggunakan emosinya saja, sehingga dianggap tidak bisa tampil sebagai pemimpin.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kelangsungan kita sebagai bangsa, di mana akan lahir kebudayaan/peradaban bangsa yang sarat dengan praktek ketidakadilan gender. Atau dengan kata lain akan lahir budaya yang tidak responsif gender. Padahal, para *founding fathers* kita amat menentang berbagai bentuk penjajahan seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula, inisiatif pengarusutamaan gender sudah menjadi agenda dunia internasional, yang mendesak negara kita untuk ikut serta dalam gerakan tersebut, agar tidak dikucilkan.

Dalam kaitan tersebut, maka tulisan ini ingin menjawab beberapa permasalahan: bagaimana membangun kesetaraan gender sebagai faktor penting dalam membangun sebuah peradaban yang unggul, tahapan apa saja dalam proyek kesetaraan gender untuk membangun peradaban dan apa sarana yang efektif untuk membangun kesetaraan gender?

### **Kesetaraan dan Keadilan Gender.**

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Persamaan di antara manusia juga berarti adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan dalam hak dan kewajiban. Untuk itu,

diperlukan jaminan agar setiap manusia dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya guna terciptanya tertib kehidupan.

Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu *genus* yang berarti tipe atau jenis. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris: gender, yang berarti jenis kelamin<sup>2</sup>. Arti yang diberikan tidak secara jelas membedakan pengertian jenis kelamin dan gender. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan pengertian kata gender dengan jenis kelamin (*seks*). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Secara biologis, jenis kelamin yang melekat pada laki-laki dan perempuan bersifat berbeda secara permanen dan tidak dapat saling dipertukarkan karena merupakan ketentuan Tuhan (kodrat).

Guru Besar Bidang Komunikasi Gender Institut Pertanian Bogor Aida Vitayala S. Hubies mengungkapkan, persepsi mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologis primer (fisik) telah membudaya, sehingga memengaruhi cara pandang masyarakat. Pandangan tersebut membatasi peran perempuan dalam tatanan sosial. Ciri biologis primer itu memungkinkan perempuan memiliki kemampuan 2H-2M (haid, hamil, melahirkan, dan menyusui). Hal itu menyebabkan mereka diposisikan berperan di rumah.

Karena itu konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa<sup>3</sup>.

Sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Women's Studies Encyclopedia yang menyebut gender sebagai "suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan

---

<sup>2</sup> John M. Echols, Hasan Shadily, 1995, hal. 265.

<sup>3</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 1997, hal. 7-8

perempuan yang berkembang dalam masyarakat”. Unesco juga mendefinisikan gender sebagai peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diciptakan dalam keluarga, masyarakat dan budaya.

Sementara Oakley dalam Mansour Fakih menjelaskan bahwa gender berarti perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Menurut Oakley, gender merupakan “*behavior differences between women and men that are socially constructed created by men and women themselves*”. Gender adalah perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.

Adapun konsep kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype* atau peran gender yang kaku. Hal itu bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, melainkan hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan<sup>4</sup>.

Dengan demikian konsep kesetaraan gender berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya dalam kegiatan yang sama seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta pertahanan dan keamanan nasional, juga kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender di sini bukanlah berarti tuntutan perempuan untuk menyamakan fungsinya dengan laki-laki. Kesetaraan yang dimaksud adalah perempuan bisa memiliki akses dan kesempatan yang sama sesuai dengan kompetensinya di berbagai bidang. Adapun keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Artinya tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

---

<sup>4</sup> Unesco, 2002

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan memiliki kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan kesempatan berpartisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya, sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender meliputi:

*Pertama*, marginalisasi (pemiskinan) perempuan yang disebabkan oleh jenis kelaminnya sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender di bidang ekonomi. Misalnya: peluang menjadi pembantu rumah tangga lebih banyak untuk perempuan. Selain itu, ada pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, misalnya sebagai guru TK atau sekretaris.

*Kedua*, subordinasi (penomorduaan). Hal ini terjadi akibat adanya keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Sejak dulu sudah ada gejala subordinasi, di mana kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dalam masyarakat tumbuh nilai-nilai yang membatasi ruang gerak kaum perempuan. Adanya anggapan bahwa perempuan adalah kaum lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan sebagainya, mengakibatkan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki. Bahkan dalam lingkungan masyarakat tertentu, kesempatan belajar lebih didahulukan untuk kaum laki-laki daripada perempuan.

*Ketiga*, *stereotype* (citra buruk). Yakni pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif sehingga secara umum melahirkan ketidakadilan. Salah satu *stereotype* yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi tersebut bersumber dari pandangan gender terhadap salah satu jenis kelamin tertentu (dalam hal ini adalah

perempuan). Misalnya, adanya citra kuat perempuan sebagai manusia yang hanya mengurus masalah rumah tangga.

*Keempat, violence* (kekerasan). Berbagai kekerasan terhadap kaum perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan fisik antara lain dalam bentuk perkosaan, pemukulan dan penyiksaan. Sedangkan kekerasan psikis atau non fisik berupa pelecehan seksual, ancaman dan paksaan, sehingga secara emosional perempuan yang mengalaminya akan merasa terusik. Kekerasan dapat terjadi dalam rumah tangga (domestik) maupun di ruang publik.

*Kelima*, beban kerja berlebihan akibat diskriminasi dan ketidakadilan gender yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perempuan yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik (pekerjaan dalam rumah tangga).

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender. Di antaranya adalah faktor budaya, hukum, dan agama. Ketidaksetaraan gender yang terjadi karena faktor budaya disebabkan karena masih adanya masyarakat kita yang cenderung *male chauvinistic* - kaum lelaki masih menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk yang kuat dan superior. Kecenderungan tersebut bisa terjadi akibat adanya pengaruh budaya/kepercayaan lokal (adat) ataupun pengaruh tafsir agama, sebagaimana yang dikesankan kalangan feminis atas penafsiran yang bias gender. Kecenderungan *male chauvinistic* ini, diperkokoh dengan ideologi *misoginis* (sikap benci terhadap perempuan) dan ideologi *patriarkhis* (pandangan bahwa laki-laki berkuasa atau dominan atas perempuan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat).

Adapun faktor hukum, meliputi isi hukum (*content of law*), budaya hukum (*culture of law*), maupun proses pembuatan dan penegakan hukum (*structure of law*). Hukum yang dibuat oleh negara seringkali diskriminatif terhadap perempuan, karena pembuat hukum tidak peka terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin (*gender*



*blind*) dan tidak memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan. Hukum yang demikian itu, juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah gender dan didukung oleh budaya yang cenderung *male chauvinistic* seperti yang disebut di atas. Itulah lingkaran konspirasi budaya (agama) dan sistem politik yang mengingkari hak-hak perempuan.

Faktor agama juga berkontribusi menjadi penyebab ketidaksetaraan gender, di antaranya akibat adanya penafsiran terhadap teks-teks keagamaan (Islam) yang bias gender. Pakar agama Nasarudin Umar menyebutkan, metode penafsiran selama ini banyak mengacu pada pendekatan tekstual, daripada kontekstual. Pembaca yang tidak netral (terlalu dipengaruhi oleh perspektif lain) dalam membaca teks ayat-ayat al-Qur'an tentang gender, akan mendapat kesan seolah-olah al-Qur'an berpihak pada laki-laki dan mendukung sistem patriarki, yang oleh kalangan feminis dinilai merugikan perempuan. Pemahaman bias gender juga bisa diakibatkan oleh pembacaan ayat-ayat tentang gender secara persial.

### **Jaminan Kesetaraan Gender.**

Kesetaraan dan keadilan gender dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pembukaan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Negara menjamin bahwa pembangunan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Lebih jelas lagi tergambar dalam Pasal 28I Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dengan demikian, konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia menjamin dan melindungi tiap warga negaranya dari sikap atau tindakan diskriminatif tanpa membeda-bedakan status sosial, ras, suku, budaya, agama, maupun jenis kelamin.

Tindakan diskriminatif yang menyebabkan penguasaan dan dominasi terhadap salah satu kelompok warga tertentu merupakan sikap yang tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Hal itu bertentangan dengan bunyi pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dalam rentang perkembangan peraturan perundang-undangan sejak zaman Orde Baru, ide kesetaraan dan keadilan gender ini sudah diakomodasi dalam GBHN Tahun 1978 yang merumuskan 7 (Tujuh) esensi terkait dengan peranan perempuan, antara lain disebutkan bahwa wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan nasional.

Fase yang sering disebut sebagai tonggak sejarah baru gerakan memajukan perempuan ini selanjutnya ditandai dengan keputusan Presiden membentuk Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita atau lebih dikenal melalui akronim Menmud UPW. Berdasarkan Keppres No.25 Tahun 1983 status Menteri Muda ini ditingkatkan menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, yang mempunyai kewenangan mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja menteri Negara. Pada Bab I pasal 1 ayat 8 Keppres tersebut ditegaskan bahwa “Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, disingkat Men-UPW, mempunyai tugas pokok menangani peranan wanita dalam pembangunan di segala bidang. Lembaga ini selanjutnya menjadi cikal bakal kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dewasa ini.

Komitmen pemerintah Indonesia memajukan kaum perempuan pun semakin diperkuat dengan kesediaannya meratifikasi “konvensi perempuan” yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi Undang-Undang

No. 7 Tahun 1984. Dengan demikian, kebijakan memajukan perempuan itu terikat oleh ketentuan perjanjian internasional.

Meski GBHN sudah dihilangkan, ikhtiar untuk memajukan kesetaraan dan keadilan gender masih dilanjutkan, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan surat Keputusan Kemendagri No. 132 Tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah sebagai tindak lanjut dari Inpres.

Sejak reformasi hingga kini kesadaran akan pentingnya pengarusutamaan gender semakin tumbuh, baik di kalangan legislatif maupun eksekutif dalam melahirkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan cukup responsif gender. Responsif gender artinya suatu keadaan untuk memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, yang diwujudkan dengan sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi akibat perbedaan tersebut. Di antara peraturan yang responsif gender itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam peraturan itu, pemerintah memberikan *guidance* bagi aparat pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Sedangkan dari pihak legislatif, DPR telah melahirkan sejumlah undang-undang yang cukup responsif gender. Di antaranya adalah Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak seluruh warga negara. Paket undang-undang Pemilu (tentang Partai Politik, PEMILU, MD3) yang secara khusus mengatur mengenai *affirmative action* 30% bagi kuota perempuan dalam penyelenggaraan politik di Indonesia. Selain itu terdapat sejumlah undang-undang lain yang secara substantif cukup responsif gender. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Keberadaan undang-undang tersebut telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang. Dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan misalnya, tercantum agar tidak adanya diskriminasi dalam dunia kerja. Pasal 5 berbunyi : “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Dengan demikian undang-undang tersebut menunjukkan komitmen untuk menciptakan kesetaraan dalam kesempatan bekerja tanpa diskriminasi, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Kendati demikian, keberadaan sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut masih terpencar-pencar, belum ada keterpaduan atau pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan masalah pengarusutamaan gender. Saat ini, peraturan yang mengatur secara khusus pengarusutamaan gender masih berbentuk Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedudukan Inpres tidak ada dalam struktur peraturan perundang-undangan sehingga kekuatan hukumnya berada jauh di bawah undang-undang. Selain itu, Inpres tersebut hanya mengatur pihak eksekutif. Sehingga dapat diartikan, komitmen Pemerintah mengenai PUG baru sebatas berlaku pada ranah eksekutif. Sedangkan dalam ranah legislatif dan yudikatif, diperlukan upaya yang lebih besar. Dengan demikian maka inisiatif DPR untuk menyusun RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender harus mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari masyarakat, agar Indonesia memiliki regulasi yang secara khusus memberikan perhatian pada permasalahan ini. Tidak terpisah-pisah dalam beberapa undang-undang, seperti yang terjadi selama ini.

## **Kesetaraan Politik untuk Peradaban.**

Wadah yang penting untuk membangun kesetaraan gender sebagai ikhtiar melahirkan peradaban yang unggul di antaranya adalah melalui dunia politik dan partai politik. Hal itu karena eksistensi bidang politik dan partai politik sebagai instrumen sangat signifikan dalam membangun kebudayaan dan peradaban yang responsif gender.

Keterlibatan perempuan Indonesia di dunia politik dapat dikatakan terlambat. Dilihat dari kaca mata gender, hal itu tidak terlepas dari *stereotype* perempuan dan politik. Adanya anggapan bahwa perempuan lebih cocok pada sektor domestik, sering dianggap sebagai salah satu penyebab terlambat dan sedikitnya kaum perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik. Sedangkan dunia politik diidentikkan sebagai dunia yang keras, penuh persaingan, membutuhkan pemikiran yang rasional dan bukan emosional.

Kedudukan partai politik sangatlah penting dalam pembangunan karena dapat mempengaruhi berbagai arah dan produk kebijakan. Partai politik bertanggung jawab terhadap rekrutmen dan seleksi calon serta memutuskan isu yang ditempatkan dalam agenda kebijakan. Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah: sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat; perekat persatuan dan kesatuan bangsa; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat; partisipasi politik warga negara; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik. Dalam konteks fungsi tersebut, partai politik menjadi sarana untuk mewujudkan sebuah kebudayaan utama dalam masyarakat, di mana akan tercipta suatu sistem tata nilai, norma, aturan, atau kebiasaan politik yang bebas, partisipatif, terbuka, dan demokratis. Kesemuanya itu merupakan prinsip tegaknya ide kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi pokok dalam membangun kesetaraan gender di partai politik adalah dengan menjadikan pandangan pengarusutamaan gender berkembang di partai politik sebagai arus utama. Seperti dalam Inpres No. 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender

menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam konteks partai politik maka strategi tersebut dilakukan pada semua lini dan tahapan penyelenggaraan politik, mulai dari perencanaan politik, penganggaran politik, implementasi program politik, hingga evaluasi dan monitoring program partai politik. Menjadikan perspektif gender sebagai arus utama dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki juga perempuan.

Pada dasarnya, keberadaan perempuan relatif cukup terwakili di tingkat dasar akar rumput, namun kurang terwakili dalam jabatan yang memiliki pengaruh kekuasaan. Tanpa adanya akses ke jaringan kekuasaan yang berpengaruh maka akan sulit mengharapkan partisipasi perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki dalam dunia politik. Dalam hal ini misalnya di parlemen. Dalam perencanaan politik, untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan, ada partai yang melakukannya dari aspek reformasi hukum. Misalnya dengan mengadopsi calon seperti yang diwajibkan oleh undang-undang, hingga reformasi internal partai secara sukarela seperti pembentukan divisi perempuan sebagai bagian dari struktur partai. Hal ini telah dilakukan oleh Partai Golkar, di antaranya dengan membentuk Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum mewajibkan partai politik mencalonkan 30% perempuan di parlemen. Regulasi tersebut mengharuskan partai politik melakukan rekrutmen secara terbuka pada semua kadernya. Keterwakilan perempuan di parlemen pada kenyataannya masih perlu ditingkatkan. Dari hasil pemilu Tahun 2004, keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR hanya sebesar 11,5%. Sedangkan hasil pemilu 2009 menunjukkan sedikit peningkatan, yakni terdapat 18% jumlah anggota dewan perempuan dari seluruh anggota DPR. Pada pemilu 2014 caleg perempuan yang terpilih hanya 14% (79 orang) dari total jumlah 560 kursi nasional yang diperebutkan. Jumlah itu tentu saja masih jauh dari kuota anggota legislatif perempuan yang minimal mencapai 30%. Kendati

demikian, sudah mengalami kemajuan dengan terbukanya kesempatan itu.

Dalam aspek penganggaran partai politik yang berbasis gender, partai tentu saja bertanggung jawab memberikan dukungan melalui pemberian keterampilan dan skill untuk menggalang dana, membentuk atau berhubungan dengan jaringan penggalangan dana bagi calon perempuan, memberikan dana subsidi kampanye bagi calon perempuan, dan menyediakan dana khusus untuk pelatihan calon perempuan. Aspek pendanaan tentu saja sangatlah penting bagi calon perempuan di partai. Sering kali faktor yang menghambat perempuan masuk ke dunia politik adalah terbatasnya dana untuk kampanye. Sebetulnya masalah pendanaan juga dihadapi oleh kaum laki-laki, namun kendala perempuan lebih besar, mengingat status ekonomi mereka juga rendah dibanding laki-laki dalam keluarga. Padahal dana menjadi faktor penentu paling tidak untuk dua aspek: (1) memenangkan nominasi oleh partai yang merekrut agar dicalonkan (2) untuk mendanai kampanye.

Selanjutnya dari segi aspek pendidikan politik, partai harus memiliki perhatian agar calon perempuan memiliki kualitas sama dengan laki-laki dari segi pengetahuan politik. Seringkali perempuan dianggap kurang berpengalaman, baik saat sebelum pemilihan, berkampanye, maupun saat sudah terpilih. Kemampuan berkomunikasi dan menjangkau konstituen menjadi sorotan yang perlu ditingkatkan pada calon perempuan. Oleh karena itulah partai bertanggung jawab memberikan pelatihan dan mentor khusus bagi para perempuan. Dalam menyiapkan calon pemimpin ada tiga komponen dasar yang perlu dipelajari oleh setiap calon pemimpin, yaitu: kemampuan mengembangkan visi mengenai masyarakat masa depan yang didambakan bersama, kemampuan mendapatkan kepercayaan dan kemampuan mengembangkan kearifan diri serta mempergunakan kearifan diri dalam mempergunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat<sup>5</sup>. Oleh karena itu, upaya pelatihan diarahkan untuk memenuhi kapasitas tersebut pada perempuan. Aspek pendidikan politik perempuan juga dilakukan oleh partai terhadap para pemilihnya.

---

<sup>5</sup> Chamim, 2003

Artinya, partai memastikan pendukung mereka terdaftar, mengetahui prosedurnya dan dapat memberikan suara pada hari H pemilihan.

Fase selanjutnya yang krusial adalah pasca perempuan terpilih sebagai anggota parlemen. Fase ini sering disebut sebagai fase eksternal partai, di mana partai dan kadernya akan mendapatkan pengaruh atau dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di luar dirinya. Ini juga seringkali menjadi moment titik balik, di mana perempuan kembali tidak lagi kritis dengan aspirasi pengarusutamaan gendernya. Mereka cukup puas dengan menjadi anggota parlemen, tanpa peduli lebih jauh dengan dinamika politik parlemen. Jadilah keberadaannya seringkali dianggap tidak ada.

Partai politik amat berkepentingan menjadikan para kader perempuannya yang duduk di parlemen agar tetap kritis dengan agenda dan perjuangan gender. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan *assessment* kesetaraan gender. Partai melakukan pemetaan aspirasi dan potensi terhadap daerah-daerah dimana calon perempuannya tidak terpilih. Aspirasi dan potensi itu kemudian menjadi bahan bagi kader perempuan yang terpilih untuk berjuang di parlemen. Selain itu, partai perlu memberikan pelatihan atau *coaching* kepada pejabat yang terpilih/politisi perempuan. Anggota parlemen perempuan yang baru terpilih akan mendapatkan pengetahuan mengenai peran dan fungsi mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Memberikan pemahaman terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan gender, agar mereka memiliki panduan dalam perjuangannya di parlemen. Dengan demikian, mereka memiliki pengetahuan untuk mendorong reformasi kebijakan yang sensitif gender dan pro perempuan di parlemen. Partai juga berkewajiban untuk memastikan akses perempuan terhadap peluang dan retensi. Kita tahu bahwa keanggotaan di parlemen datang dan pergi. Oleh karena itu, dalam situasi pergantian antar waktu (PAW), partai politik harus memastikan bahwa perempuan menggantikan perempuan jika kursi kosong. Hal itu untuk meningkatkan proporsi anggota perempuan. Yang terakhir adalah membentuk jaringan atau kaukus perempuan di parlemen dan pembentukan jaringan atau kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil. Pembentukan koalisi dan aliansi perempuan ini adalah untuk membentuk kebijakan yang lebih



pro perempuan. Secara khusus peran kaukus perempuan ini dapat meningkatkan para anggotanya, mengawal berbagai kebijakan yang pro perempuan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang berkaitan dengan program pengarusutamaan gender.

## Penutup

Secara langsung atau tidak, partisipasi partai politik dalam meningkatkan kesetaraan gender di internal maupun eksternalnya merupakan ikhtiar nyata dalam membangun peradaban yang unggul, yakni peradaban yang sensitif dan responsif gender. Berbagai lembaga dan wadah telah dibentuk oleh para aktivis pergerakan perempuan, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain: Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Aliansi Perempuan Indonesia, Simpul Perempuan dan berbagai LSM lainnya. Namun untuk mewujudkan sebuah peradaban yang menjadikan kaum perempuan sebagai pencetak generasi penerus masih sangat jauh, apabila tidak mendapatkan respons yang arif dan bijaksana dari seluruh penentu kebijakan di Republik Indonesia tercinta.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, I. 2001. *Seks, gender, dan reproduksi kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Alston, M. 2006. *Gender mainstreaming in practice: A view from rural Australia* NWSA Journal, 18 (2).
- Fakih, Mansoer. 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fayumi, Badriyah, and Thahir, Mursyah. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.
- Hubeis, AVS. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press

Jurnal Perempuan, No. 44 Tahun 2005. *Pendidikan Alternatif untuk Perempuan*.

Jurnal Perempuan, No. 45 Tahun 2006. *Sejauh Manakah Komitmen Negara terhadap Diskriminasi*.

Jurnal Perempuan, No. 50 Tahun 2006. *Pengarusutamaan Gender*.

Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Diterbitkan atas kerjasama RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar.

Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender and Development*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Prayitno, Ujianto Singgih. *Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Pelayanan Informasi DPR RI, 1996.

UNDP. 2011. *Pemberdayaan Perempuan Demi Partai Politik yang Lebih Baik*.

<http://irwan-cahyadi.blogspot.com/2012/04/kebudayaan-dan-peradaban.html>, 28 September 2012.

# MEMBANGUN KEBUDAYAAN PANCASILA

Lalu Sudarmadi

## Abstrak

Indonesia merupakan masyarakat sub-sub kebudayaan daerah yang kemudian berhimpun membentuk kebudayaan nasional. Secara hakiki kebudayaan nasional terdiri dari semua budaya yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia. Sistem sosial bangsa Indonesia dalam kebudayaan nasional, memiliki dasar negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia dan berdemokrasi Pancasila. Demikian pula, masyarakat Indonesia dalam pola tindakannya, memiliki sifat gotong-royong, sederhana, dan saling bermufakat bermusyawarah. Globalisasi sebagai proses difusi kebudayaan telah menyebar dan terserap kedalam berbagai unsur kebudayaan nasional. Di Indonesia proses pembudayaan globalisasi melibatkan budaya lokal dan nasional kedalam tatanan jaringan global sebagai cerminan saling keterkaitan (*interconnectedness*) antar masyarakat dari penjuru dunia. Pada Abad Milenium ketiga ini, kebudayaan global bercirikan teknologi dan pasar dan menjadi lambang peradaban menuju *post modern* dan mau tidak mau diterima oleh masyarakat kebudayaan yang berbasis tradisional, sebagai konsekwensi dari saling keterkaitan antar warga dan antar masyarakat tradisional dengan masyarakat modern.

**Kata kunci:** Budaya, Pancasila, Masyarakat, Gotong-Royong, Peradaban, Globalisasi.

## Abstract

*Indonesia is a sub-sub society of local culture which then assembles to form a national culture. Essentially national culture consists of all cultures contained within the territory of the Republic of Indonesia. The social system of the nation of Indonesia in the national culture, has a state base based on Belief in the One Supreme God, Unity of Indonesia and democracy of Pancasila. Similarly, the people of Indonesia in the pattern of their actions, have the nature of mutual help, simple, and mutually consensus berkusyawah. Globalization as a process of cultural difusion has spread and absorbed into various elements of national culture. In Indonesia the process of globalization culture involves local and national culture into the global network order as a reflection of interconnectedness between people from all over the world. In this third millennium, global culture is characterized by technology and markets and becomes a symbol of*

*civilization towards modern post and inevitably accepted by traditional culture-based society, as a consequence of interconnectedness between citizens and between traditional societies and modern society.*

**Keywords:** *Culture, Pancasila, Society, Gotong Royong, Civilization, Globalization.*

## **Pendahuluan**

Sejumlah pakar sejarah sosial budaya dan para cendekia luar maupun dalam negeri telah memberikan definisi tentang kebudayaan suatu bangsa yang kesimpulannya tidak terlalu jauh bahwa kebudayaan manusia sangat erat kaitannya dengan akal dan budi manusia. Karena dari akal budi manusia mengandung unsur dan nilai, sesuai dengan sifat aslinya maka manusia dengan rasa, karsa maupun karyanya, menjadi dasar hidup kemanusiaannya.

Menurut Soeryanto Poespowardoyo<sup>1</sup>, budaya secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yaitu *Colere* yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang Selain itu budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanksekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Adapun menurut istilah kebudayaan merupakan suatu yang agung dan mahal, tentu saja karena ia tercipta dari hasil rasa, karya, karsa, dan cipta manusia yang kesemuanya merupakan sifat yang hanya ada pada manusia. Tak ada makhluk lain yang memiliki anugrah itu sehingga ia merupakan sesuatu yang agung dan mahal.

Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

M. Jacobs dan B. J. Stern berpendapat bahwa kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial,

---

<sup>1</sup> Soeryanto Poespowardoyo. 1990. “*Kebudayaan Ladang*”

ideologi, religi, dan kesenian serta benda, yang kesemuanya merupakan warisan sosial.

Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

R. Soekmono (Arkeolog) mempunyai pendapat kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan dalam penghidupan. Kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat.

Masih banyak definisi tentang kebudayaan yang diberikan oleh sarjana sosial budaya dan sejarawan. Dengan demikian, definisi kebudayaan dalam tulisan ini adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan dalam penghidupan, termasuk di dalamnya seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama, dipandang layak dan dapat diterima oleh para anggota masyarakat yang dianut dan diwariskan dalam perilaku masyarakat. Pancasila sebagaimana tercantum dalam Alinea Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya yang dianut dan diwariskan dalam perilaku masyarakat Indonesia.

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana pembentukan kebudayaan Pancasila yang menyatu dalam perikehidupan manusia Indonesia yang mengandung unsur-unsur budaya daerah yang beragam namun tetap satu dalam semangat gotong royong di tengah arus globalisasi, sehingga nilai-nilai budaya Pancasila menjadi peradaban masyarakat Indonesia.

## Pengertian Dasar Kebudayaan Nasional Pancasila

Pancasila sebagai ideologi dasar negara merupakan kristalisasi unsur-unsur kebudayaan Indonesia, menurut Koentjaraningrat terdiri atas 7 (tujuh) unsur dalam kebudayaan meliputi; bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan pengetahuan sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Dari masing-masing unsur inilah yang mendukung kebudayaan merupakan esensi dasar bagi kehidupan manusia.

- a. **Bahasa** adalah merupakan jendela dunia, dimana bahasa berfungsi sebagai alat perantara (komunikasi) sebuah bentuk ucapan yang digunakan untuk membangun adaptasi kebudayaan, baik secara tulis maupun lisan.
- b. **Sistem pengetahuan** merupakan alat ilmu pengetahuan untuk mengetahui alam sekeliling, ruang, waktu, dan seluruh alam semesta serta untuk mengetahui sifat antar sesama manusia, ruang bilangan maupun bentuk manusia.
- c. **Sistem organisasi sosial** yang disebut juga organisasi kemasyarakatan, merupakan kelompok masyarakat, yang memiliki garis keturunan atau sistem kekerabatan. Sistem kemasyarakatan juga memiliki perkumpulan, sistem kenegaraan, dan juga sistem kesatuan hidup.
- d. **Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi**, adalah sejumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh anggota masyarakat, meliputi cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan alat kerja, sebagai alat penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi dan kebutuhan lainnya berupa bendawi. Unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik yang meliputi alat produksi, senjata, wadah makanan dan minuman, pakaian perhiasan serta alat berlindung berupa rumah atau alat transportasi.
- e. **Sistem mata pencaharian hidup**. ialah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi

berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan dan perdagangan.

- f. **Sistem Religi** dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem religi yang meliputi, sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, upacara keagamaan.
- g. **Kesenian** dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan, bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari permainan imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besar, bentuk kesenian dalam tiga garis besar, yaitu seni rupa, seni suara dan seni tari.

Atas dasar unsur kebudayaan menurut definisi Koentjaraningrat tersebut, maka Pancasila dibentuk atas unsur-unsur hasil budi, cipta, rasa dan karsa manusia yang berproses dan *maujud* baik berupa fisik/artefak, pengetahuan, nilai-nilai terkait hubungan antara sesama manusia, manusia dengan sang pencipta, manusia dengan lingkungan semesta Sehingga, Pancasila merupakan sistem nilai kebudayaan sebagai karya ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia Indonesia.

Pemahaman tentang kebudayaan nasional Pancasila adalah gabungan dari kebudayaan daerah yang secara hakiki terdiri dari semua budaya yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia yang mengikat kedalam sila-sila Pancasila. Kebudayaan nasional Pancasila merupakan realitas kesatuan nasional yang melibatkan budaya-budaya nusantara asli, dalam kehidupan nasional yang dapat dihayati dan dimaknai oleh seluruh warga masyarakat Indonesia.

Bila dicermati pandangan masyarakat Indonesia tentang kebudayaan Indonesia, ada dua kelompok pandangan:

1. Kelompok pertama yang mengatakan kebudayaan nasional Indonesia belum jelas, yang ada baru unsur pendukungnya yaitu kebudayaan etnik dan kebudayaan asing. Kebudayaan Indonesia itu sendiri sedang dalam proses pencarian.

2. Kelompok kedua yang mengatakan mengatakan kebudayaan nasional Indonesia sudah ada. pendukung kelompok ketiga ini antara lain adalah Sastrosupono. Sastrosupono mencontohkan, Pancasila, bahasa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, moderenisasi dan pembangunan (1982:68-72).

Adanya pandangan yang mengatakan Kebudayaan Nasional Indonesia belum ada atau sedang dalam proses mencari, boleh jadi akibat:

- a) Tidak jelasnya konsep kebudayaan yang dianut dan pahami
- b) Akibat pemahaman mereka tentang kebudayaan hanya misalnya sebatas seni, apakah itu seni sastra, tari, drama, musik, patung, lukis dan sebagainya.
- c) Mereka tidak memahami bahwa iptek, juga adalah produk manusia, yang termasuk ke dalam kebudayaan.

Proses mencari kebudayaan nasional Pancasila mendapat tantangan akibat derasnya arus globalisasi sehingga secara individu maupun individu dalam kelompok, Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dapat menjadi katalisator nilai-nilai agar supaya tantangan globalisasi menjadi perkuatan ciri dan karakter peradaban Indonesia.

### **Kebudayaan Nasional Pancasila dalam Tatanan Globalisasi**

Globalisasi merupakan istilah lain dari difusi kebudayaan atau proses menyebarnya berbagai (atau sebagian) unsur suatu kebudayaan ke kebudayaan yang lain; Masuknya/terlibatnya budaya lokal ke dalam suatu tatanan jaringan budaya global, meningkatnya keterhubungan (*interconnectedness*) antar masyarakat di berbagai penjuru dunia.<sup>2</sup>

Sebab-sebab terjadinya globalisasi pertama adanya migrasi penduduk, adanya kemajuan teknologi transportasi, kolonialisme, industrialisasi, media masa dan teknologi informasi, ekspansi Pasar

---

<sup>2</sup> Lucian W. Pye. 1965. *Introduction: Political culture and political development dalam LucianW.Pye & SidneyVerba (Eds.), Political culture and political development.*



atau perdagangan lintas negara, dan pariwisata. Terciptanya kebudayaan global (*global culture*) meliputi ekonomi, politik, kebudayaan, ilmu dan teknologi serta lingkungan.

Globalisasi ekonomi akibat dari sistem liberalisasi ekonomi dan privatisasi. Globalisasi politik karena adanya demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan kesetaraan gender. Globalisasi kebudayaan disebabkan adanya *network society*, *global culture*, glocalisasi (globalisasi dan lokalitas), globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan teknologi *digital (internet cellphone)*, serta globalisasi masalah lingkungan akibat terjadinya perubahan iklim dan *eco environment*.

Perubahan cepat akibat arus globalisasi kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang membawa nilai-nilai budaya negara lain yang ingin menghegemoni Indonesia mengakibatkan kebutuhan akan pentingnya Pancasila dalam pengarusutamaan budaya di negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu menyaring secara dinamis dan adaptif proses difusi globalisasi agar sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai inti kebudayaan Pancasila.

### **Nilai Kebudayaan Pancasila**

Berdasarkan pengetahuan tentang nilai suatu kebudayaan setiap manusia hidup bersama dengan yang lain. Manusia berdasarkan kodratnya juga memiliki potensi kejiwaan yakni rasio, perasaan dan hasrat, serta kerohanian intuitif yang bebas. Dengan penggunaan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai suatu peradaban. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia.

Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat/ciri khas kebudayaan suatu bangsa

Indonesia.<sup>3</sup> Dalam membangun dan menyatukan nilai keragaman kebudayaan daerah kepada kebudayaan nasional oleh para *stakeholder* telah merumuskan adanya konsep kebangsaan dengan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Sementara itu, kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi isi kebudayaan itu sendiri karena keberadaannya tidak terlepas dari banyak faktor lain sehingga kebudayaan itu ada, berlangsung, dan berkembang. Setiap wilayah memiliki tata nilainya sendiri yang timbul sejak pemukiman pertama sampai perkembangan kemudian mengikuti pertumbuhan penduduk dan keragaman aktivitas manusia dan memiliki perbedaan-perbedaan wujud kebudayaan. Menurut J.J. Hoenigman<sup>4</sup>, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. **Gagasan (Wujud ideal)** Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.
2. **Aktivitas (tindakan)** Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan **sistem sosial**. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
3. **Artefak (karya)** Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat

---

<sup>3</sup> M. Junus Melalatoa (ed.). 1997. *Sistem Budaya Indonesia*.

<sup>4</sup> Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*.

diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas:

#### **A. Kebudayaan material**

Kebudayaan material adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Contoh kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, dan mesin cuci.

#### **B. Kebudayaan nonmaterial**

Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

Arus globalisasi sebagai proses difusi menyebar dan meresap ke tiap-tiap kebudayaan daerah dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Budaya daerah ini muncul saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain. Budaya daerah mulai terlihat berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Hal itu dapat dilihat dari cara hidup dan interaksi sosial yang dilakukan masing-masing masyarakat kerajaan di Indonesia yang berbeda satu sama lain.

Dalam rangka mewujudkan perikehidupan ekonomi yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam sila kelima Pancasila, maka, kebudayaan daerah dikelompokkan beberapa macam yaitu:

1. Kebudayaan Pemburu dan Peramu Kelompok, kebudayaan pemburu dan peramu ini pada masa sekarang hampir tidak ada. Kelompok ini sekarang tinggal di daerah-daerah terpencil saja.
2. Kebudayaan Peternak Kelompok, kebudayaan peternak/kebudayaan berpindah-pindah banyak dijumpai di daerah padang rumput.
3. Kebudayaan Peladang Kelompok, kebudayaan peladang ini hidup di daerah hutan rimba. Mereka menebang pohon-pohon, membakar ranting, daun-daun dan dahan yang ditebang. Setelah bersih lalu ditanami berbagai macam tanaman pangan. Setelah dua atau tiga kali ditanami, kemudian ditinggalkan untuk membuka ladang baru di daerah lain.
4. Kebudayaan Nelayan Kelompok, kebudayaan nelayan ini hidup di sepanjang pantai. Desa-desa nelayan umumnya terdapat di daerah muara sungai atau teluk. Kebudayaan nelayan ditandai kemampuan teknologi pembuatan kapal, pengetahuan cara-cara berlayar di laut, pembagian kerja nelayan laut.
5. Kebudayaan Petani Pedesaan, kelompok kebudayaan petani pedesaan ini menduduki bagian terbesar di dunia. Masyarakat petani ini merupakan kesatuan ekonomi, sosial budaya dan administratif yang besar. Sikap hidup gotong royong mewarnai kebudayaan petani pedesaan.

Keragaman kebudayaan daerah dalam perikehidupan ekonomi manusia Indonesia dari aspek sila kelima Pancasila yang majemuk ini sangat kaya akan kebudayaan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa jurang pemerataan dalam tingkat kemajuan peradaban, di antara kebudayaan-kebudayaan tersebut masih menganga. Kebudayaan daerah tertentu jauh lebih berkembang di banding dengan kebudayaan daerah lain, bahkan masih ada kebudayaan daerah yang seolah-olah mandek.

Dalam hubungan kebudayaan keaneka ragaman ini semakin banyak kontak kebudayaan maka akan mendapatkan kesempatan untuk mengadopsi pemikiran, memunculkan pola tingkah laku, serta penyerapan tehnologi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan minat

masyarakat. Dengan demikian perbedaan kebudayaan antar daerah di Indonesia mencerminkan keberagaman pengaruh kebudayaan asing serta besar kecilnya kontak-kontak kebudayaan asing serta besar kecilnya kontak-kontak kebudayaan yang terjadi. Pada dasarnya ini terjadi karena masing-masing daerah dilahirkan, dibesarkan, dan dibiasakan didalam kontak kebudayaan yang berbeda dalam menentukan standar berfikir (ilmu pengetahuan) merasa, dan berperilaku budaya.

### **Akar Kebudayaan Indonesia**

Akar kebudayaan Indonesia berhubungan dengan zaman prasejarah, mulai dari nenek moyang kita yang membawa kebudayaan Dongson, setelah itu diikuti oleh perkembangan Islam di Indonesia. Jadi islam juga merupakan salah satu akar kebudayaan Indonesia.

Berikut ini ringkasan mengenai sejarah nenek moyang bangsa Indonesia dari tulisan Mochtar Lubis pada tahun 1986 dalam pidato kebudayaannya yang berjudul “Situasi Akar Budaya Kita”:

Nenek moyang kita adalah bagian dari arus perpindahan manusia yang bergerak di zaman lampau yang telah hilang sebagai hilangnya bayangan wayang dari layar sejarah, bergerak dari bagian Timur Eropa Tengah dan bagian Utara wilayah Balkan sekitar laut Hitam ke arah timur, mencapai Asia, masuk ke Tiongkok. Dan di Tiongkok arus perpindahan ini bercabang-cabang ke utara, timur dan selatan.

Arus selatan mencapai daerah Yunan, sedang bagian timur mencapai laut Indo Cina. Di sinilah tempat lahirnya budaya asal Indonesia. Manusia-manusia yang berpindah dan bergerak ke Asia dari Eropa Tengah dan Wilayah Balkan itu adalah orang Tharacia, Iliria, Cimeria, Kakusia, dan mungkin termasuk orang Teuton, yang memulai perpindahan mereka di abad ke-9 hingga abad ke-8 sebelum nabi Isa. Mereka membawa keahlian membuat besi dan perunggu.

Nenek moyang orang Indonesia yang telah berada terlebih dahulu dari mereka di daerah Dongson ini telah mengembangkan seni monumental tanpa banyak ornamentik yang dekoratif. Dari

pendatang-pendatang baru ini mereka mengambil alih, menerima, dan mencernakan seni ornametik pendatang-pendatang dari barat ini. Tidak saja dalam ornametik, akan tetapi juga dalam hiasan tenunan (amat banyak persamaan antara hiasan tenun Indonesia dan Balkan umpamanya), dan juga dalam musik dan nyayian. Jaap Kunst, seorang ahli musik, juga ahli musik Indonesia mengidentifikasi persamaan nyayian rakyat di pulau Flores dengan nyanyian rakyat di bagian timur Yugoslavia (Balkan). Kebudayaan Dongson menunjukkan lebih banyak persamaan dan kaitan dengan budaya Eropa dibanding budaya Cina.

Nenek moyang Dongson inilah yang bergerak ke selatan, dan kemudian mencapai Nusantara. Di Nusantara hampir tidak ada perpisahan antara zaman perunggu dan zaman besi. Hal ini sama juga terjadi di Indo Cina. Dalam penggalian situs-situs purbakala, perunggu dan besi selalu ditemukan bersama-sama. Hulu pisau dongson banyak berbentuk manusia, seperti keris Majapahit. Bentuk hulu pisau yang serupa juga ditemukan di Holstein (Jerman), Denmark, dan di Kaukasus.

Tetapi, sebelum nenek moyang dari Dongson turun ke Nusantara, kelompok-kelompok manusia lain telah terlebih dahulu datang. Selama zaman es terakhir, kurang lebih 15.000 tahun sebelum Masehi, sejarah bumi Nusantara menunjukkan bahwa sebagian besar Nusantara bagian barat menyatu dengan daratan Asia Tenggara, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan wilayah yang kini laut Jawa. Ketika es berakhir, permukaan laut naik kembali, dan terbentuklah gugusan pulau-pulau seperti yang kita kenal kini. Sejarah bumi Nusantara telah berpengaruh besar pada perkembangan manusia Melayu-Polinesia. Mereka menjadi bangsa maritim, yang kurang lebih 1000 tahun sebelum Nabi Isa megarungi Samudera Hindia. Manuskrip tua Hebrew dari masa akhir 2000 dan permulaan 1000 sebelum tahun Nabi Isa telah menyebut perdagangan kulit manis dari berbagai tempat sepanjang pantai timur Afrika.

Sebuah naskah Arab dari abad ke 13 menceritakan masuknya orang Melayu-Polinesia ke belahan barat Samudera Hindia. Naskah itu mengatakan bahwa di masa mundurnya Kerajaan Fira'un di Mesir,

tempat yang bernama Aden, yang menguasai jalan masuk ke laut Merah (yang masa itu merupakan tempat penduduk nelayan), telah direbut oleh orang Qumr (Melayu-Polinesia) yang datang dengan armada yang terdiri dari perahu-perahu yang memakai cadik. Mereka mengusir penduduk setempat, membangun berbagai monumen dan memelihara hubungan langsung dengan pulau Madagaskar dan Asia Tenggara. Para ahli sejarah menyebutkan hal itu mungkin terjadi di masa Nabi Isa masih hidup. Untuk masa yang cukup lama orang Melayu-Polinesia menguasai pelayaran dan perdagangan lewat Samudera Hindia dari Asia Tenggara ke pintu Laut Merah, sepanjang pantai timur Afrika dan Pulau Madagaskar.

Dalam melakukan ini, mereka juga telah membawa berbagai kekayaan budaya ke Madagaskar dan Afrika. Di Madagaskar mereka telah menetap di belahan barat pulau itu. Hingga kini masih terlihat berbagai persamaan kata antara bahasa Madagaskar dan bahasa suku Manyan di Kalimantan. Ke timur, nenek moyang Melayu-Polinesia ini berlayar jauh ke pedalaman pasifik, menetap di berbagai kepulauan, dan mereka paling ke timur mencapai Easter Island, pulau terjauh ke timur dari Nusantara.

Jelaslah bahwa budaya bangsa kita berakar jauh ke zaman prasejarah, ke masa silam yang begitu jauhnya, hingga telah lenyap dari ingatan bangsa kita. Jelas pula bahwa kita telah mewarisi budaya dunia yang ada di masa itu, di samping nenek moyang kita telah memberi pula sumbangan pada budaya-budaya bangsa lain di seberang Samudera Hindia, serta menciptakan berbagai budaya di Madagaskar, dan di kepulauan-kepulauan Samudera Pasifik.

Proses melalui zaman Mesolitik mencapai zaman Neolitik mungkin terjadi kurang lebih 3500-2500 tahun sebelum Nabi Isa. Ketika itu mereka mulai tinggal bersama dalam komunitas-komunitas kecil dan mulai mengembangkan pertanian dan sistem pengairan. Di zaman ini berkembang akar budaya musyawarah Indonesia, karena di kala itu belum ada kepala dan raja, dan semuanya masih dimusyawahkan oleh semua anggota komunitas, dipimpin oleh orang-orang yang lebih tua. Wanita ikut bermusyawarah, dan anak-anak boleh hadir dan ikut mendengar. Di suku Sakudei di pulau Mentawai,

seorang peneliti Swiss melaporkan bahwa dia masih menemukan tradisi musyawarah yang lama itu.

Akar budaya kita juga tumbuh dalam kepercayaan bahwa segala yang ada di bumi memiliki "ruh-ruh" sendiri. Ruh manusia adalah saudaranya, yang dapat melepaskan diri dari dalam badan seseorang, dan ruh itu dapat mengalami bencana dalam petualangannya di luar tubuh kita, yang dapat mengakibatkan yang punya tubuh jatuh sakit atau mati. Manusia harus berbaik-baik dalam hubungannya dengan dunia roh ini.

Selanjutnya nenek moyang kita di masa Megalitik itu memiliki konsep hubungan dan pertentangan antara dunia atas dan dunia bawah. Dalam upacara-upacara khusus, mereka membangun megalith-megalith dengan tujuan melindungi ruh dari bahaya-bahaya yang datang dari dunia bawah, untuk menjadi penghubung antara yang hidup dan yang telah mati, dan untuk mengabadikan kekuatan-kekuatan magis mereka yang membangun megalith-megalith tersebut, atau untuk siapa batu-batu itu dibangun. Megalith-megalith dibangun untuk memperkuat kesuburan manusia, ternak dan apa yang mereka tanam, dan dengan demikian memperbesar kekayaan generasi-generasi yang akan datang.

Kebudayaan Megalitik ini kemudian dimasuki oleh budaya Dongson yang membawa teknologi perunggu dan besi, dan memberikan nafas dan kekuatan serta daya cipta baru pada kelompok-kelompok budaya di Nusantara. Diperkirakan pula bahwa budaya Dongson membawa teknologi bertanam padi di sawah. Teknologi padi sawah mendorong komunitas-komunitas kecil untuk lebih berintegrasi mengembangkan dan memelihara sistem pengairan, koordinasi bertanam serempak pada waktu yang sama. Dalam proses sejarah, teknologi padi sawah ini telah mendorong proses integrasi masyarakat-masyarakat desa Indonesia yang hingga kini tumpuan kehidupan terbesar bangsa kita. Ia juga erat hubungannya dengan irama iklim, datang musim kering dan musim hujan, yang mempengaruhi pola kehidupan di Indonesia. Musim panen merupakan musim perkawinan umpamanya.



Pemujaan nenek moyang merupakan salah satu akar budaya bangsa Indonesia. Pandangan kosmik mengenai kontradiksi antara dunia bawah dan dunia atas tercermin dalam organisasi sosial berbagai suku bangsa kita; garis ibu dan garis ayah, hubungan dasar antara dua suku yang saling mengambil laki-laki dan perempuan dari dua suku untuk perkawinan, membuat tiada satu suku lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Setiap suku bergantian menduduki tempat yang superior dan tempat di bawah. Struktur tradisi kesukuan ini merupakan sebuah mekanisme ke arah demokrasi, yang seandainya kita pandai mengembangkannya dapat merupakan kekuatan untuk tradisi demokrasi bangsa kita.

Datangnya agama Budha, Hindu, dan Islam, bangkitnya feodalisme, lalu datang orang Eropa membawa penindasan penjajah, dan agama Nasrani, lalu lewat pendidikan Barat masuk pula ilmu pengetahuan modern dan teknologi modern telah mendorong berbagai proses kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan budaya, yang akhirnya membawa manusia Indonesia pada keadaan hari ini.

Akar budaya lama jadi layu dan terlupakan, meskipun ada diantaranya tanpa kita sadari masih berada terlena di bawah sadar kita. Bangkitnya feodalisme di Indonesia dengan lahirnya berbagai kerajaan besar dan kecil telah mengubah hubungan antara kekuasaan dan manusia atau anggota masyarakat. Penjajahan Belanda menggunakan sistem menguasai dan memerintah melalui kelas bangsawan atau feodal lama Indonesia telah meneruskan tradisi feodal berlangsung terus dalam masyarakat kita. Malahan setelah Indonesia merdeka, hubungan-hubungan diwarnai nilai-nilai feodalisme masih berlangsung terus, hingga sering kita mengatakan bahwa kita kini menghadapi neo-feodalisme dalam bentuk-bentuk baru.

Semua pendidikan modern, falsafah Barat dan Timur, ideologi-ideologi yang datang dari Barat mengenai manusia dan masyarakat. Agama Islam dan Nasrani yang jadi lapis terakhir di atas kepercayaan-kepercayaan lama dan nilai-nilai akar budaya kita, oleh daya sinkritisme manusia Indonesia, semuanya diterima dalam dirinya tanpa banyak konflik dalam jiwa dan diri kita.

Sesuatu terjadi dalam diri kita, hingga secara budaya tidak mampu memisahkan yang satu dari yang lain: mana yang takhyul, mana yang ilmiah, mana yang bayangan, mana yang kenyataan, mana yang mimpi dan mana dunia nyata. Malahan banyak orang kini membuat ilmu dan teknologi jadi takhyul dalam arti, orang percaya bahwa ilmu dan teknologi dapat menyelesaikan semua masalah manusia di dunia. Dan ada yang berbuat sebaliknya.

Kita jadi tidak tajam lagi membedakan mana yang batil dan mana yang halal. Karena itu beramai-ramai dan penuh kebahagiaan kita melakukan korupsi besar-besaran, dan tidak merasa bersalah sama sekali.<sup>5</sup>

### **Sistem Sosial Budaya Indonesia Berdasarkan Pancasila**

Pola tindak sosial budaya Indonesia telah terbentuk dalam tiap-tiap kebudayaan daerah dan tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Wujud Pancasila secara material yang menopang peradaban, seyogyanya Pancasila menjadi filter dan benteng sekaligus jalan bagi proses difusi (penyebarserapan) nilai-nilai universal globalisasi kedalam cara-cara mengatasi kesulitan masyarakat Indonesia.

Proses difusi nilai-nilai universal globalisasi yang telah terbangun dan terbentuk pada sistem sosial budaya Indonesia berdasarkan Pancasila, meliputi, antara lain:

1. Gotong royong. Persatuan dan kesatuan hanya bisa terwujud melalui gotong royong. Suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa dalam duka maupun suka, kehidupan keluarga, berbangsa dan bernegara.
2. Prasaja. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tidak akan terwujud apabila kehidupan yang sederhana, cermat, disiplin, profesional, dan tertib tidak dilaksanakan.
3. Musyawarah untuk mufakat. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau perorangan dapat menemui

---

<sup>5</sup> Lubis. 1999. *Pembebasan Budaya-Budaya Kita*.

perbedaan yang tidak diakhiri dengan perpecahan maupun pertentangan.

4. Kesatria. Persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial tidak bisa terwujud tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian dan perjuangan tidak mengenal menyerah demi kepentingan bersama.
5. Dinamis. Kehidupan pribadi/keluarga bangsa dan negara juga bersifat dinamis sesuai dengan zaman sehingga waktu sangat penting dalam rangka persatuan dan kesatuan maupun keadilan bagi seluruh rakyat.
6. Budi Pekerti Setiap pribadi atau dalam keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Bahwa kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya harus dijamin, dimana pendidikan dan pengajaran menjadi hak warga negara yang membutuhkan sistem pendidikan nasional. Kebudayaan Nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan daerah seluruh Indonesia. Kebudayaan harus menuju kerarah kemajuan, serta tidak menolak bahan-bahan dari luar.

Sistem sosial budaya berdasarkan Pancasila tersebut secara lentur dan dinamis membentuk pola perilaku penyelenggara negara yang diimplementasikan melalui konstitusi UUD NRI Tahun 1945, perundang-undangan, perda dan peraturan-peraturan/kebijakannya sebagai produk legislasi.

Dengan demikian, sistem sosial budaya berdasarkan Pancasila yang diimplementasikan oleh penyelenggara negara kedalam produk legislasi tujuan akhirnya adalah mencapai tujuan negara sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mencakup antara lain:

**Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa.** Sesuai dengan asas kemasyarakatan kehidupan beragama atau

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diwujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang Maha Esa.

**Negara Persatuan.** Negara Indonesia adalah negara persatuan yang mendasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Maka pembangunan nasional adalah pengalaman Pancasila dan hakekatnya pembangunan nasional itu adalah pembangunan seluruh manusia Indonesia dalam kehidupan manusia yang serba cepat dan canggih.

**Demokrasi Pancasila.** Dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan, permusyawarata perwakilan, kehidupan pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus mampu memilih perwakilannya dan pemimpinnya yang dapat bermusyawarah untuk mufakat dalam mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan dan perorangan demi terselenggaranya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Karena itu sistem manajemen sosial perlu ditegakkan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun moral.

**Keadilan Sosial bagi Semua Rakyat.** Letak geografi Indonesia, sumber daya alam, dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mempunyai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, yang berkeadilan bagi semua rakyat.

## **Penutup**

Masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa yang besar maupun yang kecil itu masing-masing mengembangkan kebudayaan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila terhadap lingkungan kebudayaan daerah masing-masing. Demikian pula aneka ragam kebudayaan yang berkembang di kepulauan Nusantara itu dihayati sebagai kerangka acuan dalam bersikap dan menentukan tindakan, serta sebagai ciri pengenal yang membedakan diri dari kelompok suku bangsa yang lain, yakni gotong royong dan kekeluargaan.

Derasnya arus globalisasi hingga ke sendi-sendi kebudayaan daerah memerlukan filter, benteng, akselerator proses difusi globalisasi ke dalam jati diri dan karakter bangsa Indonesia, yakni tak lain adalah Pancasila.

Terkait dengan pengembangan Kebudayaan Nasional Pancasila di tengah-tengah gelombang arus globalisasi dan keserasian pergaulan internasional sudah saatnya Pemerintah menyusun Rencana Induk Nasional Pengembangan Kebudayaan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan arah kebijaksanaan, strategi, dan indikasi program pengembangan kebudayaan Indonesia yang meliputi pembangunan jati diri dan karakter bangsa, sejarah dan warisan budaya, industri budaya, sumber daya manusia dan kelembagaan serta aspek strategis kebudayaan lainnya yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait.

Adapun sasaran yang dicapai adalah tersusunnya Rencana Induk Nasional Pengembangan Kebudayaan Indonesia yang akan memberikan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pengembangan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan Nasional sampai dengan 2025.

Sistematika Rencana Induk Nasional Pengembangan Kebudayaan Indonesia, seyogyanya mencakup pokok-pokok kebijakan berikut ini.

1. Dasar pijak dan pertimbangan
  - A. Pancasila
  - B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - C. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025.

Dasar pijak perundang-undangan itu ditunjang dengan dasar pertimbangan yang meliputi; Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No. 43 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

2. Isu-isu strategis (Internal/external) meliputi arah kebijaksanaan dan indikasi program

3. Visi dan Misi

a) Visi

- Konsep Dan Paradigma Pengembangan Kebudayaan Indonesia
- Pilar-Pilar Pengembangan Kebudayaan Indonesia.  
Pilar I ; Jati Diri Bangsa Dan Karakter Bangsa.  
Pilar II ; Sejarah dan Warisan Budaya  
Pilar III ; Industri Budaya  
Pilar IV ; SDM Dan Kelembagaan
- Kebijakan, Strategi,dan Program.
- Prioritas,Pentahapan,dan Strategi Implementasi.

b) Misi

Terciptanya Bangsa Indonesia Yang memiliki Jati Diri Bangsa Dan Karakter, Mampu beradaptasi, serta Hidup Sejahtera dan Bahagia.

### Daftar Pustaka

Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. (terjemahan Aswab Mahasin) Penerbit Pustaka Jaya.

Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. (Penerjemah : A Rahman Zainuddin). Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS – UI.

Harsojo. 1999. *Pengantar Antropologi*. Bandung : CV Putra A Bardin.

- Hemilton, Edith. 1958. *The Greek Way Western Civilization*. New American Library.
- Horton, B Paul. 1973. *Sosiologi*. Penerbit Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press).
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, Nina. 2008. *Sejarah Kebudayaan Daerah Indonesia*. Universitas Pajajaran Bandung. *kertas kerja*.
- Melalatoa, Junus M. (ed). 1997. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: Kerjasama FISIP Universitas Indonesia dengan PT. Pamator
- Poespowardoyo, Soeryanto. 1990. *Kebudayaan Ladang*. Gramedia.
- Pye, Lucian W. (1965). *Introduction: Political culture and political development dalam Lucian W. Pye & Sidney Verba (Eds.), Political culture and political development*. NJ: Princeton University Press.
- Sumardjo Jacob. 2002. *Arkeologi Budaya Indonesia*. Penerbit Qalam Yogyakarta.
- Tarumana Abdurrauf. 1993. *Kebudayaan Tolaka*. Balai Pustaka.
- Usman, Pelly. 1998. *Masalah Batas-Batas Bangsa*. Jurnal Antropologi Indonesia No. 54.
- Vredenberg Hampatong Jacob. 1981. *Kebudayaan Matrial Suku Dayak di Kalimantan*. Penerbit Gramedia.
- Wiriyosuparto Sutjipto. 1964 “*The Glimps of cultural History Of Indonesia*” Jakarta
- Zutmulder, PJ. 1990. *Manunggaling Kawulo Gusti Panthaiisme dan Monotisme Dalam Sastra Suluk Jawa*. Gramedia.





# PERGESERAN BUDAYA POLITIK INDONESIA DARI LEGITIMASI MORAL KE LEGITIMASI MODAL

Ali Masykur Musa

## Abstrak

Budaya politik merupakan refleksi perjalanan budaya suatu bangsa yang berpengaruh atas terciptanya sistem politik. Budaya politik adalah cerminan antara perilaku budaya dan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Praktek politik menunjukkan jika budaya politik di suatu negara telah matang, misalnya menghargai perbedaan antar kelompok, dewasa di dalam persaingan, dan cara untuk memperoleh kekuasaannya dicapai secara etik, maka budaya politik akan tercermin sebagai puncak dari pengabdian partai politik dan tokoh politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Praktek politik Indonesia di era liberal yang di tandai dengan transaksi dan pragmatisasi menunjukkan adanya pergeseran budaya politik dari legitimasi moral ke legitimasi modal sangat bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembalikan budaya politik Indonesia yang berdasar pada etika dan sistem nilai Demokrasi Pancasila bisa di lakukan dengan memperkuat Ideologi Pancasila, perbaikan regulasi yang memperkokoh kaderisasi, dan memperbaiki perilaku politik yang bijak dan dewasa.

**Kata Kunci:** Budaya Politik, Legitimasi Moral, Legitimasi Modal, Ideologi Pancasila, dan Kaderisasi.

## Abstract

*Political culture reflects a cultural journey of a nation which affects the creation of a political system. Political culture is a reflection between cultural behavior and the order of values which develops in the society. Political practice indicates that, if political culture in a developed country, for instance respect for differences among groups, mature in competition, and the effort to gain power through ethical means, then political culture will reflect the peak of dedication of the political parties and political figures in the interest of the nation and the state. Indonesia's political practice in the liberal era which is marked by transactions and pragmatism indicates a shift of political culture from moral legitimation to capital legitimation which is extremely contrary to the values of the struggle for independence and social*

*justice for all the people of Indonesia. The restoration of Indonesia's political culture which is based on ethics and the value system of Pancasila Democracy can be done by strengthening the Pancasila Ideology, improvement of regulations which strengthen regeneration, and improve the political behavior to become more prudent and mature.*

**Keywords:** *political culture, moral legitimation, capital legitimation, Pancasila Ideology, and regeneration.*

## **Pendahuluan**

Budaya politik merupakan refleksi perjalanan budaya suatu bangsa yang mempunyai peranan terciptanya sistem politik. Budaya politik suatu negara tercermin pada tindakan dalam upaya mencari, mempertahankan, dan menambah kekuasaan dalam praktek persaingan antar kekuatan partai dan kelompok kepentingan. Budaya politik di suatu negara juga refleksi dari tingkat literasi politik yang berjalan secara gradual. Dengan demikian, budaya politik adalah cerminan antara perilaku budaya dan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Praktek politik menunjukkan jika budaya politik di suatu negara telah matang dengan ciri-ciri, misalnya menghargai perbedaan antar kelompok, dewasa di dalam persaingan, dan cara untuk memperoleh kekuasaannya dicapai secara etik, maka budaya politik akan tercermin sebagai puncak dari pengabdian partai politik dan tokoh politik untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pertanyaannya, apakah Budaya Politik dan Praktek Politik Indonesia dengan perkembangan liberalisasi politik sudah sejalan dengan etika politik? Pertanyaan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. *Pertama*, dari aspek etika politik yang cenderung menghalalkan segala cara dalam bentuk praktek *money politic* yang berarti legitimasi etika telah bergeser menjadi legitimasi uang. *Kedua*, dari aspek persaingan antar kekuatan politik juga menunjukkan meningkatnya antagonisme dan konflik yang berkepanjangan karena tidak mampu menemukan kepentingan-kepentingan, sehingga masalah ideologi dan masalah platform tidak menjadi ukuran. *Ketiga*, dari aspek kaderisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan tidak berjalan secara berkelanjutan dalam menentukan kualitas kader, bahkan kualitas permodalan justru menjadi ukuran dalam praktek politik.

Budaya politik dan praktek politik didalam sistem liberalisasi dan kapitalisasi politik yang diwujudkan dalam Perundang-undangan Politik seperti undang-undang yang mengatur tentang Partai, Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Presiden melahirkan sikap pragmatisme politik yang sesungguhnya bergeser dari paradigma tujuan dan fungsi partai politik yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, pendidikan politik, dan artikulasi politik terhadap kepentingan masyarakat luas. Kalau di telusuri dari sejarah perkembangan politik Indonesia, sejak dari sebelum kemerdekaan dimana para *the founding fathers* selalu menunjukkan etika dan perjuangan tanpa pamrih untuk berdirinya dan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia sehingga hampir seluruh potensi diri dan modal yang dimiliki masing-masing tokoh tersebut hanya di peruntukkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Disi lain, dalam praktek politik sekarang ini tidak ditemui orientasi yang mendasarkan kepentingan negara diatas kepentingan partai, kepentingan individu di atas kepentingan kelompok, sebaliknya praktek politik sekarang ini selalu didasarkan kepada kepentingan sesaat yang diwujudkan dengan adanya praktek-praktek transaksi dan pragmatisasi politik. Praktek politik seperti ini meninggalkan masalah etika, ideologi, kaderisasi, dan kepentingan jangka panjang bagi kedaulatan negara. Liberalisasi politik telah menggeser legitimasi kekuasaan yang didasarkan pada moralitas seperti yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, dimana masa sekarang ini mengarah kepada legitimasi modal yang diwujudkan dengan hadirnya para pemilik modal didalam kancah politik. Pergeseran budaya politik dari legitimasi moral ke legitimasi modal sangat bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Pemikiran Budaya Politik**

Pemerintah merupakan lembaga eksekutif yang berperan di dalam pelaksanaan kebijakan demi tercapainya tujuan Negara yang telah dirumuskan pada pembukaan UUD 1945. Sistem politik Indonesia memberikan kekuasaan dan kewenangan yang tinggi terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya sesuai

dengan Undang-Undang<sup>1</sup> Adapun fungsi pemerintah di dalam mekanisme pembagian kekuasaan menurut Almond menempati posisi sebagai eksekutif atau *rule of application*.<sup>2</sup>

Pemikiran politik sebagai bagian dari ilmu politik mempunyai hubungan yang erat dengan budaya politik. Pembahasan pemikiran politik sebuah organisasi berarti membahas pandangan dasar, etika, moralitas, dan idealisme yang dianut oleh organisasi tersebut. Sebagaimana dikutip oleh Rahman Zainudin, Vernon van Dyke berpendapat bahwa sebagai teori, pemikiran politik mencakup keyakinan politik secara umum dan menyeluruh (komprehensif) yang disebut sebagai dasar pendapat atau ideologi.<sup>3</sup>

Penempatan budaya politik sebagai kerangka teori dalam penulisan ini mempunyai persamaan pandangan dengan pemikiran dan proyek politik saat ini. Demikian juga, selain sesuai dengan situasi dan kondisi pola politik dewasa ini yang selalu mendasarkan pada praktek transaksi politik, teori ini juga dapat dipergunakan untuk menganalisis kehidupan politik Indonesia yang masih dipengaruhi oleh konsep budaya politik, khususnya budaya Jawa.<sup>4</sup> Pembentukan budaya politik merupakan akibat proses tarik-menarik dari budaya yang satu dengan yang lain. Dalam kaitan ini, Dennis Kavanagh berpendapat, keberadaan budaya politik selalu berhubungan dan saling mempengaruhi dengan kebudayaan yang lain, karena pada dasarnya kebudayaan politik merupakan bagian atau subkultur dari kebudayaan suatu masyarakat yang bersangkutan. Dalam kedudukannya sebagai subkultur tersebut, budaya politik dipengaruhi oleh kebudayaan secara umum.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Grasindo, 1992), h. 167-168.

<sup>2</sup> Gabriel Almond and Bingham Powell, *Comparative Politics : A Developmental Approach* (Boston: Little, Brown and Company, 1996), h. 132-140.

<sup>3</sup> Vern van Dyke, *Political Science: A Philosophical Analisis*, dikutip A. Rahman Zainudin dalam *Jurnal Ilmu Politik ke-7* (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 4.

<sup>4</sup> Lebih lanjut baca Benedict R.O.G. Anderson, "Gagasan Tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa," dalam *Aneka pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* ( Jakarta : Sinar Harapan, 1991).

<sup>5</sup> Dennis Kavanagh, *Kebudayaan Politik*, terj. Lailahanoum Hasyim (Jakarta : Bina Aksara, 1982), h. 13.

Kajian budaya politik sebagai kerangka teori sudah banyak diperkenalkan dan dipengaruhi oleh pakar politik, seperti Almond dan Verba (1965), Lucian W. Pye (1996), A.R. Ball (1971), Rosenbaum (1975), Miriam Budiardjo (1977), dan Alfian (1985). Di antara mereka mempunyai persamaan persepsi bahwa budaya politik selalu berkaitan erat dengan sistem nilai yang mendasari orientasi dan perilaku politik seseorang.

Almond dan Verba (1965) mendefinisikan budaya politik terutama mengacu pada sikap dan orientasi politik dan bagian-bagiannya yang lain, serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut. Pembicaraan kita terhadap kebudayaan politik persis sama seperti apa yang dapat kita bicarakan tentang kebudayaan ekonomi atau kebudayaan religious. Hal ini merupakan serangkaian orientasi menuju seperangkat objek dan proses sosial yang khusus.<sup>6</sup> Pendapat Almond dan Verba tersebut menitikberatkan pada *civil culture* (budaya sipil) yang meliputi orientasi kognisi, afeksi, dan evaluasi terhadap sistem politik yang berlaku. Karena itu, budaya politik sangat berkaitan dengan sistem politik suatu Negara.

Sejalan dengan pendapat Almond dan Verba, A.R. Ball (1971) mendefinisikan budaya politik sebagai sikap, keyakinan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.<sup>7</sup> Konsep A.R. Ball dinilai lebih sempit jika dibandingkan dengan pendapat Almond dan Verba, karena A.R. Ball tidak membahas bagaimana seorang warga Negara mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Lucian W. Pye (1966) berpendapat bahwa kebudayaan politik adalah seperangkat sikap, keyakinan, dan sentimen-sentimen yang memberikan tatanan dan arti terhadap proses politik serta memberikan asumsi dasar dan aturan-aturan yang menentukan tingkah laku di dalam sistem politik.<sup>8</sup>

Ilmuan politik Indonesia, seperti Miriam Budiardjo (1977) dan Alfian (1985) juga memperhatikan perkembangan pendekatan budaya politik dalam perkembangan politik Indonesia. Menurut Miriam

---

<sup>6</sup> Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demorasi di Lima Negara* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), h. 14.

<sup>7</sup> R.R Ball, *Modern Politics and Government* (London: Mac, Millan, 1971), h. 56.

<sup>8</sup> Lucian W. Pye, *Aspects of Political Development* (Boston: Little Brown,1977), h.49

Budiardjo, budaya politik (*political culture*) mencerminkan faktor subjektif. Budaya Politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh kepercayaan individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.<sup>9</sup>

Kajian Alfian lebih menitikberatkan pada hubungan politik dan kebudayaan. Ia menilai, kebudayaan politik membentuk persepsi politik, selanjutnya persepsi politik memancarkan peta kognitif politik. Dari situlah lahir orientasi, sikap, dan tingkah laku politik dan dari situ pulalah terletak kaitan yang erat antara politik dan kebudayaan.<sup>10</sup> Bagi Rosenbaum, batasan budaya politik tersebut di atas memang cukup mewakili perumusan teori. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa budaya politik dapat dipergunakan untuk menganalisis pada dua tingkatan individu dan kolektif.<sup>11</sup>

Dengan demikian, secara garis besar budaya politik selalu menggambarkan hubungan yang erat antara sistem nilai dan prinsip dasar gerak psikologis yang mencakup pola pemikiran dan pola perilaku individu atas organisasi dalam kehidupan politik. Hakikat atau ciri-ciri pokok dari budaya politik menyangkut masalah nilai-nilai. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip mendasar yang melandasi doktrin atau suatu pandangan hidup.<sup>12</sup>

Budaya politik suatu bangsa berhubungan erat dengan budaya bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, interaksi antar-budaya masyarakat akan mempengaruhi kematangan budaya politik. Menurut Clude Ake, kematangan budaya politik adalah suatu keadaan di mana budaya politik suatu masyarakat berada dalam suatu tahap atau tingkat, suatu pra-kondisi yang memungkinkannya berfungsi dengan baik.<sup>13</sup> Sedang-

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik* (Jakarta: Gramedia, 1977), h. 49.

<sup>10</sup> Alfian (Ed), *Persepsi Politik Tentang Kebudayaan* (Jakarta : Gramedia, 1985), h. 155.

<sup>11</sup> Rosenbaum, *Political Culture* (New York : Praeger Publisher Inc, 1975), h. 7-8.

<sup>12</sup> Albert Widjaja, *Budaya Politik dan pembangunan Ekonomi* (Jakarta : LP3ES, 1982), h. 250.

<sup>13</sup> Claude Ake, *A Theory of Political Integration* (Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1967), h.96.

kan menurut Almond dan Verba, berfungsinya budaya politik dengan baik pada prinsipnya di tentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan suatu bangsa itu dengan struktur politiknya.<sup>14</sup> Dengan demikian, untuk mengembangkan budaya politik suatu bangsa harus beriringan dengan budaya bangsa itu sendiri. Nazaruddin Sjamsuddin menyimpulkan bahwa semakin serasi struktur politik dengan aspek-aspek budaya bangsa itu, semakin matang pula budaya politiknya.<sup>15</sup>

Bedasarkan definisi-definisi budaya politik tersebut di atas, pendapat Miriam Budiarmo dinilai lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi Indonesia. Pemikirannya sudah sampai pada tingkat identifikasi unsur-unsur budaya politik yaitu sikap dasar, sistem kepercayaan, dan simbol yang dimiliki oleh organisasi.

### **Praktek Budaya Politik**

Menurut Almond, unsur-unsur budaya politik meliputi perasaan identitas nasional, kesadaran kelas, motivasi prestasi, keyakinan kebebasan, keyakinan akan persamaan, efektivitas politik, dan kepercayaan kepada pemerintah.<sup>16</sup> Terbaginya beberapa unsur budaya politik maka liberalisasi politik Indonesia sekarang ini tidak sejalan dengan pembangunan budaya politik suatu bangsa. Dalam konteks ini perlu di cermati tentang unsur budaya politik yang sangat berbeda dengan idealitas membangun budaya politik bangsa, yaitu unsur identitas nasional, unsur motivasi prestasi, dan unsur efektifitas politik.

*Pertama*, unsur identitas nasional saat ini dapat kita lihat dari tokoh-tokoh Partai Politik dan juga tokoh-tokoh nasional di dalam membuat kebijakan dan praktek ketatanegaraan. Hasil dari pengamatan bahwa terjadi proses menurunnya perasaan identitas nasional yang diwujudkan dengan semakin banyaknya perundang-undangan di

---

<sup>14</sup> Almond dan Verba, *loc.cit.*

<sup>15</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, "Aspek-aspek Budaya Politik Indonesia," dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (eds.) *Profil Budaya Politik Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1991), h.24.

<sup>16</sup> Gabriel Almond, "Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik," dalam Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews (eds.), *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1986), h.40

Indonesia yang sangat liberal sehingga menggerus kepemilikan nasional dalam bidang ekonomi yang berbasis sumber daya mineral dan atau sumber daya alam di Indonesia. Perasaan identitas nasional di kalangan remaja juga tidak terlihat adanya *sense of belonging* dan *sense of responsibility* bagi anak-anak muda yang diwujudkan dengan *lifestyle* yang sangat kosmopolitan bahkan telah menghilangkan unsur jati diri sebagai anak bangsa. Upaya meningkatkan perasaan identitas nasional tidak ada jalan lain kecuali dengan cara membangun kesadaran bahwa ideologi suatu bangsa adalah bagian dari pembangunan yang tidak terpisahkan didalam pembangunan secara umum. Membangun ideologi dan identitas nasional misalnya dengan cara memperkuat Pancasila sebagai dasar dan perilaku hidup sehari-hari serta di wujudkan dengan adanya penghargaan atas perbedaan sebagai aplikasi dari praktek prinsip dan nilai Bhineka Tunggal Ika.

*Kedua*, unsur lain yang menunjukkan melemahnya tujuan dan semangat membangun negeri adalah melemahnya unsur motivasi prestasi. Semangat untuk membangun dikalangan anak remaja dan generasi muda pada umumnya diharapkan agar mempunyai daya saing yang kuat di dalam setiap individu. Kondisi seperti ini akan melahirkan penurunan semangat persaingan antar bangsa sehingga hal ini akan memunculkan faktor melemahnya kedaulatan negara sehingga Indonesia tidak menjadi *mainstreaming* di dalam mempengaruhi hubungan antar negara bahkan bisa jadi Indonesia menjadi sub-ordinat dalam sistem hubungan internasional. Motivasi dalam mencapai prestasi harus di bangun menjadi bagian dari *starting point* anak-anak muda dewasa ini dengan menumbuhkan semangat budaya untuk bersaing, budaya menjadi yang terbaik dalam rangka menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan di segani dalam konteks hubungan antara negara di dunia.

*Ketiga*, unsur budaya politik yang perlu di cermati adalah efektifitas politik. Praktek-praktek politik yang selalu didasarkan pada transaksi politik, sering disalah artikan dengan sebuah proses *rekrutment* politik yang didasarkan dengan istilah NPWP, "*nomor piro wani piro*". Praktek ini adalah wujud dari tidak adanya efektifitas politik itu sendiri. Efektifitas politik seharusnya terjalin melalui hubungan timbal balik antara yang diwakili dan mewakili, antara



representasi ideologi partai dengan perjuangan partai, dan antara individu atau tokoh politik yang harus menjawab apakah kepentingan dirinya lebih kuat daripada kepentingan negara.

Efektifitas politik harus dikembalikan kepada jiwa membangun bangsa sehingga setiap yang dilakukan baik dalam membuat kebijakan-kebijakan negara sampai dengan praktek-praktek pembangunan selalu di dasarkan pada perjuangan yang bertujuan kemakmuran negeri serta dibangun di atas prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran Almond itu mencerminkan bahwa membangun politik di Indonesia tidaklah cukup dengan formalitas demokrasi yang diwujudkan hanya dengan proses politik, lalu melahirkan instrument politik seperti pemilu, dan akhirnya melahirkan kepemimpinan baik di Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif, namun lebih dari itu membangun budaya politik seperti 3 (tiga) unsur di atas harus didasarkan pada prinsip kematangan budaya politik suatu bangsa yang terefleksikan dalam praktek politik yang didasarkan pada nilai-nilai politik kenegaraan yang diwujudkan dalam membangun bangsa dan negara. Formalitas demokrasi bukanlah esensi demokrasi itu sendiri tetapi melainkan justru mereduksi makna demokrasi yang mendasarkan bahwa semua proses politik harus didasarkan pada, dari, demi, dan untuk rakyat sebagai komunitas yang berdaulat di negeri demokrasi.

### **Pergeseran Budaya Politik**

Menurut Walter A. Rosenbaum, merinci unsur-unsur budaya politik menjadi tujuh tingkatan, yaitu *political identification*, *political trust*, *regime orientation*, *roles of game*, *political efficacy*, *political competency*, dan *input-output orientation*.<sup>17</sup> Pergeseran budaya politik yang menjadi unsur budaya politik bahwa proses budaya politik tercipta sejak dari proses budaya politik sampai dengan input-output orientation. Budaya politik dengan demikian harus menjadi komitmen dari semua pihak mulai dari niat saat seseorang mengambil profesi politikus sampai bisa melahirkan jiwa kenegarawan yang tidak

---

<sup>17</sup> Rosenbaum, *op.cit*.h.10

semata-mata mengandalkan tujuan hanya memperoleh jabatan-jabatan publik di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Budaya politik harus tercermin tidak hanya pada lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat (legislatif, yudikatif, eksekutif dan auditatif) tetapi juga oleh seluruh lembaga-lembaga keagamaan serta kelompok kepentingan. Jika semua lembaga-lembaga dalam pengertian infrastruktur dan suprastruktur politik seperti itu telah melahirkan budaya politik yang matang akan bisa melahirkan sebuah perilaku politik kenegaraan yang matang pula.

Mengukur Budaya Politik yang dapat dikatakan dewasa dan matang sebuah Negara terdapat 4 (empat) hal yang perlu dicermati. *Pertama, political trust*, yaitu sebuah tatanan di dalam kehidupan masyarakat terjadi apabila adanya kepercayaan politik antara rakyat kepada pemerintah, antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat antara organisasi-organisasi masyarakat dan ujungnya adalah antara sesama partai politik. Pergeseran budaya politik di Indonesia dewasa ini adalah melemahnya *political trust* antara sesama komponen anak bangsa. Penyelesaian perbedaan antara antar masyarakat didalam proses politik maupun proses non-politik selalu di lahirkan dengan kekerasan sebagai instrument untuk menyelesaikan masalah. Padahal budaya politik yang matang dan dewasa mensyaratkan adanya kedewasaan didalam berbeda bahkan diarahkan adanya penghargaan atas perbedaan itu sendiri yang menjadi bagian dari sinergi di Negara Indonesia yang plural.

*Kedua, political competency* yaitu sebuah pola rekrutment penggunaan kekuasaan sebaiknya dilakukan oleh tokoh dan individu-individu yang berkompeten. Pragmatisme politik yang diwujudkan dengan adanya transaksi politik didalam proses mendapatkan kekuasaan baik melalui pemilu maupun kekuasaan dengan menggunakan non-instrument pemilu seperti jabatan-jabatan di pemerintahan menunjukkan adanya rekrutmen yang dilakukan tidak secara terbuka dan dilakukan semata-mata adanya transaksi politik. Penentuan nomor urut calon legislatif, penetapan pasangan pemerintah daerah baik Gubernur, Bupati, dan penentuan Calon Presiden selalu disertai dengan transaksi politik atau mahar politik. Rekrutmen politik yang tidak didasarkan pada kompetensi politik yang baik akan melahirkan

matinya ideologi partai dan kaderisasi politik. Negara dan partai politik yang tidak melakukan kaderisasi sama halnya dengan mematikan tumbuhnya kader-kader bangsa yang menjadi bibit lahirnya negarawan. Mempertahankan rekrutmen politik dengan dasar transaksi politik akan melahirkan sebuah proses *permissiveness* pada kesalahan-kesalahan mengelola negara yang ujungnya akan melahirkan praktek politik yang berbasis Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

*Ketiga, rezim orientation* yaitu bagaimana seseorang itu berorientasi pada sebuah rezim pemerintahan. Politik praktis yang juga disebut dengan *the real politic* selalu mendasarkan pada 3 (tiga) hal *how the struggle of power is, how to increase power, dan how the status quo of power is*. Real praktek politik seperti ini kalau dianut oleh para pelaku politik maka akan mempraktekkan apa yang disebut dengan *homo homini lupus* yang bermakna menghalalkan segala cara. Orientasi kekuasaan yang berlebihan akan mematikan mata hati seorang pemimpin karena tidak berdasarkan pada budaya politik yang matang. *Rezim orientation* yang berlebihan juga akan melahirkan perilaku-perilaku semua yang hanya diukur dengan materi dan ini tidak sejalan dengan Etika Demokrasi Pancasila yang pada prinsipnya mendasarkan bahwa semua proses politik harus didasarkan pada nilai perjuangan untuk Negara dan Bangsa Indonesia. Pragmatisme politik yang seperti sekarang akan berkelindan dengan kapitalisasi dan liberalisasi politik yang semuanya didasarkan pada 2 (dua) penentu yaitu, *money and power*. *Money and power* adalah segalanya yang harus diperoleh dalam rangka mempertahankan kekuasaan itu sendiri, tidak peduli apakah proses yang didapatkan bertentangan dengan etika dan menyakiti hati nurani rakyat yang berdaulat.

*Keempat, input-output orientation* yaitu sebuah *outcome* di dalam sistem politik itu harus melahirkan *reciprocal authority* yang berjalan bersamaan dengan *authority responsible* yaitu bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada siapa pemberi kuasa yaitu rakyat. Praktek pembuatan kebijakan dengan meninggalkan proses pendidikan politik melalui kampanye akan melahirkan sebuah generasi yang tidak mendapatkan makna politik yang sebenarnya. Pemilu yang hanya didasarkan pada mobilisasi massa yang hanya

dilakukan 5 (lima) tahun sekali dengan wujud memaksa rakyat memberikan suara di TPS tanpa pendidikan politik terlebih dahulu akan melahirkan transaksi dan demoralisasi politik dikalangan kelas bawah (*grass root*), padahal *input-output orientation* mensyaratkan adanya proses pendidikan politik sejak dari awal sampai akhir yang di buktikan di dalam kampanye-kampanye politik dan pembuatan kebijakan-kebijakan sampai dengan pelaksanaannya.

Keempat hal di atas menghentakkan para pemikir politik dengan wujud telah terjadi pergeseran ke transaksi politik sebagai wujud dari legitimasi modal tersebut, telah mengambil alih dari etika dan budaya politik yang berbasis pada legitimasi moral sebagaimana yang dikehendaki didalam pendirian bangsa yang di bahas dalam BPUPKI dan sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum Negara Republik Indonesia yang diproklamkan 17 Agustus 1945. Legitimasi moral telah diambil secara paksa oleh para pemilik modal di partai politik dan pemerintah. Masalahnya, apakah praktek seperti ini tetap dipertahankan atau dikembalikan sebagaimana pengertian bahwa demokrasi adalah instrumen yang sangat tepat untuk membangun budaya politik suatu bangsa.

## **Penutup**

Telah nyata praktek politik di Indonesia bergeser dari paradigma yang berbasis pada etika dan nilai seperti perjuangan untuk memerdekakan negara dan mengisi pembangunan yang di suri-tauladankan oleh para pendiri bangsa menuju praktek politik yang selalu mendasarkan pada transaksionalis dan pragmatis baik di dalam proses mencari, mempertahankan, dan menambah kekuasaan. Bagi seorang negarawan, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Budaya dan Praktek Politik Indonesia harus dibangun pada dialektika demokrasi yang berbasis pada etika nilai kebangsaan, memperkuat ideologisasi Pancasila di dalam praktek politik serta praktek-praktek yang mendasarkan pada nilai etika. Penggunaan kekuasaan yang didasarkan pada liberalisasi politik sekarang ini menunjukkan ada pergeseran dari paradigma budaya politik dengan berbasis legitimasi moral kepada legitimasi modal.

Beberapa langkah untuk perubahan yang harus dilakukan meliputi, *pertama*, dari segi ideologisasi, Pancasila harus dijadikan sebagai ideologi semua partai politik yang bisa menjadi kekuatan politik bersama membangun negara. Platform politik boleh berbeda tetapi semangat untuk memperjuangkan Budaya Politik Pancasila harus menjadi *ultimate goal* bagi seluruh partai politik.

*Kedua*, dari sisi instrumentasi dan regulasi perubahan Undang-Undang mengenai Partai Politik dan Pemilu yang seluruh proses politik harus didasarkan pada ideologi, kaderisasi, dan pengabdian untuk kepentingan negara.

*Ketiga*, dari sisi membangun kondisi yang sehat artinya *political behavior* (perilaku politik) harus menjadi bagian dari membangun politik itu sendiri dengan arti bahwa politik bukanlah sekedar merebut kekuasaan tetapi politik adalah pengabdian setiap warga negara kepada negara.

Dengan menjalankan ketiga langkah perubahan seperti itu diharapkan akan terjadi pendulum pragmatisme politik menuju kepada idealisme politik yang berbasis pada etika politik. Wujud dari praktek yang beretika seperti itu adalah wujud kematangan budaya politik yang akan melahirkan sebuah peradaban demokrasi di Indonesia. Indonesia tidak boleh puas hanya sebagai negara terbesar demokrasi didunia dari aspek formalitas dan struktur demokrasi belaka, tetapi harus mampu membangun substansial demokrasi yang berbasis pada kedaulatan rakyat di negara demokrasi sebagaimana dikehendaki oleh *the founding fathers* sesuai dengan semangat yang tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Daftar Pustaka

- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988).
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, terj. Simamora, Sehat (Jakarta: Bina Aksara).
- Alter, Peter, *Nationalism* (London: Edward Arnold, 1989).
- Anderson, Benedict R'OG., *Imagined Communities: Reflection on the Origin and the Spread of Nationalism* (London: Verso and NLB, 1983).
- Ball, AR., *Modern Politics and Government* (London: Mcmilan, 1971).
- Budiarjo, Miriam, (Ed.), *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982).
- Budiarjo, Miriam, (ed.), *Partisipasi dan partai Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982).
- Feith, Herbert dan Catles, Lense (eds.), *Pemikiran Politik Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, London: Cornell University Press, 1962).
- Giddens, Anthony, *The Nation-State and Violence, Volume Two of Contemporary Critique of Historical Materialism* (Cambridge: Polity Press, 1985).
- Kavanagh, Dennis, *Kebudayaan Politik*, terj. Lailahanoum Hasyim (Jakarta: Bina Aksara, 1982).
- Liddle R. William, *Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Mas'ood, Mochtar dan Collin Mac Andrew, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajahmada University Pers, 1986).
- Pye, Lucian W., *Aspect of Political Development* (Boston: Little Brown, 1966).
- Siddiq, Ahmad, *Khittah Nahdliyah* (Surabaya: Balai Pustaka, 1979).
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).
- Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan: Kumpulan Artikel* (Jakarta: LEPPENAS, 1981).
- Wijaya, Albert, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1982).

# KEPEMIMPINAN POLITIK KEINDONESIAAN (Suatu Refleksi Kebudayaan)

M. Alfian Alfian

## Abstrak

Tulisan ini merupakan refleksi kebudayaan tentang perlunya kepemimpinan politik yang bervisi Keindonesiaan. Dalam konteks inilah perspektif sejarah kebangsaan Indonesia mutlak harus dipahami oleh para calon pemimpin dan pemimpin politik di semua tingkatan. Kesadaran sejarah itu penting untuk mengikat komitmen Keindonesiaan sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan krusial di masa kini dan mendatang. Yang tak kalah pentingnya tentu juga pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, mengingat Keindonesiaan tebingkai oleh nilai-nilai Kepancasilaan. Di sisi lain Keindonesiaan juga mencerminkan ikhtiar manajemen kebangsaan Indonesia dan etos bangsa. Spirit Keindonesiaan dengan demikian, mencerminkan hadirnya energi daya dorong Indonesia sebagai suatu bangsa mandiri dan maju yang besar dan disegani.

**Kata kunci:** refleksi kebudayaan, kepemimpinan politik

## Abstract

*This is a cultural reflection regarding the need of political leadership which has a vision of an Indonesian perspective (Keindonesiaan). In this context the historical perspective of Indonesian nationalism shall absolutely be understood by the candidate leaders and political leaders at all levels. That historical awareness is important to secure a commitment to an Indonesian perspective as a grip in coping with various crucial challenges nowadays and those of the future. Not less important is surely the understanding and actualization of the Pancasila values, bearing in mind that Pancasila values have framed the Indonesian perspective. On the other hand, the Indonesian perspective also reflects the efforts of national management of Indonesia and the ethos of nationalism. Therefore, the spirit of the Indonesian perspective reflects the presence of the energy of thrust of Indonesia as an autonomous and progressive nation which is great and respected.*

**Keywords:** cultural reflection, political leadership.

## Pendahuluan

Dalam perspektif kebudayaan yang luas, masalah kepemimpinan bersifat abadi. Para pemimpin tumbuh dalam situasi kebudayaan yang melingkupinya. Dalam konteks inilah perkembangan kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah, dinamika dan sistem politik, perkembangan interaksi sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Demikian pula halnya dalam konteks kepolitikan Indonesia, kehadiran pemimpin tidak dapat dilepaskan dari konteks Keindonesiaan. Dalam hal ini mengemula suatu harapan utama agar para calon pemimpin bangsa benar-benar mampu memahami jatidiri bangsanya, yang dalam tulisan ini dihadirkan dalam suatu konsepsi, kalau bukan visi tentang Keindonesiaan.

Hal tersebut penting mengingat tidak jarang banyak yang kurang memahami hakikat Keindonesiaan, padahal mereka memiliki peluang untuk terpilih sebagai pemimpin dalam suatu mekanisme demokrasi elektoral *one person one vote one value*. Konsekuensi mekanisme demokrasi elektoral semacam itu luas: ia mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang Keindonesiaan, tetapi juga sebaliknya dapat sekadar menghadirkan pemimpin yang biasa-biasa saja atau medioker.<sup>1</sup> Dalam konteks inilah, masalahnya lebih terletak pada proses penyiapannya: ladang-ladang penyemai kepemimpinan yang bervisi Keindonesiaan harus hidup dan tumbuh subur.

Ladang-ladang penyemai kepemimpinan itu secara khusus ada di partai-partai politik.<sup>2</sup> Lazim saja disebut sebagai ladang penyemai utama kepemimpinan politik, mengingat partai-partai politik

---

<sup>1</sup> Istilah medioker merupakan istilah yang cukup populer dalam khasanah kepemimpinan. Burns misalnya pernah mengingatkan bahwa gejala krisis kepemimpinan terjadi, manakala para pemimpin politik cenderung untuk lebih memilih sikap “mediocrity”, dan enggan untuk memilih tampil sebagai pemimpin yang “bertanggung jawab”, atau dalam konteks ini pemimpin sejati. Lihat, James MacGregor, *Leadership*, New York: Harperperennial, 2010, hal. 1.

<sup>2</sup> Meskipun tidak ditegaskan fungsi dan perannya dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), partai politik di Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses penentuan jabatan-jabatan politik yang dikontestasikan, mengingat kandidat-kandidat dalam seluruh jenis pemilu, melibatkan partai-partai politik. Sebagai informasi dalam UUD NRI Tahun 1945, partai politik tak dibahas khusus, melainkan dalam pasal-pasal terpencar, yakni Pasal 6A ayat (2) tentang kewenangan parpol dalam penentuan capres/cawapres; Pasal 8 ayat (3) terkait pasal sebelumnya; Pasal 22E ayat (3) bahwa peserta pemilu legislatif adalah parpol; dan Pasal 24C (1) masalah pembubaran parpol. Lihat, M Alfian Alfian, Partai Politik dan Konstitusi, Media Indonesia, 3 Februari 2017.



merupakan organisasi yang secara sengaja dimaksudkan untuk berpolitik: ada visi dan tujuan politik yang jelas, ada kegiatan politik yang dibikin secara sistematis dan tertata, ada elite-elite partai yang menggerakkan, ada kader-kader, ada infrastruktur politiknya hingga marambah ke mana-mana. Tetapi, ladang-ladang penyemai kepemimpinan politik, sesungguhnya juga ada di mana-mana: di berbagai ormas, LSM, organisasi kemahasiswaan, organisasi bisnis, dan sebagainya. Kelak, mereka bisa muncul dan saling berkompetisi dalam suatu kontestasi yang aturan mainnya demokrasi.

Sistem demokrasi bukan tanpa cela alias kelemahan. Kelemahan itu ada, misalnya, sebagaimana lazim dilontarkan berbagai kalangan, ialah bahwa demokrasi tidak menjamin akan secara otomatis memunculkan pemimpin yang sejati atau, sebagai lawan dari konteks pemimpin medioker ialah “pemimpin besar”. Bahkan, jebakan populisme politik sering hadir dan mengarahkan masyarakat untuk memimpin “pemimpin palsu”, bukan yang sejati, tetapi yang memiliki karakter dan kebijakan politik yang jahat, atau dalam kalimat candaan Nurcholish Madjid, “setan gundul”. Dalam sebuah wawancara, Nurcholish Madjid mengatakan,

*“Karena kita telah mengalami demokrasi, siapa pun yang dipilih rakyat, itulah pilihan kita. Memang bisa saja ada kecelakaan. Bisa saja pilihan kita adalah orang yang lemah atau orang buta huruf. Tapi itu absah. Setan gundul pun, kalau jadi presiden pilihan rakyat, apa mau dikata”.*<sup>3</sup>

Demokrasi itu sendiri unik. Dia punya nilai-nilai universal yang membentuk suatu karakter demokrasi substansial. Ada prinsip egalitarianisme. Kesederajatan menjadi hal utama. Juga ada anti-kekerasan, anti-otoriterisme, anti-penodaan terhadap HAM. Demikianpun prinsip “*cheks and balances*”. Semua itu berdampak pada praktik demokrasi prosedural yang melibatkan partisipasi politik publik secara luas. Demokrasi sudah menjadi suatu kecenderungan dunia ketika para Pendiri Bangsa (*The Founding Fathers*) memilih mendirikan negara Republik, bukanlah sistem kerajaan, monarkhi absolut, tak juga monarkhi konstitusional. Mereka melangkah maju, dengan penuh kesadaran dan konsekuensi lanjutan yang berdampak ke generasi seterusnya, bahwa Negara Republik yang konstitusional-

---

<sup>3</sup> Wawancara Nurcholish Madjid dengan Tempo Interaktif, 28 April – 4 Mei 2003.

demokratislah yang dipilih. Demokrasi berarti ada nilai-nilainya. Proses proseduralnya mempersyaratkan adanya partai-partai politik peserta pemilu. Di luar itu masyarakat bebas membentuk organisasi, perkumpulan, sebagai ekspresi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi (kecuali, mereka yang menyimpang dari konstitusi yang berdasarkan ideologi Pancasila).

## **Keindonesiaan sebagai Kesadaran Sejarah**

Kepemimpinan Indonesia berangkat dari karakter Keindonesiaan itu sendiri. Jelaslah bahwa Indonesia kita sebagai negara ialah Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Indonesia merupakan akumulasi dari prosesnya yang panjang: proses sejarah, proses dialog, proses pengumpulan satu sama lain, dari suatu masyarakat yang punya pengalaman yang relatif sama berabad-abad di bawah penjajahan atau kolonialisme dan imperialisisme bangsa asing (Belanda). Lalu mereka, terutama digerakkan oleh para elite pergerakan kemerdekaan berjuang untuk mewujudkannya. Mereka bersama rakyat merebut kemerdekaan dan membengkokkan suatu negara baru yang bernama Indonesia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia negara yang luas dan kaya keragaman, memiliki posisi strategis dalam percaturan dunia, dan setelah kemerdekaannya diwarnai proses dan dinamika sejarah kepolitikan yang tidak selalu mulus. Di sisi lain, wajah Indonesia masih dirundung banyak masalah klasik hingga dewasa ini, hal demikian belum sepenuhnya terelakkan. Indonesia sebagai bangsa terus berproses, juga dalam konteks apa yang pernah disitir Bung Karno sebagai “*nation and character building*”.

Gambaran tentang Indonesia dan Keindonesiaan kita, antara lain dapat diambil potretnya ketika perayaan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri.<sup>4</sup> Tentu ilustrasi ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan kebesaran hari-hari besar agama lainnya, tetapi secara kontekstual terkait dengan kultur Keindonesiaan kita yang religius. Merayakan lebaran berarti merayakan Keindonesiaan. Peristiwa mudik kolosal

---

<sup>4</sup> M Alfian Alfian, “Merayakan Keindonesiaan”, *Kompas* 1 Juli 2017.

dan tradisi silaturahmi saling maaf-memaafkan antarwarga bangsa menandai kekhasan budaya Indonesia. Semua warga bangsa yang majemuk melebur ke dalam suka cita kemanusiaan yang bernuansa religius. Karenanya tak berlebihan, manakala apabila ciri manusia Indonesia Mochtar Lubis ditambah satu lagi, maka jelas bahwa kalau lebaran mereka mudik dan bersilaturahmi. Itu adalah ciri positif mengingat memperkuat modal sosial kebangsaan.

Indonesia merupakan bangsa yang religius. Islam masuk ke Indonesia, terutama dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Dalam perkembangannya penganut agama Islam berinteraksi dengan kultur kegamaan sebelum dan sesudahnya. Islam telah turut mewarnai dinamika kebangsaan, terutama dalam konteks kebudayaannya. Dalam konteks ini, relevan kiranya, manakala organisasi *Nahdlatul Ulama* (NU) mengelaborasi esensi dan praktik Islam Nusantara. Bahwa keberadaan Islam di Nusantara merupakan unsur perekat kebangsaan yang penting sepanjang sejarahnya. Di sisi lain, Islam juga merupakan sumber energi bangsa dalam menggapai kemajuan. Karenanya relevan pula, manakala organisasi Muhammadiyah menggemakan tema Islam berkemajuan. Eksistensi Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, tak terlepas dari *ijtihad* para ulama. Dalam perspektif Muhammadiyah, Pancasila merupakan *darul ahdi wa syahadah*, suatu konsensus nasional segenap elemen bangsa, di mana mereka saling mengisi untuk kemajuan bersama.<sup>5</sup>

Keindonesiaan dan Keislaman, dalam pengertiannya sebagai pendorong kemajuan, dalam konteks ini telah membentuk suatu formula kita dalam berbangsa.<sup>6</sup> Karena, merupakan sesuatu yang ahistoris manakala Pancasila dipertentangkan dengan Islam. Di sisi lain, sudah tampak nyata dan tak terelakkan dalam sejarah bahwa selain sebagai perekat kebangsaan, melalui apa yang dikatakan Bung Karno sebagai “apinya Islam” diharapkan umat Islam Indonesia mampu mendorong percepatan dalam meraih kemajuan bangsa.

---

<sup>5</sup> Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah telah diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke 47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar. Lihat pula, PP Muhammadiyah (2016), *Negara Pancasila: Darul Ahdi Wa Syahadah*, Jakarta: PP Muhammadiyah.

<sup>6</sup> Inilah benang merah dari gagasan atau pemikiran Nurcholish Madjid yang tampak dari berbagai tulisannya. Lihat, Nurcholish Madjid (1987), *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.

Dalam konteks ini, mendekatkan harapan dan kenyataan memerlukan ikhtiar kolektif yang komprehensif di tengah kompleksitas tantangan bangsa.

Salah satu tantangan krusial dewasa ini, selain kesenjangan sosial-ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia, terfokus pada fenomena pembajakan terhadap Islam untuk kepentingan politik melalui jalan kekerasan atau terorisme. Merebaknya pengaruh ideologi transnasional di satu sisi dan masih menghebatnya masalah-masalah sosial ekonomi menghadirkan radikalisme yang destruktif. Maka, ikhtiar deradikalisasi terhadap mereka yang terjebak pada kelompok ekstrim radikal, perlu terus dilakukan melalui formula yang tepat dan komprehensif dengan menyentuh akarnya. Tentu saja Islam merupakan agama damai, bukan agama teror. Al Quran sarat dengan pesan-pesan perdamaian dan kemanusiaan. Tidak saja, terkandung di kitab tersebut pemahaman terhadap realitas kemajemukan umat manusia (QS 49:53), tetapi juga pesan-pesan kemanusiaan paripurna, dan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan. Al Quran menegaskan, “Barangsiapa menyelamatkan satu jiwa (nyawa satu orang), maka ia seolah telah menyelamatkan jiwa (nyawa) semua orang.” (QS. 5:32).

## **Keindonesiaan dan Kepancasilaan**

Kepemimpinan Indonesia berangkat dari karakter Keindonesiaan yang majemuk, sebagai negara yang berideologi Pancasila. Jelaslah wawasan Kepancasilaan mutlak bagi pemimpin politik Indonesia.<sup>7</sup> Pancasila ialah milik bersama segenap warga bangsa. Merunut pengalaman sejarah, jangan sampai ada pihak-pihak yang justru merasa terkucil atau terpojok karena tidak ikut dalam jargon-jargon pro-Pancasila, sehingga seolah-olah menjadi pihak yang anti-Pancasila. Yang diperlukan justru bagaimana semua elemen bangsa merasa memiliki Pancasila, sehingga timbul niat yang sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya konteks

---

<sup>7</sup> Pemahaman historis sekaligus sosiologis tentang Pancasila dalam konteks berbangsa, lihat antara lain Yudi Latif (2011), *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia.

nilai-nilai, tetapi aktualisasi Pancasila juga bisa mewujudkan dalam suatu sistem, di mana dalam hal ini negara memiliki peran yang sangat strategis.

Pancasila seyogyanya tidak ditampilkan sebagai doktrin ideologis yang mati, melainkan hidup, dinamis, selaras dengan paradigma Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hal ini penting, ketika kelak Pancasila didialogkan kembali di lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lebih luas. Pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, antara lain pernah dilontarkan oleh Nurcholish Madjid. Dalam makalahnya berjudul, “Nilai-nilai Keindonesiaan Umum: Antisipasi terhadap Kecenderungan Konvergensi Nasional” yang disampaikan pada seminar sehari “Mencari Nilai-nilai Baru dalam Paham Kebangsaan” yang diselenggarakan Harian *Kompas* pada 1985, Nurcholish memulainya dengan sikap optimis dan rasa syukur terkait kondisi bangsa dan kecenderungan umum “pertumbuhan ke arah konvergensi nasional pada tataran sosial budaya”.<sup>8</sup>

Nurcholish Madjid menggarisbawahi, pada tingkat perkembangannya, bangsa Indonesia telah tumbuh secara mantap sebagai nasion. Kendati demikian, tetap ditekankan kecenderungan umum “ke arah suatu konvergensi nasional”, yakni “suatu hasil bentuk saling pengertian, *mutual understanding*, dan berakar dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima”. Menurutnya, kecenderungan konvergensi nasional itu harus diarahkan kepada penguatan pandangan hidup yang kosmopolit, yaitu suatu tata pergaulan nasional, dalam arti lahiriah maupun maknawiyah, yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Nurcholish Madjid menegaskan, jika budaya Indonesia ialah rangkuman puncak berbagai budaya daerah, nilai Keindonesiaan itu harus bersemangatkan kosmopolitanisme, bukan nativisme. Nativisme akan hanya berakhir pada daerahisme, jika bukan sukuisme. Maka “karakter kosmopolit” sebagai *common denominator* kelompok-kelompok anggota bangsa atau berbagai segmen nasional menjadi penting.

---

<sup>8</sup> Uraian tentang pandangan Nurcholish Madjid ini merujuk pada tulisannya, “Nilai-nilai Keindonesiaan Umum: Antisipasi terhadap Kecenderungan Konvergensi Nasional” yang termuat dalam Nurcholish Madjid (1987), *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.

Dalam konteks itulah, Nurcholish memaparkan konteks Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurutnya, sebagai rumusan tentang cita-cita nasional yang tinggi, Pancasila tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selamanya. Karenanya, menurutnya, pelaksanaan nilai-nilai itu akan menyatu dengan proses, dan proses yang progresif (terus-menerus membuat kemajuan) hanya terjadi jika dijiwai oleh semangat keterbukaan. Selanjutnya, “Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu, baik masing-masingnya secara terpisah maupun keseluruhannya secara utuh, jelas sekali mempunyai dimensi yang bersifat universal. Karena keuniversalnya itu, Pancasila tidak mungkin diwujudkan-nyatakan dengan semangat nativistis atau atavistis. Ia menghendaki kesediaan yang cukup besar dari bangsa Indonesia untuk menimba dari pengalaman manusia sejagat”.

Nurcholish mengingatkan Pancasila bisa tak lepas sebagai “objek manipulasi”, bahwa, “Pancasila bisa berfungsi tak lebih daripada suatu alat politik, suatu *ideological weapon* untuk kepentingan sesaat”. Sedangkan, yang amat kita perlukan, “Pancasila yang berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan”, maka semua pihak harus “lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila”, yakni, “usaha mengetahui dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan “pengusutan” kepada keadaan sekarang.” Di sini berarti, “dikehendaknya adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ke sanalah muara konvergensi nasional kita, nilai Keindonesiaan kita”.

### **Keindonesiaan sebagai Manajemen Kebangsaan**

Kepemimpinan Indonesia berangkat dari karakter Keindonesiaan juga menuntut kecanggihan pengelolaan manajemen kebangsaan, yang memang terutama menjadi tanggung jawab negara, tetapi tentu juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia yang plural ini. Menahan diri, mencari jalan keluar bersama-sama dalam semangat hikmat kebijaksanaan dan persatuan Indonesia, semakin urgen untuk diprioritaskan ketika letupan-letupan potensi konflikktual bangsa ini

terasakan. Dalam konteks ini, secara sosial-politik, dinamika kehidupan bangsa yang sejak kemerdekaan meniscayakan penerapan sistem demokrasi yang kontestatif, lazimlah diakhiri oleh ikhtiar mempertegas kembali titik-titik temu kebangsaan. Konsensus kebangsaan tentu lebih utama ketimbang konflik yang terus terpelihara. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Praktik demokrasi politik kontestatif di tengah masyarakat majemuk, bagaimanapun, selalu berhadapan dengan risiko menajamnya konflik akibat politisasi identitas.

Dalam kadar yang normal, kontestasi identitas lumrah saja apabila dikaitkan dengan konteks hak warga negara untuk menjadi pemilih model sosiologis. Berbeda dengan model psikologis yang mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu dan model pilihan rasional atau ekonomi politik, pemilih model sosiologis ditentukan oleh karakter sosiologis pemilih, terutama kelas sosial, agama, maupun etnis, kedaerahan atau bahasa. Tetapi, *gor-goran* politik identitas, tentu sangat membahayakan keutuhan nasional, mengingat ia bisa semakin mempertegas polarisasi politik yang berpotensi pada konflik sosial yang mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks inilah semua pihak harus belajar bahwa konflik yang muncul sebagai dampak politisasi identitas jauh lebih berbahaya ketimbang konflik-konflik politik pragmatis. Identitas keagamaan dan etnisitas merupakan jenis yang dampak politisasinya sangat fatal.

Dalam konteks ini, Huntington mencatat, sesungguhnya identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan (*be constructed*), di mana identitas ganda (*multiple identities*) dimungkinkan terjadi, mengingat identitas merupakan produk interaksi yang penonjolannya bersifat situasional. Politisasinya telah memancing penonjolan identitas secara konfrontatif dan polarisatif.<sup>9</sup> Sementara Snyder mencatat fenomena demikian sebagai konflik nasionalisme SARA (*ethnic nationalism*), merujuk mengemukanya solidaritas yang dibangkitkan oleh persamaan budaya, bahasa, agama, sejarah, dan sejenisnya. “Setiap gerakan yang menjauh dari demokrasi sipil dan

---

<sup>9</sup> Samuel P. Huntington (2004), *Who Are We? America's Great Debate*, London: Free Press.

mengarah ke demokrasi SARA,” catat Snyder, “bakal merongrong perdamaian demokratis.” Dalam konteks inilah, penting digaris-bawahi, sejauh mana politisasi identitas mampu “merongrong perdamaian demokratis”.<sup>10</sup>

Castells mencatat tiga jenis identitas, yakni identitas yang melegitimasi (*legitimizing identity*), identitas perlawanan (*resistance identity*), dan identitas proyek (*project identity*). Jenis identitas pertama dilakukan oleh institusi-institusi dominan untuk memperluas dan merasionalisasi dominasinya. Yang kedua, dibangkitkan oleh mereka yang berada dalam posisi yang dikecilkan atau distigmatisasi oleh logika dominasi. Yang ketiga terkait ikhtiar membangun identitas baru dengan mendefinisikan ulang banyak hal yang berdampak pada transformasi struktural. Terlepas konteksnya ialah merespons globalisasi, konsep proyek identitas Castells tersebut bisa direfleksikan guna mengikhtiarakan suatu konsensus baru dalam kerangka menyegarkan kembali hakikat persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia harus diturunkan dari sebatas jargon sila ketiga Pancasila ke dalam ikhtiar proyek identitas kebangsaan yang tanpa henti.<sup>11</sup>

Membangun identitas baru Keindonesiaan mutakhir bukan berarti meniadakan atau mengingkari identitas Keindonesiaan para pendiri bangsa (*the founding fathers*), tetapi justru memberi pemaknaan baru dan kontekstual yang selaras dengan dinamika, tantangan, dan kebutuhan hakiki bangsa di zaman kita. Rekonstruksinya harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Semuanya harus siap untuk saling belajar, tidak saja menghargai perbedaan dan toleransi, tetapi juga di era kebebasan informasi ini semua pihak agar mampu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa saling melukai. Tantangan bangsa Indonesia semakin kompleks. Bangsa ini semakin dituntut berlari cepat, bisa mandiri dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Persatuan Indonesia mutlak adanya.

---

<sup>10</sup> Jack Snyder (2003), *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah, Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*, Jakarta: KPG.

<sup>11</sup> Manuel Castells (2010), *The Power of Identity*, Oxford: Wiley Blackwell.



## Keindonesiaan sebagai Etos Bangsa

Kepemimpinan Indonesia berangkat dari karakter Keindonesiaan juga menuntut kecanggihan pemimpinnya menggelorakan etos bangsa. Indonesia bangsa yang religius, yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Religiusitas itu berimpitan dengan etos spiritualitas masyarakatnya. Tapi, sejauh mana dimensi spiritualitas itu mampu memicu kemajuan (ekonomi)? Pertanyaan ini menarik kita perbincangkan kembali di tengah realitas kehidupan bangsa dewasa ini. Indonesia bangsa yang besar, tapi kondisinya seperti raksasa tertidur: berputar-putar di labirin masalah yang kompleks, nyaris belum beranjak signifikan ke arah negara maju. Kita mengamini berbagai retorika para pemimpin tentang perlunya percepatan pembangunan, betapapun sadar juga bahwa tak semudah pelaksanaannya. Apakah bangsa ini ditakdirkan lemah etos kerja betapapun “tinggi spiritualitasnya”?

Hubungan antara spiritualitas dan kemajuan mengemuka pada tesis Max Weber. Etika Protestanlah yang, dalam tesisnya itu, berperan penting membangkitkan kapitalisme di Barat. Merujuk Weber, Robert N. Bellah memotret kebangkitan Jepang dari perspektif peran penting spiritualitas religi Tokugawa. Bagaimana dengan Indonesia? Sartono Kartodirdjo pernah memberi ulasan menarik. Merujuk Serat *Wedatama* karya Mangkunegara IV, kita punya “*mesu budi*”. Sartono memaknai “*mesu budi*” sebagai etos yang mencerminkan asketisme intelektual, semacam disiplin mental yang mendasari segala usaha dan pekerjaan. Implementasi “*mesu budi*” justru terlihat tatkala dia menganalisa etos kerja masyarakat Jepang yang berkembang sejak Restorasi Meiji. Karena “*mesu budi*” merupakan suatu asketisme yang bukan eskapisme alias religiusitas yang diekspresikan dengan meninggalkan segala urusan keduniaan, maka ia justru berfungsi sebagai etos yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan bangsa.<sup>12</sup>

Tetapi, lantas memang timbul pertanyaan bahwa kalau “*mesu budi*” itu semacam asketisme produktif yang dapat disejajarkan

---

<sup>12</sup> Sartono Kartodirdjo, “Etos Kerja dan Etos Bangsa”, *Kompas*, 4 Maret 1989 . Lihat juga, Sartono Kartodirdjo, “*Mesu Budi*” Berfungsi sebagai Etos yang Berpengaruh”, *Kompas*, 2 Oktober 1983.

dengan “etos Protestan”-nya Weber atau “Religi Tokogawa”-nya Bellah, mengapa tidak ada semacam Restorasi Meiji di Jawa, lebih luas lagi Indonesia? Saya punya hipotesis bahwa masalahnya, Jawa punya pengalaman lain. Kultur feodal kerajaan-kerajaan di Jawa, pada praktiknya justru dipersubur oleh kolonialisme. Kaum penjajah punya politik yang memecah belah, sehingga dalam mengatasi perlawanan pun kaum penguasa pribumi saling diadu domba. Penjelasannya segera dapat dikaitkan dengan konteks munculnya mentalitas permisif akibat yang tak berdaya pada kaum kolonial.

Tetapi sangat mungkin ada hipotesis lain, bahkan yang berkebalikan dengan pendapat saya itu. Bagaimana dengan hal-ikhwal tradisi Samurai layaknya di Jepang, apakah juga ada di Jawa? Kalau ada seberapa signifikan? Juga, sejauhmana mentalitas produsen dan kewirausahaannya, apakah dipicu kesadaran religiusitas pula? Bagaimana dengan modernisasi, apakah ia timbul secara “mandiri” atau banyak menggantungkan diri pada pihak kolonial dan rezim kelanjutannya? Pengalaman kita di Jawa atau Indonesia, lain kiranya dengan yang terjadi di Jepang dan Barat. Jepang, menurut Kishore Mahbubani bangsa Asia paling awal yang mampu mengadaptasi etos bangsa Barat.<sup>13</sup>

Perbincangan tentang etos kerja orang Indonesia, sesungguhnya sudah menjadi klasik. Sebelum kemerdekaan pun, ia menyeruak lewat *Polemik Kebudayaan* antara Sutan Takdir Alisjahbana dengan yang lain.<sup>14</sup> Takdir memicu polemik dengan melontarkan pandangan yang tak jauh dari pesan kalau kita mau maju, tirulah etos bangsa Barat. Bagi Takdir, kita terlalu lemah menyalakan api, sehingga nasi yang kita tanak tak matang-matang. Sedang bangsa Barat, apinya menyala-nyala. Pada masa Orde Baru, budayawan Mochtar Lubis menyinggung soal “watak yang lemah”, sebagai salah satu karakter menonjol manusia Indonesia. Dikatakannya, “Manusia Indonesia kurang kuat dalam mempertahankan dan memperjuangkan keyakinan serta pendiriannya. Hal menjadikan manusia Indonesia cepat berubah prinsipnya, seiring dengan tekanan yang ia dapatkan dari luar

---

<sup>13</sup> Kishore Mahbubani (2005), *Bisakah Orang Asia Berpikir?* Jakarta: Teraju Mizan.

<sup>14</sup> Achdiat K. Miharja (1986), *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya.

dirinya.”<sup>15</sup> Uraian tersebut, otokritik yang betapapun menyesakkan, tak boleh kita abaikan.

Ada juga tesis yang mengatakan, kita sebagai bangsa, terjebak pada apa yang kerap diuraikan Nurcholish Madjid sebagai “mentalitas pedalaman”, hal yang telah mengubah karakter bangsa yang konon berorientasi “pesisiran”.<sup>16</sup> Mentalitas pedalaman mencerminkan ketertutupan, *inward looking*, membatasi informasi, eksklusif, enggan berkompetisi, terlambat dalam mengenali perkembangan baru, lemah dalam kreativitas dan inovasi, merasa jaya di negeri sendiri yang diklaim *gemah ripah loh jinawi*. Konon, kolonialismelah yang juga menyumbang kokohnya mental ini. Indonesia yang berkarakter maritim dijauhkan dari mental pesisiran. Mental pesisiran mencerminkan keterbukaan, melek informasi, *outward looking*, responsif dalam berkompetisi, inklusif, kreatif dan inovatif. Ia lebih produktif, mengingat kalau tidak demikian, bangsa ini akan tergantung terus pada kekuatan asing. Mental pesisiran memaksa kita untuk lebih objektif dalam melihat dan merespons perkembangan bangsa dari perspektif global. Mental pesisiran itulah sesungguhnya yang perlu kita warisi. Indonesia, menurut Sutan Takdir Alisjahbana bukanlah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan di masa lalu, melainkan sebuah bangsa baru. Maka memang harus ada mental baru. Bangsa baru dengan mental baru. Mental baru itu bisa diambil dari manapun, termasuk dalam konteks *Polemik Kebudayaan*, dari bangsa Barat yang cenderung bermental pesisiran.

Kesadaran religius bangsa, sesungguhnya tidak menutup diri pada kemajuan. Dalam perkembangan gagasan Keislaman misalnya, pada masa Polemik Kebudayaan 1930-an, muncullah kampanye asketisme produktif oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Melalui serangkaian artikelnya di majalah yang dikelolanya, HAMKA memperkenalkan perspektif *tasawuf* modern. Dia menarik makna *tasawuf*, penyikapan spiritualitas keagamaan, dari pandangan umum yang bersifat eskapistik menjadi asketisme

---

<sup>15</sup> Mochtar Lubis, menyampaikannya dalam pidato kebudayaan tahun 1978. Lihat, Mochtar Lubis (2001), *Manusia Indonesia*, Jakarta: YOI.

<sup>16</sup> Misalnya, lihat Nurcholish Madjid, “Mempertegas Misi Perjuangan HMI” dalam Abdullah Hafidz dkk (Ed.), (1997) *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman*, Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.

produktif.<sup>17</sup> Spirit keagamaan dijumpakannya dengan modernitas, kemajuan. Jauh sebelum itu, KH. Ahmad Dahlan telah merintis bagaimana spirit Keislaman mendorong kemajuan bangsa melalui gerakan Muhammadiyah. Di sisi lain, gerakan Keislaman *Nahdlatul Ulama* juga punya semangat kemandirian yang tinggi. Ia juga sadar akan etos untuk memajukan bangsa. Dua gerakan Islam arus utama ini penting untuk diperbincangkan, meng-ingat pengaruhnya yang signifikan dalam mewarnai pemahaman dan aktualisasi Keislaman di Indonesia hingga dewasa ini.

Sejak beberapa dekade belakangan ini, kesadaran akan melemahnya etos kewirausahaan dirasakan semua pihak. Lumbung-lumbung produktivitas ekonomi masyarakat goyah karena kalahnya persaingan. Dalam hal ini, kita perlu berkaca pada perkembangan ekonomi Turki. Beberapa penelitian ekonomi Weberian, kini menemukan contoh kasusnya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di jantung Anatolia. Misalnya, Kayseri, “kota santri” yang maju pesat perekonomiannya dan lazim dikaitkan dengan konteks *Islamic Protestantism* atau *Islamic Calvinism*. Dalam kasus Kayseri, spirit keagamaan Islam mampu memicu tumbuhnya wirausahawan kelas menengah secara signifikan. Produk-produk mereka berorientasi ekspor ke Eropa dan yang lain. Namun, apabila kita teliti, sebagaimana Korea Selatan, Turki juga telah lama melakukan ikhtiar pembelaan ekonomi kepada warganya. Di Turki, kebijakan liberalisasi ekonomi yang dilakukan Turgut Ozal pada dekade 1980-an diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat Anatolia.<sup>18</sup> Ikhtiar itu berhasil selaras dengan mentalitas kesalehan ekonomi yang hasilnya bisa disaksikan sekarang. Di Korea, negara berpihak pada pengembangan industri kreatif. Ia tak akan seberhasil sekarang, manakala tak didukung etos kerja rakyatnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Dari mana etos bangsa kita gali? Jawabnya, dari banyak hal, termasuk dari konteks spiritualitas keagamaan. Bung Karno pernah menyitir tentang “api Islam”,

---

<sup>17</sup> M Alfian Alfian (2014), *HAMKA dan Bahagia*, Jakarta: Penjuru Ilmu.

<sup>18</sup> Dalam konteks tertentu, hal ini saya ulas di disertasi saya yang kemudian dibukukan tentang militer dan politik di Turki. Lihat, M Alfian Alfian (2018), *Militer dan Politik di Turki, Dinamika Politik Pasca-AKP hingga Gagalnya Kudeta*, Jakarta: Penjuru Ilmu.

tampaknya yang dimaksud ialah bagaimana etos spiritualitas agama mampu dijadikan pendorong bagi kemajuan. Tetapi, apakah dari sudut ini, belumlah muncul apinya, melainkan sekadar abunya? Apakah agama masih banyak didekati dari perspektif yang jauh dari apinya? Apakah elite agama tengah terjebak pada formalitas-formalitas dan sibuk mengurus konflik-konflik yang seharusnya tidak perlu? Kita perlu terus mengaca diri, justru untuk menggali kembali etos bangsa, sebuah etos baru yang kompatibel dengan zamannya. Kalau etos bangsa masih lemah dan ketinggalan zaman, bagaimana mau lari cepat?

Lagi-lagi, pertanyaan demikian mengingatkan *Polemik Kebudayaan* pada kurun 1935-1939 antara Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dan yang lain. Polemik tersebut respons generasi pasca-Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 terhadap persoalan-persoalan besar bangsa. STA yang masih berusia 27 tahun merumuskan pandangannya secara jelas, betapapun kontroversial.<sup>19</sup> Pemicu polemik tulisan STA, “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru, Indonesia dan Pra-Indonesia”, yang ditanggapi Sanusi Pane dan Purbatjaraka (Agustus-September 1935). Polemik terus menggelinding hingga 1939, dengan tambahan penanggap: Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M Amir, dan Ki Hadjar Dewantara. Tak seperti komentar instan dan singkat di medsos zaman kita, semua pemikiran dalam polemik ditulis dengan kalimat-kalimat yang jelas, utuh, dan terbaca luas.

Tulisan-tulisan STA menegaskan, sejarah Indonesia dimulai pada abad ke-20, “ketika lahir generasi baru yang dengan insaf hendak menempuh jalan baru bagi bangsa dan negerinya”. Zaman baru tersebut berbeda dengan “zaman hingga penutup abad ke-19” sebagai zaman pra-Indonesia. STA mengajak untuk merekonstruksi sejarah baru Indonesia, di mana zaman Indonesia bukan sambungan atau terusan masa lalu. Indonesia yang dicita-citakan oleh generasi baru, karena itu, bukan sambungan Mataram atau yang lain. Kebudayaan Indonesia harus dicari sesuai keperluan kemajuan masyarakat.

---

<sup>19</sup> Uraian tentang pemikiran STA dan polemiknya, merujuk pada Achdiat K. Miharja (1986), *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya.

STA berpendapat, tali persatuan bangsa itu kepentingan bersama. Sebuah bangsa tidak boleh statis, tetapi harus dinamis sehingga dapat “berlomba-lomba di lautan dunia yang luas”. STA menegaskan, bangsa Indonesia harus menanak nasi karena itu harus menghidupkan api. Ini berbeda dengan bangsa Barat yang sudah menanak nasi, apinya sudah menyala-nyala. Bagi Barat, masalahnya ialah bagaimana menjaga agar nasinya jangan sampai hangus, maka mengurangi api. Kalau bangsa Indonesia justru memikirkan bagaimana mengurangi api, maka nasi Indonesia tidak akan masak-masak karena api-nya saja tak hidup.

Api yang dimaksud STA ialah intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme, di mana tiga hal terakhir ini tidak selalu bermakna negatif. Semua itu berkembang di Barat. Karena itu, bagi STA, budaya Barat perlu dilihat karena tidak saja mampu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga filsafat, keagamaan, dan kesusastraan. Dalam konteks waktu itu, STA mengibaratkan Indonesia lemah seperti “pohon yang sudah mati, dahannya tiada berdaun, tiada berkembang, dan tidak berbuah”. Kalaupun ada daun, kembang, dan buahnya, “itu sangatlah kecil dan merana sehingga boleh dikatakan tidak berarti di mata dunia”. Karena itu, “jiwa Barat” harus diambil, dan kebalikannya, yakni “jiwa *nrimo*” alias pasrah semata-mata, harus ditolak.

Apakah dengan mengusulkan agar bangsa Indonesia mengambil “jiwa Barat” itu berarti STA sepakat dengan pembaratan atau westernisasi? Dalam sebuah wawancaranya pada 1976, STA mengatakan “tidak membicarakan tentang Barat”, tetapi tentang “suatu mentalitas”. STA mengaku bukan “pemuja Barat”. Ia sepakat dengan Andre Malraux bahwa Barat sudah tidak mampu lagi menghasilkan suatu karya agung seperti Michelangelo di zaman Renaisans. STA memakai istilah “jiwa Barat” lebih merujuk pada “manusia berpikir, mengambil keputusan, dan memegang nasib di tangannya sendiri”. Pendapat itu merupakan perkembangan penting setelah sekian lama polemik kebudayaan. Ia melakukan obyektivikasi,

justru dengan menolak mengidentikkan mengambil “jiwa Barat” dengan pembaratan.<sup>20</sup>

Sebagai refleksi, apakah manusia Indonesia sudah *berpikir, mengambil keputusan, dan memegang nasib di tangan sendiri?* Pertanyaan itu dapat diringkas, dengan sedikit modifikasi pertanyaan Kishore Mahbubani, “*can’t Asian think?*”<sup>21</sup> Pertanyaan itu penting mengingat ia bersifat abadi, tidak saja berlaku di masa penjajahan, juga lazim saja di masa kini mengingat merdeka belum tentu mandiri dalam hal kebebasan berpikir dan pengambilan keputusan terkait dengan penentuan nasib bangsa. Persoalannya, bagaimana api Indonesia yang sudah menyala terkelola efektif sehingga penanakan nasi Indonesia berjalan tanpa ketekoran. Menanak nasi Indonesia berarti menjaga apinya tetap menyala. Kepemimpinan tentu aspek penting dalam menjaga nyala api Indonesia mengingat ada fungsi motivasi. Nyala api tak berarti identik retorika pemimpin *solidarity maker*, tetapi lebih terkait pada efektivitas dan efisiensi kebijakan yang sistemik.

## Penutup

Kepemimpinan politik dalam konteks Indonesia dan Keindonesiaan mempersyaratkan sejumlah kualifikasi, dari konteks ideologi, visi, wawasan, kemampuan motivasional meluruskan niat dan mengaktivasi etos bangsa di mana semua itu mewujudkan pada sosok-sosok pemimpin yang berintegritas dan berkompeten. Untuk memimpin bangsa sebesar ini tentu, bukan tipe pemimpin medioker yang diharapkan muncul, tetapi pemimpin bangsa yang menjiwai dan paham masalah-masalah bangsa, mampu mengupayakan, dengan segenap potensi sumber daya kepemimpinannya, hal-hal yang mendasar dan demi menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi kemajuan dan kesejahteraan.

Regenerasi kepemimpinan tentu tak boleh dilupakan, apalagi dipinggirkan. Karena itu, jalan bagi generasi muda, generasi milenial

---

<sup>20</sup> M Alfian Alfian, “Menanak Nasi Indonesia”, *Kompas*, 16 April 2015.

<sup>21</sup> Lihat kembali, Kishore Mahbubani (2005), *Bisakah Orang Asia Berpikir?* Jakarta: Teraju Mizan.

dan seterusnya menambah dunia politik diperlukan untuk bisa ikut berkiprah dan mewarnai dinamika kebangsaan kita dewasa ini. Sekolah-sekolah politik makin diperlukan, apakah kursus atau sekolah tersebut dibikin oleh partai politik atau kelompok-kelompok masyarakat sebagai bentuk kepedulian, sekaligus memperkuat basis-basis, ladang-ladang penyemai kepemimpinan bagi masa depan Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Alfian, M Alfian (2014), *HAMKA dan Bahagia*, Jakarta: Penjuru Ilmu.
- Alfian, M Alfian (2015), “Menanak Nasi Indonesia”, *Kompas*, 16 April.
- Alfian, M Alfian (2017), “Merayakan Keindonesiaan”, *Kompas* 1 Juli.
- Alfian, M Alfian (2017), “Partai Politik dan Konstitusi”, *Media Indonesia*, 3 Februari.
- Alfian, M Alfian (2018), *Militer dan Politik di Turki, Dinamika Politik Pasca-AKP hingga Gagalnya Kudeta*, Jakarta: Penjuru Ilmu.
- Castells, Manuel (2010), *The Power of Identity*, Oxford: Wiley Blackwell.
- Huntington, Samuel P. (2004), *Who Are We? America’s Great Debate*, London: Free Press, 2004.
- Kartodirdjo, Sartono (1983), ““Mesu Budi” Berfungsi sebagai Etos yang Berpengaruh”, *Kompas*, 2 Oktober.
- Kartodirdjo, Sartono (1989), “Etos Kerja dan Etos Bangsa”, *Kompas*, 4 Maret.
- Latif, Yudi (2011), *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia.
- Lubis, Mochtar (2001), *Manusia Indonesia*, Jakarta: YOI.
- MacGregor, James (2010), *Leadership*, New York: Harperperennial.
- Madjid, Nurcholish (1987), *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish (1987), “Nilai-nilai Keindonesiaan Umum: Antisipasi terhadap Kecenderungan Konvergensi Nasional” dalam Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.



- Madjid, Nurcholish (1997), “Mempertegas Misi Perjuangan HMI” dalam Abdullah Hafidz dkk (Ed.), HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman, Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.
- Mahbubani, Kishore (2005), *Bisakah Orang Asia Berpikir?* Jakarta: Teraju Mizan, 2005.
- Miharja, Achdiat K. (1986), *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- PP Muhammadiyah (2016), *Negara Pancasila: Darul Ahdi Wa Syahadah*, Jakarta: PP Muhammadiyah.
- Snyder, Jack (2003), *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah, Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*, Jakarta: KPG.
- Tempo Interaktif, 28 April – 4 Mei 2003.
- UUD NRI Tahun 1945



# BANGSA DAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI HASIL PROSES KEBUDAYAAN (Sebuah Tinjauan Pengantar)

Iman Toto K. Rahardjo

## Abstrak

Sejak zaman prasejarah, sudah ada suku-suku bangsa yang mendiami wilayah yang dikenal dengan nama Indonesia. Penduduk asli ini adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat yang telah memiliki kebudayaan sendiri pada tingkat peradaban yang cukup tinggi pada masanya sehingga mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa pendatang dengan kesetaraan dan mendapat manfaat. Budaya baru dari luar diserap untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan budaya (*penyuburan*). Interaksi budaya tersebut dimungkinkan karena penduduk asli leluhur bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang mendasari peripikir dan perilakunya. Nilai-nilai luhur itu adalah suka damai, saling menghormati-menghargai, saling memberi dan menerima, musyawarah, jujur, toleransi dan tanggung jawab. Keunggulan-keunggulan itu menjadikan Sriwijaya dan Majapahit menjadi negara besar dan mampu mempersatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaannya. Tetapi oleh karena motif dan cara mempersatukan tidak didasari nilai-nilai luhur itu, lebih karena dorongan ekspansionis-imperialistik, menjadikan negara Sriwijaya dan Majapahit sangat rapuh terhadap goncangan-goncangan dari dalam ataupun luar yang pada akhirnya menjadi sebab keruntuhannya. Masuknya Islam melalui persamaan agama (Islam) sesungguhnya merajut kembali persatuan Indonesia dan budaya Indonesia menjadi makin kaya lahir dan batin karena nilai-nilai luhur yang ada mendapatkan penguatan religius. Kolonialisme Barat masuk dengan membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur inilah yang pada hakikatnya menjadi dasar dan menjiwai seluruh perlawanan menentang penjajahan. Para Pejuang Kemerdekaan, Pahlawan dan *Founding Fathers* berhasil membangun persatuan di atas nilai-nilai luhur tersebut. Bisa dikatakan tokoh-tokoh Pejuang Bangsa ini sebagai pencipta-pencipta kebudayaan baru dan modern Indonesia. Persatuan yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai luhur itu yang melahirkan Bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda), rumusan Pancasila, Proklamasi 1945 dan Negara Indonesia Merdeka. Karena nilai-nilai luhur tersebut tidak lain adalah unsur-unsur budaya unggul bangsa, maka seluruh sejarah lahirnya Bangsa dan Negara Indonesia Merdeka pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses kebudayaan. Sudah semestinya pengelolaan negara Bangsa Indonesia seterusnya tetap dilandasi dan dibimbing oleh nilai-

nilai luhur budaya seperti yang telah dirumuskan dalam Pancasila sebagai fondasi utama peradaban Indonesia.

**Kata kunci:** nilai-nilai luhur, kebudayaan, persatuan, dan kemerdekaan.

### *Abstract*

*As of the prehistoric age there have been already tribes who inhabited a region which is now known as Indonesia. Those indigenous populations were independent and sovereign and had their own culture at a level of civilization which was high for the time, so that they were able to interact with new coming nations equally and gaining advantage. The new culture of the settlers was absorbed to enhance science and to expand their cultural insight (enrichment - penyuburan). That cultural interaction was possible because the native inhabitant ancestors of the Indonesian nation had already noble values which underlie their way of thought and behavior. Those noble values were peace loving, mutually respecting, mutually giving and taking, consultative, honest, tolerant, and responsible. Those superiorities had turned Sriwijaya and Majapahit into great states and capable of unifying the regions of Nusantara (the Archipelago-Between) under their rule. Nevertheless, as the motives and the ways of unifying was not based on those noble values, yet more due to expansionistic-imperialistic drives, the states of Sriwijaya and Majapahit became prone against shocks from within or without, which finally would lead to their downfall. Enter the Islam through the equality in religion (Islam) had indeed knit back the unity of Indonesia and the Indonesian culture to become richer worldly as well as arcanelly, as the existing noble values obtained religious strengthening. Western colonialism came and brought along values which were contrary to the noble values of the Indonesian nation. It has been those noble values which in essence become the base of and inspire the whole struggle against colonialism. The Independence fighters, the heroes and founding fathers had succeeded to develop unity based on those noble values. We may say that the figures of fighters of the nation were the creators of the new culture and the modern Indonesia. The unity which is inspired by and is based on those noble values has given birth to the Indonesian nation (the Youth Pledge), the formulation of Pancasila, the Proclamation of 1945, and the Independent State of Indonesia. Because those noble values are none other than the elements of the superior culture of the nation, then in essence the whole history of the birth of the nation and the state of Independent Indonesia took place in a cultural process. The further management of the state of the Indonesian nation should remain based on and be guided by the noble cultural values as which have been formulated in Pancasila being the main foundation of the civilization of Indonesia.*

**Keywords:** noble values, culture, unity, and independence.

## **Pendahuluan**

Tulisan ini merupakan tinjauan awal dengan pengertian berdasarkan bahan-bahan dari sumber-sumber sekunder seperlunya, dibanding dengan ketersediaan dalam literatur nasional maupun dunia, yang dalam hal kajian Indonesia dikenal sangat luas. Ditambah dengan pengamatan terhadap sejumlah pengalaman empirik fenomena sosial-budaya dalam sejarah Indonesia.

## **Pokok-Pokok Pikiran Tentang Kebudayaan**

Indonesia atau Nusantara digunakan di sini sebagai nama, secara bergantian dipakai dengan maksud dan makna yang sama, suatu gugusan kepulauan yang membentang seluas Eropa yang terletak di antara dua benua Asia dan Australia, di antara dua samudra Pasifik dan India. Kata Indonesia kemudian berkembang dalam kepastakaan etnologi, entitas bahasa dan pada akhirnya identitas bangsa dan negara.

Kebudayaan berasal dari kata ‘budaya’ yang berasal dari bahasa Sanskerta ‘buddhayah’. Menurut Koentjaraningrat<sup>1</sup> kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari budi dan karyanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>2</sup> ‘Budaya’ diartikan sebagai: 1). Pikiran, Akal Budi; 2). Adat-istiadat; 3). Beradab, Maju; 4). Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Sedangkan ‘kebudayaan’ dijelaskan sebagai: 1). Hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan istiadat; 2). Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.

Selanjutnya wujud dan nilai kebudayaan menurut Koentjaraningrat<sup>3</sup>, ada tiga macam:

---

<sup>1</sup> Ani Sri Rahayu, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, 2016, hal 20

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>3</sup> Ani Sri Rahayu, 2016, op cit hal 21

**Pertama**, kebudayaan merupakan kompleks dari gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma dan peraturan. Wujud ini adalah wujud ideal kebudayaan yang sifatnya abstrak, terletak pada alam pikiran manusia.

**Kedua**, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas dan tindakan berpola manusia dalam bermasyarakat. Wujud ini bisa disebut sistem sosial, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi satu dengan lainnya dari waktu ke waktu menurut pola tertentu. Sistem sosial ini konkret, bisa diobservasi dan didokumentasi.

**Ketiga**, wujud sebagai benda-benda manusia bisa disebut juga kebudayaan fisik sifatnya sangat konkret. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan budaya atau kebudayaan adalah wujud kebudayaan pertama dan kedua seperti tersebut di atas.

Sementara itu C.K.M. Kluckhohn<sup>4</sup> memakai istilah aspek kebudayaan. Ada tujuh aspek kebudayaan, yaitu: 1). Bahasa; 2). Sistem pengetahuan; 3). Organisasi sosial; 4). Sistem peralatan hidup dan teknologi; 5). Sistem mata pencaharian hidup; 6). Sistem religi; 7). Kesenian. Tentang hubungan kebudayaan dan religi ada dua pandangan. Yang pertama menyatakan kebudayaan adalah bagian dari religi, sedangkan yang kedua menyatakan religi bagian dari kebudayaan.

Selain Koentjaraningrat, masih banyak dan beragam rumusan definisi tentang kebudayaan. Alfred L. Kroeber dan C.K.M. Kluckhohn<sup>5</sup> mencatat paling sedikit 176 definisi tentang apa yang disebut 'kebudayaan'. Yang terkemuka di antaranya Edward B. Taylor (1871) merumuskan kebudayaan sebagai "*That complex whole which includes knowledge, beliefs, morals, laws, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*". Masih banyak pakar antropologi, filsafat dan ilmu-ilmu sosial budaya melakukan pendefinisian kebudayaan misalnya Ralf Linton, W.H. Kelly, Sigmund Freud, dan lain-lain.

Sebenarnya, upaya-upaya pendefinisian itu hendak mencakup segala praksis dalam segala masyarakat manusia dalam segala babak

---

<sup>4</sup> Boediono Kusumohamidjojo, *Proses Realisasi Manusia, Filsafat Kebudayaan*, 2017, hal 34

<sup>5</sup> Ibid hal 39

sejarah. Karena itu, perdebatan tentang definisi ‘kebudayaan’ bisa berkepanjangan tak berujung. Oleh karena itu, Koentjaraningrat seperti yang sudah dikutip di muka berupaya merangkum dalam cakupan yang luas sehingga tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak terangkum dalam kebudayaan.

Aspek penting lainnya adalah hubungan dan kedudukan manusia terhadap kebudayaannya. Selain sebagai penganut dari kebudayaan masyarakatnya sendiri yang sudah dilakoni turun-temurun, juga bisa berperan sebagai pembawa kebudayaan dari masyarakat yang satu masuk ke dalam masyarakat yang lain. Tetapi yang dipandang memiliki tingkat tertinggi adalah manusia sebagai pencipta kebudayaan. Yaitu yang memiliki kapasitas sebagai inspirator, motivator dan inovator, baik dengan revitalisasi kebudayaan lama masyarakatnya atau menciptakan gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan sosial budaya yang pada akhirnya melahirkan budaya baru yang bisa diterima secara luas oleh masyarakatnya.

Pembentukan atau lahirnya budaya baru tidak lepas dari eksistensi manusia demi mempertahankan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu dihadapkan masalah dan tantangan dari lingkungan kehidupannya baik alam maupun sosial yang selalu dan terus berubah. Kompleksitas dari gagasan-gagasan, perilaku dan tindakan-tindakan manusia dalam perubahan ini disebut sebagai *proses kebudayaan*.

Perubahan kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari perubahan sosial. Surjono Sukanto<sup>6</sup> berpendapat tidak ada perubahan sosial yang tidak diakibatkan oleh perubahan kebudayaan. Tetapi perubahan pada akar kebudayaan-lah yang menghasilkan perubahan sosial. Perkembangan dalam pikiran manusia yang merupakan akar dari kebudayaan, yang terhimpun dalam kompleks ilmu (pengetahuan), yang menentukan dalam corak pikiran dan pada gilirannya perilaku manusia. Dan pada giliran selanjutnya mengakibatkan perubahan dalam pola hubungan antar manusia dan dengan demikian bermuara pada perubahan sosial.

---

<sup>6</sup> Ibid hal 185

## **Kebudayaan dan Peradaban**

Di Indonesia kita menganut seperti wacana yang berkembang di Eropa, dimana kebudayaan sebagai padanan ‘*culture*’ dalam bahasa Inggris dan peradaban sebagai padanan ‘*civilization*’. Sekalipun wacana tentang kebudayaan dan peradaban sampai sekarang masih diwarnai oleh ketidaksepakatan definitif tentang apa itu kebudayaan dan apa itu peradaban, dalam tulisan ini kita ambil apa yang ditawarkan *Samuel Huntington*<sup>7</sup> yang merumuskan “*a civilization as the highest culture grouping of people and the broadest level of culture identity people have sort of that which distinguishes humans from other species. It is define both by common objective elements, such as language, history, religion, customs, institutions, and by the subjective self identification of people*”.

Selain luas dan komprehensif peradaban juga memiliki sisi keunggulan kebudayaan. Peradaban merupakan puncak prestasi manusia untuk merealisasikan dirinya dengan mengerahkan segenap kecakapan yang dimilikinya untuk mendayagunakan alam dan hukum-hukumnya. Peradaban berlangsung berkesinambungan karena ingatan, khayalan, mitos, gagasan-gagasan diteruskan antar generasi melalui jalur genetik dan jalur kebudayaan. Keberlanjutan peradaban karena manusia memerlukan peradaban justru untuk mengendalikan kebudayaan yang mencerminkan pola perilakunya.<sup>8</sup>

## **Kebudayaan dan Sejarah**

Kebudayaan itu lahir bersamaan dengan proses evolusi manusia, berubah, berkembang atau menyusut berganti dalam dimensi ruang dan waktu. Karena itulah sejarah yang diketahui manusia hanya karena kebudayaan yang dia bangun, dan kebudayaan yang dia bangun itu hanya menjadi relevan karena berlangsung dalam sejarah. Kaitan itulah yang mengakibatkan bahwa baik sejarah maupun kebudayaan tidak bisa dipahami sebagai momen, melainkan lebih sebagai proses. Dalam proses yang sifat dasarnya adalah kesinam-

---

<sup>7</sup> Ibid hal 207

<sup>8</sup> Ibid hal 216



bugan dan keberlanjutan sejarah bisa dipahami sebagai jembatan kronologi.

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang kebudayaan yang sekilas dikemukakan di atas sebagai pangkal tolak untuk menelusuri sejarah Nusantara atau Indonesia, sejak sebagai lokalitas geografis dan seterusnya berproses dalam lintasan sejarah menjadi entitas budaya yang berpuncak pada pembentukan bangsa dan negara Indonesia dalam suatu proses kebudayaan yang panjang.

## **Latar Belakang Sejarah**

### **A. Geografi**

Kepulauan Indonesia terletak di daerah khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dengan dua musim sebagai gejala alam yang tetap. Hal ini berpengaruh pada pelbagai aspek kehidupan penduduk yang mendiami kepulauan Indonesia. Misalnya pada pola pertanian, pola pelayaran dan aspek-aspek lain yang dipengaruhi iklim. Selain itu juga menjadi jembatan antara daratan benua Asia dan Australia yang terletak pada jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina. Letaknya yang pada jalur perdagangan internasional itu besar pengaruhnya pada perkembangan sejarah kuno Indonesia.

Sejak zaman Indonesia kuno penduduk Indonesia adalah pelaut-pelaut andal yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan di sekitar dan pulau-pulau di Indonesia tidak pernah menjadi penghalang, bahkan menjadi faktor pemersatu. Hubungan dengan daerah pedalaman lebih sulit. Pada awal sejarah kuno Indonesia telah tumbuh pusat-pusat perdagangan di beberapa tempat di pesisir pulau Jawa, Sumatra dan bagian Timur Indonesia.

### **B. Hubungan Awal Zaman Kuno**

Penelitian arkeologis di pelbagai tempat di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari kesatuan wilayah lalu lintas barang di Asia Tenggara. Ketika menjelaskan keadaan Indonesia yang mula-mula ditemui para pedagang dari luar

Asia Tenggara, khususnya dari India, sejumlah ahli menekankan bahwa di Indonesia pada saat itu telah berkembang masyarakat-masyarakat yang memiliki pranata yang memungkinkan masyarakat-masyarakat itu mendapat manfaat dari hubungan-hubungan tersebut.<sup>9</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa sebelum pendatang-pendatang dari luar Nusantara masuk, di wilayah kepulauan telah ada masyarakat-masyarakat asli yang telah memiliki tingkat peradaban tertentu yang memungkinkan mereka bisa melakukan komunikasi dan transaksi yang setara dan mendapatkan manfaat. Ini terjadi pada abad-abad awal tarikh Masehi.

Bernard H. N. Vlakke,<sup>10</sup> ahli sejarah pertama yang menulis sejarah kuno Indonesia menyatakan, “bukti paling kuat pada sejarah Indonesia yang kita miliki jelas menunjuk pada keberadaan ciri-ciri asli yang kuat dalam budaya Hindu Indonesia. Ketika orang India ke kepulauan Indonesia mereka tidak berjumpa dengan orang-orang yang tidak beradab, yang bisa dengan seenaknya, yang bisa dicekoki dengan kebudayaan mereka sendiri (India)”.

Dari catatan sejarah hubungan dagang antara Indonesia dan India lebih dulu berkembang daripada hubungan dagang Cina. Hubungan dagang dengan Cina dan India telah menempatkan Indonesia di gelanggang perdagangan internasional zaman kuno. Akan tetapi pengaruh hubungan dengan India dan Cina, pada perkembangan sejarah Indonesia berbeda. Hubungan dengan India telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam bentuk tata negara di sebagian daerah Indonesia. Telah pula terjadi perubahan tata dan susunan masyarakat sebagai akibat penyebaran agama Buddha dan Hindu. Pengaruh hubungan dengan Cina jauh lebih kecil.

### **C. Masuknya Pengaruh Budaya India**

Proses masuknya pengaruh budaya India oleh para peneliti sering disebut penghinduan, sekalipun kurang tepat karena juga terdapat pengaruh agama Buddha. Bahkan kemudian pada perkembangannya di Indonesia menjadi Shiwa-Buddha. Bagaimana proses masuknya pengaruh budaya India dalam budaya Indonesia terdapat

---

<sup>9</sup> Marwati D Poesponegoro & Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional II*, 2008, hal 7-8

<sup>10</sup> Bernard HM Vlekke, *Nusantara, Sejarah Indonesia*, 2017, hal 21

sejumlah hipotesis. Pendapat yang pertama, bertolak dari anggapan bahwa bangsa Indonesia zaman itu berlaku pasif dalam proses tersebut. Oleh karena itu timbul anggapan telah terjadi proses kolonisasi oleh orang-orang India. Koloni-koloni orang India itu kemudian menjadi pusat penyebaran dari budaya India. Bahkan pula ada anggapan kolonisasi tersebut disertai dengan penaklukan. Yang berarti bahwa orang-orang India dalam jumlah besar itu terutama prajurit, yang dalam tata susunan budaya India disebut sebagai kasta ksatria. Karena itu F.D.K. Bosch menyebutnya sebagai *hipotesis ksatria*.<sup>11</sup>

Pendapat berbeda diajukan oleh N.C. Krom,<sup>12</sup> meskipun masih ada anggapan kolonisasi, bukan oleh prajurit, tetapi oleh pedagang. Karena tujuan kedatangan orang-orang India itu ke Indonesia semata-mata dengan tujuan dagang. Orang-orang ini lalu menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan-perempuan Indonesia, menyebarkan budaya-budaya India melalui hubungan-hubungannya dengan pemuka masyarakat Indonesia. Karena pedagang termasuk kasta waisya, Bosch menyebut *hipotesis waisya*.

Pendapat lainnya adalah yang bertolak dari anggapan bahwa dalam proses masuknya pengaruh budaya India ke dalam budaya Indonesia, bangsa Indonesia berlaku aktif dan peran yang lebih besar dan menentukan. Van Leur<sup>13</sup> misalnya, mengajukan keberatan keberatan terhadap hipotesis ksatria maupun hipotesis waisya. Baik di India maupun di Indonesia tidak ada bukti-bukti tertulis dan prasasti yang menandai telah berlangsungnya kolonisasi yang melibatkan penaklukan. Selain itu, suatu kolonisasi selalu disertai dengan pemindahan segala unsur-unsur atau aspek-aspek kebudayaan dari tanah asal. Misalnya sistem kasta, kesenian, bentuk-bentuk bangunan, bahasa, dan sistem sosial. Kenyataannya apa yang terdapat pada masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India. Bisa saja sejumlah pedagang bertempat tinggal dalam suatu perkampungan khusus seperti yang kita saksikan sekarang masih terdapat kampung Keling di beberapa tempat di Sumatra Utara. Tetapi keberadaan dan

---

<sup>11</sup> *Sejarah Nasional II, op cit* hal 26

<sup>12</sup> *Ibid* hal 28

<sup>13</sup> *Ibid* hal 28

kedudukan mereka itu tidak berbeda dengan masyarakat lainnya sebagai rakyat biasa dan tidak memiliki akses yang memungkinkan untuk mempengaruhi budaya setempat. Oleh karena itu Van Leur mengajukan hipotesis masuknya pengaruh India melalui golongan Brahmana. Brahmana pada masa itu bukan saja orang yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam agama Hindu, tetapi juga dipandang mumpuni dalam ilmu pengetahuan dan ketatanegaraan. Mereka datang atas undangan dari para penguasa Indonesia. Dengan demikian pengaruh itu langsung pada elite masyarakat Indonesia dan seterusnya menyebarluas ke masyarakat umum. Bosch sependapat dengan Van Leur dan menyebut proses tersebut sebagai *penyuburan*, yang bisa diartikan memperkaya serta memperluas wawasan budaya Indonesia.

Para ahli sejarah kuno Indonesia umumnya berpendapat bahwa unsur budaya Indonesia lama masih tampak dominan dalam semua lapisan masyarakat. Yang sangat menyolok adalah adanya kasta, baik dalam sastra kuno maupun keadaan masyarakat di Bali sekarang ini tidak seperti keadaan di India. Maka sebagai kesimpulan tentang pengaruh masuknya budaya India dalam budaya Indonesia telah jelas, yaitu dimungkinkan karena hubungan perdagangan antara India dan Indonesia. Tetapi proses yang mengakibatkan terjadinya penyuburan budaya Indonesia karena inisiatif bangsa Indonesia. Dalam hal tersebut unsur-unsur budaya India hanya diambil substansinya. Dengan demikian unsur-unsur atau aspek-aspek budaya India tidak pernah menjadi unsur dominan dalam budaya Indonesia secara keseluruhan.

Sampai dengan tahap ini dalam sejarah Indonesia dapatlah diambil pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

***Pertama***, kepulauan Nusantara jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa dari luar kawasan tersebut telah dihuni masyarakat yang telah memiliki peradaban tinggi pada zamannya. Oleh karena itu, mereka mampu berinteraksi secara setara, bermartabat, dan mendapatkan manfaat. Komunikasi yang pada awalnya hubungan dagang telah meningkatkan mobilitas fisik, sosial dan kemakmuran.

**Kedua**, keberhasilan hubungan-hubungan tersebut dimungkinkan karena bangsa Indonesia menerima kedatangan bangsa-bangsa dari luar yang bermaksud baik (dagang) itu dengan sikap damai, terbuka, jujur dan penuh toleransi. Sifat-sifat ini adalah merupakan unsur-unsur budaya luhur yang kiranya mendasari tingginya peradaban bangsa Indonesia masa itu. Budaya perilaku seperti ini pula yang kiranya mendasari hubungan antar suku bangsa di Nusantara masa itu. Terbukti dengan maju dan ramainya hubungan pelayaran antar pulau serta tumbuhnya pusat-pusat perdagangan di pesisir pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur lainnya.

**Ketiga**, dengan tingkat peradaban dan kemajuan ekonomi seperti itu maka tatkala hubungan dengan bangsa-bangsa lain juga membawa pengaruh budaya asing yang mereka bawa, bangsa Indonesia mampu menyerap secara cerdas dan bermartabat. Sehingga budaya asing itu tidak mendominasi budaya bangsa sendiri, tetapi menjadi faktor penyuburan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan budaya. Dari proses itu lahirlah peradaban baru Indonesia yang tetap dengan dominasi ciri-ciri Indonesia.

Semua peristiwa-peristiwa tersebut yang diperkirakan berlangsung antara abad III-VI M, dalam perspektif ruang dan waktu, pada hakikatnya adalah *proses kebudayaan*. Pencapaian ini agaknya menjadi momentum tumbuh kembangnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara.<sup>14</sup>

Fakta-fakta sejarah tersebut jugalah yang menjadi dasar argumentasi Bung Karno<sup>15</sup> untuk membantah pendapat para ahli Barat pembela kolonialisme yang berpendapat bahwa kolonialisme bangsa-bangsa Barat ke negeri di luar Eropa adalah sebagai *mission sacre*

---

<sup>14</sup> Ibid hal 28

<sup>15</sup> Soekarno, *Mencapai Indonesia Merdeka* dalam *Di Bawah Bendera Revolusi I*, 1963, ditulis pada Maret 1933: *membantah tulisan Prof Veth yang menulis bahwa Indonesia tidak pernah merdeka sejak zaman ribuan tahun lalu hingga sekarang (Hindia-Belanda). ...pendapat kita ialah bahwa professor yang pandai itu, yang memang menjadi salah satu "datuk"-nya penyelidikan riwayat kita, ini kali salah raba. Ia lupa, bahwa perbedaan yang dalam sekali antara hakekatnya zaman Hindu dan hakekatnya zaman sekarang. Ia lupa, bahwa zaman Hindu itu tidak terutama sekali berarti suatu pengungkungan oleh kekuasaan Hindu, yakni tidak terutama sekali berarti suatu machtsusurpartie dari pihak Hindu di atas pundaknya Indonesia. Ia lupa, bahwa di dalam zaman Hindu itu Indonesia sebenarnya adalah merdeka terhadap pada Hindustan, sedang di dalam zaman sekarang Indonesia adalah tidak merdeka terhadap pada negeri Belanda.*

yang bertujuan “civilization”. Memandang bangsa-bangsa yang mereka jajah bangsa-bangsa yang belum beradab.

## **Era Kerajaan Hindu-Buddha**

Dengan tidak mengurangi arti pentingnya kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, sesuai maksud tulisan ini, hanya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang akan diulas seperlunya. Alasannya jelas, pada eranya masing-masing kedua kerajaan ini telah berhasil mempersatukan sebagian besar wilayah Indonesia. Batas-batas geografis yang dipersatukan nyaris sesuai dengan batas-batas NKRI seperti sekarang.

### **A. Sriwijaya**

Sebagai perkembangan lebih lanjut dari hubungan dagang dan masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia antara abad 3-6 M, jalur pelayaran Selat Malaka dan daerah-daerah di Semenanjung Melayu serta pantai-pantai timur di Sumatra tumbuh menjadi pusat-pusat perdagangan yang maju. Sementara itu hubungan dagang dengan Cina juga semakin berkembang, mengakibatkan wilayah pantai seputar laut Cina Selatan yaitu Sumatra bagian selatan, pantai-pantai utara Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Kepulauan Riau hingga pantai timur Semenanjung Malaka tumbuh menjadi pelabuhan-pelabuhan dagang baru.<sup>16</sup>

Pada abad ke 7, kerajaan Sriwijaya muncul sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara, kekuatan ekonominya bertumpu pada perdagangan yang menguasai jalur-jalur perdagangan utama Asia Tenggara yaitu Selat Malaka dan laut Cina Selatan serta kota-kota pelabuhan di pantai-pantai seputar Selat Malaka dan laut Cina Selatan. Dengan kata lain, Sriwijaya menguasai wilayah perdagangan internasional di Asia Tenggara. Ibukota Sriwijaya juga menjadi pusat pengembangan agama Buddha terkemuka setelah India. Selain pemasukan dari bea dan cukai, perdagangan ekspor impor komoditas dari daerah-daerah yang dikuasai menjadikan Sriwijaya sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menjalin hubungan dengan Asia Barat, Selatan (India) dan Cina.

---

<sup>16</sup> OW Walters, *Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya Abad III-VII*, 2017, hal 65-100

Untuk menjaga dan mengamankan kepentingannya sebagai negara maritim, angkatan bersenjata Sriwijaya terutama angkatan lautnya melakukan ekspedisi penaklukan-penaklukan bukan hanya Sumatra bagian timur dan selatan tetapi juga sepanjang pantai utara Jawa hingga timur dan Kalimantan Barat. Pada puncak kejayaannya Indonesia bagian barat dan Semenanjung Tanah Melayu berada dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Selain memaksa kapal-kapal dagang untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan yang di bawah kekuasaannya juga menguasai monopoli perdagangan.

Sifat umum dari negara yang kekuasaannya bertumpu pada penjajahan serupa itu adalah sangat rawan pemberontakan dari wilayah-wilayah jajahan dan munculnya pesaing-pesaing dari negara lain yang kuat. Demikianlah sepanjang sejarahnya Sriwijaya tak sepi dari pemberontakan di wilayah-wilayah yang dikuasainya, satu persatu melepaskan diri. Ketika pesaing kuat dari luar muncul terutama Cina, kemunduran Sriwijaya sebagai imperium di Asia Tenggara tak terelakkan lagi.

Setelah abad ke-12 memasuki abad ke-13, Sriwijaya tidak lagi menjadi kekuatan yang dipatuhi di Asia Tenggara, sementara itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa telah berkembang menjadi kerajaan yang kuat setelah munculnya Majapahit pada abad ke-13. Pada 1376 tentara Majapahit menyerbu dan menaklukan kerajaan Sriwijaya. Pada permulaan abad ke-15 muncul beberapa kerajaan Islam di Sumatra bagian utara dan Semenanjung Tanah Melayu. Maka berakhir lah riwayat kerajaan Hindu di Sumatra.

## **B. Majapahit**

Kerajaan Majapahit<sup>17</sup> berdiri setelah runtuhnya Singhasari pada 1293, runtuhnya Singhasari bertepatan dinobatkannya Wijaya yang bergelar *Kertarajasa* sebagai pendiri dan raja pertama Majapahit. Memerintah hingga 1309 digantikan anaknya Jayanagara sampai 1328. Setelah Jayanagara meninggal, digantikan saudara tirinya Ratu Tribhuwana Tunggaladewi yang memerintah hingga 1350.

---

<sup>17</sup> *Sejarah Nasional II, op cit* hal 447-461

Pada 1334 lahir putra mahkota Hayam Wuruk, pada 1350 Hayam Wuruk naik tahta menggantikan ibunya ratu Tribhuwana dan bergelar *Sri Rajasanagara* dan memerintah hingga wafatnya 1389. Masa pemerintahan raja Hayam Wuruk disebut sebagai puncak kejayaan Majapahit. Keberhasilan tersebut berkat peran sangat penting dari tokoh legendaris Gajah Mada yang menjabat sebagai *Patih Hamangkubhumi*, jabatan ini sesungguhnya sudah dia dapatkan sewaktu mengabdikan kepada ratu Tribhuwana Tungadewi setelah ia berhasil menumpas pemberontakan Sadeng.<sup>18</sup>

Pada masa Ratu Tribhuwana inilah Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal “Sumpah Palapa”, yang intinya “sebelum menaklukkan seluruh wilayah di Nusantara dan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit, dia tidak akan *amukti palapa*. Sumpah itu dilaksanakan dengan terus menerus mengirimkan tentara Majapahit menyerbu wilayah-wilayah yang diinginkan, dan itu berarti perang penaklukan. Perang pada zaman itu menganut asas *anyaken musuh*, yang artinya memusnahkan musuh. Yang menang mendapatkan segalanya, yang kalah kehilangan segalanya, bukan hanya harta tetapi juga nyawa dan negaranya. Jadi lah yang kalah sebagai negeri jajahan dengan segala kewajibannya, yaitu mengirim harta benda sebagai upeti, orang-orang muda sebagai pekerja dan prajurit serta wanita-wanita cantik sebagai selir-selir di istana para bangsawan di negeri para pemenang.<sup>19</sup>

Pemberontakan sebagai cara merebut kekuasaan, peperangan untuk menaklukkan negara lain untuk meluaskan wilayah kekuasaan, adalah budaya yang berkembang dan bagian dari peradaban zaman

---

<sup>18</sup> *Sejarah Nasional II*, op cit, hal 461-462

<sup>19</sup> Mpu Prapanca, *Kakawin Nagarakertagama*, 2018. Hal 13-15, lihat juga, M Yamin, Gadjah Mada, *Pahlawan Persatoean Nusantara*, Balai Pustaka, 1948. Penaklukan-penaklukan oleh balatentara Majapahit baru berhenti pada peristiwa Perang Bubat tahun 1357. Pada peristiwa ini Gajah Mada melakukan kesalahan fatal. Rombongan Raja Padjadjaran beserta putrinya, Dyah Pitaloka yang akan menikah dan menjadi permaisuri Raja Hayam Wuruk, dipaksa Gajah Mada untuk menyatakan tunduk terlebih dulu mengakui kekuasaan Majapahit. Penolakan pihak Padjadjaran menyebabkan terjadinya perang dimana Raja Padjadjaran dan Putri Dyah Pitaloka meninggal. Akibat langsung dari peristiwa ini Gajah Mada disalahkan dan dia mengakui kesalahannya. Secara ksatria Gajah Mada meletakkan sebagai Patih Hamangkubhumi dan mengundurkan diri dari segala urusan Negara, sampai meninggalnya pada 1364... Dalam konteks masa kini sifat ksatria Gajah Mada yang mengundurkan diri dan tidak meneruskan perang-perang penaklukan sebagai rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang layak diteladani.



itu. Kebesaran Majapahit termasuk di dalamnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada adalah bagian dari zaman itu. Dan harus diingat apa yang kita sebut sebagai kebesaran dan kejayaan Majapahit terutama bersumber pada kitab *Pararaton* dan *Nagarakertagama*, yang semuanya ditulis oleh pujangga keraton. Pujangga keraton adalah istilah spesifik yang bukan hanya menunjukkan jabatan tetapi juga peran keberadaannya dalam budaya kerajaan Jawa baik masa Hindu Budha maupun Islam. *Nagarakertagama* ditulis oleh Mpu Prapanca, sedangkan kitab *pararaton* tidak diketahui penulisnya, tapi sejalan dengan tradisi zaman itu hanya seorang yang setingkat pujangga keraton yang mampu menulis buku semacam itu. Seorang pujangga keraton memang bertugas untuk menuliskan hal ihwal yang terbaik tentang raja, keluarganya beserta kerajaannya. Di sisi lain dituliskan yang sebaliknya perihal musuh-musuhnya.<sup>20</sup> Tugas dan kewajiban utama punggawa istana memang terutama menyenangkan hati sang Raja. Ini adalah satu bentuk pengabdian tertinggi, karena Raja dalam kepercayaan kosmologis yang dianut pada masa itu adalah personifikasi dewa tertinggi.

Para ahli mengakui bahwa sumber paling lengkap tentang Majapahit adalah dalam kitab *Pararaton* dan *Nagarakertagama* ditambah sejumlah prasasti-prasasti. Dari sumber-sumber ini diberitakan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang lengkap, terdesentralisasi dan terperinci. Juga pembangunan infrastruktur, ekstensifikasi pertanian yang berhasil meningkatkan kemakmuran negeri. Tak kurang pentingnya suasana kerukunan umat beragama yang terlaksana dan terlindungi dengan baik diantara penganut-penganut Buddha, Hindu-Siwa dan Hindu-Waisynawa (Wisnu). Sistem pemerintahan tidak banyak berubah sampai dengan runtuhnya Majapahit.<sup>21</sup>

Masalahnya seperti halnya riwayat Sriwijaya, suatu kekuasaan yang dibangun di atas fondasi pemaksaan, penaklukan dan

---

<sup>20</sup> *Sejarah Nasional II*, op cit, hal 464

<sup>21</sup> Di samping *Nagarakertagama* dan *Pararaton*, ada sumber lagi: *Babad Tanah Jawi* (WI Olthof) cet 1, 2017 dalam bentuk narasi seperti dongeng dan lebih banyak cerita tentang Mataram.

peperangan, ditambah lagi dasar kepercayaan kosmologis mistis, sangat rapuh dan rawan tatkala kekuasaan di puncak atau pusat melemah dan munculnya pesaing-pesaing baru yang kuat.

Demikianlah tatkala Gajah Mada meninggal pada 1364 dan Hayam Wuruk pada 1389, yang ini berarti kekuatan utama di puncak atau pusat kekuasaan melemah. Maka masa berikutnya adalah ulangan riwayat kerajaan absolut yang mengalami kemunduran dan keruntuhan. Perebutan kekuasaan di pusat, pemberontakan daerah-daerah taklukan disusul dengan melepaskan diri sebagai jajahan. Di saat keruntuhan hanya soal waktu, Islam sebagai faktor sosial budaya baru sudah cukup berkembang dan memiliki kekuatan untuk mengambil alih tongkat estafet sejarah Nusantara.

Penelitian-penelitian komperhensif mutakhir menunjukkan penyerbuan Pati Unus putra Raden Patah Sultan Demak yang adalah putra Bhre Kertabhumi pada 1478 menyerang Girindrawardana raja terakhir Majapahit, adalah bagian perebutan kekuasaan dan balas dendam antara keluarga dinasti Majapahit sendiri. Kebetulan Raden Patah dan Pati Unus sudah memeluk Islam.<sup>22</sup>

## **Kesimpulan Era Indonesia Kuno**

Dari catatan sejarah dua imperium Indonesia kuno, Sriwijaya dan Majapahit, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, bahwa dari abad ke 7-15 M bangsa Indonesia semakin menunjukkan keunggulannya sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, makmur dan maju di Asia Tenggara. Interaksi dengan budaya asing yang berdampak *penyuburan* pada budaya Indonesia sendiri mendorong terjadinya proses kebudayaan berupa perubahan kebudayaan yang pada gilirannya mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang terpenting adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan tata kenegaraan. Ini tecermin dalam masa kejayaan

---

<sup>22</sup> *Sejarah Nasional II*, op cit hal 469-479

Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dunia mengakui Majapahit adalah negara “modern” pada zamannya.<sup>23</sup>

**Kedua**, sebagai akibat dari kemajuan di berbagai bidang utamanya ekonomi, baik Sriwijaya maupun Majapahit sebagai negara maritim, dalam ekspansinya menuntut adanya wilayah-wilayah baru sebagai penghasil sumber daya ekonomi. Dalam kasus Majapahit ditambah lagi adanya dorongan-dorongan yang bersifat keyakinan spiritual, Yaitu ambisi menjadikan Majapahit sebagai pusat dunia sesuai dengan konsep kosmologis-mistik, dan Raja Majapahit sebagai representasi dewa tertinggi. Maka satu persatu wilayah yang pada dasarnya “negara-negara lain”, ditaklukan agar tunduk di bawah lindungan kebesaran Majapahit sebagai “matahari” Nusantara.<sup>24</sup> Sejarah mencatat Sriwijaya dan Majapahit berhasil menyatukan di bawah kekuasaannya hampir seluruh wilayah Nusantara nyaris seperti wilayah NKRI sekarang. Ini adalah kenyataan sejarah, tetapi mengenai motif dan cara mempersatukan adalah perihal lain yang harus disikapi secara kritis terutama jika dikaitkan dengan nilai-nilai baru yang berkembang sesudahnya.

**Ketiga**, menyikapi perihal tersebut di atas, Sukarno (Bung Karno) tegas dan jelas memandang kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berperadaban tinggi hingga dapat menyatukan wilayah seluas daratan Eropa. Tetapi mengenai motif dan cara mempersatukan wilayah Nusantara untuk takluk di bawah kekuasaannya adalah bentuk nafsu imperialisme.<sup>25</sup> Sikap dan pandangan Bung Karno yang demikian itu adalah pandangan yang *historis rasional*. Sementara Yamin

---

<sup>23</sup> Unesco mengakui *Nagarakartagama* sebagai Warisan Budaya Dunia. *Nagarakartagama* memberikan kesaksian pemerintahan seorang raja pada abad 14 di Indonesia, dimana ide-ide modern keadilan sosial, kebebasan beragama, keamanan pribadi, dan kesejahteraan rakyat dijunjung tinggi (unesco.org)

<sup>24</sup> Muhammad Yamin, *Gadjah Mada, Pahlawan Persatoean Nusantara*, 1948

<sup>25</sup> HA Notosutardjo, *Bung Karno di Hadapan Pengadilan Kolonial*, Bab Pembelaan Hal 241-371, hal 247-248 tentang imperialisme. “.....*Imperialisme adalah suatu paham...Ia adalah suatu nafsu, suatu sistem menguasai, atau mengendalikan ekonomi bangsa lain...suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi bangsa atau negeri lain...Ia kita dapatkan dalam suatu nafsu bangsa Spanyol menguasai Belanda. Kita dapatkan dalam nafsu Kerajaan Timur Sriwijaya menaklukkan Semenanjung Malaka, kerajaan Melayu...Ia kita dapatkan dalam nafsu negeri Majapahit menaklukkan dan mempengaruhi semua kepulauan Indonesia...*”

cenderung *romantik emosional*. Meskipun Yamin tidak menolak analisis yang menyebut Gajah Mada termasuk *Machevialian*.<sup>26</sup>

Sebagai salah satu warisan utama sejarah dan budaya Indonesia, Sriwijaya dan Majapahit amatlah penting untuk menempatkannya dalam perspektif kebudayaan dan peradaban bangsa. Sebagai bagian dari mata rantai kesinambungan sejarah yang akhirnya bermuara pada Kebangkitan Nasional dengan muatan nilai-nilai baru yang menjadi dasar terciptanya budaya baru yang akan membidani lahirnya Bangsa dan Negara Indonesia Merdeka.

## **Kehadiran Islam Dan Perkembangannya**

### **A. Awal Kehadiran**

Kehadiran Islam di Indonesia sudah diketahui bersamaan dengan kedatangan para pedagang dan pelaut-pelaut dari luar kepulauan nusantara dengan tujuan perdagangan atau lainnya. Itu berarti sudah sejak awal abad masehi ketika para pendatang dari Timur Tengah dan Asia Selatan (India) mencari jalan menuju Asia Timur melalui jalur laut. Tidak ada jalan lain selain melalui Selat Malaka dan laut Cina Selatan. Di antara para pendatang itu terutama yang berasal dari Timur Tengah (Arab dan Persia) adalah muslim. Tatkala Sriwijaya mencapai puncak kemajuannya pada abad ke 7-12, ditandai dengan makin ramainya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga semakin banyaknya pendatang-pendatang pedagang muslim masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai Sriwijaya. Bahkan kemudian bermukim terutama di kota-kota pelabuhan. Peristiwa yang hampir serupa terjadi pada abad-abad berikutnya di wilayah wilayah yang dikuasai oleh Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang masa itu masih bercorak Indonesia dan Hindu.<sup>27</sup>

Diketahui pula bahwa para pendatang muslim yang umumnya pedagang terdapat juga mubalig, yang kedatangannya bermaksud menyebarkan Islam (dakwah). Demikianlah kehadirannya di Nusantara

---

<sup>26</sup> Mohammad Yamin, *Gajah Mada Pahlawan Persatoean Nusantara*, op cit. Lihat juga Enung Nurhayati, *Gajah Mada*, 2018.

<sup>27</sup> *Sejarah Nasional III*, op cit hal 1-20

dikenalkan dan disebarakan serta diterima secara damai oleh masyarakat setempat. Sejarah menunjukkan penyebaran Islam dipercepat oleh faktor kondisi dan situasi setempat, yaitu terutama situasi politik yang dialami oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan di bab terdahulu, menjelang akhir abad ke-12 mulai terjadi kemunduran Sriwijaya yang ditandai dengan pemberontakan-pemberontakan dan makin kuatnya tekanan persaingan dari Cina dan kerajaan-kerajaan di Jawa, Singhasari dan Majapahit. Demikian pula yang dialami Majapahit pada abad-abad berikutnya yang terutama karena perebutan kekuasaan di antara bangsawan anggota dinasti. Sejarah juga mencatat pengaruh Hindu-Buddha hanya terdapat di lapisan atas kerajaan yang terutama bermukim di kota-kota pusat pemerintahan dan pelabuhan-pelabuhan. Sementara penduduk atau rakyat biasa masih menganut kepercayaan Indonesia asli pra Hindu. Maka ketika Raja dan bangsawan yang berpindah keyakinan, banyak rakyat mengikutinya. Pada sisi lain sifat egalitarian Islam yang tidak membedakan menjadi daya tarik bagi masyarakat yang selama itu hidup dalam alam feodalistik dan sistem kasta. Dalam Islam ia merasa sama dengan orang-orang lain meskipun kedudukan sosialnya lebih tinggi.

Demikianlah penyebaran Islam di Indonesia terjadi dan dipermudah karena adanya dua pihak, yaitu orang-orang pendatang muslim yang mengajarkan agama Islam dan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Dalam masa-masa pergolakan politik, ekonomi, sosial-budaya seperti pada abad ke 13-16, Islam sebagai agama dan budaya mudah memasuki dan mengisi masyarakat Indonesia yang sedang mencari pegangan hidup. Juga cara-cara yang di tempuh dalam dakwah Islam dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi sosial-budaya yang ada, misalnya seperti yang dilakukan Wali Songo.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ensiklopedia Islam* 5, 1994, Wali Songo

## B. Kerajaan Islam dan Penetrasi Barat

Runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha dan berkembangnya Islam melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara mulai dari Samudra Pasai di Aceh, Demak di Jawa hingga Ternate dan Tidore di Maluku. Berpuluh-puluh kerajaan Islam tumbuh kembang sebagai negara berdaulat. Berbeda dengan kerajaan Hindu-Buddha dimana agama Hindu dan Buddha hanya dianut oleh lapisan elite kerajaan, Islam dianut oleh sultan dan punggawa-punggawa kerajaan serta mayoritas rakyatnya. Oleh karena itu dalam waktu singkat abad ke 13-16 Islam telah menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk serta tersebar di seluruh Nusantara.

Kesamaan agama tidak menjamin tidak adanya benturan dan konflik di antara sesama kerajaan Islam. Benturan-benturan yang berlatar belakang politik dan ekonomi tak jarang terjadi. Celah inilah yang menjadi sumber kerawanan dan sekaligus kelemahan, mana kala muncul kekuatan yang kuat melakukan penetrasi dan intervensi. Kekuatan lain itu memang sudah ada dan akan masuk setiap saat ada peluang. Mereka adalah armada pedagang asing Eropa, mula-mula Portugis disusul Spanyol, Belanda dan Inggris. Kekuatan asing ini masuk dengan rencananya sendiri atau yang lebih sering terjadi karena diundang atau diminta bantuan oleh salah satu pihak yang terlibat konflik. Dengan membantu pihak Portugis akan mendapatkan monopoli perdagangan komoditas yang dibutuhkan, pada masa itu adalah rempah-rempah seperti cengkih, lada dan lain lain, juga fasilitas mendirikan benteng-benteng pertahanan.

Dari sinilah *divide et impera* mulai, yang juga dijalankan oleh Belanda setelah berhasil menyingkirkan Portugis dalam persaingan perdagangan di Nusantara. Jadi *divide et impera* bukan semata-mata rencana kekuatan asing untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga karena tersedianya peluang berupa persaingan dan peperangan-peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan di Indonesia. Faktor penyebabnya jelas yaitu belum terbentuknya pemahaman bahwa kekuatan asing itu adalah musuh bersama. Belum adanya pemahaman bersama itu lalu mengakibatkan tidak adanya dorongan

akan amat pentingnya persatuan di antara kerajaan-kerajaan dalam menghadapi kekuatan asing.

Sesuai dengan tujuan tulisan ini, maka aspek di atas yang akan dibahas. Yaitu, bagaimana Islam sebagai faktor yang menumbuhkan kesadaran bahwa kekuatan asing itulah musuh bersama, dan pada saat yang sama membangkitkan kesadaran untuk menggalang persatuan sebagai cara yang lebih andal menghadapi musuh bersama yang kuat. Sementara perkembangan Islam dalam aspek fiqih dan teologis lainnya yang melahirkan aliran, ormas-ormas, gerakan-gerakan politik dan sosial-budaya yang berasas Islam tidak dalam lingkup pembahasan.

Perdagangan dan islamisasi telah menyebabkan masyarakat di berbagai wilayah Nusantara terhubungkan satu sama lain. Islam berjasa menghubungkan masyarakat-masyarakat itu di bawah satu tema pesan universal Islam. Dalam kaitan itu kerajaan selain jadi pusat politik dan perdagangan juga sebagai pusat Islam, bersama kelompok strategis lain terutama ulama, kerajaan telah berjasa menghubungkan wilayah Nusantara secara ekonomi dan politik, dan juga agama (Islam). Dan sejalan dengan berlangsungnya islamisasi terjadi proses integrasi antar satu masyarakat dengan yang lain dengan budaya yang berbeda. Interaksi budaya ini makin menguat sejalan dengan proses islamisasi yang tidak hanya sebatas konversi tetapi juga pelembagaan agama dalam struktur sosial-budaya dan masyarakat.<sup>29</sup>

Integrasi budaya inilah yang membentuk manusia Indonesia secara umum mempunyai watak religius. Perkembangan sosial-budaya seperti di atas bisa dipandang semacam prakondisi bagi tumbuhnya benih-benih wawasan kebangsaan yang akan mendorong “Kebangkitan Nasional” di kemudian hari dan dalam proses tumbuh kembangnya wawasan kebangsaan itu unsur religius menjadi salah satu faktor utama dengan kata lain *proses kebudayaan* menjadi pangkal tolak dan landasan pembentukan wawasan kebangsaan pada proses selanjutnya. Masuknya Islam bisa dikatakan *penyuburan* fase kedua bagi budaya Indonesia. Bahkan dengan ajaran persamaan dan keadilan, pemuliaan sesama manusia, memberikan penguatan dan

---

<sup>29</sup> Jajat Burhanuddin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, 2017

watak religius kepada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Indonesia.

## **Masa Kolonial Dan Kebangkitan Nasional**

Sejak awal abad ke-17 kedudukan Portugis sebagai kekuatan asing yang memegang monopoli perdagangan di Indonesia disingkirkan VOC. Peran ini berlangsung hingga akhir abad ke-18 (1799) dimana VOC dinyatakan pailit dan bubar. Peran VOC digantikan pemerintah Belanda dan dari sinilah dimulai negara kolonial Hindia Belanda sejak 1817.<sup>30</sup>

Kolonialisme membawa nilai-nilai yang bertentangan dalam nilai-nilai budaya Indonesia terutama persamaan dan rasa keadilan. Sepanjang masa penjajahan Belanda seluruh wilayah timbul perlawanan-perlawanan fisik maupun gerakan-gerakan sosial dan keagamaan. Segala kebijakan dijalankan untuk mempertahankan penjajahan dengan politik etis, politik kesejahteraan, politik reaksioner dll. Kebijakan-kebijakan itu tidak meredam perlawanan tapi justru melahirkan lapisan terpelajar pribumi baru sebagai hasil dari pendidikan Barat. Mereka inilah yang nantinya akan merumuskan dan mengartikulasikan tuntutan hati nurani bangsa terjajah yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Momentum sejarah pada awal abad ke-20 ini menandai kebangkitan nasional Bangsa Indonesia.

### **A. Pergerakan Nasional**

Diskriminasi kolonial di segala bidang yang melukai rasa keadilan dan martabat manusia menimbulkan ketidakpuasan dan kebencian yang makin luas dan mendalam. Ini yang melahirkan gerakan-gerakan sosial pribumi yang pada satu sisi menuntut adanya persamaan dan keadilan bagi warga pribumi, pada sisi lain melakukan upaya meningkatkan kesadaran dan kualitas warga pribumi melalui pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan. Dipelopori Sarekat Dagang Islam (1905) kemudian menjadi Sarekat Islam (SI) pada (1911), Budi Utomo (1908), Muhammadiyah (1912), Taman Siswa (1922), NU (1926), pesantren-pesantren, perkumpulan sosial Kristen,

---

<sup>30</sup> Sejarah Nasional IV, op cit hal 27-52



perkumpulan daerah, dan lain-lain. Juga pendidikan kaum perempuan yang dipelopori Kartini. Gerakan politik muncul dengan berdirinya Indische Partij (IP) pada (1912) dipimpin tiga serangkai, Douewes Dekker Setia Budi, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, sepenuhnya bercorak politik dengan asas-asas nasionalisme modern dan radikal. SI yang merupakan organisasi massa terbesar dan semakin radikal karena infiltrasi unsur-unsur kiri, kehadiran IP dan disusul Indische Social Democratiche Vereniging (ISDV) pimpinan Sneevliet yang berhaluan sosialis marxis, menjadikan suasana politik Hindia Belanda pada dasawarsa kedua abad 20 itu memanas. Pemerintah kolonial bertindak represif dengan menangkap tokoh-tokohnya. Perkembangan lebih lanjut, mengikuti jejak Social Democratiche Arbeids Partij (SDAP) di Belanda menjadi Partai Komunis Belanda (CPN), ISDV menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1920. SI-Merah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat dan menjadi organisasi masyarakat PKI.

Menyimpang dari arahan Komintern di Moskow, PKI menggerakkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial pada 1926. Pemberontakan itu berhasil ditumpas, ribuan orang ditangkap dan diasingkan ke Digul, Papua. PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang.<sup>31</sup> Atas kegagalan ini bahkan Stalin selaku pemimpin Komintern mengancam PKI yang melakukan petualangan kekiri-kirian.

Sesudah PKI dilarang memberi peluang kepada gerakan politik yang memiliki gagasan nasionalisme modern dan radikal. Adalah HOS Tjokroaminoto sebagai pemimpin SI tokoh nasional pertama yang membangkitkan semangat nasionalisme. Kontribusi ini dimungkinkan adanya peranan penting Islam sebagai faktor pengikat bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Tjokroaminoto adalah juga perumus Sosialisme Islam. Dengan demikian Tjokroaminoto berusaha mensintesakan tiga unsur ideologi “Islamisme, Nasionalisme dan Sosialisme”. Trias ini tak diragukan menginspirasi muridnya yang paling cemerlang, Sukarno. Tjokroaminoto bersama SI juga membangkitkan kesadaran bernegara dengan tuntutan berdirinya

---

<sup>31</sup> *Sejarah Nasional V*, op cit Bab Pergerakan Nasional juga lihat George MT Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Komunitas Bambu, 201, Bab II dan Bab III

pemerintahan sendiri di Hindia Belanda.<sup>32</sup> Sebagai guru, selain Tjokroaminoto adalah KH. Ahmad Dahlan Pemimpin Muhammadiyah (Soekarno menjadi anggota aktif sejak 1938 ketika masih dalam pembuangannya di Bengkulu. Juga A. Hasan Pemimpin persis ketika masa pembuangan di Ende, Flores -pen). Setelah menulis risalahnya yang terkenal “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” pada 1926 dan kemudian menyempurnakan dalam satu rumusan ideologi *marhaenisme*, Sukarno mendirikan Perserikatan Indonesia pada 4 Juli 1927. Pada kongres pertama pada Mei 1928 menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Tak diragukan pengaruh Sang Guru Tjokroaminoto terhadap Sukarno. Bila Tjokroaminoto menjadikan Islam sebagai rujukan sosialisme, maka Sukarno merujuk pada suatu unsur marxisme yaitu *materialisme-historis* sebatas sebagai metodologi ilmiah, “pisau analisa” untuk mengupas situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Tampilnya gerakan politik dengan ideologi nasional baru ini tepat waktu. Di saat SI (sudah menjadi partai) mengalami kemunduran dan PKI dibubarkan dan terlarang, munculnya PNI bukan hanya sebagai alternatif tapi juga sebagai kritik terhadap gerakan petualangan kekiri-kirian PKI (*kinderkrankheit*, penyakit kekanak-kanakan) yang fatal itu. Gerakan PKI itu telah mengkhianati upaya-upaya membangun persatuan nasional.

Dengan dasar ideologi yang merupakan sintesa dari tiga aliran besar itu diharapkan bisa menjadi faktor pemersatu. Dalam anggaran dasarnya tegas dinyatakan PNI bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang berarti “berhentinya pemerintahan Belanda”. Untuk mencapai tujuan itu hanya persatuan seluruh kekuatan nasional sebagai syarat utamanya. Pada Kongres Pemuda II pada 26-27 Oktober 1928 di Surabaya semangat persatuan itu terwujud. Pada 28 Oktober 1928 diucapkan Sumpah Pemuda, yang menegaskan tekad bersatu sebagai satu Bangsa Indonesia. Pada 1930 hampir seluruh organisasi pemuda bergabung dalam Indonesia Muda (IM). Demikian juga organisasi-organisasi perempuan, pada Kongres Perempuan Indonesia pertama 22-25 Desember 1928 berhimpun dalam

---

<sup>32</sup> Anton Timur Djaelani, *Gerakan Sarekat Islam*, 2017, Bab 3 dan 5. Tentang islam sebagai inspirasi pemikiran politik Soekarno lihat Ridwan Lubis, *Soekarno & Modernisme Islam* (disertasi), 1987. Juga dalam Iman Toto K. Rahardjo & Suko Sudarso (ed), *Bung Karno - Islam, Pancasila*, NKRI, 2006.

Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI). Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah yang sangat penting. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan gemblengan pengalaman perjuangan para pemuda pejuang berdialog, bermusyawarah dengan damai, saling menghargai, saling memberi dan menerima, terbuka, toleran dan bertanggung jawab. Bersepakat bahkan bersumpah sebagai satu Bangsa Indonesia. Dengan kata lain kesepakatan sebagai suatu Bangsa Indonesia dicapai dengan cara yang cerdas dan berbudaya. Bedakan dengan cara Sriwijaya dan Majapahit mempersatukan Nusantara.

### **Menuju Indonesia Merdeka**

Gerakan politik nasionalis revolusioner mendapatkan momentumnya pasca kehancuran PKI. Sementara itu, di bawah pimpinan Sukarno PNI tumbuh cepat dan makin radikal: Indonesia Merdeka sekarang! Di negeri Belanda mahasiswa yang berhimpun dalam Perhimpunan Indonesia (PI) makin berperan sebagai duta-duta perjuangan Indonesia merdeka di luar negeri. Di tanah air gerakan pemuda menorehkan sejarah dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Semangat Sumpah Pemuda telah mendorong kehendak untuk bersatu dalam persatuan Indonesia menemukan wujud jasmani dan rohaninya. Jasmaninya adalah, dengan dipelopori PNI dan SI, terbentuk PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Rohnya adalah tekad bulat bersatu mencapai Indonesia merdeka. Hasilnya adalah mendorong organisasi-organisasi nasionalis yang semula bersikap kooperatif dengan Belanda menjadi non-kooperatif seperti PNI dan SI. Tercapainya persatuan ini pastilah hasil dari suatu proses dialog, musyawarah yang cerdas dan bertanggung jawab demi tercapainya Indonesia merdeka.

Menyikapi perkembangan tersebut pemerintah kolonial bertindak makin represif. Pemimpin-pemimpin partai ditangkap dan dipenjarakan atau dibuang, partainya dilarang. Situasi dan kondisi represif dan tidak adanya pemimpin karismatik, sampai dengan kedatangan tentara Jepang, hanya gerakan-gerakan politik yang loyal atau moderat yang masih hidup, namun tak banyak yang bisa dilakukan. Kedatangan Jepang sekalipun sebagai penjajah memberkan

harapan-harapan baru. Selain janji-janji kemerdekaan juga dipicu sikap Belanda yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyetujui kemerdekaan Indonesia (sekalipun dalam bentuk pemerintahan sendiri Hindia Belanda). Ditolaknya “Petisi” Sutardjo 1936 meyakinkan golongan moderat bahwa Belanda memang tidak berniat membuka peluang bagi kemerdekaan Indonesia. Penolakan serupa terhadap Petisi Kongres Rakyat Indonesia pertama (1939) dan “Resolusi Wiwoho 1940” mendorong ketidakpuasan dan kekecewaan menjadi perasaan anti Belanda yang makin meluas. Pada sisi lain persatuan di kalangan kaum nasionalis Indonesia meningkat. Untuk lebih memantapkan persatuan nasional bangsa Indonesia, Kongres Rakyat Indonesia pertama secara resmi menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bendera merah putih sebagai bendera nasional, lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional. Pada Kongres Rakyat Indonesia kedua 1941 dibentuk Majelis Rakyat Indonesia yang menghimpun seluruh pergerakan kaum nasionalis Indonesia dan dikoordinasi oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia), MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) dan PVPN-suatu gabungan serikat pegawai pemerintah.<sup>33</sup>

## **Negara Indonesia Merdeka**

Berakhirnya kolonialisme Belanda dan berganti dengan pendudukan Jepang, memunculkan situasi baru. Situasi perang dunia menuntut semua pihak bersiasat. Pemimpin utama gerakan kemerdekaan, Soekarno, Hatta dan Syahrir dibebaskan untuk diajak bekerja sama dengan tujuan bisa mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Perbedaan sikap terhadap kerja sama dengan Jepang di antara pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan tidak menghalangi semua pihak bekerja sama mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang paling signifikan adalah pembentukan pasukan bersenjata dari tingkat prajurit “Heiho” dan perwira (PETA) yang seluruhnya direkrut dari para pemuda Indonesia. Sekalipun tujuannya untuk kepentingan perang Jepang, tetapi “*de facto*” pasukan bersenjata dan terlatih ini merupakan *embrio* tentara nasional Negara Indonesia Merdeka di kemudian hari.

---

<sup>33</sup> GMT Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, 2013, hal 138.

Pemimpin-pemimpin pergerakan dihadapkan pada dua masalah besar dan fundamental. Pertama, dengan cara bagaimana dan kapan kemerdekaan (yang sudah di depan mata) dicapai. Kedua, bentuk dan sifat Negara Indonesia Merdeka. Sekali lagi perbedaan-perbedaan taktis dalam sikap terhadap Jepang tidak menghalangi usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut tecermin dalam perdebatan-perdebatan pada sidang-sidang BPUPKI. Semua perbedaan paham golongan dikesampingkan untuk menjaga persatuan agar secepatnya Indonesia merdeka. Betapa sengitnya perdebatan dan betapa tajamnya perbedaan segera berakhir pada kesepakatan, kompromi, *gentlemen agreement*. Suatu wujud dari musyawarah untuk mencapai mufakat. Rumusan Pancasila yang mula-mula diajukan Sukarno pada 1 Juni 1945, bergulir mendapatkan bentuk kesepakatan pertama dalam *Piagam Jakarta* pada 22 Juni 1945, dan selanjutnya mendapatkan tempatnya yang abadi dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Jadi rumusan Pancasila merupakan hasil dari suatu proses yang dinamis dan dijiwai oleh nilai-nilai luhur: damai, musyawarah, saling menghargai, saling memberi dan menerima (saling berkorban), gotong royong, toleran dan bertanggung jawab. Sukarno menyebut proses dan hasil musyawarah itu (rumusan Pancasila dan UUD 1945) sebagai *perjanjian luhur*<sup>34</sup>. Demikian pula perdebatan sengit bahkan disertai

---

<sup>34</sup> R.M.A.B Kusuma, *Lahirnya UUD 1945*, 2016, hal 247-249, "...Maka oleh karena itu, saya sebagai ketua panitia, menasihatkan kepada Tuan-Tuan sekalian, marilah kita sudahi perkara ini dengan tidak masing-masing memegang kokoh-kokoh pendirian kita masing-masing lagi. Kepada kaum yang dinamakan kaum kebangsaan Indonesia, saya minta dengan tegas, supaya suka menjalankan suatu pengorbanan, menjalankan suatu offer kepada keyakinan itu. Alangkah gilang gemilang kaum kebangsaan, jikalau kita bisa menunjukkan kepada dunia umum, dunia Indonesia khususnya, bahwa kita demi persatuan, demi Indonesia Merdeka yang hendaknya datang selekas-lekasnya, bisa menjalankan suatu offer mengenai keyakinan kita sendiri. Saya berkata, bahwa adalah sifat kebesaran di dalam pengorbanan, 'er is grootheid in offer'. Marilah kita sekarang menjalankan pengorbanan ini dan pengorbanan yang saya minta kepada Saudara-Saudara yang tidak sefaham dengan golongan-golongan yang dinamakan golongan Islam ialah supaya Saudara-Saudara mufakati apa yang saya usulkan ini. Yang saya usulkan ialah: baiklah kita terima, bahwa di dalam UUD dituliskan, bahwa 'Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam'....Saya minta kepada Saudara-Saudara kaum kebangsaan jalankanlah offer ini. Marilah kita setuju usul saya ini, terimalah klausul di dalam UUD bahwa Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Saya minta supaya apa yang saya usulkan itu diterima bulat-bulat oleh anggota sekalian, walaupun saya mengetahui, bahwa ini berarti pengorbanan yang hebat-hebatnya, terutama sekali dari pihak Saudara-Saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam, Saya minta dengan rasa menngis...rasa menngis, supaya sukalah

dengan pemaksaan<sup>35</sup>, yang nyaris menggagalkan Proklamasi Kemerdekaan bisa diselesaikan berkat kesadaran semua pejuang kemerdekaan akan mutlakny menjaga persatuan agar selekasnya bisa memproklamasikan kemerdekaan. Tekad untuk menjaga persatuan hanya mungkin bila dijiwai nilai-nilai luhur. Persatuan inilah yang akhirnya mengantar bangsa Indonesia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menyusun UUD NRI 1945, dimana di atasnya berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seperti sudah disebutkan di muka, nilai-nilai luhur bangsa itu adalah unsur-unsur budaya unggul Indonesia yang terbentuk sepanjang sejarahnya selama ribuan tahun. Nilai-nilai inilah yang mendasari dan menjiwai *perjanjian luhur* Bangsa Indonesia yang Berbahasa Indonesia, Berbendera Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, (Sumpah Pemuda 1928, Kongres Rakyat Indonesia 1940). Juga mendasari dan menjiwai perjanjian luhur yang melahirkan Pancasila, mewujudkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI.

Bangsa dan negara Indonesia Merdeka adalah hasil perjuangan seluruh komponen bangsa dilandasi dan dijiwai nilai-nilai luhur, baru dan modern. Negara Republik Indonesia bisa disebut sebagai *negara natura*<sup>36</sup>, yang berarti terbentuk dari proses yang alami, sebuah keniscayaan sejarah, atau lebih tepat disebut sebagai *proses kebudayaan*.

## Penutup

Bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 seperti yang diuraikan di atas adalah hasil dari suatu proses kebudayaan. Bukan pemaksaan atau penaklukan dengan kekerasan atau peperangan seperti halnya Sriwijaya dan Majapahit. Proses kebudayaan itu dalam realitas sosialnya merupakan rangkaian kesepakatan demi kesepakatan yang

---

*menjalankan offer ini kepada Tanah Air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita supaya kita lekas menyelesaikan Indonesia Merdeka bisa lekas damai...”*

<sup>35</sup> Penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh Pemuda ke Rengasdengkok, Agustus 1945

<sup>36</sup> Agustinus, W. Dewantara, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, 2017. Jenis negara lainnya adalah negara *konvensional*, yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional atau lainnya.

berlangsung melintasi jembatan kronologi sejarah budaya bangsa, dan dilandasi dan dijiwai nilai-nilai luhur dan melahirkan perjanjian luhur yang mengikat segenap warga bangsa lahir-batin.

Kesepakatan kita dengan Sumpah Pemuda, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah perjanjian luhur. Hanya dengan tetap teguh dan setia menepati perjanjian ini, eksistensi Indonesia Merdeka akan tetap terjaga dan lestari. Bukan simbol-simbolnya tapi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya sebagai unsur budaya unggul yang pada gilirannya membangun peradaban Indonesia.

Maka dalam alam Indonesia Merdeka ketika menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul diantara sesama anak bangsa dan mengelola Negara Bangsa ini harus mengedepankan cara-cara yang dijiwai nilai-nilai luhur itu. Selanjutnya perlu kajian dengan pendekatan kebudayaan untuk menjawab pertanyaan mengapa setelah lebih dari 70 tahun merdeka cita-cita kemerdekaan belum juga terwujud. Apakah karena perjanjian luhur tidak ditepati lagi dan nilai-nilai luhur diingkari?

### Daftar Pustaka

- Burhanudin, Jajat. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- \_\_\_\_\_. *Negara Harus Bertuhan, Intisari Amanat PJM Presiden Soekarno pada Upatjara Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Ushuluddin Bidang Da'wah, Gelar Guru Besar Kehormatan, Gelar Pendidik Agung oleh Institute Agama Islam Negeri (IAIN) di Istana Negara*. Djakarta, Departemen Agama. 1964.
- Dewantara, Agustinus .W. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta. PT Kanisius. 2017.
- Djaelani, Anton Timur. *Gerakan Sarekat Islam dan Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia*. Depok. LP3ES. 2017.
- \_\_\_\_\_. *ENSIKLOPEDIA ISLAM JILID 5*. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. 1994.
- Kahin, George Mc Turnan. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok. Komunitas Bambu. 2013.
- Kusuma, R.M. A.B, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta. Badan Penerbit FH UI. 2017.

- Kusumohamidjojo Budiono. *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia (Edisi Revisi)*. Bandung, Yrama Widya. 2017.
- Lubis, M Ridwan, *Sukarno dan Modernisme Islam*. Depok. Komunitas Bambu. 2010.
- Natosoetandjo, H.A, *Bung Karno di Hadapan Pengadilan Kolonial*. Djakarta, Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesia. Endang dan Pemuda, 1963.
- Olthof ,W,L, *Babad Tanah Jawi Cet 1*. Yogyakarta. Narasi. 2017.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Notosusanto, Nugroho (ed). *Sejarah Nasional Edisi I Pemuktahiran Cet 2*. Jakarta, Balai Pustaka. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Nasional Edisi II Pemuktahiran Cet 2*. Jakarta, Balai Pustaka. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Nasional Edisi III Pemuktahiran Cet 2*. Jakarta, Balai Pustaka. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Nasional Edisi IV Pemuktahiran Cet 2*. Jakarta, Balai Pustaka. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Nasional Edisi V Pemuktahiran Cet 2*. Jakarta, Balai Pustaka. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Nasional Edisi VI Pemuktahiran Cet 2*. Jakarta, Balai Pustaka. 2008.
- Prapanca, Mpu. *Kakawin Nagara Kartagama (Edisi Revisi Cet 1)*. Yogyakarta.Narasi. 2018.
- Rahardjo, Iman Toto K. & Sudarso, Suko; *BUNG KARNO - Islam, Pancasila, NKRI*, (ed), 1926-1966, Komunitas Nasionalis Religius Indonesia, 2006.
- Soekarno. *Pantja Sila Sebagai Dasar Negara, Kursus–Kursus Presiden Sukarno tentang Pantja Sila di Istana Negara. Djakarta Tanggal 26 Mei, 5 Djuni, 16 Djuni, 22 Juli, 3 September 1958 dan Kuliah Umum pada Seminar Pantja Sila di Yogyakarta Tanggal 21 Pebruari 1959*. Panitia Pembina Djiwa Revolusi. 1964.
- Sri Rahayu, Ani. *ISBD Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta,PT Bumi Aksara,2016.
- Vlekke, H.M. Bernard, *Nusantara Sejarah Indonesia Cet 4*. Jakarta. Kepustakaan Popular Gramedia. 2017.
- Wolters O.W. *Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya Abad ke III-VII*, Depok.Komunitas Bambu. 2017.
- Yamin, Muhammad. *Gadjah Mada Pahlawan Persatoean Nusantara Cet 3*. Jakarta. Balai Pustaka. 1948.
- \_\_\_\_\_,*Pararaton*, [http://sejarah-puri-pamecutanblogspot.com/2010/01/kitabpararaton\\_10.html](http://sejarah-puri-pamecutanblogspot.com/2010/01/kitabpararaton_10.html).



# BUDAYA PANCASILA SEBAGAI PERADABAN INDONESIA

Yusyus Kuswandana

## Abstrak

Budaya mempunyai peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Karena hakekatnya Budaya tidak dapat dipisahkan dengan individu Manusia sebagai makhluk sosial, yang membangun sikap akal budi Manusia yang positif menjadi sebuah kebiasaan dari hasil Cipta, Rasa, Karsa dengan penyebaran belajar dan mengajar. Budaya yang terbentuk menjadi karakter manusia atau masyarakat sebuah bangsa, menjadi modal sebuah Peradaban Manusia diberbagai bidang termasuk sosial, Ekonomi, Budaya, Politik dan Ilmu Pengetahuan yang diimbangi Iman dan Taqwa.

**Kata Kunci :** Budaya, Karakter, Peradaban Manusia

## Abstract

*Culture has a very fundamental role in human life in the nation and state. Due to the essence of Culture can not be separated with the individual Human as a social being, which builds the attitude of reason The positive human being becomes a habit of the creation of Create, sense, intention with the dissemination of learning and teaching. Culture that is formed into a human character or society of a nation, into capital a Human Civilization in various fields including social, Economy, Culture, Politics and Science which is balanced by Faith and God-fearing.*

**Keywords:** culture, character, the civilization of humans.

## Pendahuluan

Nilai-nilai budaya menginspirasi lahirnya sebuah ideologi dan berdirinya sebuah Negara, dan menjadi identitas dari sebuah bangsa itu sendiri. Begitupun Indonesia sebuah Negara Bangsa yang besar, mengikat kurang lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya disekitar 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) berdiri tegak diantara negara

negara lain didunia dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dengan makna walaupun berbeda beda suku dan agama serta ragam budaya setiap daerah, tetap satu tujuan Indonesia.

Indonesia sebuah bangsa yang berbudaya jauh hari sebelum kemerdekaan, masyarakatnya diberbagai daerah yang dikemudian hari menjadi wilayah NKRI sudah memiliki nilai-nilai yang kelak akan menjadi identitas bangsanya setelah kurun waktu pasca kemerdekaan. Refleksi dari nilai-nilai budaya yang dihasilkan melalui Cipta, Rasa dan Karsa ditengah tengah kehidupan bermasyarakat tercermin dari nilai dasar dan karakter masyarakatnya yang Percaya adanya Tuhan, agamis, saling menghormati, kepedulian sesama individunya, menegakkan musyawarah mufakat, serta berciri kekeluargaan dan bergotong Royong untuk menghasilkan kesepakatan diantara sesama komunitas masyarakatnya, patuh terhadap petuah-petuah orang tua atau orang yang lebih dahulu menjadi panutan ditengah tengah masyarakatnya, dan menjunjung tradisi yang sudah menjadi identitas diantara suku-suku bangsa yang ada di berbagai daerah wilayah Indonesia yang sudah lebih dulu di jadikan refleksi tata cara atau nilai nilai luhur yang menjadikan identitas kebudayaannya.

Dari berbagai sumber kearifan budaya lokal yang ada di Wilayah NKRI, Salah satunya contoh kearifan lokal yang ada di daerah Jawa Barat yang menginspirasi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ialah makna falsafah Silih Asah, Silih Asih dan Silih Asuh merupakan satu istilah yang lahir dari kearifan masyarakat sunda. Tentunya istilah ini tidak asing bagi masyarkat sunda karena telah menjadi falsafah hidupnya. Silih asah silih asih silih asuh bukanlah bahasa kuno peninggalan sejarah. Tetapi merupakan falsafah bagi kehidupan orang sunda yang harus terus dibumikan dimanapun dan kapanpun. Keutamaan dari falsafah silih asah silih asih silih asuh merupakan satu kesatuan sikap, nilai dan rukun hidup yang harus dijiwai oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya demi terwujudnya masyarakat yang kuat, cerdas, egaliter dan saling menebar cinta kasih sesamanya.

Silih asah yang berarti saling memberi pengetahuan. Baik dengan cara saling mengingatkan saling membangun kesadaran akan

ilmu pengetahuan dan saling mendukung dalam pengembangan diri sesamanya. Ini demi terbentuknya satu kesatuan masyarakat yang cerdas. Sebuah masyarakat yang cerdas merupakan satu syarat terbentuknya masyarakat yang kuat, tanpa kecedasan dan kesadaran akan ilmu pengetahuan masyarakat akan kehilangan hakikat dan kemerdekaannya sebagai manusia sehingga tanpa ilmu pengetahuan masyarakat akan mudah untuk dibodohi, didiskriminasi dan dieksploitasi. Semangat silih asah merupakan semangat membangun dan menumbuhkembangkan khazanah keilmuan. Dalam masyarakat yang menjiwai rukun hidup silih asah, ilmu pengetahuan akan berdampingan dengan dimensi etis sehingga ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi alat penindasan yang angkuh tetapi ilmu pengetahuan akan menjelma menjadi anggun yang akan membebaskan dan mengangkat derajat masyarakat dari keterbelakangan.

Silih asih yang berarti saling menebar cinta kasih atau rasa saling menyayangi. Tentulah harus menjadi falsafah yang mendarah daging bagi masyarakat sunda. Silih asih merupakan salah satu bentuk ikhtiar interaksi manusia dengan Tuhan demi mendapat cinta kasih-Nya dengan cara menyayangi dan menebar cinta terhadap sesamanya. Semangat silih asih merupakan semangat membumikan nilai-nilai ketauhidan. Karena dalam budaya silih asih tertancap kuat prinsip keTuhanan dan kemanusiaan. Yang nantinya akan membentuk mental masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan. Masyarakat silih asih dalam prakteknya akan saling menghormati satu sama lain serta akan menjunjung tinggi nilai persamaan dengan tidak menganggap adanya kelas sosial, semua manusia sama tidak ada yang dipandang sempurna dan tidak ada manusia yang seluruhnya cela. Dari semangat silih asih inilah maka akan melahirkan kehidupan masyarakat yang adil, harmonis serta jauh dari tindakan-tindakan yang anarkis.

Setelah masyarakat menyadari akan persamaan, maka akan terbentuklah satu bangunan rasa saling menjaga yaitu silih asuh. Silih asuh (sikap saling memelihara) masyarakat, silih asuh pastilah akan membebaskan manusia dari batas-batas yang mampu membentuk masyarakat yang terkotak-kotak. Dengan semangat ini masyarakat akan saling menjaga tanpa memandang siapa. Dalam bermasyarakat

seseorang yang telah menjalankan dan menjiwai falsafah silih asah tidak akan berbicara “saya”, “dia” dan “mereka” tetapi dia akan berbicara “kita”, oleh karena itu silih asah dapat membentuk rasa tanggung jawab serta membangun satu kesatuan masyarakat yang utuh.

Dengan demikian falsafah “silih asah silih asih silih asuh” masih sangat relevan dalam kehidupan yang serba modern ini. Bahkan falsafah ini bisa menjadi solusi dalam membebaskan manusia dari belenggu penindasan, keterbelakangan serta keterasingan.

Nilai-nilai kearifan budaya lokal yang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat dari daerah Jawa Barat yang dimaksud diatas, turut berkontribusi menjadi inspirasi, dalam kategori nilai nilai luhur yang ada didalam falsafah dasar bangsa Indonesia Pancasila.

Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia.

Pancasila di ilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Pancasila digali dari Bumi Indonesia, merupakan sifat, watak, tingkah laku bangsa yang merupakan ciri khas atau karakteristik Bangsa Indonesia yang tidak boleh sampai terkikis oleh waktu di bumi Indonesia.

Bahwa perumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno dan pemikiran *founding fathers* lainnya merupakan konsepsi yang khas yang tidak ada pada pemikiran filsafat negara yang lain di dunia. Pemikiran Soekarno itu merupakan suatu sintesis dari demokrasi Barat, Islamisme, Marxisme, nasionalisme Sun Yat Sen, dan humanisme Gandhi. Namun demikian pemikiran Soekarno juga mendasarkan pada *kausa materialis* yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, yaitu tentang nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan serta semangat kekeluargaan gotong-royong, realitas etnis serta nilai kebudayaan lainnya.

Walaupun nilai-nilai falsafah dasar yang terkandung didalam Pancasila sudah ada dan hidup ditengah masyarakat jauh hari sebelum kemerdekaan, dan nilai nilai tersebut sudah menjadi sifat, watak masyarakat Indonesia, namun secara empiris perkembangan pemikiran mengenai Pancasila mulai dapat dilihat, dipelajari dan dipahami melalui sejarah konstitusi Negara Republik Indonesia. Pertama, Sejarah Konstitusi Negara Republik Indonesia itu mempunyai awal yang jelas, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedua, karena terdapat hubungan antara Pancasila dengan Negara Republik Indonesia. Ketiga, karena sejarah konstitusi Negara Republik Indonesia itu secara historis mempunyai perkembangan lebih lanjut yang jelas. Oleh karena itu inventarisasi pemikiran tentang Pancasila juga dimulai dari masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia.

Soekarno sudah sering mengatakan bahwa” *Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara ini yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini, adalah pemberian Tuhan kepada saya, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala*”

Menurut pandangan Moh. Yamin ketika pidato tanggal 29 mei 1945, Negara Indonesia merdeka harus didasarkan atas peradaban Indonesia dan “*rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari pada peradaban kebangsaan Indonesia, orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya*”.

Begitupun pandangan Soepomo didalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, sebagai prinsip yang harus dipergunakan untuk menentukan dasar negara (Staatsidee) bahwa: “*dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (Rechtsgeschichte) dan Lembaga sosial (sociale structuur)*

dari negara itu” dan juga dikatakan bahwa “Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu politik pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan sociale structuur masyarakat Indonesia. Dan yang dimaksud struktur masyarakat Indonesia menurut Soepomo ialah: Struktur sosial Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia, ialah buat aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia”.

Dengan disahkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila, dalam arti lima dasar negara, menjadi dasar negara. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat pernyataan sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Memaknai isi alinea ke empat ini Terjadilah “konstituering” atau penguangan konstitusional dari Pancasila. Dengan terjadinya proses ini maka Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Akan tetapi nama Pancasila tidak terdapat dalam pembukaan. Tetap secara ideologis (sebagai suatu belief-system) ada terdapat suatu “*communis opinio*” bahwa dasar negara yang lima itu adalah Pancasila, dan bahwa Pancasila itu adalah ideologi nasional.

Nilai-nilai luhur budaya yang hidup ditengah kehidupan masyarakat indonesia sudah menyatu bagaikan Roh mengisi

kehidupan, diwariskan oleh para pendahulu bangsa Indonesia beberapa abad yang lalu, dan hidup menjadi refleksi corak atau ciri masyarakat Indonesia, selanjutnya dirumuskan menjadi lima azas yaitu Pancasila oleh para pendiri bangsa melalui sebuah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia menjelang kemerdekaan Republik Indonesia Tgl 17 Agustus 1945. Nilai-nilai luhur budaya tersebut dituangkan didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke empat agar supaya dapat disepakati oleh seluruh Bangsa Indonesia didalam praktek bernegara melalui kesepakatan tertinggi konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 dan selanjutnya diatur atau didalam Undang-Undang sebagai pelaksanaannya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu tuntutan Reformasi tahun 1998 adalah Amendemen Undang-Undang Dasar, dan MPR-RI yang mempunyai kewenangan tersebut menerima berbagai aspirasi dari berbagai komponen masyarakat untuk meng amandemen Undang-Undang Dasar tersebut, perubahan Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002 oleh MPR-RI termasuk salah satunya pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun berubah menjadi 2 (dua) ayat yaitu: ayat (1), Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2), Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pasal 32 ayat (1), sebuah kesepakatan dasar yang menyatakan, bahwa hadirnya dan keturut sertaan Negara, melalui komponen pelaksanaan para pelaku yang diberikan kewenangan dan dipayungi oleh Undang-Undang, diberbagai tingkatan aturan dibawahnya, harus menjadi mata rantai kesadaran bersama dalam memahami amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat (1) tersebut, dengan tujuan untuk kemajuan bangsa Indonesia kedepannya sebuah tantangan zaman ditengah peradaban dunia. Kekuatan kebudayaan nasional yang dibangun melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal sebuah keniscayaan dari generasi ke generasi bangsa, dan sangat mempunyai andil besar dalam

memajukan bangsa, baik untuk kepentingan dalam negeri salah satunya tujuan nasional yaitu kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan kemajuan negara Indonesia diberbagai bidang dimata negara-negara didunia, serta selalu mengantisipasi persaingan antar negara serta peran aktif Indonesia berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat.

Takdir Indonesia adalah negara yang kebesaran, baik jumlah penduduknya dan sangat luas wilayahnya serta beragam suku dan budayanya, bukti negara Indonesia adalah negara yang sangat besar terlihat dari pengakuan atau pernyataan negara yang dituangkan dalam “Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa *“negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”*, sangat beralasan menjadi kesepakatan dasar bangsa Indonesia, karena sebelum ada pengakuan budaya nasional jauh hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sudah tumbuh berkembang bahasa-bahasa daerah dengan akar budaya dengan berbagai variannya diberbagai daerah. Pasca berdirinya Negara Republik Indonesia pada waktu diproklamirkan kemerdekaan, berdasarkan proses waktu kearifan budaya lokal yang ada di daerah-daerah tersebut dalam tahapan perkembangannya menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi, memelihara bahasa yang tumbuh menjadi ciri khas daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya menjadi kekayaan budaya nasional, yang menjadi ciri bangsa Indonesia dimata bangsa-bangsa lain didunia.

Menyikapi tantangan kebangsaan yang serius, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menurut TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, tantangan kebangsaan dari dalam Negeri:

- 1) Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan Agama, serta muncul pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit.
- 2) Pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan.



- 3) Kurang berkembangnya pemahaman dan penghayatan atas kebhinekaan dan kemajemukan.
- 4) Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin dan tokoh bangsa.
- 5) Tidak berjalan penegakan hukum secara optimal.

Dan tantangan kebangsaan dari luar negeri:

- 1) Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam.
- 2) Makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini disusun untuk mengantisipasi bahwa krisis moral multidimensi yang bertentangan dengan nilai-nilai Ideologi Pancasila, benar-benar sedang menjadi masalah serius baik ditingkat penyelenggaraan negara pusat maupun daerah juga ditengah-tengah masyarakat luas.

Dalam menghadapi krisis moral yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukannya kerja keras bukan saja Pemerintah semata yang harus mengatasi keadaan tersebut, tapi segenap komponen bangsa baik tingkat pusat maupun daerah, bahu membahu, gotong royong bersama para pemuka dan tokoh Lintas Agama, Ormas dan segenap tokoh politik membangun kesadaran dan penyadaran yang masif, dalam mengatasi krisis moral secara nasional ini baik untuk kepentingan internal bangsa demi keutuhan negara, maupun antisipasi penyusupan-penyusupan atau pengaruh asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan yang akan merugikan stabilitas bangsa akibat persaingan di era globalisasi diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menyongsong menuju ketinggian peradaban bangsa Indonesia yang lebih maju 25 (dua puluh lima) sampai 50 (lima puluh) tahun yang akan datang, Nilai-nilai luhur Pancasila harus ditanamkan dengan benar di tiga sektor pendidikan, yaitu sektor pendidikan Formal, pendidikan non formal dan pendidikan Informal. Penanaman Ideologi Pancasila dapat di tanamkan secara sistematis dengan tahapan-tahapan dan metoda yang dapat di terapkan di tiga sektor jalur

pendidikan, agar supaya output di tiga jalur sektor pendidikan tersebut dengan metode penyeragaman yang di rumuskan oleh negara (pemerintah), dapat membangun manusia-manusia Indonesia yang berkarakter dan berideologis agar dapat mengawal arah bangsa Indonesia yang berkesinambungan kedepannya berdasarkan ideologi Pancasila, ditengah peradaban dunia yang dinamis dan penuh tantangan. Dengan proses belajar di tiga jalur pendidikan Formal, non formal dan informal dengan proses tahapan dan waktu yang berkesinambungan tersebut, Pancasila harus menjadi Efek Kognitif (menjadi sebuah pengetahuan di masyarakat), Efek Afektif (sebuah kesadaran di masyarakat), dan Efek Psikomotorik atau Behavioral (menjadi sebuah perilaku di masyarakat).

Secara sistematis wujud sistem sosial-kebudayaan dalam pembudayaan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) sistem nilai, (*Pembudayaan nilai-nilai Pancasila*) (2) sistem sosial (*Pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial*) dan (3) wujud fisik (*Pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya fisik*). Dalam hubungan ini Pancasila merupakan *core values* sistem sosial-kebudayaan masyarakat Indonesia, yaitu merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial-kebudayaan yang multikulturalisme.

Oleh karena itu dalam proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus meliputi tiga *dimensi tersebut*, sehingga dalam hubungan ini diperlukan suatu proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Hal ini memang tidak mudah dan sifatnya bukanlah suatu proses doktriner melainkan justru pembudayaan dan internalisasi dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat nampak semakin kuatnya pengaruh individualisme, primordialisme, serta fanatisme etnis, ras, golongan, maupun agama. Bangsa Indonesia adalah multikultural multi etnis dan multireligius, oleh karena itu nilai-nilai persatuan dalam suatu keragaman harus dibudayakan dengan berbasis pada ketika religius dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu kita harus mendesak pemerintah untuk melakukan revitalisasi terhadap kekayaan budaya bangsa. Kita harus membudayakan kepercayaan dan kebanggaan atas kekhasan dan keunikan

kekayaan budaya bangsa sebagai suatu *local wisdom* dan *local genius* bangsa. Dengan sendirinya revitalisasi juga harus diikuti dengan upaya pembinaan, pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan budaya bangsa, bahkan sektor ini juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, misalnya dikembangkan melalui pariwisata. Hal ini banyak dilakukan diberbagai negara seperti Itali, Austria, Spanyol, Thailand, China, Arab Saudi, Korea dan banyak negara lainnya.

Harapan kita semua, karena Pancasila telah menjadi kesepakatan bersama sebagai falsafah dasar bangsa Indonesia, harus menjadi konsistensi bersama untuk menjaga dan merefleksikan diberbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia sebagai rumah kita bersama. Nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia menjadi sumber inspirasi lahirnya Pancasila, dan Pancasila harus terus berkesinambungan menjadi sumber inspirasi kebudayaan nasional, serta membangun peradaban Indonesia baik masa kini maupun masa yang akan datang dengan kesinambungan sesuai perkembangan zamannya.

Membangun peradaban Manusia Indonesia dengan nilai nilai budaya Pancasila dalam hal ketaatan manusia-manusia Indonesia yang berketuhanan, dan manusia-manusia yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan. Manusia-manusia Indonesia harus selalu menjaga persatuan yang berketuhanan, dan konsisten melaksanakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan menuju cita-cita luhur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Kaelan, 2015. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Pranarka, A.M.W. 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies.
- Rahmawan, Fajar. 2016. <https://www.lyceum.id/silih-asah-silih-asih-silih-asuh>.
- Sekretariat Negara. 1992, 1995, 1998. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*. Jakarta.
- Sekretariat Jendral MPR-RI. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta.
- Sekretariat Jendral MPR-RI. 2013. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR-RI*. Jakarta.
- Sekretariat Jendral MPR-RI, 2013. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.

# KEBUDAYAAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL, AGAMA DAN EKONOMI

Djamal Aziz

## Abstrak

Tulisan ini mengulas konteks kebudayaan nasional dari perspektif kearifan lokal, agama dan ekonomi. Bahwa, selain dapat dilihat dalam perspektif kearifan lokal, kebudayaan nasional dipengaruhi pula oleh faktor agama dan ekonomi. Faktor agama yang dalam hal ini Islam sebagai agama yang dianut secara mayoritas misalnya, dalam konteks kebudayaan di Indonesia, sangat besar pengaruhnya. Semakin maju tingkat pemahaman keagamaan dan ekonomi suatu bangsa, semakin berkembang pula kebudayaan yang ada pada bangsa tersebut. Dalam konteks ini Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan untuk berkembangnya kebudayaan nasional Indonesia secara dinamis dan progresif.

**Kata Kunci :** kebudayaan nasional, kearifan lokal, agama, ekonomi.

## Abstract

*This paper reviews the context of national culture from the perspective of local wisdom, religious and economic factors. That, in addition it can be seen in the perspective of local wisdom, national culture is also influenced by religious and economic factors. The religious factor which in this case Islam as the majority religion for example, in the context of culture in Indonesia, is very big influence. The more advanced the level of religious and economic understanding of a nation, the more developed the culture of the nation. In this context, the constitution of Indonesia (UUD NRI 1945) has guaranteed the development of Indonesia's national culture dynamically and progressively.*

**Keywords :** national culture, local wisdom, religious, economic.

## Pendahuluan

Di zaman ketika informasi melimpah di internet dewasa ini, dengan muda kita mencari informasi tentang apa definisi budaya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, ketika googling di internet, maka akan banyak menemukan pengertian budaya dan kebudayaan, sebagaimana diuraikan oleh situs ensiklopedia, wikipedia.org. Dalam situs populer tersebut, diuraikan bahwa budaya atau kebudayaan berasal dari bahasan Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kemudian, diuraikan pula, bahwa dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa pula diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Dalam hal ini, kata *culture* juga sering diterjemahkan sebagai *kultur* dalam bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

Masih dalam situs yang sama, dijelaskan bahwa kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Mengutip Koentjaraningrat, disebutkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sementara Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.<sup>2</sup>

Koentjaraningrat mencatat bahwa kebudayaan mempunyai unsur-unsur yang bersifat universal. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dianggap universal karena dapat ditemukan pada semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Koentjaraningrat mengelompokkan ada tujuh unsur kebudayaan universal yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan

---

<sup>1</sup> Lihat, <https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya> (diakses 24 April 2018)

<sup>2</sup> Ibid.

teknologi, sistem mata pencaharian hidup, kesenian, dan sistem religi.<sup>3</sup>

Apabila diuraikan lebih lanjut, maka bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Bentuk bahasa ada dua yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Selanjutnya, sistem pengetahuan berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, tubuh manusia. Kemudian, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial mengacu pada pengertian bahwa organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi: kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan.<sup>4</sup>

Selanjutnya, terkait sistem peralatan hidup dan teknologi, maka yang dimaksud dengan teknologi adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan-bahan mentah, pemrosesan bahan-bahan itu untuk dibuat menjadi alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi, dan kebutuhan lain yang berupa benda material. Unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik yang meliputi, alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung, dan perumahan serta alat-alat transportasi.<sup>5</sup>

Sementara, sistem mata pencaharian hidup merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi: berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan,

---

<sup>3</sup> Koentjaraningrat (1994), *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

perikanan, dan perdagangan. Kemudian, kesenian secara sederhana dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besar, dapat dipetakan bentuk kesenian dalam tiga garis besar, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari. Yang terakhir, sistem religi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktik keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem religi yang meliputi: sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan.<sup>6</sup>

Dari berbagai definisi dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Namun kebudayaan dapat berkembang dan lestari hanya di lingkungan masyarakat yang kehidupannya ekonominya berkecukupan, serta hukum dan adat-istiadat di masyarakat tersebut terjaga, untuk dapat dilaksanakan secara konsisten serta berkesinambungan. Apalagi kalau kebudayaan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religius, maka biasanya yang dominan adalah yang diyakini oleh masyarakat adalah yang berkaitan dengan kepercayaan keagamaan.

## **Kearifan Lokal dan Agama**

Sudah menjadi pengertian umum bahwa budaya lokal atau budaya daerah menjadi dasar terbentuknya budaya nasional. Pengertian budaya lokal di sini ialah budaya yang berkembang di daerah-daerah dan merupakan milik suku-suku bangsa di Indonesia. Dengan demikian, budaya lokal hidup dan berkembang di masing-masing daerah. Budaya lokal memberikan kekayaan dan khazanah yang besar dalam memperkaya budaya nasional. Adanya budaya lokal akan turut mempengaruhi bentuk dari kebudayaan nasional itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Ibid.



Karena tidak mungkin kebudayaan nasional akan terbentuk sendiri tanpa adanya pengaruh dari budaya-budaya lokal. Bahkan, merujuk pada pandangan Ki Hadjar Dewantara, kebudayaan nasional dalam adalah “puncak-puncak dari kebudayaan daerah”.

Merujuk pada uraian singkat di situs *wikipedia.org*, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal misalnya ada di dalam cerita rakyat pribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.<sup>7</sup>

Kearifan-kearifan lokal yang sangat banyak sekali di seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan kondisi dan suasana yang ada di daerah tersebut turut pula memperkaya kebudayaan nasional. Kearifan lokal yang telah ikut membentuk budaya lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan pula dalam ikut membentuk kebudayaan nasional dalam suatu bangsa atau negara. Bahkan tidak bisa dipungkiri pula bahwa budaya dan kearifan lokal turut pula dibentuk oleh pengaruh budaya dari jazirah Arab, terutama daerah-daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dimana daerah tersebut pertama kali didatangi oleh saudagar-saudagar atau penyebar agama Islam dari Timur Tengah. Misalnya, suku-suku Melayu di Sumatera dan Kalimantan, daerah-daerah di Sulawesi dan Jawa bahkan daerah NTT, Maluku dan Maluku Utara sampai di beberapa daerah Papua serta Papua Barat yang nuansa budayanya sangat kental dengan pengaruh kebudayaan Arab.<sup>8</sup>

Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri pula bahwa keberadaan orang-orang Arab di Tanah Air telah ikut mempengaruhi terbentuknya

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kearifan\\_lokal](https://id.wikipedia.org/wiki/Kearifan_lokal) (diakses 24 April 2018)

<sup>8</sup> Dalam hal ini, lihat misalnya Natalie Mobini-Kesheh (1999), *The Hadrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands East Indies, 1900-1942*, Ithaca: Southeast Asian Program Cornell University.

budaya-budaya dan kearifan lokal, yang merupakan embrio terbentuknya kebudayaan nasional. Kendati secara harfiah, budaya Arab sendiri memang tidak begitu kental terlihat di daerah asalnya, namun kedatangan bangsa-bangsa Arab ke bumi Nusantara telah ikut membentuk terwujudnya budaya-budaya dan kearifan lokal pada daerah-daerah di Indonesia. Para ulama tempo dulu bahkan hingga dewasa ini banyak yang berasal dari keturunan Arab, mereka memiliki jaringan keagamaan yang kuat dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Nusantara.<sup>9</sup>

### **Faktor Ekonomi**

Selain faktor agama, faktor ekonomi di suatu negara dapat mempengaruhi kebudayaannya. Semakin baik tingkat pemahaman agama di satu sisi, dan di sisi lain kondisi ekonomi masyarakatnya, maka akan semakin berubah pula pola kebudayaan di masyarakat tersebut. Hal ini dapat dipahami mengingat faktor agama dan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial-budaya masyarakat. Kendati dalam kehidupan bermasyarakat banyak faktor yang mempengaruhi kebudayaan, seperti faktor pendidikan dan yang lain, namun faktor ekonomilah yang dominan dan berpengaruh. Hal ini disebabkan bahwa faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat hidup dan status sosial seseorang atau sekelompok orang di lingkungannya. Apalagi, manakala yang lazim berkembang di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini juga cenderung terjadi di Indonesia, status sosial yang didorong oleh status ekonomi dipandang penting.<sup>10</sup>

Sekali lagi, tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi memegang peranan yang begitu penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Faktor ekonomi mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan

---

<sup>9</sup> Lihat, Azyumardi Azra (1994), *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII : Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan.

<sup>10</sup> Kajian mengenai agama, ekonomi dan kebudayaan, lihat misalnya Huub de Jonge (Ed.) (1989), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi : Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, Jakarta : Rajawali Pers.

manusia, terutama bidang sosial dan budaya yang ada dan tercermin di masyarakat. Misalnya, dalam sebuah komunitas masyarakat, seseorang dengan tingkat kekayaan yang tinggi akan berbeda pola hidup dan kebiasaannya dibandingkan dengan orang yang tingkat ekonominya di bawah standar. Seseorang yang pendapatannya cukup besar, mendorongnya untuk memiliki apa saja yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki pendapatan kecil tidak akan mampu atau sulit untuk mewujudkan keinginannya. Orang berada atau “memiliki segalanya”, biasanya pergi makan ke restoran mewah. Sebaliknya orang yang tidak mampu akan pergi makan ke warung murah di pinggir jalan. Jadi, faktor ekonomi membuat pilihan masing-masing, yakni antara yang kaya dan miskin menjadi kontras.

Di sisi lain, fenomena demikian juga hadir dalam pola kehidupan sehari-hari lainnya, termasuk berpenampilan atau gaya hidup dan bertutur kata. Orang-orang dengan tingkat status yang tinggi, secara teoritis akan berpenampilan lebih elegan dan berbicara dengan sopan dan halus (*high context*). Sedangkan untuk masyarakat dengan status sosial rendah umumnya berpenampilan tidak menarik dan kurang memperhatikan penampilannya. Dalam berbicara pun terkadang mereka sering menggunakan kata-kata yang kasar dan kurang sopan didengar (*low context*). Dengan adanya perbedaan kebiasaan dan pola hidup tersebut, muncullah apa yang disebut dengan stratifikasi atau strata sosial.

Hal di atas memang merupakan suatu pandangan umum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam suatu tingkat kebudayaan yang tinggi, kultur yang berkembang ialah kultur egaliter, dimana perbedaan strata sosial bukanlah sesuatu yang membuat nilai-nilai kemanusiaan, juga tentu saja nilai-nilai Ketuhanan (keagamaan) terpinggirkan. Dalam konteks inilah, dalam kasus Indonesia secara sejarah, pengaruh budaya dari Jazirah Arab pelan-pelan mengikis kebudayaan yang di tinggalkan oleh raja-raja terdahulu di wilayah Nusantara yang bertahan dalam suatu sistem sosial yang berbasis strata sosial (kasta). Hal tersebut didorong oleh ajaran agama agama Islam bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa derajat seseorang dilihat ketakwaannya, bagaimana seseorang meninggalkan larangan-

Nya atau menjalankan seluruh perintah-Nya dan yang luhur *akhlaq*-nya di masyarakat.

Sesuatu yang telah menjadi kenyataan, Islam lahir di Mekkah dan berkembang di Madinah, lantas berkembang ke seluruh dunia sampai ke Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari hakikat Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah akhlak bangsa Arab yang sebelumnya jatuh ke dalam kebudayaan *Jahiliyah*, kebudayaan yang mengingkari nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan atau keagamaan yang hakiki. Islam yang diajarkan Muhammad SAW mampu membimbing ke akhlak yang benar dan baik, sebagai cerminan Islam yang membawa rahmat atau *rahmat'an lil alamin*, sebagai agama besar di dunia. Sejarah Islam mencatat prinsip-prinsip penting dalam mengatur masyarakat yang berbeda keyakinan dengan masyarakat yang beragama Islam di Madinah melalui Piagam Madinah sebagai Piagam, sebagai dokumen penting dalam mengedepankan prinsip-prinsip kesederajatan dan kemaslahatan bersama.

Ajaran agama Islam juga mendorong untuk mewujudkan kesejahteraan secara adil. Islam tidak melarang umatnya untuk kaya dan menguasai ekonomi, mengingat dalam konteks ini jika semakin tinggi tingkat kehidupan ekonomi masyarakat dalam suatu bangsa, maka akan berdampak pula pada pergeseran gaya hidup dan gaya sosial masyarakat tersebut. Pada gilirannya, gaya hidup dan sosial masyarakat tersebut membentuk pola kebiasaan baru di dalam masyarakat yang disebut dengan budaya. Maka, faktor agama dan ekonomi pun sangat berpengaruh dalam mengubah budaya yang sudah ada dan dapat membentuk budaya yang baru. Sehingga Agama dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan kebudayaan nasional suatu bangsa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kajian mengenai Islam dan perekonomian, pengaruhnya terhadap kebudayaan, lihat misalnya, Sutan takdir Alisjahbana (1982), "Pembangunan *Ekonomi* dan Etik *Ekonomi Islam*" Jurnal Ilmu dan Budaya, Thn IV, No. 3, April.

## Penutup

Sebagaimana telah disinggung di atas, kebudayaan nasional terbentuk dari keseluruhan budaya lokal (daerah) yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk hasil serapan dari budaya asing atau budaya global, dengan ikatan yang menjadi ciri khas seluruh budaya di Indonesia yaitu nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Merujuk Koentjaraningrat, kebudayaan nasional berfungsi sebagai pemberi identitas kepada suatu *nation* sebagai kontinuitas sejak kejayaan bangsa Indonesia pada masa lampau sampai kebudayaan nasional masa kini. Secara formal-konstitusional, dalam hal kebudayaan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Selain dapat dilihat dalam perspektif kearifan lokal, kebudayaan nasional dipengaruhi pula oleh faktor agama dan ekonomi. Semakin maju tingkat pemahaman keagamaan dan ekonomi suatu bangsa, semakin berkembang pula kebudayaan yang ada pada bangsa tersebut. Dalam konteks ini Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan untuk berkembangnya kebudayaan nasional Indonesia secara dinamis dan progresif. *Wallahua'lam bi shawab.*

## Daftar Pustaka

- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1982. *Pembangunan Ekonomi dan Etik Ekonomi Islam* " Jurnal Ilmu dan Budaya, Tahun IV, No. 3, April.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII : Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Jonge, Huub de. (Ed.). 1989. *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi : Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Mobini-Kesheh, Natalie. 1999. *The Hadrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands East Indies, 1900-1942*, Ithaca: Southeast Asian Program Cornell University.
- Wikipedia.org

## TENTANG PENULIS

**Rully Chairul Azwar** lahir di Jakarta, 22 November 1953. Merupakan Sarjana Teknik Industri ITB, lulus tahun 1979 dan Magister Komunikasi Politik FISIP Universitas Indonesia, lulus tahun 2008. Penulis buku “Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era” tahun 2008 ini pernah menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI Tahun 2010-2012, Ketua Pansus RUU Ke-Insinyuran Tahun 2012-2014, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Tahun 2012-2014 dan Anggota Dewan Insiyur Indonesia 2018 - 2023.

**Bambang Sadono**, lahir di Blora, 30 Januari 1957. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Diponegoro tahun 1983, S2 Hukum Universitas Indonesia tahun 1991, dan Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro tahun 2009. Merupakan mantan politisi Partai Golongan Karya yang menjadi Ketua Kelompok DPD di MPR periode 2014 - 2019. Sebelumnya, Bambang adalah wakil ketua DPRD provinsi Jawa Tengah untuk periode 2009-2014. Bambang juga dikenal sebagai jurnalis yang pernah memimpin harian umum *Suara Merdeka* (Semarang) dan *Suara Karya* (Jakarta). Di kancah kesenian, dia adalah penulis aktif yang melahirkan banyak karya sastra, dan pernah mengemban sebagai ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah.

**Syamsudin Ch. Haesy**, seorang imagineer - East Asia Imagineering Institute; Wartawan Utama (Sertifikasi Dewan Pers) Indonesia; Pensyarah Tamu - Perhimpunan Kebangsaan - Direktorat Jendral Jabatan Hal Ehwal Khas - Kementerian Penerangan Komunikasi & Kebudayaan Malaysia (2011); Pensyarah jemputan berbagai universiti di Indonesia dan Malaysia; Anggota Dewan Kebudayaan Jawa Barat; Wakil Ketua Umum Lajnah Tanfidziah - Syarikat Islam; Wakil Ketua Perkumpulan Usaha Memajukan Anakbangsa, Jakarta; Ketua Yayasan Kerukunan Indonesia Malaysia (YAKIM); Penasehat Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI)

**Hajriyanto Y. Thohari**, lahir di Karanganyar pada 26 Juni 1960. Menyelesaikan pendidikan S1 Sastra & Kebudayaan di UGM Tahun 1985, Pascasarjana Antropologi di UI Tahun 1993, dan Program Doktor Antropologi di UI. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar.

**Ulla Nuchrawaty**, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 3 Juni 1954. Lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 1982, Magister Manajemen Universitas Indonusa Esa Unggul - Jakarta tahun 2006, dan Program Doktor Administrasi Publik UNM - Makassar tahun 2006. Aktif sejak di mahasiswa dan perempuan pergerakan terutama dalam sosial budaya. Aktif terlibat dalam politik sejak tahun 1990-an. Jabatan di Partai Golkar sebagai ketua Bidang sejak 2012, Ketua koordinator Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah, dan Humas PP IKAL Lemhannas RI.

**Lalu Sudarmadi** lahir di Selong, 1 November, menyelesaikan pendidikan Sarjana Business Administrasi di Universitas Brawijaya Malang serta Master of Public and International Affairs, dan Diploma International Administration, tahun 1990 di GSPIA- University of Pittsburgh USA serta Diploma Communications tahun 2002 di CCCP Johns Hopkins University, Maryland USA. Dipemerintah pernah berkarier sebagai sekjen BKKBN-RI dan konsultan Kependudukan dalam rangka kerjasama Selatan-selatan, Badan Kependudukan PBB dan NFPCB di negara Republic of Malawi, United Republic of Tanzania and Zanzibar, Africa dan di Republic of Myanmar. Saat ini menjabat Komisaris Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Selain itu juga sebagai Direktur Eksekutif ND Institute , Anggota Dewan Pakar Nasional Demokrat dan Wakil Ketua Umum DPP HIPPI.

**Ali Masykur Musa**, lahir di Tulungagung, 12 September 1962. Lulus Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember dan Ilmu Hukum, dan FH Universitas Sahid Jakarta. Pendidikan Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Gajah Mada, serta Doktor Manajemen Pendidikan dari UNJ, Jakarta. Pernah menjadi Dosen FISIP UNEJ 1986-1999, Anggota DPR RI 1999-2009 yang juga menjadi Sekretaris PAH I BP MPR RI 1999-2004. Anggota BPK RI 2009-2014. Saat ini menjabat Ketua Komisi Pengabdian Masyarakat HIPIIS dan Komisaris Utama PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sejak tahun 2014.

**M. Alfian Alfian**, lahir di Klaten, 15 Februari 1973. Pendidikan tinggi ditempuh di Jurusan Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (S-1 lulus pada 1996); S-2 Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta (lulus 2005) dan S-3 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta lulus pada 2015. Dosen



di Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta serta di Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL Universitas Nasional, Jakarta. Direktur Riset dan Publikasi sekaligus Kepala Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa, Akbar Tandjung Institute, Jakarta.

**Iman Toto Kartoraharjo**, lahir di Banyumas, 10 Oktober 1940. Lulusan Fakultas Kedokteran UI dan Fakultas Kedokteran UNDIP. Perhatian pada bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan, antara lain : mendirikan/mengelola sejumlah BKIA dan Rumah Sakit Bersalin, Staf pengajar FK Akademi Keperawatan, Dewan Penyantun UNTAG Jakarta. Dalam bidang Pengkajian; Pengurus Balitbang Pusat PDI Perjuangan, Pendiri/ Dir. Eksekutif CINAPS ( Center for Information & National Policy Studies ), Dewan Pakar PA GMNI, Dewan Penasehat ISRI.

**Yusyus Kuswandana**, lahir di Bandung 30 September 1962. Lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung (1988) dan Fakultas Hukum STAI Yamisa Bandung (2007). Terpilih menjadi Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Partai Demokrat (2009-2014).

**Djamal Aziz** lahir di Surabaya, 9 Maret 1958 merupakan seorang politikus Indonesia dan anggota DPR. Terpilih sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009 dengan diusung oleh Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan menjabat sebagai anggota di Komisi X DPR-RI untuk menangani Pemuda, Pariwisata, Kebudayaan, Pendidikan, Pariwisata, dan Kesenian. Selain itu, juga pernah bertugas sebagai Anggota Komite Eksekutif *PSSI*.

# Pedoman Penulisan Jurnal Ketatanegaraan

Lembaga Pengkajian  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

1. Jurnal Ketatanegaraan bersifat Ilmiah Populer untuk tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan dalam perspektif Ketatanegaraan.
2. Diterbitkan setiap 2 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember.
3. Naskah yang diterima adalah artikel yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan tidak mengandung unsur *plagiarisme*.
4. Naskah dapat berupa hasil penelitian, resensi buku, dan/atau kajian konseptual.
5. Naskah dapat mencakup temuan baru, artikel ulasan (*review*), ringkasan, dan opini.
6. Jurnal Ketatanegaraan memberikan ruang bagi penulisan mengenai isu-isu aktual tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
7. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia.
8. Naskah yang dikirimkan dalam *file* berbentuk .doc dan .pdf.
9. Naskah ditulis dalam format jurnal dengan sistem baris kredit (*byline*), yang meliputi:
  - Sistematika artikel **Hasil Penelitian** mencakup: Judul Artikel, Nama Penulis (tanpa gelar), Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan (berisi latar belakang masalah, permasalahan, dan metode penelitian), Pembahasan (berisi hasil penelitian, analisis dan sub-sub bahasan), Pembahasan (berisi hasil penelitian, analisis dan sub-sub bahasan), Kesimpulan (berisi simpulan dan saran), dan Daftar Pustaka.
  - Sistematika artikel **Kajian Konseptual** mencakup: Judul Artikel, Nama Penulis (tanpa gelar), Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (analisis dan sub-sub bahasan), Kesimpulan (berisi simpulan dan saran), dan Daftar Pustaka.

10. Judul artikel harus spesifik, tidak multitafsir dan lugas yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif.
11. Abstrak (*abstract*) ditulis secara jelas, utuh dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang masing-masing satu paragraf.
12. Kata kunci (*keyword*) yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah (*horos*).
13. Naskah diketik minimal 5 halaman dan maksimal 20 halaman pada kertas ukuran A4 (210 x 297 mm) dengan jarak antar baris 1,5 spasi. Batas pengetikan dari tepi kertas diatur sebagai berikut:
  - Tepi atas : 3 cm
  - Tepi bawah : 3 cm
  - Tepi kiri : 4 cm
  - Tepi kanan : 3 cm

Naskah diketik dengan mempergunakan jenis huruf times new roman dengan spesifikasi ukuran huruf sebagai berikut:

- Judul naskah : ukuran huruf 12 point
  - Nama penulis : ukuran huruf 12 point, huruf tebal
  - Abstrak dan kata kunci : ukuran huruf 12 point, huruf tebal
  - Isi naskah : ukuran huruf 12 point
  - *Footnote* : ukuran huruf 10 point
  - Daftar pustaka : ukuran huruf 12 point
8. Contoh penulisan identitas:

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Jakob Tobing**

9. Contoh tata aturan penulisan *footnote* sebagai berikut:

1) Buku

- Yudi Latif (2012:10) *Negara Paripurna*, Jakarta: Gramedia.

- 2) Buku karya terjemahan
  - Paul, Scholten (2011:7) *De Structuur Dere Rechtswetenschap*, Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan oleh Arief Sidharta, Bandung : Alumni.
- 3) Buku yang berisi kumpulan artikel
  - Syahrul Sajidin (Ed) (2014:89) *Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah Terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: ILRC dan Hivos.
- 4) Skripsi, tesis atau disertasi
  - Bahrul Ulum Annafi (2010:2) *Dinamika Fiqh Siyasah Dalam Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tidak dipublikasikan.
- 5) Artikel dalam buku kumpulan artikel
  - Ria Casmi Arsa, “Constitutional Complaint dan Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan”, Dri Utari (Ed) (2014:5) *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Kumpulan Hasil Konferensi Nasional, Setara Institute dan Kedutaan Besar Jerman*, Jakarta.
- 6) Makalah
  - Ni'matul Huda (12 Juli 2009:5) *Constitutional Question dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, makalah disajikan dalam Lokakarya Seminar Nasional di Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- 7) Artikel internet
  - Ali Safaat, *Penafsiran konstitusi* (online), <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf>, diakses 3 Februari 2013.
  - Simon Butt, “*Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia*”, [http://papers.ssrn.com/sol3/papes.cfm?abstract\\_id=1650432](http://papers.ssrn.com/sol3/papes.cfm?abstract_id=1650432), diakses 28 Juli 2010.
10. Daftar Pustaka memuat daftar buku, jurnal, makalah/paper/orasi ilmiah baik cetak maupun online yang dikutip dalam naskah, yang disusun secara alfabetis (A to Z) dengan susunan: Nama

penulis (mendahulukan nama keluarga/marga), tahun, *judul*, tempat penerbitan: penerbit, dts., seperti contoh berikut ini:

- Asshidiqie, Jimly (2010), *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Gramedia Group.
  - Latif, Yudi (2014), *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta: Penerbit Mizan.
  - Prasetyo, D. Ngesti (2013), *Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Pelayanan Perizinan Rumah Ibadah*, Malang: PPOTODA dan Tifa foundation.
  - Yuliandri (2009), “*Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan Dalam Penataan Sistem Ketatanegaraan*”, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang: Universitas Andalas, 23 Juli.
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75.
  - TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
  - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Redaktur berhak melakukan penyuntingan tanpa mengubah substansi dan makna tulisan. Redaktur tidak bertanggung jawab terhadap isi naskah.
  12. Pengiriman Naskah melalui Redaktur Pelaksana Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR RI Gedung Bharana Graha, Lt. III. Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270, Telp. (021) 57895418, Email: [lembaga.pengkajian@gmail.com](mailto:lembaga.pengkajian@gmail.com) dan [ta.lemkaji@gmail.com](mailto:ta.lemkaji@gmail.com).

## NAMA-NAMA ANGGOTA LEMBAGA PENKKAJIAN MPR RI

No	NAMA	JABATAN
1.	A.B. Kusuma	Peneliti senior di Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
2.	Abdul Malik, Dr., Ir., H.	Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem
3.	Adji Samekto, Prof. Dr., S.H., M.Hum.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4.	Ahmad Farhan Hamid, Dr., H., MS.	Wakil ketua MPR RI 2009-2014; DPR/MPR RI 1999 - 2004; DPR/MPR RI 2004 - 2009; DPD/MPR RI 2009 - 2014
5.	Ali Masykur Musa, Dr., S.H., M.Si., M.Hum	Sekretaris PAH I MPR RI 1999 – 2002, Anggota DPR RI Fraksi PKB 1999-2004, 2004-2009, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2009-2014
6.	Alihardi Kyai Demak, S.H., M.Si.	Anggota DPR RI Fraksi PPP 1982-1987, 1992-1997, 1997-1999 dan 1999-2004, Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004 & Ketua PAH Khusus BP MPR RI 2001-2004
7.	Alirman Sori, SH., M.Hum., M.M.	Anggota DPD RI 2009 - 2014
8.	Amidhan, KH.	Anggota MPR RI, BP PAH I (1999-2004), Ketua Subkomisi Ekosob, Komnas HAM (2002-2007), Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji, Departemen Agama RI, (1991-1996), Ketua MUI Pusat (1995-2015)
9.	Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya	Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra 2009-2014
10.	Andi Mattalatta	Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004 & Menteri Hukum dan HAM RI 2007 - 2009
11.	Arif Budimanta, Dr., Ir., M.Sc.	Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 1999-2004
12.	AT. Sugito, Prof., Dr.	Anggota MPR RI 1998 - 1999

13.	Baharuddin Aritonang	Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004; Anggota DPR RI 1999 - 2004 & Anggota BPK 2004-2009
14.	Bambang Soeroso, Dipl., -Ing.	Ketua Kelompok DPD di MPR RI 2009 - 2014
15.	Bukhori Yusuf, KH., Lc., MA.	Anggota DPR RI Fraksi PKS 2009-2014
16.	Didi Irawadi Syamsudin, LLm.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat 2009-2014
17.	Didik J. Rachbini, Prof., Dr.	Anggota DPR RI Fraksi PAN 2004-2009
18.	Djamal Aziz, B.Sc., S.H., M.H.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Hanura 2009-2014
19.	Erik Satrya Wardhana	Anggota DPR RI Fraksi Hanura 2009-2014
20.	Fitra Arsil, Dr., S.H., M.H.	Pakar Hukum Tata Negara & Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI
21.	Freddy Latumahina	Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar 1977-2004
22.	Fuad Bawazier, Dr.	Menteri Keuangan RI 1998; Anggota DPR RI Fraksi PAN 2004-2009; Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004
23.	Gregorius Seto Harianto	Anggota DPR/ MPR RI Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) 1999 – 2004, Anggota PAH III BP MPR 1999 – 2004, dan Anggota PAH I BP MPR 2000 - 2004
24.	Hajriyanto Y. Thohari, Drs., H., MA.	Anggota DPR RI Fraksi Golkar 1997-1999, 1999-2004, 2004-2009, 2009 - 2014, Anggota PAH II BP MPR 2001-2002 & Wakil ketua MPR RI Periode 2009-2014.
25.	Hamdan Zoelva, Dr., S.H., M.H.	Anggota DPR RI Fraksi PBB 1999 - 2004; Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004; Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2013 - 2015
26.	Harun Kamil	Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004 & Ketua Forum Konstitusi

27.	Herman Kadir, S.H., M.Hum	Anggota DPR RI Fraksi PAN 2009-2014
28.	Iman Toto Kartoraharjo, dr.	Dokter dan Kepala RS Bersalin Kasih Ibu, Tangerang
29.	I Wayan Sudirta, SH.	Anggota DPD RI 2004 - 2009 dan 2009 - 2014
30.	Irmanputra Sidin, Dr.	Pakar Hukum Tata Negara
31.	Ishak Latuconsina	Anggota DPR/MPR dari Fraksi TNI-Polri 1999 – 2004, Wakil Ketua Komisi Konstitusi 2003-2004
32.	Jakob Tobing	Ketua PAH I BP MPR 1999 - 2004
33.	Lalu Soedarmadi, Drs., Mpia.	Anggota Dewan Pakar Nasional Demokrat (Nasdem); Wakil Ketua Umum DPP HIPPI; Direktur Eksekutif ND Institute; dan Komisaris Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
34.	Margarito Kamis, Dr., S.H., M.Hum.	Pakar Hukum Tata Negara
35.	Maruarar Siahaan, Dr.,S.H.,M.H.	Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2008
36.	Masdar Farid Mas'udi, KH.	Ketua PBNU
37.	Memed Sosiawan, Ir., H., ME.	Anggota DPR RI Fraksi PKS 2009-2014
38.	Mohammad Jafar Hafisah, Dr., Ir. IPM.	Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Tahun 2010-2012;Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR RI Tahun 2012-2014; Ketua Tim Pengkajian MPR RI 2012 - 2014
39.	M. Alfian Alfian, Dr.	Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional & Direktur Riset The Akbar Tandjung Institute
40.	M. Hasanudin Wahid	Wakil Sekjen DPP PKB
41.	M. Soleh Amin, SH.	Ketua IKADIN DPC Jakarta Pusat ; Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Hukum
42.	Muspani, S.H	Anggota DPD RI 2004 - 2009



43.	Nanang Samodra KA., Ir., M.Sc.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat 2009-2014
44.	Nuzran Joher, S.Ag, M.Si.,H	Anggota DPD RI 2009 - 2014
45.	Otong Abdurrahman, Drs., H.	Anggota DPR RI Fraksi PKB 2009-2014
46.	Pataniari Siahaan, Dr., S.T., M.H.	Anggota DPR RI Periode 1999-2004 & Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004
47.	Permadi Satrio Wiwoho, KP., S.H.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra
48.	Rully Chairul Azwar, Ir. M.Si. IPU.	Anggota MPR RI 1987 - 1992, Anggota DPR RI Fraksi GOLKAR 1992 - 1997, 1997 - 1999, 1999 - 2004, 2009 - 2014, Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004; Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI 2011-2014 ; Wakil Ketua Tim Pengkajian MPR RI 2012 - 2014
49.	Satya Arinanto, Prof., DR., SH., MH.	Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum pada FH UI, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI Tahun 2015, dan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum Tahun 2009-2014 dan 2014-Sekarang.
50.	Sulastomo	Anggota MPR RI 1988 – 1998
51.	Sutjipno, Drs., (Irjen Pol. Purn)	Wakil Ketua Forum Konstitusi; Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004
52.	Syamsul Bahri, Prof., Dr., M.Sc.	Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Periode 2007-2012
53.	Theo L. Sambuaga	Anggota MPR RI 1982 - 2004, Menteri Tenaga Kerja 1998, Menteri Perumahan dan Permukiman 1998 - 1999, Wakil Ketua FPG MPR RI 1999 - 2004, Anggota BP MPR 1999 - 2004, Ketua PAH I ( GBHN) BP MPR 1999, Anggota PAH I (Perubahan Konstitusi) BP MPR 1999 - 2004

54.	Ulla Nuchrawaty, Dr., dr., Hj., M.M.	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar 2016-2019, Ketua Koordinator Bid. Organisasi Pembina Daerah dan Humas IKAL LEMHANNAS
55.	Valina Singka Subekti	Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004; Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia 2012 - 2017
56.	Wahidin Ismail, Drs., H.	Anggota DPD RI 2004 - 2009 dan 2009 - 2014. Pimpinan Tim Sosialisasi MPR RI 2009 - 2014
57.	Widodo Ekatjahjana, Prof. Dr., S.H., M.Hum.	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI
58.	Yasmin Muntaz	Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Publik DPP PAN ( 2015 - 2020)
59.	Yusus Kuswandana, S.H.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat 2009-2014
60.	Zain Badjeber	Anggota DPR/MPR RI Tahun 1992-2004; Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004

